

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 13 No 2 Juni 2014
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Peran Kelembagaan dalam Mendukung Ketahanan Pangan bagi Kesejahteraan Masyarakat
The Role of Institution on Food Security Support for Societal Welfare
(Radot Manalu) 109 - 121
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi
A Case Study on Aftercare Service of Ex-homeless and Beggar Social Rehabilitation in Pangudi Luhur Social Institution Bekasi
(Ruaida Murni) 122 - 137
3. Peran LKM-Kube Sejahtera 14 dalam Pemberdayaan Masyarakat
The Role of LKM-Kube Sejahtera 14 on Community Empowerment
(Kissumi Diyanayati dan Suryani) 138 - 152
4. Pengembangan Produk Unggulan melalui Program Inkubasi dalam Pembangunan Perdesaan di Provinsi Riau
The Development of Leading Product through Incubation Program in Rural Development, Riau Province
(Kurnia Novianti dan Saiful Hakam) 153 - 166
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat, Cimahi, Jawa Barat
Social Rehabilitation for Persons with Disabilities A Case Study on Social Rehabilitation Institution for Persons with Disabilities in Cibabat, Cimahi, West Java
(Habibullah dan Agus Marzuki) 167 - 176
6. Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional di Pantai Arungkeke
Life Strategy Continuation of Traditional Fishermen in Arungkeke Coastal Area
(Tateki Yoga Tursilarini) 177 - 195
7. Pendamping Program Aslut sebagai Strategi Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
Elderly Program Guidance as a Strategy to Empower Neglected Elderly
(Elly Kuntjorowati) 196 - 209
8. Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza melalui Lembaga Rehabilitasi Kunci
Drug Abuse Victim Service through Kunci Rehabilitation Institution
(Siti Aminatun) 210 - 224

Editorial

Peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat dikemukakan oleh Radot Manalu sebagai pembuka JPKS volume 13 nomor 2, diikuti kemudian oleh Ruaida Murni dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Kissumi diyanayati dan Suryani mengungkap peran LKM-Kube Sejahtera 14 dalam pemberdayaan masyarakat, sementara pengembangan produk unggulan melalui program inkubasi dalam pembangunan perdesaan disampaikan oleh Kurnia Novianti dan Saiful Hakam. Rehabilitasi Sosial oleh pemerintah daerah dalam kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat, Cimahi, Jawa Barat disampaikan oleh Habibullah dan Agus Marzuki, sementara Tateki Yoga Tursilarini mengungkap tentang strategi kelangsungan hidup nelayan di Pantai Arungkeke, Sulawesi. Dalam permasalahan lain, Elly Kuntjorowati, menulis tentang pendamping program aslut sebagai strategi pemberdayaan lanjut usia terlantar, menutup edisi ini Siti Aminatun mengemukakan tentang pelayanan sosial korban penyalahgunaan nafa melalui lembaga rehabilitasi kunci.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451

Vol 13 No 2 Juni 2014

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extracted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Radot Manalu (Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK (PAPIPTEK-LIPI) Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tengah)
Peran Kelembagaan dalam Mendukung Ketahanan Pangan bagi Kesejahteraan Masyarakat
The Role of Institution on Food Security Support for Societal Welfare
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 109 - 121

Indonesian population is 237.6 million. The need for food continues to increase along with the increase of population. Large population as followed by the need of food is a sensitive issue. It is inevitable frequent upheavals in the community often triggered by the rising prices and shortages of food. Food security has become a national commitment to a strategic role in national development. Three aspects of the strategic role are access to food and adequate nutrition as the most fundamental rights to humans, the the importance role of food to the formation of qualified human resources, and food security for families is one of the main pillars to support national food security. The purpose of this paper is to examine the role of institutions to support food security for the welfare of the family as a part of the community. The data and information obtained from secondary data, such as journals, research reports, statistical data, and others data both from print and electronic media in accordance with the topic of discussion. The method used in this study is qualitative non-interactive (non-interactive inquiry). The analysis is conducted based on data and information available to the qualitative approach to draw conclusions. This article supposed can be useful for policy makers in the field of food, researchers, students and society.

Keywords: Institutional- Food Security-Societal Welfare

Penduduk Indonesia tercatat 237,6 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk senantiasa seiring dengan peningkatan kebutuhan pangan. Dalam jumlah penduduk yang besar kebutuhan pangan tentu merupakan masalah yang sensitif. Tidak dapat dipungkiri, seringkali terjadi gejolak dalam masyarakat karena dipicu oleh kenaikan harga dan terjadi kelangkaan pangan. Ketahanan pangan menjadi komitmen nasional dengan peran strategis dalam pembangunan nasional. Tiga aspek peran strategis tersebut adalah akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia, peranan pentingnya pangan bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan keluarga yang merupakan salah satu pilar utama untuk menopang ketahanan pangan nasional. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengkaji peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan bagi kesejahteraan keluarga

sebagai bagian dari masyarakat. Data dan informasi diperoleh dari data sekunder, seperti jurnal, laporan penelitian, data statistik, baik yang bersumber dari media cetak maupun elektronik sesuai dengan topik pembahasan. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif non interaktif (*non interaktif inquiry*). Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang ada dengan pendekatan kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Manfaat tulisan ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan di bidang pangan, para peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum.

Kata kunci: Kelembagaan-Ketahanan Pangan-Kesejahteraan Masyarakat

Ruaida Murni (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi
A Case Study on Aftercare Service of Ex-homeless and Beggar Social Rehabilitation in Pangudi Luhur Social Institution Bekasi
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 122 - 137

This case study is to describe the service and rehabilitation process done by PSBKPL, on advanced education, understand institution apparatus, advanced education implementation, and supporting and handicap factors. The research result hoped can give an input to the Directory of Social Handicap Service to set a policy on service and rehabilitation implementation for homeless and beggar on advanced education done by PSBKPL. This research is evaluation with qualitative technique. The result shows that service and rehabilitation process by PSBKPL based on guidance made by the Directory of Social Handicap Service, because there is inadequate understanding between advanced education and evaluation-monitoring (Monev), caused advanced education and monev are done at the same time and place. Advanced education output shows that economically the lives of ex-educated members majority are still hand-to-mouth condition, but the change of attitude showed through working effort and their spirit to enhance it for not to be back in homeless and beggar. Only small numbers of ex-educated, with several reasons, back in condition they used to be. Handicap that felt by apparatus is that the issue has not been thought proportionally, such as fund limitation, has not special guidance, there has not been yet role from the sending institution and community, and there is no advanced assistance to develop entrepreneurship, that causes ex-social educated are not be able to develop as maximum.

Keywords: Homeless and Beggar-PSBKPL-Advanced Education

Studi kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL, pembinaan lanjut; pemahaman petugas panti, pelaksanaan pembinaan lanjut, dan faktor penghambat dan pendukung. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Direktorat Pelayanan Tunasosial dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis serta pembinaan lanjut yang dilaksanakan oleh PSBKPL. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan,

bahwa proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL berdasarkan panduan yang disusun oleh Direktorat Pelayanan Tunasosial, karena adanya kekurangpahaman antara pengertian pembinaan lanjut dan monitoring evaluasi (monev), mengakibatkan pelaksanaan pembinaan lanjut dan monev dilakukan secara bersamaan di lokasi yang sama. Hasil bimbingan lanjut menunjukkan secara ekonomi kehidupan sebagian besar eks warga binaan sosial (WBS) masih pas-pasan, tetapi perubahan sikap eks WBS Direktorat tunjukkan melalui berbagai usaha kerja yang dilakukan dan keinginan untuk meningkatkan usahanya, sehingga tidak lagi kembali sebagai gelandangan dan pengemis. Sebagian kecil eks WBS dengan berbagai alasan terpaksa kembali ke kegiatan semula. Hambatan yang dirasakan petugas dalam melaksanakan pembinaan lanjutan adalah belum mendapatkan perhatian proporsional, seperti anggaran yang terbatas, belum memiliki panduan khusus, belum adanya peran lembaga pengirim dan masyarakat, serta tidak adanya bantuan lanjutan untuk pengembangan usaha, mengakibatkan eks warga binaan sosial tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis-Panti Sosial Bina Karya-Bimbingan Lanjut

Kissumi Diyanayati dan Suryani (B2P3KS Yogyakarta)

Peran LKM-Kube Sejahtera 14 dalam Pemberdayaan Masyarakat

The Role of LKM-Kube Sejahtera 14 on Community Empowerment

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 138 - 152

The research on the role of LKM-Kube Sejahtera 14 on community empowerment is done in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Territory. The research method is qualitative-descriptive with 22 Respondents as data resources from 10 LKM-Kube and Kube. Data are gathered through interview, observation, and documentary analysis. Data are analysed in qualitative technique through Mile and Huberman model. The result shows that LKM-Kube is able to hold the role as mediating institution between government (Social Agency) and community (Kube members), also among the members of the community its self. LKM-Kube Sejahtera 14 are able to hold its function as complementer institution that run funding activities where the goverment has not done yet intensively in saving and credit development for its members. The institution is also able to hold its function as subsidiary institution, as a partner that support community empowerment designed by government, especially rural poor community through Kube. Members of Kube are able to improve their social welfare, in case of their income, ability to send their children to school, get access to health service, and renovate their houses. the success of LKM Kube Sejahtera 14 still need to be enhanced with related government agencies guidance.

Keywords: Mediating Institution-Community Empowerment-LKM-Kube

Penelitian tentang peran lembaga mediasi dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan pada LKM-Kube Sejahtera 14 Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data sebanyak 22 orang yang berasal dari pengurus 10 Kube dan LKM-Kube. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan, LKM-Kube

mampu berperan sebagai lembaga mediasi antara pemerinah (Dinas Sosial) dengan masyarakat (anggota Kube), dan antar masyarakat sendiri (mampu dengan tidak mampu). LKM-Kube Sejahtera 14 mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga komplementer bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang tidak atau belum digarap secara intensif oleh pemerintah dalam bentuk tabungan masyarakat dan pemberian pinjaman bagi anggota. Lembaga ini juga mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga subsider, yakni berperan sebagai mitra yang mendukung dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai program yang dirancang pemerintah, terutama pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan melalui kelompok usaha bersama (Kube). Anggota Kube mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya, dilihat dari peningkatan pendapatan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan mengakses layanan kesehatan, dan kemampuan merenovasi rumah tinggalnya. Keberhasilan LKM-Kube Sejahtera 14 masih perlu ditingkatkan dan mendapatkan pembinaan dari instansi terkait.

Kata kunci: Lembaga Mediasi-Pemberdayaan Masyarakat-LKM Kube

Kurnia Novianti dan Saiful Hakam (Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI))

Pengembangan Produk Unggulan melalui Program Inkubasi dalam Pembangunan Perdesaan di Provinsi Riau

The Development of Leading Product through Incubation Program in Rural Development, Riau Province

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 153 - 166

Rural areas, as the areas that have been the most targeted and developed in Indonesia, become the places of interest for social research. A case in Riau revealed that among many natural resources that can be developed, palm oil is still becoming the most attention leading product by local government. This paper is to describe the concept of leading product and its relation with rural development through incubation program that have been activatited in that province. This paper also propose a recomendation to the implementors of the program activities with more bottom-up approach, with capacity owned by community so that the their commitment in the development process will be optimum. Analysis in this papaer will be based on field research conducted in 2013 and literature studies from various resources.

Keywords: Leading Product-Incubation Program-Rural Development

Perdesaan sebagai sebuah kawasan yang banyak ditargetkan untuk dikembangkan di Indonesia, menjadi lokus yang menarik untuk dikaji. Kasus Riau menunjukkan bahwa diantara banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, kelapa sawit tetap menjadi unggulan yang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Tulisan ini hendak menjelaskan konsep produk unggulan dan keterkaitannya dengan pembangunan pedesaan melalui program inkubasi yang tengah digiatkan di propinsi tersebut. Tulisan ini juga mengusulkan rekomendasi kepada pihak pelaksana kegiatan program pembangunan tersebut dengan pendekatan yang lebih bersifat *bottom-up*; dengan mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat sehingga keterlibatannya dalam proses pem-

bangunan menjadi optimal. Analisis dalam tulisan ini mengandalkan data dari penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2013 dan studi literatur dari berbagai sumber.

Kata Kunci: Produk unggulan-Program Inkubasi-Pembangunan Pedesaan,

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI) dan Agus Marzuki (Badan Pusat Statistik Jakarta)

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat, Cimahi, Jawa Barat

Social Rehabilitation for Persons with Disabilities A Case Study on Social Rehabilitation Institution for Persons with Disabilities in Cibabat, Cimahi, West Java.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 167 - 176

Social rehabilitation services for persons with disabilities organized by institution has advantages and disadvantages. One of the disadvantages is its limited capacity if compared with disabilities population who need social service. The results of this study reveals that the social rehabilitation services input in the form of clients, human resources, facility and infrastructure, culture, theory/methods and relative feedback has been relatively fulfilled. Operational conversion, supported by structural component and functional processes has been implemented but not optimal. Social rehabilitation services output have made some clients working independently, either by opening their own business or working in the company.

Keywords: Social Rehabilitation-Persons with Disabilities-Social Institution

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh panti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan adalah keterbatasan daya tampung panti dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa input pelayanan rehabilitasi sosial berupa klien, sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, teori/metode dan umpan balik relatif sudah terpenuhi. Konversi operasi didukung komponen struktural dan proses fungsional terlaksana namun belum optimal. Output pelayanan rehabilitasi sosial, beberapa klien sudah mandiri, baik bekerja dengan membuka usaha sendiri maupun bekerja di perusahaan.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial-Penyandang Disabilitas-Panti Sosial

Tateki Yoga Tursilarini (B2P3KS)

Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional di Pantai Arungkeke

Life Strategy Continuation of Traditional Fishermen in Arungkeke Coastal Area

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 177 - 195

The problem faced by fishermen community in Arungkeke Village is caused by the difficulty to develop their business, limited resource of capital, fuel increasing that is

not in balance with their captive. Their selves adaptation strategy to stanch their lives finally enable them to get out from vulnerable lives. Data resource are family heads and their members. Informants are from related institutionals, village apparatus, local public figures, and social institution committed to fishermen lives. Data are gathered through interview, focused group discussion, and documnetary analysis. Data are analysed through interpretative-descriptive technique. It is found that living strategy to stanc their lives are business diversification, family money management enhancement, and local value application. Those strategies survive their lives. It is recommended that fishermen need to be educated in skill and expertisement on management strategy so that fisheries and rumput laut are marketable as other products. It needs always to be increased their motivation, spirit, and community support so that they always work independently form others. For local government, social, fishery and oceanery, non-government organization should have same commitement to help fishermen out form poverty, because support and policy consistency are needed to develop Arungkeke shore area, and will bring a good impact on fishermen welfare enhancement it that area.

Keywords: Lives Continuation-Traditional Fishermen-Shore Area

Permasalahan yang dialami masyarakat nelayan di Desa Arungkeke antara lain disebabkan kesulitan pemilik usaha mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber modal, kenaikan harga BBM tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan. Strategi adaptasi nelayan dalam bertahan hidup pada akhirnya mampu keluar dari keterpurukan atas upaya masyarakat sendiri, mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Sumber data adalah kepala keluarga dan anggota keluarga nelayan, dan informan dari instansi terkait, aparat desa, tokoh masyarakat, lembaga sosial yang peduli terhadap nelayan. Data digali melalui wawancara, FGD, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif interpretatif. Strategi kelangsungan hidup nelayan, meliputi penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan keuangan keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal. Sejumlah strategi tersebut mampu menjawab berbagai masalah nelayan sehingga tetap *survive* dalam hidupnya. Direkomendasikan, nelayan perlu diberi pengembangan keterampilan dan keahlian tentang metode dan strategi manajemen, sehingga produk perikanan dan rumput laut mampu bersaing dengan produk lainnya. Perlu selalu ditumbuhkembangkan motivasi, semangat dan dukungan bagi masyarakat nelayan agar tetap berkarya dan produktif tanpa menggantungkan pada pihak lain. Bagi Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menjalin kerjasama dalam upaya membantu masyarakat nelayan keluar dari belenggu kemiskinan, karena dukungan dan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pantai Arungkeke, akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Kelangsungan Hidup-Nelayan Tradisional-Pesisir

Elly Kuntjorowati (B2P3KS Yogyakarta)

Pendamping Program Aslut sebagai Strategi Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
Elderly Program Guidance as a Strategy to Empower Neglected Elderly

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 196 - 209

In order to cope a lot of numbers of neglected elderly, the Ministry of Social Affairs has been launching a program (policy) called Neglected Elderly Social Assistance (ASLUT). The main object of ASLUT Program is to ease living burden of neglected elderly in order to meet the basic needs and living maintenance, the second is to maintain the welfare of the elderly so they can enjoy a reasonable standard of living. To realize the goal of ASLUT program, the program then requires a guidance as a strategy. The research question is how the strategy has to be performed to mentor ASLUT program to empower neglected elderly? The purpose of the research is to know the local empirical strategy of ASLUT program guidance conducted in the empowerment of neglected elderly. The research takes place in Banjarbaru City, West Kalimantan Province. The research method used is descriptive. The result showed that the guidance is used as strategy to direct cash assistance will get assuredly to the concerned (Elderly). Guidance also serves as commitment with the post office to liquify and disburse the aid in cash, and nominating other names for replacement if the existing die and to be resumed by other elderly that is waiting in list.

Keywords: Guidance–Program Strategy –Neglected Elderly Empowerment

Dalam rangka untuk mengatasi jumlah lansia terlantar yang cukup banyak, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, meluncurkan program dan kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Tujuan utama Program ASLUT adalah untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Untuk mewujudkan tujuan program ASLUT, program tersebut membutuhkan pendampingan sebagai suatu strategi. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pendampingan yang dilakukan program ASLUT dalam memberdayakan lanjut usia terlantar? Tujuan penelitian adalah diketahuinya strategi pendampingan yang dilakukan program ASLUT dalam memberdayakan lanjut usia terlantar. Lokasi penelitian di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan digunakan agar bantuan langsung tunai sampai kepada yang bersangkutan. Pendampingan berfungsi mendampingi lembaga pembayar, yakni kantor pos, untuk mencairkan bantuan langsung tunai. Pendamping berfungsi membuat komitmen dengan pihak pos untuk pencairan dan mengajukan nama pengganti penerima manfaat yang sudah ada dalam daftar tunggu, apabila ada lansia penerima manfaat terdahulu meninggal dunia.

Kata Kunci: Pendampingan–Strategi–Pemberdayaan Lanjut Usia

Siti Aminatun (B2P3KS Yogyakarta)

Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza melalui Lembaga Rehabilitasi Kunci

Drug Abuse Victim Service through Kunci Rehabilittion Institution

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 Juni 2014, hal 210 - 224

This research is to describe the effort of Kunci Institution in giving social service for drug abuse victims. Data are gathered through in-depth interview, observation, and documentary analysis. Informants are clients and Kunci institution care takers. Data are analysed through qualitative technique. The result shows that the institution gives social service through rehabilitation to drug abuse victims according to victims condition. In the proses of rehabilitation, the victims are oriented to live in community healthy, phisically, mentally, emotionally, socially, spiritually, and they ought to help themselves. Kunci Institution is one of government partner, non-profit, the clients participating in the rehabilitation have to pay fee as a compensation of daily service, facilities, and clients daily needs. It is recommended that the Ministry of Social Affairs and Narcotic National Board should support in trainning and education for institution care takers to enhance social service capability.

Keywords: Drug Abuse Victims-Social Service-Kunci Institution

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam memberi pelayanan korban penyalahgunaan Napza. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan telaah dokumen. Informan terdiri dari pengurus dan klien Lembaga Rehabilitasi Kunci. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Rehabilitasi Kunci memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan Napza dengan tahapan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi korban penyalahgunaan Napza. Dalam proses rehabilitasi, klien diarahkan untuk hidup berkomunitas dengan cara hidup sehat baik secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan harus bisa menolong dirinya sendiri. Lembaga Rehabilitasi Kunci merupakan salah satu mitra pemerintah, merupakan lembaga non profit, klien yang mengikuti proses rehabilitasi dipungut biaya, tetapi biaya tersebut dikembalikan kepada klien dalam bentuk pelayanan fisik dan fasilitas kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan pelayanan rehabilitasi bagi klien. Direkomendasikan, Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional perlu memberi dukungan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.

Kata Kunci: Korban Napza-Pelayanan Sosial-Lembaga Rehabilitasi Kunci

Peran Kelembagaan dalam Mendukung Ketahanan Pangan bagi Kesejahteraan Masyarakat

The Role of Institution on Food Security Support for Societal Welfare

Radot Manalu

Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK (PAPIPTEK-LIPI)

Gedung A, PDII-LIPI Lt.4, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12720

email: <radotmanalu@yahoo.com>. Diterima 17 Maret 2014, direvisi 19 Maret 2014, disetujui 15 Mei 2014.

Abstract

Indonesian population is 237.6 million. The need for food continues to increase along with the increase of population. Large population as followed by the need of food is a sensitive issue. It is inevitable frequent upheavals in the community often triggered by the rising prices and shortages of food. Food security has become a national commitment to a strategic role in national development. Three aspects of the strategic role are access to food and adequate nutrition as the most fundamental rights to humans, the the importance role of food to the formation of qualified human resources, and food security for families is one of the main pillars to support national food security. The purpose of this paper is to examine the role of institutions to support food security for the welfare of the family as a part of the community. The data and information obtained from secondary data, such as journals, research reports, statistical data, and others data both from print and electronic media in accordance with the topic of discussion. The method used in this study is qualitative non-interactive (non-interactive inquiry). The analysis is conducted based on data and information available to the qualitative approach to draw conclusions. This article supposed can be useful for policy makers in the field of food, researchers, students and society.

Keywords:

Institutional- Food Security-Societal Welfare

Abstrak

Penduduk Indonesia tercatat 237,6 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk senantiasa seiring dengan peningkatan kebutuhan pangan. Dalam jumlah penduduk yang besar kebutuhan pangan tentu merupakan masalah yang sensitif. Tidak dapat dipungkiri, seringnya terjadi gejolak dalam masyarakat karena dipicu oleh kenaikan harga dan terjadi kelangkaan pangan. Ketahanan pangan menjadi komitmen nasional dengan peran strategis dalam pembangunan nasional. Tiga aspek peran strategis tersebut adalah akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia, peranan pentingnya pangan bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan keluarga yang merupakan salah satu pilar utama untuk menopang ketahanan pangan nasional. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengkaji peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan bagi kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Data dan informasi diperoleh dari data sekunder, seperti jurnal, laporan penelitian, data statistik, baik yang bersumber dari media cetak maupun elektronik sesuai dengan topik pembahasan. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif non interaktif (*non interaktif inquiry*). Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang ada dengan pendekatan kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Manfaat tulisan ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan di bidang pangan, para peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum.

Kata kunci:

Kelembagaan-Ketahanan Pangan-Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendahuluan

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya di bidang kelautan tapi juga daratan luas yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Itulah sebabnya selain disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris dan sebagian

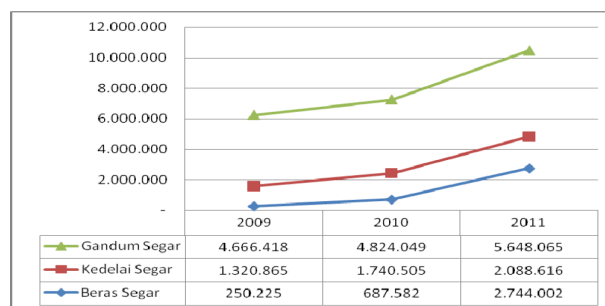
besar penduduknya hidup dari usaha pertanian. Jumlah usaha pertanian rumah tangga di Indonesia sebanyak 26,13 juta, 5,49 ribu perusahaan pertanian berbadan hukum, dan 6,17 ribu usaha pertanian lainnya (BPS, 2013). Namun demikian, walaupun potensi pertanian Indonesia sangat besar dan sebagian besar penduduk hidup dari hasil pertanian, ketahanan

pangan kita masih lemah dan impor bahan pangan pokok dari luar negeri terus dilakukan yang seharusnya dapat kita hasilkan sendiri, seperti beras, gandum, kedelai, kacang tanah, bahkan ubi jalar, dan singkong.

Menurut Purwaningsih (2008), bahwa kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Penduduk Indonesia pada bulan Mei 2010 berjumlah 237,6 juta jiwa (BPS, 2013). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, tentu kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, masalah pangan selalu menjadi masalah yang krusial, sewaktu-waktu dapat saja terjadinya gejolak di masyarakat karena dipicu oleh kelangkaan dan naiknya harga pangan. Oleh karena itu masalah pangan bukan lagi hanya sekedar komoditas ekonomi tetapi juga dapat menjadi komoditas politik oleh para pelaku dan memiliki dimensi sosial yang luas. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk yang besar tersebut dalam periode 2009–2012, Indonesia harus mengimpor bahan pangan, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Berdasarkan data pada Tabel 1, ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2009–2012, negara kita mengimpor bahan pangan dari luar negeri sebanyak 36.546.058 ton meliputi beras segar dan olahan, gandum segar dan olahan, jagung segar dan olahan, kacang tanah segar

dan olahan, kedelai segar dan olahan, ubi jalar segar dan olahan, serta ubi kayu segar dan olahan. Komoditas pangan yang paling banyak diimpor dalam kurun waktu tahun 2009–2012 yaitu gandum segar sebanyak 16.520.719 ton dan kedelai segar sebesar 5.524.856 ton (Pusdatin, Kementan 2013). Untuk melihat lebih jelas volume impor pangan kita dari luar negeri, yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun khususnya komoditi gandum, kedelai, dan beras, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1.
Jumlah Impor 3 Jenis Komoditi Pangan Terus Naik (dalam Ton)

Sumber: Pusdatin Kementerian Pertanian, 2013.
Statistik Makro Sektor Pertanian 2012 (diolah)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah impor pangan kita khususnya 3 komoditas pangan antara lain gandum, kedelai, dan beras dalam kurun waktu 2009 – 2011 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, walaupun

Tabel 1. Volume Impor Komoditi Pangan Indonesia 2009 – 2012 (Ton)

No	Komoditi	T a h u n				Jumlah
		2009	2010	2011	2012 (Tw I)	
1	Beras Segar	250,225	687,582	2,744,002	770,295	4.452.104
	Beras Olahan	51	1	259	12	323
2	Gandum Segar	4,666,418	4,824,049	5,648,065	1,382,187	16.520.719
	Gandum Olahan	733,527	900,963	828,512	151,514	2.614.516
3	Jagung Segar	338,798	1,527,517	3,207,657	424,147	5.498.119
	Jagung Olahan	82,433	259,294	103,327	26,676	471.730
4	Kacang Tanah Segar	82,433	229,393	251,004	47,146	609.976
	Kacang Tanah Olahan	1,186	1,393	2,099	242	4.920
5	Kedelai Segar	1,320,865	1,740,505	2,088,616	374,870	5.524.856
	Kedelai Olahan	22,145	32,158	36,896	4,316	95.515
6	Ubi Jalar Segar	51	32	25	6	114
7	Ubi Kayu Segar	1,903	21	6	-	1.930
	Ubi Kayu Olahan	166,813	294,832	435,419	194,854	1.091.918
8	Lainnya	9,799	6,862	17,124	403	34.188
	Total	7,788,215	10,504,604	15,363,009	3,376,666	36.546.058

Sumber: Pusdatin Kementerian Pertanian, 2013. Statistik Makro Sektor Pertanian 2012

negara kita termasuk negara maritim yang memiliki laut yang sangat luas sebagai potensi bahan baku pembuatan garam, namun garampun turut kita impor dari luar negeri. Tercatat pada tahun 2012 Indonesia mengimpor garam konsumsi (non industri) dalam kurun waktu Januari-Juni 2012 mencapai 495.073 ton, sedangkan pada tahun sebelumnya 2011 sebanyak 923.000 ton (Nurhayat, 2012). Data tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan bangsa kita masih lemah dan untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus mengimpor dari luar negeri. Pada zaman orde baru pada tahun 1984, bangsa Indonesia mengalami swasembada pangan, tetapi setelah itu basis pengembangan sektor pertanian semakin rapuh. Basis pengembangan sektor pertanian rapuh, maka swasembada pangan yang pernah diraih pada masa orde baru tidak dapat bertahan lama, Indonesia berubah menjadi negara pengimpor beras secara terus menerus sampai sekarang.

Memang, kebijakan pemerintah untuk mengimpor pangan bertujuan baik untuk memenuhi kebutuhan agar ketahanan pangan di Indonesia dapat terjamin dan seperti ketahu tidak ada negara manapun yang benar-benar mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, jika negara kita yang merupakan negara agraris, kaya dengan sumberdaya alam akan tetapi terus-menerus impor pangan dan ironisnya jumlah bahan pangan yang dimporpun lebih besar dari pada yang dihasilkan sendiri, maka hal ini menjadi masalah besar dikemudian hari karena akhirnya negara kita sangat ketergantungan dengan negara penghasil pangan. Dengan kondisi seperti ini tentu banyak permasalahan yang perlu diperbaiki dalam hal pengelolaan pangan antara lain aspek kelembagaan, kebijakan, program dan lain sebagainya sehingga kita tidak lagi terus menerus mengimpor pangan dengan batas waktu yang kita tidak ketahui.

Sektor pertanian sebagai penghasil bahan pangan seringkali dipandang tidak serius, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Sangat disayangkan masih banyak yang berpendapat bahwa jika membeli bahan pangan dari luar negeri dinilai lebih efisien

daripada harus menanam sendiri. Menurut pendapat penulis pandangan seperti ini akan menyesatkan bagi generasi muda, karena akan mengurangi motivasi untuk mandiri tanpa harus ketergantungan dengan negara lain, terutama kebutuhan dasar seperti bahan pangan.

Oleh karena itu, sektor pertanian seharusnya menjadi sektor prioritas dalam pembangunan nasional dibandingkan sektor lainnya. Namun kenyataannya, sektor pertanian belum menjadi sektor prioritas, bahkan terkadang pemerintah membuat kebijakan yang kontra produktif dengan kondisi masyarakat. Salah satu contoh harga pupuk yang tinggi, itupun sulit ditemukan karena langka dipasaran. Contoh lain misalnya harga dasar gabah tidak diberlakukan lagi, sehingga petani rentan dirugikan terutama saat panen dan Nilai Tukar Petani (NTP) semakin turun. Nilai Tukar Petani (NTP) November 2013 turun 0,14 persen dibanding Oktober 2013 (BPS, 2013). Kondisi seperti ini mengakibatkan usaha tani tanaman pangan menjadi tidak menarik lagi bagi petani sehingga beralih profesi di luar pertanian, akibatnya ketahanan pangan nasional mejadi semakin rapuh dan rentan dengan kerawanan pangan (Hutapea et al. 2005). Selain itu, berdasarkan data pemetaan wilayah dari Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan *World Food Programme (WFP)* yang dilakukan terdapat 100 dari 265 kabupaten di Indonesia tergolong rawan pangan dan gizi kronis (Ariani, 2008). Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang masyarakatnya tergolong rawan pangan dan gizi kronis. Uraian tersebut di atas juga mengindikasikan bahwa ketergantungan bahan baku impor pangan negara kita akan mengganggu sendi-sendi perekonomian keluarga dan masyarakat, serta berdampak pada perekonomian nasional. Kondisi seperti ini seharusnya bisa dihindari jika petani kita diberi perhatian dengan memberdayakan mereka dan memfasilitasi pengairan serta infrastruktur termasuk teknologi.

Dengan demikian masalah ketahanan pangan ini perlu mendapat perhatian yang serius. Kalau pemerintah tidak segera memiliki kebijakan sebagai solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi masalah pangan ini maka kita akan terus menerus ketergantungan

an dengan terpaksa mengimpor bahan pangan dari negara lain tanpa batas waktu yang tidak kita ketahui.

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan telah tertuang pada Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Selain itu, berkaitan dengan kelembagaan pangan terdapat kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan baik pada tingkat rumah tangga, daerah maupun nasional. Namun demikian, tampaknya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia masih memerlukan keseriusan pemerintah melalui kelembagaan pangan yang ada untuk memahami persoalan pangan nasional, sehingga ketahanan pangan di Indonesia di masa datang dapat terjamin. Dalam perjalanannya kelembagaan pangan yang ada belum berfungsi dengan baik, padahal Presiden RI masuk dalam struktur lembaga sebagai Ketua dan melibatkan institusi terkait, akan tetapi pada kenyataannya produktivitas pangan terus merosot dan sebaliknya impor pangan semakin meningkat. Tampaknya ketergantungan dengan mengimpor bahan pangan dari negara lain masih terus berlangsung dalam jangka panjang karena kesiapan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita belum ditunjukkan secara signifikan. Untuk itu peran kelembagaan pangan perlu mengkordinasikan program-program dan terobosan baru dengan institusi terkait dan upaya-upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dilakukan secepat mungkin agar masalah pangan nasional dapat diatasi.

Disamping peran kelembagaan perlu komitmen yang kuat dari pemerintah agar kebijakan pangan tersebut dapat diimplementasikan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Peran kelembagaan yang optimal dan dukungan kebijakan pangan, dan komitmen dari pemerintah sampai ke daerah akan mempermudah implementasi kebijakan dalam masyarakat. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat,

yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangganya secara berkelanjutan (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Dengan potensi yang ada tentu kita memiliki kemandirian dan ketahanan pangan yang kuat melalui peran kelembagaan dan dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga negara kita tidak lagi terus-menerus ketergantungan terhadap bahan impor pangan dari luar negeri. Tujuan dari tulisan ini untuk mengkaji masalah ketahanan pangan karena belum optimalnya koordinasi lembaga ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu peran kelembagaan pangan sangat diharapkan untuk mendukung ketahanan pangan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian perlu memperkuat kelembagaan pangan yang ada dan didukung dengan implementasi kebijakan-kebijakan dengan perencanaan memiliki target jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sehingga bangsa kita memiliki kemandirian pangan yang kuat.

B. Kajian Teori: Definisi Pangan dan Ketahanan Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Definisi pangan menurut Kuwornu John K.M. (2013), adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebelum yang lainnya. Senada dengan itu, menurut Hutapea, J. et al (2010), bahwa pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar dari suatu bangsa. Selain itu, menurut Putu Sarjana (2009), pada hakekatnya pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia

yang paling hakiki yang tidak dapat dihindari untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dimuka bumi, karena melalui pangan kebutuhan gizi manusia dapat terpenuhi, sehingga peranan pangan menjadi sangat penting bagi manusia dalam berbagai aktivitas. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pangan tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari karena pangan termasuk kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu, peran pemerintah untuk menjaga kemandirian dan ketahanan pangan nasional sangat diperlukan, terutama dalam aspek kebijakannya.

Sementara itu, menurut World Food Summit (1996), dalam Deklarasi Roma bahwa terjadi ketahanan pangan jika semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan. Definisi lain ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang setiap saat untuk cukup makanan untuk hidup, aktif dan sehat (Robert S. Chen et al. 1994). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan suatu negara tidak saja dapat menghasilkan makanan yang cukup bagi penduduknya dan dapat menyediakan akses untuk makanan untuk semua rakyatnya akan tetapi harus memastikan keseimbangan antara makanan ketersediaan dan kebutuhan, dan dapat mengakhiri kelaparan atau kekurangan gizi, serta tidak ada kekurangan nutrisi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian pengertian ketahanan pangan tidak sebatas ketersediaan makanan yang dapat diakses oleh semua penduduk tapi juga penduduk suatu negara juga terhindar dari kelaparan serta gizi dan nutrisinya dapat terpenuhi untuk dapat sehat dan produktif secara berkelanjutan.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti misalnya proyek pembukaan lahan pertanian se-

juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, implementasi Bimas, Insus dan Supra Insus, namun tampaknya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk memberikan manfaat yang cukup berarti, bahkan dalam dasawarsa terakhir pemerintah terjebak dalam kesenjangan antara kebutuhan pangan dan produksi pangan nasional sehingga kebijakan seperti impor beras, kedelai, gandum, dan sebagainya tetap dijadikan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Prajasa (2012), bahwa konsep ketahanan pangan yang diterapkan di Indonesia semata-mata bagaimana menjamin pangan murah dengan berbagai cara yang dilakukan terutama melalui impor pangan. Kebijakan pangan Indonesia yang saat ini telah sangat bergantung pada impor menyebabkan negeri ini berada pada posisi yang serba sulit. Tingginya kebutuhan pangan dalam negeri justru dimanfaatkan sebagai peluang untuk membuka liberalisasi perdagangan pangan seluas-luasnya. Padahal Indonesia sebagai negara agraris sesungguhnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan justru seharusnya dapat sebagai pemasok untuk kebutuhan pangan negara lain.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif non interaktif (*non interaktif inquiry*). Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari data sekunder antara lain: buku, jurnal, majalah, laporan penelitian, data statistik, dan dokumen, baik dari media cetak maupun media elektronik. Data dan informasi yang digunakan disesuaikan dengan topik pembahasan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwa yang tidak secara langsung dapat diamati. Berdasarkan data dan informasi yang telah dianalisis kemudian diambil kesimpulan yang merupakan rekomendasi dari tulisan ini. Harapan penulis, tulisan ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan di bidang pangan, kalangan peneliti, mahasiswa serta kalangan masyarakat luas.

D. Hasil Penelitian: Kelembagaan dan Ketahanan Pangan

1. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Mengingat luasnya kebutuhan dasar individu dan keluarga maka dalam definisi operasionalnya, kesejahteraan seringkali direduksi menjadi sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik dasar minimal seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran kesejahteraan masyarakatpun seringkali hanya dilakukan secara subsektif, padahal kesejahteraan menyangkut banyak aspek persepsi individu atau keluarga terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Menurut Sunarti (2009), bahwa kesejahteraan keluarga meliputi indikator pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian, perumahan, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan keluarga. Sementara itu menurut Deacon & Firebough (1988) dalam Sunarti bahwa kesejahteraan keluarga berhubungan dengan keberfungsian keluarga. Keluarga yang bisa menjalankan beragam fungsi yang diembannya, terutama fungsi ekonomi maka memiliki peluang yang besar untuk sejahtera, dan juga menjalankan fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan dan pendidikan anak. Demikian pula halnya dengan tercapainya ketahanan pangan nasional, tidak berarti tiada masalah dalam ketahanan pangan keluarga. Distribusi pangan yang tidak merata menjadi kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensi yaitu meliputi mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Secara ringkas ketahanan pangan sebenarnya hanya menyangkut tiga hal penting yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumberdaya alam, fisik, dan manusia. Pemilikan lahan yang ditunjang oleh iklim yang mendukung dan disertai dengan SDM yang baik akan menjamin ketersediaan pangan yang kontiniu. Sementara itu akses

pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan konsumsi pangan akan sangat menentukan apakah seluruh anggota keluarga nantinya bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan keluarga sangat tergantung dari berfungsinya keluarga bagaimana suatu keluarga dapat menjalankan beragam fungsi yang diembannya, terutama fungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, perumahan, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan keluarga.

Kebijakan pemerintah yang sudah baikpun ternyata belum dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, apalagi kalau kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kesejahteraan keluarga. Kebijakan pengentasan kemiskinanpun akan berjalan tanpa hasil karena dampak positifnya diikuti oleh dampak negatif kebijakan lain yang tidak tepat sasaran, sehingga kerja keras pemerintah akan sia-sia jika kemiskinan tidak berkurang tapi justru bertambah. Diharapkan kebijakan pangan ke depan lebih fokus pada usaha-usaha memperbaiki kesejahteraan keluarga karena kesejahteraan keluarga akan menggambarkan kesejahteraan daerah dan nasional.

2. Analisis Peran Kelembagaan Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

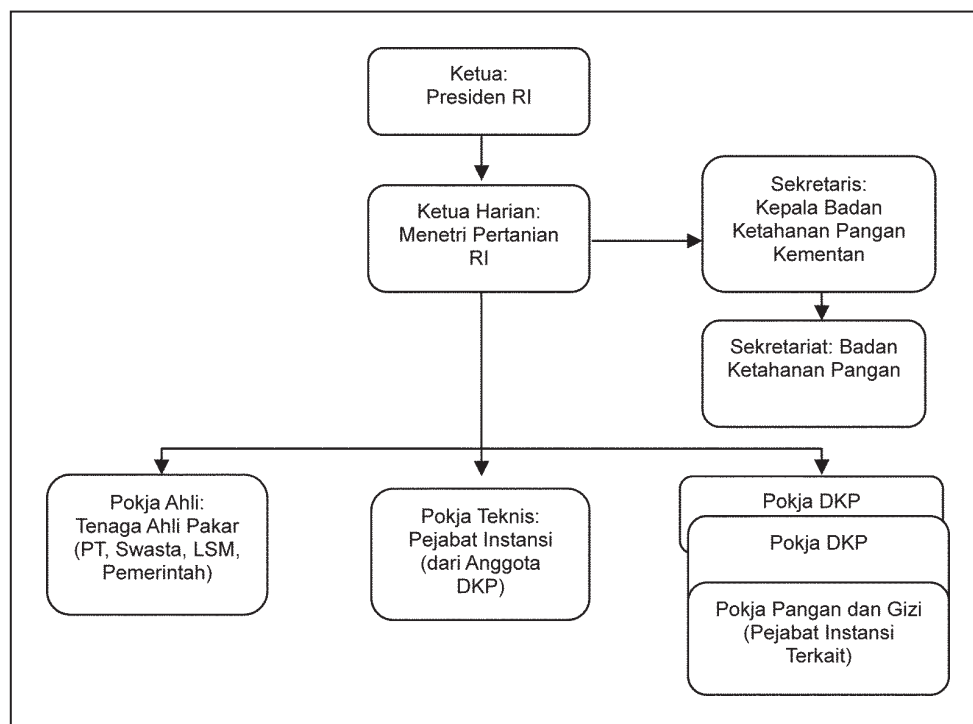
Kelembagaan pangan yang bertanggung jawab masalah pangan di Indonesia adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Berbagai institusi yang menangani masalah pangan akibatnya sering terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan ada kalanya tidak jelas. Sejumlah kebijakan dan program telah dilakukan, namun pada akhirnya negara kita tetap melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar tidak terjadi kebijakan pemerintah yang tumpang tindih sebaiknya, Kementerian Pertanian: mengurus intensifikasi dan ekstensifikasi masalah pangan. Kementerian Perdagangan: mengurus masalah ekspor komoditas pangan dan Bulog kembali berperan mengurus distribusi dan transportasi, tanpa adanya unsur bisnis.

Selain kelembagaan struktural Pemerintah telah membentuk kelembagaan pangan yang disebut dengan Dewan Ketahanan Pangan (DKP). DKP merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua, yaitu Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 2001 dan telah direvisi dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006. Struktur Organisasi DKP, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Sesuai dengan Peraturan Presiden, tugas utama DKP Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota adalah membantu Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota dalam: (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional/wilayah; (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional/wilayah; (3) Membangun koordinasi program ketahanan pangan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, DKP juga memiliki tugas lainnya terutama menyangkut koordinasi di bidang: a) penyediaan pangan, b) distribusi pangan, c) cadangan pangan, d) penganekaragaman pangan, e) pencegahan dan penanggulangan masalah

pangan dan gizi, f) pengendalian harga dan g) pengembangan sumberdaya manusia dan kerjasama internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, DKP di pusat maupun Provinsi dan kabupaten/kota dibantu oleh Sekretariat Dewan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan ataupun unit kerja yang mengangani ketahanan pangan untuk Provinsi dan kabupaten/kota. Badan/Dinas/Kantor tersebut merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas DKP, dapat dibentuk Kelompok Kerja yakni Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Teknis, yang anggotanya dapat berasal dari tenaga ahli perguruan tinggi, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan. Dewan Ketahanan Pangan juga dapat membentuk kelompok kerja lainnya jika diperlukan. Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan.

Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Hingga tahun 2009, seluruh Provinsi



Gambar 2.
Struktur Organisasi Kelembagaan Ketahanan Pangan
Sumber: Buku Dasawarsa Ketahanan Pangan di Indonesia

telah membentuk DKP dan menetapkan Gubernur sebagai Ketua DKP Provinsi. Demikian halnya dengan pembentukan DKP Kabupaten/Kota, antusias daerah untuk membentuk DKP sangat kuat terutama setelah pemerintah menetapkan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Sebanyak 405 Kabupaten dan Kota telah melaporkan pembentukan DKP di daerahnya masing-masing. Sampai dengan tahun 2009 telah terbentuk 375 unit kerja kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika melihat banyaknya unit kerja kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang peran dalam ketahanan pangan tetapi tampaknya Dewan Ketahanan Pangan yang terdiri dari berbagai instansi terkait ini belum terkoordinasi dengan baik, akan tetapi lembaga tersebut masih berjalan sendiri-sendiri yang seharusnya dapat bersinergi dan saling koordinasi untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan.

Selain kelembagaan struktural telah dibentuk kelembagaan pangan yang disebut Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Namun dalam kenyataannya fungsi belum berjalan dengan baik karena DKP harus berhadapan dengan berbagai masalah dan hambatan. Koordinasi lintas sektor untuk bekerja sama mewujudkan ketahanan pangan memerlukan kesepahaman bersama dan wawasan yang luas. Beragamnya kelembagaan struktural yang menangani ketahanan pangan di pemerintah Provinsi maupun kabupaten dan kota sehubungan dengan adanya otonomi daerah adalah salah satu fenomena yang perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama. Tidak mudah bagi DKP untuk membangun koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh.

Dewan Ketahanan Pangan harus mampu menjadi jembatan komunikasi seluruh *stakeholder* agar dukungan semua pihak dapat saling memperkuat dan terintegrasi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai cita-cita bersama. Secara umum kendala yang dihadapi pembangunan ketahanan pangan dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan

yang dihadapkan pada keterbukaan ekonomi dan perdagangan global. Aliran barang dan jasa serta inventasi akan semakin bebas dan terbuka, bersaing dengan produk produk luar, terutama dari negara-negara maju diberikan subsidi yang luar biasa besarnya dibandingkan subsidi yang diberikan kepada para petani kita. Sedangkan kendala internal adalah yang terkait dengan masih besarnya populasi penduduk dan proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pangan yang cukup serta kelangkaan sumber daya alam akibat kompetisi pemanfaatan ataupun perubahan iklim global. Semua hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan pangan yang pada ujungnya mengakibatkan rendahnya status gizi, kualitas fisik dan tingkat intelegensia masyarakat khususnya generasi muda.

Peran dari kelembagaan pangan sangat terkait dengan kebijakan, selain dari sisi kebijakan peningkatan produksi nasional diperlukan kebijakan dari sisi konsumsi dan permintaan yang sinergis. Kelembagaan pangan yang perlu ditempuh adalah advokasi dan penyuluhan tentang pentingnya diversifikasi konsumsi yang mengarah pada pola pangan beragam dan gizi seimbang merupakan strategi yang perlu mendapat prioritas. Identifikasi, pengembangan dan peningkatan konsumsi komoditas pangan lokal spesifik perlu dilakukan secara intensif dan konsisten. Mewujudkan stabilitas nilai tukar, mengendalikan gejolak harga lewat pengendalian inflasi, dan meningkatkan efisiensi pemasaran sehingga tercipta harga pangan dengan karakteristik murah dan stabil agar setidaknya tidaknya daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Peningkatan akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli dengan upaya pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan bantuan modal. Meningkatkan akses fisik rumah tangga terhadap pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan (Saliem Handewi, P. 2004).

Berbagai masalah yang diuraikan di atas mustahil dapat diatasi oleh satu atau dua instansi saja. Berbagai instansi, lembaga, organisasi terkait membutuhkan koordinasi untuk mengarahkan kebijakannya agar bangsa

ini memiliki sistem ketahanan pangan yang handal. Berbagai fakta menunjukkan bahwa di daerah surplus pangan sekalipun masih terjadi rawan pangan dan gizi buruk. Oleh karena itu, jelaslah sangat diperlukan kelembagaan dan kebijakan serta langkah operasional terpadu lintas sektor dan bahkan dengan menyertakan seluruh komponen masyarakat guna terlepas dari rawan pangan, gizi buruk dan kemiskinan. Kalau masing-masing lembaga terkait tersebut, sesuai menjalankan perannya secara optimal, ketahanan pangan Indonesia akan kuat dan lambat laun negara Indonesia tidak terus-menerus sebagai pengimpor bahan pangan dari luar negara lain.

Dari uraian di atas, adanya kebijakan pemerintah melalui undang-undang pangan seperti telah disinggung tampaknya belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menjadi menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ada perlu ditinjau kembali dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berbasis kultur pertanian karena Indonesia adalah negara agraris sekaligus maritim sehingga basis kultur (*cultural base*) bagi pembangunan ekonomi nasional seharusnya bertumpu pada pengembangan pertanian dan kelautan untuk menopang pengembangan sektor lain.

3. Alternatif Kelembagaan Pangan ke Depan

Mengikuti perkembangan konsepsi ketahanan pangan bahwa pangan dan pertanian sangat erat kaitannya. Pemerintah melalui kelembagaan pangan saat ini belum mampu mengatasi dan merumuskan ketahanan pangan dengan baik, sehingga masih banyak ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal perlindungan baik produsen maupun konsumen pangan. Padahal, kita memahami bahwa individu tidak mungkin dapat hidup tanpa ketergantungan dengan orang lain, tetapi saling tergantung kepada manusia (individu) lainnya. Dalam pemahaman seperti ini, maka kehidupan bermasyarakat (bersosialisasi) menjadi unsur yang penting.

Dalam banyak pendapat bahwa modal sosial yang menempatkan individu di bawah subordinasi masyarakat di sekitarnya ternyata mampu mendorong tidak hanya perwujudan ketahanan pangan, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan menekan keresahan sosial yang dapat terjadi di masyarakat. Bahkan, banyak manfaat yang akan muncul dan diperoleh individu apabila hidup bersosialisasi (bermasyarakat/berkelompok). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selain berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik bahwa pangan juga harus dipahami dalam kaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas, ketahanan pangan tidak dapat diartikan pada tingkatan nasional akan tetap harus sampai pada level, individu, rumah tangga dan tataran masyarakat luas dan bagaimana kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya. Dengan demikian, ketahanan pangan akan mengakomodasikan aspek-aspek sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pada kenyataannya, mekanisme dalam kelembagaan ketahanan pangan yang ada saat ini belum tertata dengan baik seperti pada tingkat daerah kabupaten dan Provinsi. Pemahaman dan komitmen tentang ketahanan pangan juga belum tersosialisasi dengan baik terutama di tingkat kabupaten/kota/pemahaman ketahanan pangan harus jelas, karena kelembagaan ini sebagai kelembagaan yang paling mengetahui masalah yang ada dalam masyarakat karena lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kelembagaan ini diharapkan mampu menjembatani dan sebagai ujung tombak untuk mengkordinasikan urusan pelaksanaan ketahanan pangan di daerah.

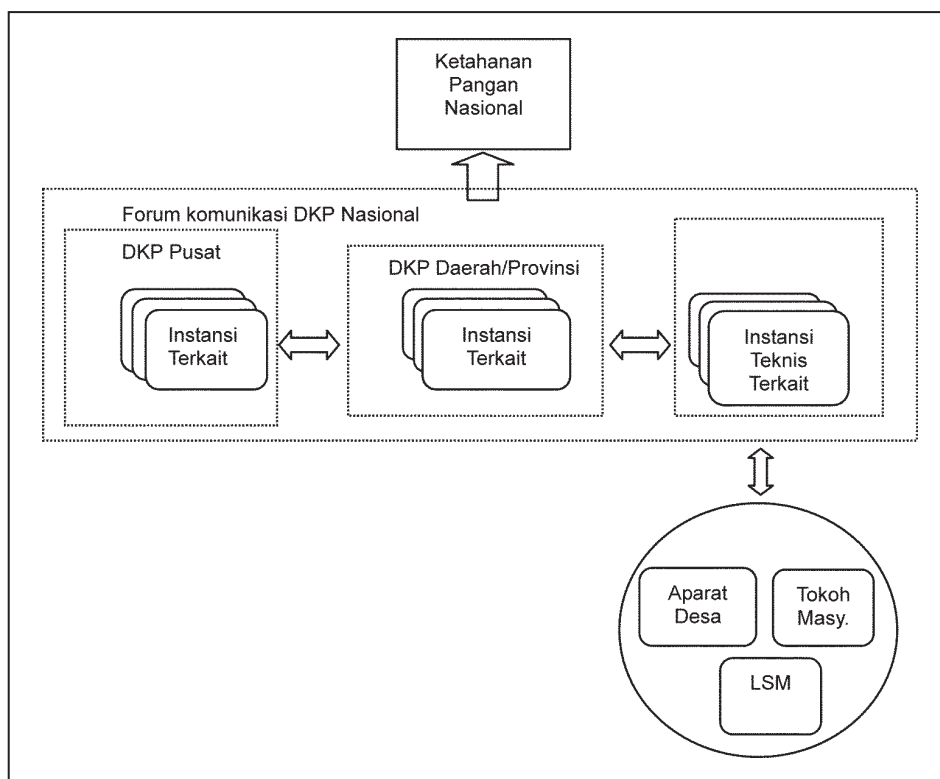
Selain itu, kurangnya komitmen pimpinan daerah terhadap urusan ketahanan pangan dapat pula ditinjau dari kualifikasi personil pengelola, keadaan sarana prasarana, serta anggaran yang kurang memadai. Fungsi lembaga dalam koordinasi untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan daerah juga masih sangat terbatas. Pada masa yang akan datang usaha usaha untuk memperbaiki kinerja kelembagaan ketahanan pangan perlu dilakukan, karena ketahanan pangan telah menjadi urusan wajib, dan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawab-

kan kepada legislatif dan masyarakat.

Eksistensi kelembagaan ketahanan pangan daerah memang masih banyak menghadapi kendala di lapangan. Pertama, lima besar kendala di lapangan adalah keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, rendahnya komitmen pimpinan daerah dan eselonisasi serta belum adanya pedoman operasional yang jelas. Kedua, kendati belum adanya pedoman operasional, namun mekanisme kerja juga merupakan kendala, hal tersebut menyebabkan munculnya kerancuan pada tingkat daerah yang mengakibatkan beragamnya komitmen dalam mengalokasikan anggaran, koordinasi para pimpinan daerah. Ketiga, beragamnya kendala tidak terlepas dari terbatasnya komitmen dan pemahaman lembaga legislatif daerah terhadap urusan ketahanan pangan, meskipun ini merupakan kewajiban mereka. Beragamnya kendala lapangan yang dihadapi bisa dimaknai sebagai gambaran nyata adanya persoalan tentang keberadaan kelembagaan ketahanan pangan di tingkat daerah dan nasional. Hal ini

terutama terkait dengan keterbatasan komitmen politik daerah, pemahaman dan komitmen terhadap ketahanan pangan, serta tidak adanya pedoman operasional yang memiliki kekuatan politik bagi daerah.

Berdasarkan permasalahan kelembagaan ketahanan pangan di daerah dapat dikatakan bahwa urusan ketahanan pangan nasional masih terkendala oleh krisis komitmen dan kemauan pemerintah pusat dan daerah terhadap urusan ketahanan pangan. Lemahnya ketahanan pangan, perlu upaya penguatan kelembagaan dan komitmen serta kemauan baik pusat maupun daerah, terlebih menghadapi dinamika dan masalah ketahanan pangan global. Keberadaan kelembagaan pangan di daerah yang telah berbentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) masih menimbulkan pertanyaan, karena statusnya berada di bawah Kementerian Pertanian, sehingga mengalami hambatan untuk melakukan koordinasi karena eselonisasinya lebih rendah dengan yang dikoordinasikan.



Gambar 3.
Alternatif Lembaga Pangan Nasional

Sumber: Satu Dasawarsa Ketahanan Pangan di Indonesia (dimodifikasi)

Disamping itu, BKP pusat yang ada saat ini juga tidak diikuti struktur BKP di daerah. Untuk mencari bentuk kelembagaan ketahanan pangan ideal yang dapat menjawab tantangan pembangunan ketahanan pangan kedepan, tidak cukup hanya dengan melihat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan mendatang seperti diuraikan di atas. Dalam upaya mencari formula bentuk kelembagaan ketahanan pangan yang tepat, telah dilakukan telaah yang didasarkan pada: landasan teoritis tentang lingkup ketahanan pangan, landasan hukum (perundangan dan peraturan pemerintah), landasan empiris tentang kondisi dan arah pengembangan ketahanan pangan mendatang, dan landasan operasional tentang kesiapan institusi ketahanan pangan tingkat daerah. Alternatif kelembagaan pangan yang baik untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 2 menunjukkan ada hubungan komunikasi mulai dari DKP Pusat sampai ke DKP Daerah/Provinsi kemudian DKP Kabupaten/Kota selanjutnya sapa ke masyarakat melalui Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan LSM. Gambar 2 tersebut juga menjelaskan bahwa kelembagaan ideal yang diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan di dalam sinergitas kegiatan yang terkoordinasi. Berdasarkan hasil telaahan kelembagaan pangan tersebut, penguatan kelembagaan ketahanan pangan ke depan nampaknya sangat penting untuk terus dilakukan. Untuk itu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan legislatif dalam membangun ketahanan pangan bangsa sangat penting dibangun dan dikembangkan oleh pimpinan pemerintahan yang berkuasa dalam setiap periode. Melalui koordinasi kelembagaan pangan yang baik didukung, kebijakan dan program yang terfokus serta didukung dengan pembiayaan yang memadai, diharapkan pembangunan ketahanan pangan masyarakat semakin kokoh dan masalah kerawanan pangan di Indonesia dapat teratasi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan pangan senantiasa meningkat. Dengan demikian, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, masalah pangan selalu merupakan masalah yang krusial, terjadinya gejala di masyarakat tampaknya sulit dihindari karena dipicu oleh kelangkaan dan naiknya harga pangan. Berdasarkan permasalahan kelembagaan ketahanan pangan di daerah dapat dikatakan bahwa urusan ketahanan pangan nasional masih terkendala oleh krisis kelembagaan ketahanan pangan pada umumnya, dan krisis komitmen dan kemauan politik Pemerintah Pusat terhadap urusan ketahanan pangan. Lemahnya ketahanan pangan, perlunya upaya penguatan kelembagaan dan komitmen serta kemauan politik baik pusat maupun daerah, terlebih menghadapi dinamika dan masalah ketahanan pangan global. Masih banyak wilayah di Indonesia yang masyarakatnya tergolong rawan pangan dan gizi kronis. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah serius sebagai solusi agar masyarakat dapat terhindar dari kerawanan pangan dan gizi kronis.

Kelembagaan ideal yang diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan di dalam sinergitas kegiatan yang terkoordinasi dengan. Berdasarkan hasil telaahan kelembagaan pangan tersebut, penguatan kelembagaan ketahanan pangan ke depan nampaknya sangat penting dilakukan. Untuk itu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan legislatif dalam membangun ketahanan pangan bangsa sangat penting dibangun dan dikembangkan oleh pimpinan pemerintahan yang berkuasa dalam setiap periode. Melalui koordinasi kelembagaan pangan yang baik didukung, kebijakan dan program yang terfokus serta didukung dengan pembiayaan yang memadai, diharapkan pembangunan ketahanan pangan masyarakat semakin kokoh dan masalah kerawanan pangan di Indonesia dapat teratasi.

2. Saran

Saran penulis ke depan, diperlukan dukungan kelembagaan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah

serta peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mengakses pangan secara berkelanjutan. Eksistensi kelembagaan ketahanan pangan daerah memang masih banyak menghadapi kendala di lapangan. Perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan pangan yang ada disertai dengan kebijakan serta langkah operasional terpadu lintas sektor dan bahkan dengan menyertakan seluruh komponen masyarakat guna terlepas dari rawan pangan, gizi buruk dan kemiskinan.

Pemerintah perlu memperkuat dan meninjau kembali kelembagaan ketahanan pangan yang ada, seperti contoh keberadaan kelembagaan pangan di daerah yang telah berbentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) statusnya berada di bawah Kementerian Pertanian, sehingga mengalami hambatan dalam koordinasi pelaksanaan tugas. Perlunya upaya penguatan kelembagaan melalui pengkoordinasian yang baik dan komitmen serta kemauan politik baik pusat maupun daerah, sehingga tercipta langkah operasional terpadu lintas sektor dan bahkan dengan menyertakan seluruh komponen masyarakat guna terlepas dari rawan pangan, gizi buruk dan kemiskinan terlebih menghadapi dinamika dan masalah ketahanan pangan global.

Pustaka Acuan

- Ariani, Mewa et al. (2008). *Analisis Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis Serta Alternatif Penanggulangannya*. Pengembangan Inovasi Pertanian 1 (1): 66-73
- Badan Ketahanan Pangan (DKP), Buku Dasawarsa. Diakses: http://www.bkp.pertanian.go.id/download.php?file=Buku_Dasawarsa_BKP.pdf 10/2/2014
- Badan Pusat Statistik, (2013). *Data Sosial Ekonomi*, Ed. 40. Jakarta
- FAO Corporate Document Repository World Food Summit, 1996. *Monitoring Progress Since The World Summit*, Roma: Italy
- Dewan Ketahanan Pangan, (2006). *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009 (Food Policy on Food Security, 2006 – 2009)*. Gurnal Gizi dan Pangan, Juli 2006 1 (1): 57-63
- Fardiaz, Dedi. 2012. *Membangun Kemandirian Pangan di Indonesia*, Jakarta: BPOM
- Hutapea, J dan Mashar, (2010). *Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kamandirian Pertanian*. (<http://www.kpd.tanahbumbukab.go.id/index.php?option=com,> diakses 16 Januari 2013)
- John K.M. Kuwornu, Demi M., and Suleyman Ditchfield P.K. 2013 *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 1(13): 43-48
- Nurhayat, Wiji, 2012. Detik Finance. Tahun ini Indonesia masih impor garam konsumsi 495.000 ton, [http://www.finance.detik.com/read/2012/09/14/130508/2019133/1036,](http://www.finance.detik.com/read/2012/09/14/130508/2019133/1036) diakses 9 Januari 2013)
- Prasaja, Hadiedi, (2012). *Kedaulatan Pangan Harus Menjadi Dasar RUU Perubahan UU Pangan*. Serikat Petani Indonesia, Maret 2012.
- Purwaningsih, (2008). *Ketahanan Pangan: Situsasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Pembangunan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret: 1-27
- Pusdatin, Kementerian Pertanian, (2012). *Statistik Makro Sektor Pertanian*. Jakarta
- Republik Indonesia, (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Robert, S. Chen.et.al.(1994). *World food security: Prospects and Trends*, Associate Director with the Interdisciplinary Data Resources Division of the Consortium for International Earth Science Information Network (CIESIN), 2250 Pierce Road, University Center, Michigan 48710, USA
- Saliem Handei P. et al. (2004). *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian,

Sarjana, Putu. (2009). *Bahan Tambahan Makanan yang Beresiko Terhadap Gizi dan Kesehatan. Makalah dalam Seminar Nasional Peranan Ilmu dan Teknologi Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan*, Denpasar: Peranan Ilmu dan Teknologi Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. Denpasar: Fak. Teknologi Pertanian, UNUD: 372-377

Sunarti Euis, Nia Nurayani, Neti Hernawati, (2009). *Hubungan Antara Fungsi Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan Sistem dengan Kesejahteraan Keluarga*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB. Bogor.

**Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan
dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi**
***A Case Study on Aftercare Service of Ex-homeless and Beggar Social
Rehabilitation in Pangudi Luhur Social Institution Bekasi***

Ruaida Murni

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126.
Email: <ruaidamurni@yahoo.co.id> Diterima 2 Januari 2014, direvisi 20 Maret 2014, disetujui 22 Mei 2014.

Abstract

This case study is to describe the service and rehabilitation process done by PSBKPL, on advanced education, understand institution apparatus, advanced education implementation, and supporting and handicap factors. The research result hoped can give an input to the Directory of Social Handicap Service to set a policy on service and rehabilitation implementation for homeless and beggar on advanced education done by PSBKPL. This research is evaluation with qualitative technique. The result shows that service and rehabilitation process by PSBKPL based on guidance made by the Directory of Social Handicap Service, because there is inadequate understanding between advanced education and evaluation-monitoring (Monev), caused advanced education and monev are done at the same time and place. Advanced education output shows that economically the lives of ex-educated members majority are still hand-to-mouth condition, but the change of attitude showed through working effort and their spirit to enhance it for not to be back in homeless and beggar. Only small numbers of ex-educated, with several reasons, back in condition they used to be. Handicap that felt by apparatus is that the issue has not been thought proportionally, such as fund limitation, has not special guidance, there has not been yet role from the sending institution and community, and there is no advanced assistance to develop entrepreneurship, that causes ex-social educated are not be able to develop as maximum.

Keywords:

Homeless and Beggar-PSBKPL-Advanced Education

Abstrak

Studi kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL, pembinaan lanjut; pemahaman petugas panti, pelaksanaan pembinaan lanjut, dan faktor penghambat dan pendukung. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Direktorat Pelayanan Tunasosial dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis serta pembinaan lanjut yang dilaksanakan oleh PSBKPL. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL berdasarkan panduan yang disusun oleh Direktorat Pelayanan Tunasosial, karena adanya kekurangpahaman antara pengertian pembinaan lanjut dan monitoring evaluasi (monev), mengakibatkan pelaksanaan pembinaan lanjut dan monev dilakukan secara bersamaan di lokasi yang sama. Hasil bimbingan lanjut menunjukkan secara ekonomi kehidupan sebagian besar eks warga binaan sosial (WBS) masih pas-pasan, tetapi perubahan sikap eks WBS Direktorat tunjukkan melalui berbagai usaha kerja yang dilakukan dan keinginan untuk meningkatkan usahanya, sehingga tidak lagi kembali sebagai gelandangan dan pengemis. Sebagian kecil eks WBS dengan berbagai alasan terpaksa kembali ke kegiatan semula. Hambatan yang dirasakan petugas dalam melaksanakan pembinaan lanjutan adalah belum mendapatkan perhatian proporsional, seperti anggaran yang terbatas, belum memiliki panduan khusus, belum adanya peran lembaga pengirim dan masyarakat, serta tidak adanya bantuan lanjutan untuk pengembangan usaha, mengakibatkan eks warga binaan sosial tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

Kata Kunci:

Gelandangan dan Pengemis-Panti Sosial Bina Karya-Bimbingan Lanjut

A. Pendahuluan

Panti sosial yang merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial disebutkan dalam Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial

atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Panti Sosial Bina Karya (PSBK) mempunyai

tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos No 50/HUK/2004). Pelayanan dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan panduan yang disediakan.

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi sebagai lembaga pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, melaksanakan kegiatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Informasi awal menunjukkan bahwa ketika PSBKPL melakukan tahapan pelayanan dan rehabilitasi, tercatat beberapa warga binaan sosial sebelumnya telah mengikuti rehabilitasi di panti sejenis di wilayah lain. Hal ini terkait dengan belum mampunya eks klien di panti bersangkutan untuk mandiri sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pada eks klien atau warga binaan sosial (WBS) PSBK yang lain. Diduga hal ini terjadi karena lemahnya proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSBK, salah satu dari proses tersebut adalah pembinaan lanjut.

Kondisi sesungguhnya eks warga binaan sosial PSBKPL adalah setelah dikembalikan ke masyarakat, apakah mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai individu dan warga masyarakat setelah dilakukan pelayanan dan rehabilitasi di panti? Kondisi ini dapat diketahui ketika dilaksanakan pembinaan lanjut oleh petugas sosial, sehingga perlu dikaji bagaimana proses pelayanan dan pelaksanaan pembinaan lanjut terhadap eks WBS yang dilakukan oleh PSBKPL. Pengkajian ini bertujuan mendeskripsikan, proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan PSBKPL, pemahaman petugas panti terhadap pembinaan lanjut dan bagaimana pelaksanaannya, hasil pembinaan lanjut yang dilaksanakan panti, dan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembinaan lanjut. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Pelayanan Tunasosial dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh PSBKPL.

B. Kajian Teori

Menurut Harry Hikmat (<http://isearch.babylon.com>. Analisis Kebijakan pengembangan panti sosial, diakses 2 oktober 2012), tugas dan tanggung jawab panti sosial mencakup empat kategori, meliputi mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang masalah dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin, melakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap keluarganya, meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandiriannya di masyarakat; Mengembalikan PMKS ke masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan masyarakat agar mengerti dan mau menerima kehadiran kembali mereka, dan membantu penyaluran ke pelbagai sektor kerja dan usaha produktif; Melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti mendorong peningkatan taraf kesejahteraan pribadinya, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang mendukung pemulihan, dan memfasilitasi dukungan psikososial dari keluarganya.

Pelayanan sosial yang dimaksud menurut Romansyshyn yang dikutip oleh Fahrudin (2011) adalah sebagai usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui: sumber-sumber sosial pendukung, proses untuk meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatasi stres dan tuntutan kehidupan sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Rehabilitasi sosial dalam UU No 11 angka 8 pasal 1 diartikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan profesi pekerjaan sosial di PSBKPL dilaksanakan oleh pekerja sosial fungsional dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Keputusan Menpan Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka KreDirektoratnya dijelaskan bahwa pelayanan sosial di dalam panti dilakukan melalui proses: Pendekatan awal, Asesmen, Perencanaan intervensi, Intervensi, Evaluasi dan terminasi, Bimbingan lanjut. Tahapan pelayanan sosial dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (2007) meliputi: Pendekatan awal, yang meliputi kegiatan orientasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi, penerimaan, meliputi kegiatan registrasi, penempatan dalam program rehabilitasi sosial, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*), pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan mental, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan keterampilan kerja. Rehabilitasi sosialisasi meliputi: bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, bimbingan sosial hidup bermasyarakat, pemberian bantuan stimulan usaha produktif, bimbingan usaha kerja (magang), dan penyaluran. Bimbingan lanjut meliputi: peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan, bantuan pengembangan usaha, bimbingan peningkatan keterampilan dan bimbingan pemantapan kemandirian, peningkatan usaha kerja. Evaluasi dan terminasi.

Bimbingan lanjut (pembinaan lanjut) merupakan salah satu proses pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan pada penerima pelayanan dan masyarakat untuk lebih dapat memantapkan dan meningkatkan serta mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupannya. Tahapan ini merupakan esensi pemberdayaan dan upaya stabilisasi perubahan dan perkembangan WBS setelah kembali ke masyarakat. Bimbingan lanjut merupakan salah satu tahapan penting yang harus mendapat perhatian yang lebih intensif. Selama dalam pelayanan dan rehabilitasi di panti, warga binaan sosial selalu didampingi pekerja sosial. Ketika WBS kembali ke masyarakat juga senantiasa harus mendapatkan pendampingan untuk memonitor perkembangan eks WBS, berupa bimbingan lan-

jut yang dilakukan oleh pekerja sosial, yang diharapkan dapat mengetahui pemasalahan yang dihadapi dan kebutuhan eks WBS, sehingga tindak lanjut dari bimbingan lanjut dapat dilaksanakan.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis. Lexy J Moleong (2004) yang mengatakan, bahwa tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. PSBK Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi salah satu panti yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gepeng. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan panduan wawancara terhadap eks warga binaan sosial, *focus group discussion* (FGD) dengan pekerja sosial, pejabat struktural, unsur yang terlibat dalam rehabilitasi dan pelaksanaan pembinaan lanjut dan dinas sosial, kemudian observasi terhadap kondisi eks WBS dan pelaksanaan pembinaan lanjut, serta telaah dokumentasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian, penafsiran dan menyimpulkan.

D. Hasil Penelitian: Gambaran Panti Sosial

Kelembagaan: Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi berdiri berdasarkan SK Mensos 14 HUK/1994, tgl 23 April 1994, tentang Penamaan UPT pusat/panti/sasana di lingkungan Departemen Sosial RI, yang sebelumnya bernama Panti Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis dan Orang Terlantar (PRPGOT). Berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2009 tgl 23 juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI, struktur organisasi PSBKPL terdiri dari 1 (satu) kepala,

1 (satu) Subbag Tata Usaha dan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Program dan Advokasi, Seksi Rehabilitasi Sosial dan kelompok jabatan fungsional. Masing-masing seksi bertanggung jawab langsung kepada pimpinan panti.

Tujuan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan PSBKPL adalah untuk memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, antara lain dapat dilihat dari gelandangan dan pengemis yang mampu mengubah cara hidup dan mencari penghasilannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; gelandangan dan pengemis dapat dijangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial; gelandangan dan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial, Dityanresos, 2007).

Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah pegawai PSBKPL 75 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 56 orang (76 persen), dan tenaga honorer 19 orang (24 persen), dengan tingkat pendidikan S2 1 orang, S1/D4 sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 9 orang, SLTA 3 orang, SLTP 1 orang dan SD 1 orang. Sedangkan menurut jabatannya terdapat 4 orang pejabat struktural, 15 orang fungsional pekerja sosial, penyuluh sosial, arsiparis, psikolog, dokter umum, dokter gigi masing-masing 1 orang, 2 orang perawat, 10 orang instruktur, 4 orang Satpam, 6 orang tukang bangunan, 2 orang tukang kebun, 1 orang supir dan 7 orang *cleaning service* dan staf pendukung lainnya. Perbandingan antara pekerja sosial dengan WBS masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan, yaitu 1 berbanding 14 sampai 15, idealnya 1 berbanding 9 sampai 10 (standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial PSBK). Berdasarkan Standarisasi Panti, perbandingan antara pekerja sosial dan WBS adalah 1 : 5 (Kep.Mensos RI No. 50/HUK/2004). Menurut Kepala PSBKPL: "Saat ini pegawai baru sudah diarahkan untuk menjadi pekerja sosial, sehingga jumlah yang dibutuhkan dapat terpenuhi."

Tingkat pendidikan pekerja sosial, terbanyak setingkat SMA 12 orang, (2 orang di antaranya adalah SMPS), D3 (sosial) 1 orang dan sarjana sosial 3 orang. Hanya sebagian kecil yang sudah mengikuti pendidikan berkaitan dengan pelayanan yang berbasis kesejahteraan sosial.

Sebagian besar telah memiliki sertifikat pekerja sosial fungsional sesuai dengan jenjang fungsionalnya. Menurut salah satu pekerja sosial, "sertifikasi ini belum memuat kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan pekerja sosial, karena sertifikasi hanya menetapkan bahwa pekerja sosial yang bersangkutan adalah fungsional pekerja sosial pada tingkat yang Direktorat tetapkan. Sedangkan pada pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan membutuhkan keahlian sesuai dengan permasalahan yang Direktorat tangani, seperti pekerja sosial anak, pekerja sosial remaja, pekerja sosial Lanjut Usia." Selain pekerja sosial, tenaga lain di PSBKPL adalah instruktur keterampilan. Sebagian instruktur yang terdapat di PSBKPL tidak memiliki sertifikat terkait dengan ilmu keterampilan yang diberikan kepada WBS. Meskipun demikian, mereka telah mendapatkan ilmu keterampilan langsung dari lembaga praktek keterampilan, atau belajar secara otodidak. Menurut kepala PSBKPL dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, "para instruktur cukup menguasai dan mahir dalam jenis keterampilan yang diberikan kepada WBS. Mereka juga bukan termasuk tenaga honor panti."

Sarana Dan Prasarana: PSBK Pangudi Luhur memiliki lahan seluas 51.616 M², terdiri dari 44.412 M² untuk bangunan (pondok WBS dan sarana pendukung pondok dll), bangunan kantor 4.204 M² dan 3.000 M² untuk lahan percobaan pertanian. Ruang kantor yang dimiliki adalah ruang kepala panti, ruang tata usaha, ruang bendahara, ruang seksi program dan advokasi sosial, ruang seksi rehabilitasi sosial, ruang pekerja sosial 2 unit, ruang psikologi, ruang bendahara, ruang dokter gigi. PSBKPL juga memiliki ruang untuk menunjang kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan, seperti ruang rapat, ruang tamu pekerja sosial, ruang tamu taman penitipan anak, ruang tamu kelas, ruang tamu poliklinik, ruang koperasi. PSBKPL juga didukung oleh berbagai jenis sarana peralatan kantor yang cukup lengkap, baik sarana kerja maupun sarana transportasi, tetapi diakui masih dalam jumlah yang terbatas terutama computer dan sarana transportasi. PSBKPL hanya memiliki 3 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua sehingga masih belum memadai untuk operasional kegiatan.

Sarana pelayanan dan rehabilitasi:

PSBKPL memiliki 31 asrama untuk tempat tinggal WBS, masing-masing pondok terdiri dari 5 pintu, masing-masing pintu terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan 1 ruang dapur (sebagian tidak memiliki ruang dapur). Satu pintu dihuni oleh satu keluarga (ibu, bapak, anak usia sekolah), sedangkan keluarga yang memiliki anak remaja bergabung dengan remaja lain dalam satu pintu. Untuk bimbingan keterampilan PSBKPL memiliki 9 unit ruang keterampilan, ruang pendidikan, ruang TPA, aula, sarana kesenian, dua unit ruang rehabilitasi dan satu unit mushalla. Panti ini juga dilengkapi dengan sarana olah raga, sarana kesenian dan satu unit guest house. Untuk pelayanan kesehatan, terdapat poliklinik dan ruang rawat inap, sedangkan untuk kesejahteraan pegawai, PSBKPL memiliki rumah dinas, 1 unit tipe C, 14 unit tipe D dan 19 unit tipe E.

Gambaran Warga Binaan Sosial (WBS):

Pada umumnya WBS berasal dari DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Lebak Banten, Tangerang, Malang, Cianjur, Garut, Sukabumi, Lampung, Banyumas, Kendal, Kebumen, Jombang, Situbondo, Magelang, Jember, Banjarnegara, Sulawesi dan Kalimantan. Jumlah WBS perangkatan (6 bulan) 300 orang yang terdiri dari balita, anak usia sekolah, remaja dan orang tua serta lanjut usia yang masih produktif. Mereka ada yang datang dengan status keluarga (istri, suami, anak) ataupun sendiri (bujang/gadis, janda/duda). Tingkat pendidikan WBS yang dewasa bervariasi, mulai dari SD sampai tingkat SMA bahkan ada yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah. Sebagian besar WBS di PSBKPL berasal dari keluarga atau masyarakat yang rawan menjadi gelandangan dan pengemis sedangkan gelandangan dan pengemis murni hanya beberapa keluarga saja. Menurut pekerja sosial PSBKPL, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambah banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan, sementara yang sudah terjun sebagai gelandangan dan pengemis juga dilakukan agar mereka tidak lagi hidup sebagai gelandangan dan pengemis.

Untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSBKPL, calon WBS perorangan dan keluarga harus memenuhi persyaratan

yang ada, yaitu tidak memiliki penyakit menular atau kronis; tidak cacat fisik dan mental; tidak sedang berurusan dengan penegak hukum; bersedia mengikuti program pelayanan panti; usia produktif (secara fisik dan mental mampu dilatih). Sebelum masuk panti, kegiatan WBS adalah pengamen, pedagang asong, pemulung, peminta-minta atau tidak memiliki kegiatan apa-apa. Setelah masuk panti, WBS memilih sendiri jenis keterampilan yang diikuti, sedangkan bimbingan sosial lainnya harus diikuti oleh semua WBS. Penempatan WBS dalam pelayanan dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan asesmen jenis keterampilan yang tersedia di panti. Jenis keterampilan yang diikuti WBS adalah pertukangan kayu, las, montir motor, olah pangan, sablon, tata rias, montir mobil, tahu tempe, dan pertanian. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis bagi WBS yang belum mampu tulis baca, diberikan paket A, yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Bekasi. Jumlah WBS yang mengikuti paket A pada tahun 2009 sebanyak 45 orang, 2010 sebanyak 61 orang dan tahun 2011 sebanyak 29 orang. Sedangkan bagi WBS yang memiliki anak balita, juga tersedia TPA Bina Insani.

Proses Rehabilitasi Sosial: Pendekatan awal: dilakukan melalui sosialisasi program, orientasi dan konsultasi, identifikasi masalah, motivasi dan seleksi penerimaan. Sosialisasi program diawali dengan melakukan kontak dengan Dinas Sosial Tingkat II melalui surat pemberitahuan tentang penerimaan warga binaan sosial di PSBKPL. Pada tahap ini PSBKPL menyosialisasikan programnya pada dinas sosial setempat dan instansi terkait, untuk mendapatkan dukungan dan peran serta dalam pelaksanaan program. Pada tahap ini petugas panti sekaligus melakukan orientasi dan konsultasi tentang wilayah-wilayah yang menjadi kantong calon WBS untuk menumbuhkan peran serta aktif dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Peserta sosialisasi selain petugas sosial tingkat II, instansi terkait, diikuti juga tokoh masyarakat dan petugas kecamatan. Untuk tingkat Kelurahan dan lokasi calon WBS berada, sosialisasi dilakukan oleh dinas sosial. Pada saat yang sama pekerja sosial melakukan identifikasi masalah terhadap calon WBS dan

potensi lingkungan yang mendukung proses pelayanan dan rehabilitasi WBS ketika kembali dari panti, baik potensi alam, sumber daya manusia dan nilai setempat. Motivasi secara langsung dilakukan petugas panti hanya pada lokasi-lokasi terdekat dengan panti. Seleksi dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial setempat dan gelandangan dan pengemis yang sudah dimotivasi oleh pekerja sosial untuk mendapatkan calon warga binaan sosial. Beberapa kendala dalam kegiatan ini antara lain: (a) Surat yang dikirim ke Dinas Sosial sering tidak sampai, karena nomenklatur Dinas Sosial bergabung dengan instansi lain, sehingga informasi tentang pelaksanaan sosialisasi tidak sampai ke petugas. (b) Beberapa tahun terakhir Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas panti atau petugas lainnya tidak secara langsung sampai ke jenjang calon WBS, sehingga petugas panti tidak bisa secara langsung memotivasi calon WBS, dalam kondisi seperti ini sering terjadi kesalahpahaman terhadap program yang akan dilaksanakan di PSBKPL. Calon WBS mengira adanya uang saku, atau akan ada jaminan pekerjaan setelah selesai mengikuti kegiatan di panti. Hal ini menimbulkan masalah setelah berada di panti. Mereka tidak mau mengikuti kegiatan panti, minta keluar atau secara diam-diam keluar dari panti (kabur). Kecuali pada lokasi terdekat, pekerja sosial melakukan sosialisasi dan motivasi secara langsung kepada calon wbas, seperti daerah Bekasi, DKI Jakarta, Bogor dan wilayah terdekat lainnya.

Penerimaan dan pengasramaan: Pada tahap penerimaan dilakukan registrasi, studi kasus dan penempatan dalam program rehabilitasi sosial. Registrasi merupakan seleksi yang kedua yang dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog, untuk memastikan calon WBS memenuhi syarat Direktorat terima sebagai WBS. Studi kasus, pada kesempatan ini pekerja sosial dan psikolog menggali informasi dan mempelajari latar belakang WBS dan riwayat permasalahan yang dihadapi. Pekerja sosial dan psikolog menggali informasi dari WBS dengan cara wawancara. Hasil wawancara dijadikan data dasar penempatan dalam pondok dan

dalam program rehabilitasi sosial sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki masing-masing WBS, tingkat pendidikan, serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PSBKPL. WBS yang berasal dari satu daerah, tidak direktorat tempatkan dalam satu pondok. Beberapa permasalahan terkait dengan penerimaan antara lain: (a) Seringnya WBS memilih untuk mengikuti jenis keterampilan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, kalau hal ini dipaksakan dikhawatirkan sampai pada waktunya pelayanan dan rehabilitasi selesai dilaksanakan, WBS belum menunjukkan kemampuannya dalam keterampilan yang dipilih. Sehingga sering terjadi penumpukan WBS dalam salah satu jenis keterampilan yang tidak mengharuskan kemampuan dimaksud, seperti olah pangan, tahu tempe dan pengolahan susu kedelai. (b) Petugas sering dihadapkan pada dilematis pada calon WBS yang datang sendiri dalam kondisi mengidap penyakit tertentu yang tidak memenuhi persyaratan tetapi membutuhkan bantuan. Menghadapi hal ini petugas mempertimbangkan latar belakang calon WBS, jika gelandangan dan pengemis murni tetap Direktorat terima sebagai WBS, dengan resiko pengobatan secara intensif ke Puskesmas.

Asesmen (Pengungkapan dan Pemahaman Masalah): Dilakukan sepanjang WBS menerima bimbingan dan rehabilitasi sosial di PSBKPL. Asesmen yang dilakukan pada awal penerimaan untuk menelusuri, menggali data WBS, faktor-faktor penyebab masalah, tanggapan, serta kekuatan dalam rangka membantu dirinya sendiri, yang kemudian dikaji, dianalisis dan diolah oleh tim yang sudah Direktorat tentukan, termasuk pekerja sosial dan psikolog, untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi sosialialisasi bagi WBS. Aspek-aspek dalam asesmen meliputi fisik, mental spiritual, sosial dan keterampilan. Asesmen juga dilakukan apabila WBS bermasalah di panti, baik masalah dalam keluarganya maupun dengan tetangga sesama WBS. Asesmen dilakukan oleh pekerja sosial, sedangkan penyelesaian masalah dilakukan oleh pembimbing pondok, tetapi jika melalui pembimbing belum terselesaikan, akan diadakan

case conference atau pembahasan kasus, yang melibatkan pekerja sosial, struktural, psikolog, pembimbing agama dan medis. Untuk mengupayakan penyelesaian masalah WBS, dilakukan *home visit*, untuk mengetahui lebih jauh kondisi keluarga sebelum masuk ke panti. Kendala yang dihadapi dalam asesmen meliputi: belum ada instrumen yang baku untuk melakukan asesmen; petugas asesmen/ asesmentor belum memiliki ilmu asesmen yang memadai sehingga hasil asesmen kadang kala tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi WBS.

Pelaksanaan Bimbingan dan Rehabilitasi

Sosial: Pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di PSBKPL mencakup: (a) Bimbingan sosial, direktorat tunjukkan ke arah tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bimbingan sosial dilakukan melalui teori dan praktek hidup berteman, berelasi dan bersosialisasi; hidup bermasyarakat, bergotong royong, bertanggung jawab dan bertoleran; hidup tertib dan berperilaku sesuai aturan dan tata nilai yang berlaku di masyarakat; hidup selalu optimis, bekerja keras dan percaya diri; bimbingan pengetahuan dasar; kesehatan, keluarga berencana; kewirausahaan dan keteraturan bermasyarakat dan taat hukum. Teori bimbingan sosial dilakukan secara klasikal, WBS dikelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikan (SD, SMP, SMA). Kemudian diskusi kelompok dan dinamika kelompok, serta terapi komuniti yang dilakukan melalui pertemuan pagi, bimbingan kelompok, curahan hati pengalaman hidup. (b) Bimbingan fisik dan kesehatan, merupakan bimbingan atau tuntunan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat secara teratur dan disiplin agar kondisi fisik selalu dalam keadaan sehat.

Pelayanan dan kegiatan yang mendukung bimbingan fisik dan kesehatan melalui pelayanan menu makanan yang diberikan dalam bentuk natura yang diberikan dalam 5 hari sekali. Bahan makanan yang diberikan per WBS adalah beras 2,5 kg, ikan/daging/sarden/ayam (diberikan bergantian), telur, teh, gula, kopi, minyak

goreng, indomie, garam, gas 3 kg dan lain lain yang diperlukan. Kemudian bimbingan fisik berupa olah raga, PBB, *outbound*, kebersihan ketertiban dan keindahan (K3) dan SKJ. Bimbingan kesehatan dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di poliklinik milik panti, bimbingan hidup sehat, kesehatan reproduksi, penyuluhan HIV/AIDS dan pelayanan Keluarga Berencana. Khusus untuk ibu hamil, diadakan pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Anak balita, selain pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga diberikan imunisasi sesuai kebutuhan anak balita serta pemberian vitamin A. WBS sakit yang tidak bisa diobati di poliklinik panti, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bekasi, atau ke rumah sakit terdekat yang telah diadakan kerjasama seperti klinik, rumah bersalin, dan bidan. Dalam pemeriksaan kesehatan, kadangkala terdeteksi penyakit berat diderita oleh WBS yang tidak terdeteksi saat penerimaan WBS, seperti HIV/AIDS dan narkoba. WBS seperti ini dirujuk ke panti lain yang sesuai dengan permasalahannya untuk penanganan lebih lanjut. Bimbingan fisik dan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan dibimbing oleh pekerja sosial bekerja sama dengan Polres Bekasi, Puskesmas dan RSUD.

Bimbingan Mental Spiritual: Bimbingan mental spiritual direktorat tunjukkan untuk memahami diri sendiri dan orang lain melalui bimbingan keagamaan, etika, budi pekerti dan disiplin diri. Bimbingan spiritual dilakukan melalui ceramah agama dua kali seminggu, pengajian 1 kali seminggu, belajar membaca Al Qur'an 1 kali seminggu. Bimbingan mental diberikan oleh pekerja sosial yang dianggap mampu dalam bimbingan agama, ceramah agama selain diberikan oleh petugas panti, juga bekerja sama dengan Departemen Agama dan Pesantren.

Bimbingan keterampilan kerja: Direktorat tunjukkan agar WBS terampil di bidangnya sehingga memungkinkan mampu memperoleh pendapatan yang layak sebagai hasil penda-yagunaan keterampilan kerja yang dimiliki. Masing-masing jenis keterampilan dibimbing oleh seorang instruktur yang didampingi oleh seorang pekerja sosial. Menurut pekerja sosial

PSBKPL, dalam bimbingan keterampilan pekerja sosial bertugas memantau dan memberi dorongan kepada WBS agar setiap bimbingan dilakukan dengan tekun. Keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat dan bakat WBS yang mencakup pertukangan kayu, bengkel las, olahan pangan dan tahu/tempe, sablon, tata rias, montir mobil, montir motor, servis elektro, menjahit, budi daya perikanan dan pertanian. Menurut instruktur PSBKPL, “ruang yang digunakan untuk bimbingan keterampilan terasa sempit, sehingga membatasi ruang gerak WBS. Peralatan dan bahan keterampilan juga tidak mengikuti perkembangan pasar.”

Rehabilitasi sosialialisasi: dilakukan satu atau dua bulan sebelum terminasi atau pemulangan WBS. Kegiatan ini dilakukan ke lembaga pengirim untuk memberitahukan pemulangan WBS yang dikirim oleh lembaga atau dinas sosial setempat, karena telah selesai pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL, kemudian dijalin kerjasama dalam melaksanakan pembinaan lanjut, dengan harapan instansi terkait serta masyarakat dapat memfasilitasi eks WBS dalam mengembangkan keterampilan yang sudah di dapat dari PSBKPL. Kendala yang dihadapi petugas dan pekerja sosial dalam kegiatan ini: (a) Seringnya terjadi mutasi pejabat daerah, sehingga pemahaman tentang kegiatan PSBKPL masih kurang. Sehingga pekerja sosial harus mengulangi mensosialisasikan program agar mereka memahami kegiatan PSBKPL. (b) Waktu yang diberikan untuk rehabilitasi sosialialisasi hanya 3 hari untuk lokasi jauh dan 1 hari lokasi dekat cukup menyulitkan petugas dalam mengatur waktu terutama terkait dengan tingkat kesibukan pejabat daerah.

Rehabilitasi sosialialisasi WBS dilakukan melalui kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK) selama 1 bulan. Menurut pekerja sosial PSBKPL, bagi WBS yang dianggap belum menguasai atau belum mampu, tidak diikuti dalam PBK, bahkan bagi WBS yang sudah mampu pun tidak semua dapat diikutsertakan dalam PBK karena anggaran terbatas. PBK dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha sesuai dengan jenis keterampilan WBS. Beberapa jenis keterampilan tertentu tersebut, seperti olah pangan, dilakukan

dengan mengolah makanan di panti, kemudian menjualnya sendiri ke masyarakat sekitar. Pada akhir pelayanan dan rehabilitasi sosial sebelum pemulangan, WBS diberikan paket kerja sesuai dengan jenis keterampilan. Paket ini merupakan bantuan stimulan usaha produktif berupa bahan dan peralatan kerja untuk melaksanakan praktek keterampilan yang sudah diberikan, bertujuan agar mereka memiliki matapencaharian dan berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Kasie Rehabilitasi PSBKPL, paket diberikan secara kelompok dan perorangan, sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti.

Penyaluran: diwujudkan dalam bentuk pengembalian ke masyarakat, menyalurkan ke tempat kerja, dan menyalurkan sebagai peserta transmigrasi. Penyaluran dilakukan setelah selesai masa bimbingan dan rehabilitasi. Hasil FGD diketahui, bahwa secara khusus penyaluran ke tempat kerja belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena kepercayaan dunia usaha terhadap eks WBS masih rendah. Dunia usaha pernah mempekerjakan eks WBS tetapi banyak keluhan yang dihadapinya seperti keterampilan eks WBS yang masih kurang, sikap terhadap pekerjaan juga masih kurang, masih malas-malasan, setelah beberapa bulan bekerja sering meninggalkan pekerjaan tanpa pamit dan membawa beberapa peralatan kerja. Menurut pekerja sosial sikap eks WBS masih sulit dikendalikan ketika sudah kembali ke masyarakat. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemilik usaha sering disalahgunakan dengan membawa barang-barang dari tempat usahanya, sehingga berimbas kepada eks WBS lain yang benar-benar mau memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dan benar-benar mau mengubah hidupnya. Untuk mencari sendiri pekerjaan dengan modal keterampilan yang dimiliki hasil bimbingan PSBKPL, eks WBS merasa kesulitan walaupun sudah menunjukkan sertifikat, menurut Eks WBS sertifikat yang didapat dari PSBKPL belum diakui.

Hasil FGD juga diketahui, bahwa penyaluran juga dilakukan dengan mengikutkan WBS dalam program transmigrasi ke daerah Kalimantan Tengah, Gorontalo, Morotai dan Maluku Utara. Pekerja sosial dan Kasie Rehabilitasi sosial

PSBPKL mengatakan, proses untuk mengikuti program cukup rumit, calon transmigran harus mengikuti persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti persyaratan KTP dan dokumen pendukung lainnya, yang membutuhkan biaya administrasi cukup besar, karena WBS bukan berasal dari warga setempat. Menurut Kasi Rehabilitasi sosial PSBPKL, bagi WBS yang belum terampil dalam keterampilan dan menurut penilaian pekerja sosial memiliki kemauan dan potensi untuk dikembangkan, masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengikuti bimbingan di PSBPKL.

Bimbingan lanjut, Evaluasi dan Terminasi: Merujuk pada Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Teknis, bimbingan lanjut merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada WBS dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemandirian WBS dalam penghidupan serta kehidupan yang layak. Bimbingan lanjut dilakukan setelah WBS kembali ke masyarakat. Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan proses rehabilitasi, untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi secara keseluruhan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Terminasi atau penghentian pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan, apakah WBS telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga masyarakat yang baik. Pengakhiran pelayanan sedapat mungkin tidak menimbulkan konflik psikologis yang mengganggu WBS karena belum mampu mandiri.

Kegiatan Penunjang: kegiatan yang menunjang keberhasilan program kegiatan pokok seperti: Pernikahan masal, Direktorat tujuan bagi WBS yang belum memiliki buku nikah/akta nikah, dan bagi WBS yang kebetulan menemukan jodohnya di panti; Khitanan masal untuk anak dari keluarga WBS; Widya wisata yang dilakukan setiap angkatan, 6 bulan sekali; Mengikuti bazaar dan pameran, untuk menso-sialisasikan kepada masyarakat tentang visi misi dan program-program pelayanan dan rehabilitasi serta hasil-hasil shelter workshop dan produksi hasil WBS; Kegiatan Tim Reaksi Cepat

(TRC), membantu penanganan permasalahan sosial secara cepat, tepat dan terukur, terutama permasalahan gelandangan dan pengemis dan orang terlantar yang belum tertangani oleh dinas atau instansi terkait, sedangkan permasalahan sosial di luar gelandangan dan pengemis hanya sebatas mediator ke lembaga kesejahteraan; Bhakti sosial; dilakukan bersama dengan masyarakat sekitar, kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan lingkungan perumahan sebagai upaya menjaga dan mengantisipasi banjir yang setiap musim hujan PSBKPL Pangudi Luhur mengalami banjir

Beberapa jenis Pelayanan dan rehabilitasi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu memberikan pelayanan berkelanjutan untuk lebih menghasilkan kesejahteraan eks WBS, PSBKPL menyusun rencana program kegiatan sebagai berikut: Pemberian Jaminan hidup kepada eks WBS sebesar Rp. 1.500.000,- per keluarga untuk jangka waktu 3 bulan pertama setelah terminasi. Pelayanan Home care bagi Gelandangan dan Pengemis luar panti. Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 30 orang atau 30 keluarga eks WBS. Shelter work shop sebagai lanjutan dari instalasi produksi guna memantapkan kemandirian eks WBS. *Famili group suport*; keterlibatan keluarga (tokoh masyarakat) dalam kegiatan rehabilitasi sosial PSBKPL.

Pelaksanaan Pembinaan Lanjut: Kebijakan, dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis, PSBKPL menggunakan panduan Standarisasi Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis (2007), dan Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gepeng Sistim Panti (2006) yang disusun oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Pekerja sosial sebagai pelaksana pembinaan lanjut mengatakan, sampai saat ini PSBKPL belum memiliki acuan atau panduan khusus untuk melaksanakan pembinaan lanjut, baik yang disusun oleh instansi lain maupun yang disusun oleh PSBKPL sendiri. PSBKPL memiliki instrumen yang disusun oleh pekerja sosial dan seksi rehabilitasi sosial sehingga diperkirakan dapat memenuhi tujuan pembinaan lanjut yang dimaksud panti.

Tujuan pembinaan lanjut adalah untuk lebih memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian WBS dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Pada pembinaan lanjut bukan hanya sekedar melihat kondisi WBS, tetapi serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana pembinaan lanjut yang diarahkan kepada WBS dan masyarakat. Berdasarkan Panduan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Gepeng Sistim Panti (2006), tahap bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan. Kegiatan bimbingan atau tuntunan untuk lebih memantapkan kemampuan penyesuaian diri dalam tata hidup bermasyarakat dan keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Bantuan pengembangan usaha dan bimbingan peningkatan keterampilan, yang diarahkan kepada WBS dalam bentuk pemberian bantuan ulang baik berupa peralatan dan bahan permodalan maupun pemantapan keterampilan, sehingga jenis dan jumlah usahanya lebih berkembang. Bimbingan pemantapan kemandirian atau peningkatan usaha kerja, guna dapat meningkatkan usaha ekonomis produktif, sehingga dapat mengembangkan jenis dan jumlah penghasilannya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua WBS yang disalurkan dilakukan pembinaan lanjut, karena terbatasnya anggaran untuk pembinaan lanjut.

Pemahaman dan Pelaksanaan Pembinaan Lanjut: merupakan rangkaian kegiatan bimbingan, yang berada dibawah koordinasi seksi Rehabilitasi Sosial PSBKPL. Adanya kekurangan pemahaman antara pengertian pembinaan lanjut dan evaluasi yang dilakukan oleh PSBKPL, mengakibatkan pelaksanaan pembinaan lanjut dan evaluasi sering dilakukan secara bersamaan di lokasi yang sama. Perbedaannya hanya lama waktu, pembinaan lanjut dilakukan 4 hari, sedangkan monev dilakukan selama 3 hari. Apabila mengacu pada buku panduan, pembinaan lanjut dan evaluasi memiliki pengertian yang cukup jelas. Bimbingan lanjut merupakan rangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada eks WBS dan masyarakat, guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian WBS dalam kehidupan serta peng-

hidupan yang layak. Evaluasi untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi berlangsung sesuai rencana yang telah Direktorat tetapkan sehingga dapat dilakukan pengakhiran pelayanan. Pembinaan lanjut oleh PSBKPL diartikan untuk mengetahui kondisi eks WBS setelah dipulangkan ke masyarakat dan keluarga, terutama dalam pemanfaatan paket yang diberikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, tempat tinggal, yang dilaksanakan tiga bulan setelah pemulangan WBS ke masyarakat. Jika melihat tahapan pembinaan lanjut berdasarkan panduan teknis, idealnya evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan pembinaan lanjut, pada tahap evaluasi dapat diketahui apakah dari hasil pembinaan lanjut tersebut, eks WBS masih membutuhkan pendampingan atau sudah bisa Direktorat terminasi.

Pembinaan lanjut dilakukan oleh pekerja sosial dan seksi rehabilitasi sosial, karena keterbatasan anggaran, sehingga pembinaan lanjut dilakukan hanya kurang dari 1 persen eks WBS dan hanya pada wilayah yang terbanyak eks WBS-nya. Menurut pekerja sosial PSBKLP, ada ketidaknyamanan terhadap eks WBS ketika melakukan pembinaan lanjut, karena pekerja sosial tidak melakukan tindakan apapun yang terkait dengan kondisi eks WBS, pekerja sosial hanya melakukan wawancara dan observasi terhadap eks WBS. Mengacu pada buku Standard Pelayanan Minimal Gelandangan dan pengemis, pada tahap pembinaan lanjut ada tiga kegiatan yang harus dilakukan terhadap eks WBS, tetapi ketiga kegiatan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh petugas pembinaan lanjut. Seyogyanya kegiatan tersebut harus dilakukan sebagai wujud dari pembinaan lanjutan terhadap eks WBS, seperti adanya tambahan modal usaha baik berupa materi maupun peralatan kerja berdasarkan hasil evaluasi untuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh eks WBS, sehingga tujuan pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan di PSBKPL dapat terwujud.

Pembinaan lanjut dilaksanakan selama 4 hari, baik di wilayah luar Jawa (Kalimantan, Gorontalo) maupun wilayah Jawa. Menurut pekerja sosial, bagi WBS yang mengikuti transmigrasi (Kalimantan dan Gorontalo) biasanya

selalu dilakukan pembinaan lanjut. Wilayah transmigrasi merupakan wilayah dengan transportasi yang cukup sulit, karena harus menggunakan transportasi udara, darat bahkan sungai, sehingga membutuhkan dana transportasi lokal untuk menjangkau lokasi eks WBS. Pekerja sosial yang melakukan pembinaan lanjut sering kesulitan dengan biaya transportasi yang ada, sementara belum ada kerjasama yang intensif dengan instansi sosial dan instansi terkait setempat dalam pelaksanaan pembinaan lanjut. Instansi sosial menganggap bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya merupakan kegiatan PSBKPL yang tidak perlu adanya keterlibatan instansi lain. Alasan lain, instansi terkait tidak memiliki anggaran untuk ikut melaksanakan pembinaan lanjut. WBS merupakan warga setempat, sudah seharusnya instansi terkait setempat (lembaga pengirim) ikut bertanggung jawab melakukan pembinaan lanjut terhadap perkembangan kesejahteraan eks WBS, bahkan ikut serta memberikan modal pengembangan usaha eks WBS. Dengan demikian peluang tercapainya peningkatan taraf hidup eks WBS akan lebih besar.

Dalam pelaksanaan *focus group discussion* (FGD), petugas instansi terkait mengatakan, mereka tidak tahu apakah warga binaan sosial PSBKPL yang berasal dari daerahnya sudah selesai mengikuti rehabilitasi atau belum, demikian juga dengan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSBKPL, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan lanjut. Hal ini terkait dengan rehabilitasi sosialialisasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja, menyebabkan beberapa instansi terkait tidak mendapatkan informasi secara langsung tentang kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang sudah dilaksanakan dan kondisi WBS yang berasal dari daerahnya. Terbatasnya anggaran merupakan salah satu hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan rehabilitasi sosialialisasi masih terfokus pada daerah yang terbanyak mengirim warga binaan sosial saja, sehingga tidak semua instansi pengirim mengetahui keberadaan WBS asal daerahnya.

Laporan hasil pembinaan lanjut yang disusun oleh seksi rehabilitasi sosial, belum sepenuhnya memuat hasil wawancara yang

dilakukan terhadap eks WBS, yang dapat dijadikan acuan perbaikan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSBKPL. Padahal, melihat instrument yang dipakai pekerja sosial dalam melaksanakan pembinaan lanjut memuat kemungkinan permasalahan yang dihadapi oleh eks WBS dan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi eks WBS setelah beberapa bulan selesai mengikuti bimbingan dan rehabilitasi di PSBKPL. Hasil pembinaan lanjut belum Direktorat tindaklanjuti, walaupun eks WBS sedang bermasalah. Terbatasnya anggaran mengakibatkan tindak lanjut pembinaan lanjut tidak dapat diwujudkan, terutama untuk pengembangan usaha eks WBS.

Pekerja sosial seyogyanya ikut menyusun laporan hasil pembinaan lanjut, karena pekerja sosial sebagai pelaksana pembinaan lanjut yang mengetahui kondisi eks WBS setelah kembali ke masyarakat, dan memuat semua *pointer* instrumen yang dibuat bersama seksi rehabilitasi sosial. Pekerja sosial diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang ada serta mengajukan hal yang harus ditindaklanjuti, baik oleh PSBKPL maupun Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunasosial. Pembinaan lanjut menunjukkan juga sebagian eks WBS menjual *toolkit*, dengan alasan terdesak uang, tidak bisa dimanfaatkan, tidak tahu memanfaatkan karena keterampilan yang dimiliki belum mampu untuk melaksanakan usaha. Hal ini terkait dengan proses rehabilitasi yang dilakukan cukup singkat, belum sepenuhnya mampu mengubah sikap dan perilaku WBS, dan kondisi WBS yang pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga dengan waktu 6 bulan belum mampu menyerap semua bimbingan (teori dan praktek) yang diberikan petugas panti. Namun sebagian WBS ada juga yang mampu mengembangkan keterampilan yang diterima di PSBKPL, dengan membuat usaha sendiri atau bekerja dengan orang lain. Masih ada keinginan dan kemampuan sebagian eks WBS untuk mengubah pola hidupnya dan mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar, dengan mencari penghasilannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Lanjut: Penghambat, Terbatasnya anggaran, mengakibatkan frekuensi

pembinaan lanjut setiap tahunnya hanya dilaksanakan satu kali pada satu lokasi selama 4 hari. Hal ini mengakibatkan sebagian besar perkembangan eks WBS tidak diketahui. PSBKPL belum bisa mengetahui keberhasilan secara maksimal dari pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi yang dilaksanakan. Lokasi pembinaan lanjut tidak selalu pada lokasi yang dekat, pekerja sosial terpaksa menambah ekstra perjalanan. Komponen transport local dalam anggaran juga tidak ada, sementara petugas harus menyewa kendaraan untuk menjangkau lokasi, terutama pada daerah transmigrasi. Peran serta instansi terkait/instansi pengirim belum ada, sementara petugas juga belum memiliki data awal mengenai keberadaan eks WBS, karena sebagian eks WBS tidak kembali ke daerah asalnya dan sebagian lagi sering pindah alamat. Tidak adanya bantuan lanjutan untuk pengembangan usaha, mengakibatkan eks WBS tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

Pendukung: Meskipun pembinaan lanjut dapat dilaksanakan hanya di satu lokasi per tahun, dapat diketahui gambaran kondisi sebagian kecil eks WBS. Koordinasi yang baik antara pekerja sosial dan seksi Rehabilitasi sosial dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan lanjut meskipun berbagai kendala yang dihadapi. PSBKPL telah memiliki instrumen sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan lanjut.

Gambaran dan Analisis kasus Eks WBS:

Hasil pembinaan lanjut berdasarkan studi kasus terhadap eks WBS PSBKPL diperoleh gambaran sebagai berikut. Informan eks WBS yang menjadi sasaran penelitian adalah berjumlah 13 orang, berusia 19 sampai dengan 43 tahun, berasal dari Tangerang, Magelang, Ciamis, DKI Jakarta (pasar senen, stasiun kereta Cikini). Jenis kegiatan sebelum masuk panti adalah ngamen, pemulung, buruh tani, serabutan di pasar dan tidak bekerja (gelandangan). Sebanyak 11 orang informan sudah berumah tangga dan memiliki anak 1-5 orang. Sebagian informan masuk PSBKPL berstatus bujang perempuan (gadis atau janda), bujang laki atau duda. Pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak pernah sekolah sampai tingkat SMA.

Motivasi informan masuk PSBKPL cukup beragam, ada yang ingin belajar keterampilan, masalah keluarga, daripada tidur di stasiun kereta, kemudian atas suruhan petugas dinas sosial atau panti, dijanjikan pekerjaan dan keterampilan. Selama di PSBKPL informan mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan, seperti bimbingan sosial, bimbingan keterampilan yang merupakan salah satu modal yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan penghasilan. Jenis keterampilan yang diikuti adalah olah pangan (membuat bermacam jenis kueh, tahu tempe dan susu kedelai), montir motor, salon, dan sablon.

Sebanyak delapan orang informan eks WBS sudah bekerja, walaupun tidak sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti. Hal ini terjadi selain kesulitan mendapat pekerjaan di tempat-tempat usaha, juga belum mampu mandiri dilihat dari penguasaan keterampilan, dan ragu-ragu untuk memulai usaha, karena waktu yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi hanya 6 bulan dan secara efektif 4 sampai 5 bulan, karena waktu 1 bulan dilakukan untuk melengkapi administrasi, sehingga terlalu cepat untuk dikembalikan ke masyarakat. Hal ini terbukti dari kondisi dua orang eks WBS yang mengikuti program rehabilitasi selama dua periode, ada perpanjangan waktu pelayanan dan rehabilitasi karena merasa belum mampu menerapkan keterampilan yang diberikan di panti. Tujuan utama pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi oleh panti bukan pelaksanaan keterampilan, tetapi dengan keterampilan yang dimiliki dapat menunjang perubahan sikap dan perilaku WBS, karena keterampilan merupakan salah satu alat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Menurut pekerja sosial PSBKPL, ketidakmampuan WBS bukan hanya terkait waktu yang hanya 6 bulan di panti, tetapi juga berkaitan dengan kondisi WBS yang kurang menyadari manfaat pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku mereka yang sering malas-malasan ketika mengikuti bimbingan keterampilan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, pasrah

pada nasibnya, pemahaman agama yang rendah, budaya ketika di luar panti banyak yang memberi sehingga ada harapan akan terus diberi dan memiliki uang walaupun tidak bekerja, dan adanya stigma masyarakat. Menurut instruktur beberapa WBS terlihat ada yang sebatas hanya sekedar mengikuti kegiatan yang ada, kelihatan malas-malasan, tidak memperhatikan. Pekerja sosial berulang kali memperingatkan tetapi tidak ada perubahan, sehingga setelah keluar panti belum mampu berbuat sesuatu untuk diri dan keluarganya, padahal konsep yang dikembangkan di panti adalah perubahan sikap dan perilaku serta hidup mandiri sesuai norma kehidupan di masyarakat.

WBS yang telah menekuni jenis keterampilan tertentu, seperti membuka bengkel motor dan tambal ban (1 orang), *showroom* motor yang ditempatkan di bagian bengkel motor (1 orang), depot isi ulang air minum (1 orang), pabrik *sparepart* (1 orang), jual nasi uduk, terima cuci setrika pakaian (1 orang), jualan gorengan dan es (2 orang), yayasan tenaga kerja (1 orang) dan dua orang kembali menekuni kegiatan semula yaitu sebagai pedagang asongan. Salah satunya sebagai pedagang asongan (rokok, kacang goreng, permen, tisu), sekaligus sebagai pengamen, dilakukan ketika dagangannya sepi dari pembeli. Kegiatan sebagai pedagang asongan merupakan kegiatan yang semula ditekuni sebelum masuk ke PSBKPL, yang bisa menghasilkan pendapatan antara Rp 30.000–Rp 50.000 per hari. Tempat tinggal informan sebagian besar kontrak, satu orang tinggal di tempat kerja, dan 3 (tiga) orang bersama orang tua. Mereka merasa kondisi tempat tinggal saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan sebelum mengikuti rehabilitasi, karena sebelumnya ada yang tinggal di bawah jembatan sekitar Matraman, stasiun kereta Cikni, Pasar Senen. Sebagian tinggal di kampung halaman dengan kondisi rumah kontrak atau menempati rumah keluarga. Informan yang belum bekerja masih tinggal dengan orang tua.

Kasus Informan Eks Warga Binaan Sosial (WBS), Sesuai dengan tujuan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis yaitu memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, diantaranya dapat dilihat dari

kemampuan mereka merubah cara hidup dan cara mencari penghasilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar. Berikut ini kondisi eks WBS yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. **Eks WBS yang sudah bekerja**, jumlah delapan orang, dua orang di antaranya bekerja sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti di panti, yaitu bengkel motor. Sesuai atau tidak jenis pekerjaan yang ditekuni eks WBS dengan jenis keterampilan yang diikuti di panti bukan merupakan faktor utama dalam mendapatkan pekerjaan, yang penting eks WBS mampu berusaha mencari nafkah dengan cara tidak mengemis di jalanan. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dari PSBKPL dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis. Menurut eks WBS, penghasilan yang didapat masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 30.000-Rp. 50.000 per hari dimanfaatkan untuk mengontrak rumah sederhana dan kebutuhan sehari-hari.

Informan sangat bersyukur dengan kondisi ekonomi setelah dari panti, karena mereka mendapat penghasilan setiap hari walaupun sedikit. Mereka mengatakan, “daripada harus pulang kampung tidak ada pekerjaan tetap yang dapat dijadikan sumber penghasilan.” Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dianalisis, bahwa kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik dan kehidupannya lebih tenang dibandingkan sebelum masuk PSBKPL. Satu hal yang dapat diperhatikan, bahwa keberhasilan eks WBS pada satu sisi memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi disisi lain sebagian mereka tidak mau pulang ke kampung halaman. Mereka sudah merasa nyaman berpenghasilan di kota besar, sementara di kampung tidak memiliki sumber penghasilan serta tidak punya lahan. Mereka banyak tinggal di kota sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah setempat. Menurut eks WBS, kalau mereka pulang ke daerah asal, mereka tidak bisa mengembangkan keterampilannya, karena tidak memiliki tempat usaha, dan khawatir hasil usahanya tidak ada yang memanfaatkan. Berdasarkan pengalaman

WBS tersebut, terlihat bahwa sebagian besar informan telah bekerja sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak lagi menggelandang dan mengemis.

Eks Warga Binaan Sosial yang Belum Bekerja: Sebanyak 3 (tiga) orang, jenis keterampilan yang diambil sablon, olah pangan dan bengkel motor. Salah satu informan masih tinggal dengan orang tua dan belum menikah, dua orang lainnya sudah menikah dan tinggal bersama keluarga di rumah kontrakan. Mereka merasa belum menguasai keterampilan yang diberikan di panti, sehingga belum berani untuk membuka usaha sendiri. Keterampilan montir yang didapat dari PSBKPL, masih harus dipelajari lebih lanjut atau sebenarnya masih harus mengikuti pelayanan rehabilitasi. Informan lain merasa masih kebingungan dalam mempraktekan keterampilan yang sudah diperoleh di panti, karena paket yang diberikan tidak lengkap untuk melaksanakan atau mempraktekan keterampilan. Hingga saat ini mereka belum memperoleh pekerjaan karena sangat sulit, meskipun telah berusaha. Alasan lain peralatan/*toolkit* yang diberikan juga belum bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha karena tidak lengkap. Paket/*toolkit* sampai saat ini masih tersimpan, dengan harapan PSBKPL akan memberikan bantuan saat ada kunjungan dari panti, sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha. Informan lain belum berpikir untuk melanjutkan keterampilan yang sudah diperoleh di panti dan paket/*toolkit* yang diterima juga sudah dijual, karena terdesak kebutuhan sehari-hari.

Eks WBS yang Menekuni Kegiatan Semula: Rehabilitasi yang telah dilaksanakan terhadap gelandangan dan pengemis ternyata belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan eks WBS, sebagaimana dialami 2 informan eks WBS. Sebelum masuk PSBKPL, mereka mencari nafkah dengan cara mengamen dan pemulung. Sulitnya mencari pekerjaan dan terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari PSBKPL, mengakibatkan mereka kembali menekuni pekerjaan semula. Salah seorang dari informan ini mengaku sudah pernah mencoba untuk berjualan jajanan anak-anak (snak dan minuman), dengan modal hasil menjual

toolkit yang diberikan panti, tetapi belum dapat dikembangkan sebagai pekerjaan utama, karena penghasilannya masih sangat kecil. Modal utama yang seharusnya berkembang, habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya tidak bisa lagi melanjutkan usahanya karena kehabisan modal, sehingga kembali mengamen. Meskipun hingga saat ini masih ngamen, tetapi masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta berharap adanya dukungan dari panti untuk memulai usaha sendiri. Terlihat adanya perubahan sikap eks WBS, walaupun belum mampu mengembangkan potensi dirinya, karena beberapa hambatan yang dialami.

Uraian diatas menunjukkan, pentingnya peran pembinaan lanjut terutama bagi WBS yang mampu mengembangkan kemampuannya atau potensi dirinya. Pada kasus-kasus ini pembinaan WBS disertai tambahan modal baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk melengkapi *toolkit*. Kondisi eks WBS yang kembali menekuni kegiatan semula, membuktikan pentingnya pembinaan lanjut untuk memaksimalkan hasil pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL, oleh instansi terkait, dinas sosial, dan lembaga pengirim. Eks WBS yang tidak lagi kembali ke daerah asal, panti berperan penuh dalam pembinaan lanjut.

E. Penutup

Kesimpulan: Proses Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBKPL berdasarkan buku panduan yang disusun oleh Direktorat Tunasosial, walaupun masih terdapat berbagai masalah, seperti peran instansi sosial sebagai lembaga pengirim belum optimal, lokasi rehabilitasi sosialialisasi dan pembinaan lanjut yang cukup jauh, alokasi dana belum proporsional. Belum ada instrumen baku untuk melakukan asesmen, petugas asesmen juga belum memiliki ilmu asesmen yang memadai sehingga hasil asesmen kadang kala tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi WBS. Adanya kerancuan pengertian pembinaan lanjut dan evaluasi oleh petugas panti sehingga pelaksanaannya seringkali bersamaan dan pada lokasi yang sama. Jika dilihat berdasarkan teori bahwa pengertian pembinaan lanjut dan

monitoring evaluasi cukup jelas, sehingga sasaran maupun hasil yang diharapkan akan berbeda. Pembinaan lanjut merupakan bagian integral dari proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL, tetapi dalam kenyataannya pembinaan lanjut belum mendapatkan porsi yang seimbang baik dari sisi dana, waktu dan sarana prasarana lain, sehingga seolah-olah pelaksanaan pembinaan lanjut hanya sekedar melakukan kunjungan siraturrahi dengan eks WBS. Karna pembinaan lanjut yang hanya dilakukan terhadap kurang dari 1 persen dari jumlah eks WBS pun belum ada tindak lanjut, meski eks WBS sedang menghadapi masalah. Belum ada keterlibatan instansi pengirim dan instansi terkait lainnya serta tokoh masyarakat dalam pembinaan lanjut, sehingga hasil pembinaan lanjut tidak maksimal. Perubahan sikap eks WBS Direktorat tunjukkan melalui berbagai usaha kerja yang dilakukan dan keinginan untuk meningkatkan usahanya. Walaupun secara ekonomi semua informan eks WBS masih belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari (dikatakan masih *pas-pasan*), tetapi demikian sudah memiliki penghasilan tetap, pendapatan secara harian yang cukup untuk kehidupan dalam katagori sangat sederhana (istilah yang dipakai yang penting makan walaupun tanpa lauk pauk). Adanya stigma masyarakat dan dunia usaha membuat eks WBS kesulitan mendapat pekerjaan dari dunia usaha, sertifikat yang diberikan panti tidak mampu merubah stigma tersebut. Bagi eks WBS yang sudah menguasai keterampilan yang diberikan, belum bisa membuka usaha sendiri, karena masih membutuhkan modal cukup besar dibandingkan dengan modal yang diberikan panti, seperti lahan, sewa lahan, peralatan yang lebih lengkap, materi. Pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan panti baru mampu menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi gelandangan dan pengemis.

Saran: Untuk memaksimalkan kemampuan pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial khususnya dalam pelaksanaan asesmen terhadap gelandangan dan pengemis, maka perlu mengikutsertakan pekerja sosial dalam diklat

husus tentang pelaksanaan asesmen, sehingga selain pelaksanaan asesmen dapat dilakukan oleh pekerja sosial sesuai dengan kaidahnya, pekerja sosial juga dapat membuat instrumen asesmen yang baku. Dalam melaksanakan pembinaan lanjut, PSBKPL perlu menyusun panduan teknis yang dapat memperjelas pengertian dan pelaksanaan pembinaan lanjut, sehingga pelaksanaan pembinaan lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Kemudian perlu memaksimalkan peran pekerja sosial, selain sebagai pelaksana di lapangan, juga dalam penyusunan laporan lengkap, menganalisa permasalahan dan kebutuhan eks WBS, sehingga hasil pembinaan lanjut dapat Direktorat tindaklanjuti sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi eks WBS. Mengingat pembinaan lanjut adalah merupakan salah satu tahapan pelayanan dan rehabilitasi yang berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup gepeng, maka perlu mendapatkan perhatian yang proporsional, baik dari segi lama waktu pelaksanaan, anggaran, sarana dan prasarana lain. Kemudian agar WBS dapat mengembangkan potensi dirinya di daerah asal, maka pada tahap sosialisasi dan rehabilitasi sosialialisai, PSBK perlu lebih menggali potensi daerah asal baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang bisa dimanfaatkan dalam menunjang mengembangkan potensi WBS ketika kembali ke masyarakat. Selanjutnya perlu memastikan atau menegaskan kerjasama dengan instansi pengirim dan dinas sosial setempat untuk memfasilitasi eks WBS dalam mengembangkan potensinya di daerah asal, sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, seperti menyediakan tempat usaha atau membantu eks WBS dengan menghubungkan dengan sumber yang relevan. Untuk memaksimalkan hasil pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis, maka perlu kerjasama penanganan permasalahan WBS baik antar unit kerja dilingkungan Kementerian Sosial seperti dengan Direktorat Pemberdayaan Keluarga, Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Banjamsos, secara bersama melakukan pelayanan dan pemberdayaan terhadap WBS dan eks WBS yang telah mengikuti rehabilitasi di PSBKPL,

sehingga permasalahan yang dihadapi eks WBS secara tuntas dapat direktorat tanggulangi dan pada akhirnya terlepas dari kemiskinan yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan dan pengemis.

Pustaka Acuan

Departemen Sosial RI, Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 *Tentang Standart Panti Sosial*: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Departemen Sosial RI. (2006). *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sistim Panti*, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial. Dirktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Departemen Sosial RI, (2007). *Standard Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Direk-

torat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial. Dirktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Fahrudin, A. (2011). *Kesejahteraan Sosial. Sebuah Pengantar*, Jakarta: P3KS Press.

Kementerian Sosial RI, (2011). *Data Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pusdatin Kesos

Moleong, JL, (2004). *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Republik Indonesia, (1983). Keputusan Presiden RI Nomor 40/1983 Tentang *Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*.

Soetarso. (1992). *Praktek Pekerjaan Sosial*, Bandung : Koperasi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial

Peran LKM-Kube Sejahtera 14 dalam Pemberdayaan Masyarakat ***The Role of LKM-Kube Sejahtera 14 on Community Empowerment***

Kissumi Diyanayati dan Suryani

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl. Kesejahteraan Sosial nomor 1 Nitipuran Yogyakarta. email: <diyanasasongko@yahoo.com>.
email: <yanthi_ys@yahoo.com>. Diterima 12 Maret 2014, direvisi 11 April 2014, disetujui 5 Mei 2014.

Abstract

The research on the role of LKM-Kube Sejahtera 14 on community empowerment is done in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Territory. The research method is qualitative-descriptive with 22 Respondents as data resources from 10 LKM-Kube and Kube. Data are gathered through interview, observation, and documentary analysis. Data are analysed in qualitative technique through Mile and Huberman model. The result shows that LKM-Kube is able to hold the role as mediating institution between government (Social Agency) and community (Kube members), also among the members of the community its self. LKM-Kube Sejahtera 14 are able to hold its function as complement institution that run funding activities where the government has not done yet intensively in saving and credit development for its members. The institution is also able to hold its function as subsidiary institution, as a partner that support community empowerment designed by government, especially rural poor community through Kube. Members of Kube are able to improve their social welfare, in case of their income, ability to send their children to school, get access to health service, and renovate their houses. the success of LKM Kube Sejahtera 14 still need to be enhanced with related government agencies guidance.

Keywords:

Mediating Institution-Community Empowerment-LKM-Kube

Abstrak

Penelitian tentang peran lembaga mediasi dalam pemberdayaan masyarakat di lakukan pada LKM-Kube Sejahtera 14 Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data sebanyak 22 orang yang berasal dari pengurus 10 Kube dan LKM-Kube. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan, LKM-Kube mampu berperan sebagai lembaga mediasi antara pemerintah (Dinas Sosial) dengan masyarakat (anggota Kube), dan antar masyarakat sendiri (mampu dengan tidak mampu). LKM-Kube Sejahtera 14 mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga komplementer bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang tidak atau belum digarap secara intensif oleh pemerintah dalam bentuk tabungan masyarakat dan pemberian pinjaman bagi anggota. Lembaga ini juga mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga subsider, yakni berperan sebagai mitra yang mendukung dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai program yang dirancang pemerintah, terutama pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan melalui kelompok usaha bersama (Kube). Anggota Kube mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya, dilihat dari peningkatan pendapatan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan mengakses layanan kesehatan, dan kemampuan merenovasi rumah tinggalnya. Keberhasilan LKM-Kube Sejahtera 14 masih perlu ditingkatkan dan mendapatkan pembinaan dari instansi terkait.

Kata kunci:

Lembaga Mediasi-Pemberdayaan Masyarakat-LKM Kube

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan masalah kemiskinan merupakan salah satu wujud dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan

pernah digulirkan seperti Bantuan Presiden (Banpres), Bantuan Desa (Bandes), IDT, Raskin, dalam realitanya belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah kemiskinan. Belum terentasnya permasalahan kemiskinan bisa jadi bukan karena sedikitnya program penanganan kemiskinan tetapi lebih disebabkan tidak atau belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program penanggulangan kemiskinan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga sosial.

Kemiskinan merupakan fakta sosial yang bergerak dinamis sesuai dengan sistem sosial. Sebagai fakta sosial, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai masalah sosial yang multidimensional. Fluktuasi angka kemiskinan sangat terkait dengan kondisi sosial politik. Terkadang kemiskinan menjadi isu politik khususnya dalam proses pembangunan. Artinya, angka kemiskinan akan menjadi sangat besar jumlahnya pada saat pembangunan dan pendanaan membutuhkan data tentang kemiskinan, sebaliknya kemiskinan menjadi tertangani secara signifikan pada saat dilakukan evaluasi atas program penanganan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 mencapai 32,53 juta (14,15 persen) dan pada bulan yang sama tahun 2010 turun menjadi 31,22 juta (13,33 persen) dari total penduduk. Menurut wilayah, pada Maret 2009 wilayah perkotaan mencapai 11,91 juta dan perdesaan mencapai 20,62 juta. Pada Maret 2010 penduduk miskin wilayah perkotaan 11,10 juta dan perdesaan turun tinggal 19,93 juta (BPS-Kompas, 12 Juli 2010). Jika dilihat jumlah rumah tangga miskin di Provinsi DIY tercatat sebanyak 476.744, menempati urutan 15 secara nasional. Jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah terlihat dalam Tabel 1.

Dilihat persebaran per kabupaten/kota, angka tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul, disusul Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, dan Yogyakarta. Urutan tersebut tidak mencerminkan bahwa kabupaten dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak secara otomatis menempati urutan pertama karena jumlah keseluruhan tu-

mah tangga sebagai pembanding tidaklah sama, apabila dilihat secara persentasi urutannya akan berbeda. Data Tabel 1 semata-mata hanya memberi gambaran angka absolut jumlah rumah tangga miskin dan persebarannya, tidak serta merta merupakan gambaran tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah bersangkutan. Hal ini perlu diungkap karena sering terjadi bias pengertian antara kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber matapencaharian atau mempunyai tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan pokok meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah kemiskinan dengan berbagai program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat. Berbagai program penanggulangan kemiskinan memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan penekanan pada Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Penanggulangan kemiskinan melalui program Kube dengan UEP diarahkan untuk:

1. Mengubah sikap dan tingkah laku sosial maupun ekonomi

Tabel 1. Persebaran penduduk miskin dan fakir miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2011

Kab/Kota Jumlah	Miskin	Hampir Miskin	Mendekati Miskin	Rentan Miskin	
Kulonprogo	13.734	15.542	22.281	16.636	68.193
Bantul	45.176	33.995	38.960	23.373	141.506
Gunungkidul	34.734	33.546	38.538	23.449	130.267
Sleman	31.300	22.934	25.612	22.032	101.878
Yogyakarta	5.300	6.243	9.385	13.872	34.900
Jumlah	130.246	112.260	134.776	99.462	476.744

Sumber: PPLS 2011 dalam KR, 12 Januari 2013

2. Memberikan motivasi agar mempunyai kesadaran dan tergerak akan potensi yang dimiliki sehingga mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi masalah, dan mampu menampilkan peran sosialnya melalui bimbingan sosial.
3. Bimbingan keterampilan usaha
4. Pemberian bantuan stimulan modal kerja atau sarana berusaha
5. Pendampingan sosial yang berasal dari masyarakat (PSM, Karang Taruna, Orsos) atau dari petugas fungsional.

Program ini dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin dan lingkungan tempat tinggalnya untuk meningkatkan kesejahteraan, interaksi dan atau kerjasama dalam kelompok, pendayagunaan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, penguatan budaya kewirausahaan, pengembangan akses pasar, dan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Kube sebagai program percepatan penanggulangan masalah kemiskinan selanjutnya diarahkan dan diintegrasikan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditujukan untuk memperkuat organisasi pengelola keuangan, pengelolaan simpan pinjam, peningkatan peranserta warga mampu dalam menangani kemiskinan, pengembangan kemitraan, peningkatan akses Kube terhadap mekanisme perbankan, dan memajukan LKM sebagai embrio koperasi.

Penanggulangan kemiskinan tidaklah mudah karena kemiskinan telah menimbulkan berbagai masalah seperti keterbatasan dalam pendidikan, keterampilan, kemampuan berusaha, dan kepemilikan sarana usaha. Menyimak kondisi tersebut, pola penanganan yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan harus mampu mengintegrasikan langkah-langkah dalam mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Penanganan kemiskinan dengan konsep pemberdayaan adalah suatu upaya yang memposisikan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka dituntut aktif dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada perbaikan kesejahteraan dan memberikan apresiasi yang layak terhadap sumber potensi dirinya. Program Kube dan LKM yang dilakukan melalui model pemberdayaan

dengan mengedepankan tanggung jawab bersama dan kemudahan akses modal usaha merupakan salah satu alternatif penanggulangan masalah kemiskinan. Harapan program dan strategi yang diinisiasi pemerintah ini agar masyarakat miskin dapat memahami masalah yang dihadapi dan mencari solusi penyelesaian dengan mendayagunakan sumber potensi diri dan lingkungan. Tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini sebatas sebagai inisiator dan fasilitator.

Berdasar uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peran LKM-Kube sebagai lembaga mediasi dalam pemberdayaan masyarakat? Tujuan yang akan dicapai adalah mengetahui peran LKM-Kube dalam pemberdayaan masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat mampu. Lokasi penelitian dilakukan di LKM-Kube Sejahtera 14, Kecamatan Playen. Kecamatan ini menempati urutan pertama jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, yakni mencapai 6.875 dari 16.582 rumah tangga yang ada.

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”. Dengan demikian kata daya tidak saja berarti “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo, 2007). Sejalan dengan pendapat tersebut, Payne mendefinisikan pemberdayaan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya, guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka. Tindakan pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk mendayagunakan sumber potensi yang dimiliki dan yang ada di sekitarnya untuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Agnes (2004) memberikan batasan, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Edi Suharto (2005) memberi batasan, pemberdayaan sebagai upaya menyediakan sumber

daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masa depan sendiri dan mengambil bagian dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemberdayaan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan *power* masyarakat yang kurang beruntung dan dimaknai sebagai upaya pengembangan, kemandirian, keswadayaan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat khususnya lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan. Pemberdayaan dapat bermakna, melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah atau tidak beruntung. Penjelasan yang lain, bahwa pemberdayaan memiliki dua kecenderungan:

- a. Kecenderungan primer: kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu semakin berdaya.
- b. Kecenderungan sekunder: kecenderungan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan/keberdayaan guna menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog (Oakley dan Marsden dalam Priyono, 1996: 34)

Upaya pemberdayaan ditujukan untuk kemandirian, yaitu kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia tidak tergantung pada bantuan atau kederewanan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, yakni suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi, dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan atau mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada upaya orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan

yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan merupakan suatu “proses menjadi” bukan “proses instan” (Wrihatnolo, 2007). Sebagai suatu proses, pemberdayaan perlu melalui tiga tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap pertama, sasaran yang hendak diberdayakan diberi pencerahan berupa penyadaran bahwa mereka berhak untuk mempunyai “sesuatu” dan dapat menjadi berdaya. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari permasalahan yang dialami. Upaya pemberdayaan dalam tahap ini berupa pemberian pengetahuan yang bersifat kognitif, *belief*, dan *healing* dengan target mereka menyadari dan memahami memang perlu diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam tahap ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial (PBS) yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, serta memotivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. PBS dilakukan pada baik individu maupun komunitas yang sengaja dibentuk seperti kelompok usaha bersama (Kube).

Tahap kedua, berupa pengkapasitasan yang juga sering disebut dengan istilah “*capacity building*”, dalam bahasa sederhana yakni memampukan, *enabling*. Pengkapasitasan di sini dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Pengkapasitasan masyarakat miskin misalnya, dapat dilakukan dalam bentuk mengelompokkan mereka dalam suatu usaha bersama (Kube). Mengelompokkan dalam suatu jenis usaha yang dikelola secara bersama-sama disesuaikan dengan sumber potensi yang tersedia, serta mendapat pendampingan, diharapkan anggota memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pengkapasitasan pada kelompok mampu dilakukan dengan penumbuhan kepedulian untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang beruntung. Terkait dengan LKM-Kube, kepedulian masyarakat mampu diwujudkan dengan penyertaan modal atau tabungan yang akan dipinjamkan pada anggota Kube. Kepedulian juga bisa dimanifestasikan dalam bentuk

kegiatan yang langsung untuk kemajuan Kube seperti bimbingan keterampilan usaha, manajemen, dan pemasaran hasil.

Tahap ketiga, berupa pendayaan sistem nilai. Dalam hal ini sasaran pemberdayaan adalah aturan main yang disepakati. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kube menyangkut tata tertib dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan (*planning, organizing, actuating, controlling*). LKM-Kube, aturan main dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga merupakan sistem nilai yang disepakati dan mesti ditaati baik oleh semua pengurus maupun anggota. Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka penguatan kapasitas untuk pemenuhan kesejahteraan sedikitnya dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan teknokratis yakni pendekatan yang diawali dengan menetapkan program, kelompok sasaran, sistem penyaluran, pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada daerah-daerah relatif miskin dengan sumberdaya manusia yang masih lemah. Sehingga memerlukan program pemberdayaan yang lebih bersifat *top down*. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat sasaran dalam perencanaan, pendekatan ini mempunyai kelemahan, yakni seringkali tidak menyentuh kebutuhan riil mereka.

Kedua, pendekatan partisipatif yang memfokuskan kegiatan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang umum dikenal sebagai suatu proses usaha memperkuat kemandirian (*community self-reliance*). Masyarakat dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk menganalisis mulai dari masalah yang dihadapi, solusi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber potensi yang dimiliki, dan menciptakan aktivitas dengan kemampuan sendiri. Inisiatif masyarakat menjadi faktor penting yang mendasari keputusan suatu program kegiatan. Peran pemerintah sebatas sebagai fasilitator sementara pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri. Kube merupakan program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara

partisipatif untuk mengenali masalah dan kebutuhan, serta sumber dan potensi yang dapat di-dayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. LKM-Kube, program pembentukan LKM yang beranggotakan Kube diinisiasi pemerintah dengan melibatkan Kube yang sudah terbentuk terlebih dahulu sebagai anggota awal LKM. Baik Kube maupun LKM-Kube merupakan pemberdayaan masyarakat yang mengombinasikan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yakni pengembangan (*enabling*), memperkuat posisi atau daya (*empowering*), dan tercapainya kemandirian (*selfsustained*). Bertitik tolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak terbatas dilakukan pada masyarakat yang *powerless*, tetapi juga bagi masyarakat yang memiliki daya dan mandiri (*powerfull*) untuk mau membagi kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan dan strategi dalam pengentasan kemiskinan sangat erat dengan proses pemberdayaan terhadap individu, kelompok, masyarakat miskin yang tergabung dalam Kube. Proses pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian, diharapkan mereka mampu menata kehidupannya secara lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidupnya. Pemberdayaan juga berlaku bagi anggota masyarakat yang relatif telah sejahtera, yakni dengan menyadarkan mereka untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang ada di lingkungannya. Anggota masyarakat mampu dapat menanam saham sebagai modal usaha LKM-Kube yang disalurkan bagi pengembangan usaha ekonomis anggota Kube dan masyarakat sekitar.

2. LKM-Kube sebagai Lembaga Mediasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan pada masyarakat lapisan bawah sangat jamak menggunakan lembaga mediasi yang berperan sebagai mediator antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam istilah sosiologis, lembaga mediasi (*mediating structure*) merupakan lembaga sosial

yang memiliki posisi di antara wilayah kehidupan individu yang bersifat privat dengan lembaga yang berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga mediasi merupakan sarana untuk memberdayakan individu agar tidak mengalami keterasingan/keterpinggiran dalam menghadapi realitas makro seperti dominasi perusahaan korporasi, konglomerasi, dan birokrasi pemerintahan (Heru Nugroho, 2001).

Lembaga mediasi dapat dilihat sebagai sarana transfer dari makna privat ke publik atau sebaliknya. Lembaga mediasi merupakan jembatan antara individu atau masyarakat yang *powerless* dalam menghadapi kekuatan besar dalam lingkup kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Demikian pula sebaliknya, lembaga mediasi merupakan kepanjangan tangan dari kekuatan besar dalam menansfer kebijakan yang tidak mungkin dilakukannya sendiri. Posisi strategis yang dimiliki lembaga mediasi tersebut cenderung mengurangi alienasi bagi individu dan mengurangi ancaman keberadaan *public orders*. Berger dan Neuhaus menunjuk pada lembaga keluarga, ketetanggaaan, keagamaan, dan asosiasi keswadayaan merupakan contoh konkrit dari lembaga mediasi tersebut (Heru Nugroho, 2001: 204).

Pendayagunaan lembaga mediasi dalam kebijakan publik akan menghindari kecenderungan pemegang kekuasaan pengambil kebijakan bertindak *coercive* atau masyarakat melakukan penolakan sampai terjadi anarkhi atas kebijakan yang dituangkan dalam program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran lembaga mediasi dapat dipandang sebagai agen pembangunan. Teori strukturasi menjelaskan hubungan dialektika atau saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. Ibarat dua sisi mata uang logam, agen dan struktur keduanya tidak dapat dipahami secara terpisah. Hal ini sejalan dengan pendapat Giddens yang menyatakan bahwa, agen dan struktur adalah dwi rangkap dengan asumsi tindakan sosial memerlukan struktur dan struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tidak terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer, Goodman, 2003).

Inti dari teori Giddens terletak pada pemikiran tentang struktur yang didefinisikan sebagai properti yang memungkinkan bagi penyelenggaraan praktik kegiatan secara terus menerus hingga berbentuk sistemik. Struktur hanya akan terwujud jika ada aturan dan sumberdaya melalui aktivitas manusia sebagai agen. Dalam penelitian ini keberadaan LKM-Kube merupakan agen sekaligus struktur yang diharapkan mampu membawa peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sosial tidak semata-mata akan tercapai hanya dengan keberadaan LKM-Kube, tetapi anggota yang mendapatkan bantuan dan tergabung dalam Kube juga turut menentukan keberhasilan LKM-Kube dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Lembaga keuangan mikro (LKM) mempunyai potensi alternatif penting dalam pemberdayaan masyarakat, baik melalui pendekatan teknokratis maupun pendekatan partisipatif. Lembaga ini memiliki ciri-ciri dan keunggulan komparatif yang lebih sesuai untuk menjangkau masyarakat lapisan bawah. Pertama, LKM umumnya berasal, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, telah terjalin hubungan akrab antara LKM dengan sasaran kegiatan baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Interaksi sosial semacam ini sangat efektif untuk menjelaskan berbagai kebijakan sehingga memungkinkan masyarakat dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Kondisi ini menjadi pilar penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Posisi LKM menjadi agen perubahan terutama yang terkait dengan masalah pembiayaan, baik dalam konteks menjembatani kemauan pemerintah dan keinginan masyarakat maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah.

Kedua, LKM pada umumnya dikelola oleh orang yang memiliki motivasi cukup tinggi untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah, motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lapisan bawah mampu menumbuhkan kreativitas dan lebih fleksibel dalam

menghadapi masyarakat sasaran kegiatannya. Kegiatan yang diprogramkan dapat diubah atau dijadwal kembali sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. LKM digerakkan dengan semangat memberdayakan masyarakat dengan mengedepankan proses serta mengutamakan pelayanan dan keberlanjutan.

Ketiga, LKM merupakan himpunan masyarakat yakni antara pengelola dan nasabah yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kondisi ini memungkinkan mereka saling mengenal dan saling mengetahui, sehingga memungkinkan mereka saling belajar mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan usaha. Berbagai pengalaman merupakan hal yang sangat berharga untuk menghindari kesalahan yang sama di masa datang. Jumlah anggota yang tidak terlalu besar juga memungkinkan LKM lebih efektif dalam melakukan aktualisasi dan pengendalian terhadap prioritas kegiatannya, sehingga jika di tengah jalan ditemukan hal yang menghambat keberhasilan, dapat segera dilakukan revisi.

Keterlibatan LKM dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua fungsi. Pertama, bersifat komplementer, yakni bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang karena alasan tertentu tidak digarap atau masih belum digarap secara intensif oleh pemerintah. Fungsi komplementer ini menempatkan LKM menjadi institusi alternatif bukan dalam arti cadangan atau pengganti akan tetapi menjadi institusi pilihan tempat masyarakat menaruh dan mempertaruhkan harapan bagi pengembangan usahanya. Kedua, bersifat subsider atau peran tambahan dalam arti sebagai institusi yang memberikan *support*, menunjang atau menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang pemerintah. Kedudukan LKM bukan sekedar kepanjangan tangan pemerintah tetapi menjadi *partner* yang mampu memberi masukan dan kontrol atas kebijakan pemerintah.

Peran serta LKM-Kube dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya bidang kesejahteraan sosial yang telah terwadahi dalam suatu organisasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diyakini banyak pihak telah

menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah. Keberhasilan pembangunan menyaratkan adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek. Dalam konteks *good governance*, partisipasi merupakan salah satu bagian dari tiga elemen penting selain transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dapat dimaknai sebagai jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik, dan sosial ekonomi.

Mubyarto (1988) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat bukan sebuah proses mobilisasi tetapi sikap sukarela untuk membantu keberhasilan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat pada dasarnya juga meningkatkan posisi mereka karena dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan publik menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Juliantara (2002) yang menyatakan, bahwa substansi partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dengan tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam mengenali permasalahan dan sumber potensi yang ada pada diri dan lingkungannya merupakan prasyarat tumbuhnya partisipasi, diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat memiliki daya dan kuasa dalam memahami permasalahan dan mampu mendayagunakan sumber potensi baik yang ada pada diri mereka maupun lingkungan.

LKM-Kube keberadaannya sesuai dengan tujuan pengembangan partisipasi karena dibentuk oleh dan untuk masyarakat meskipun peran pemerintah sebagai fasilitator tidak mungkin diabaikan. Anggota memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas peningkatan kesejahteraan dan kemajuan LKM-Kube. Asas

kekeluargaan dan kebersamaan akan memudahkan dalam mengatasi persoalan baik yang berasal dari intern anggota dan organisasi maupun di luar organisasi (ekstern), dibanding harus dihadapi secara mandiri.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini sebagai penelitian deskriptif, yang berupaya menggambarkan yang dilakukan LKM-Kube Sejahtera 14, Playen dalam memberdayakan masyarakat. Sumber data berjumlah 22 orang berasal dari pengurus LKM dua orang dan 20 orang dari pengurus 10 Kube anggota LKM (dua orang per Kube). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, observasi pada LKM-Kube Sejahtera 14 Playen, dan Kube binaan LKM, serta telaah dokumen atas laporan dan arsip penting. Analisis data dilakukan secara kualitatif, model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007), dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas dengan proses reduksi (*reduction*), penyajian (*display*), dan kesimpulan (*conclusion*). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM-Kube. Penyajian data dilakukan dengan bantuan tabel dan pemaknaan dalam uraian singkat berbentuk teks yang bersifat naratif berasal dari wawancara dengan sumber data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti hasil pengumpulan data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian.

D. Hasil Penelitian: Peranan LKM-Kube dalam Pemberdayaan Masyarakat

LKM Kube Sejahtera 14 Playen didirikan dengan bantuan dana APBD Kabupaten Gunung Kidul dan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang berasal dari APBN tahun anggaran 2011. LKM ini diresmikan tanggal 28 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY, bertempat di Jln Playen Getas KM 1, Tumpak, Ngawu, Playen, Gunungkidul. Pendirian LKM-Kube Sejahtera 14 dimaksudkan sebagai pelaksana program pemberdayaan fakir miskin melalui Pola Terpadu Kube dan LKM-BMT di

daerah Adopsi Desa Miskin (ADEM). Pembentukan berbagai LKM Kube di beberapa wilayah di dasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial nomor 797/SK/BJS/IX/2005 tentang Penetapan dan Pengesahan LKM-Kube Sejahtera sebagai pelaksana program pemberdayaan fakir miskin melalui Pola Terpadu Kube dan LKM-BMT.

Keberadaan LKM-Kube Sejahtera 14 didukung oleh 10 Kube yang ada di lingkungan Kecamatan Playen. Kesepuluh Kube tersebut adalah Amrih Cukup, Bibit Mulya, Handayani 102, Handayani 121, Handayani 122, Kecukupan, Lestari, Lumintu, Urip Lumintu, dan Urip Anyar. Kesepuluh Kube masing-masing beranggotakan 10 orang kepala keluarga dengan kategori keluarga miskin, semuanya bergerak dalam peternakan sapi, baik penggemukan maupun budidaya. Profil kesepuluh Kube anggota sekaligus pendiri LKM-Kube Sejahtera 14 adalah sebagai berikut.

Amrih Cukup, didirikan tahun 2005 beralamat di Dusun Menggoran 1, Desa Bleberan, Kecamatan Playen. Kegiatan awal berupa peternakan sapi berupa bantuan dari Kementerian Sosial yang diserahkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul. Dalam perkembangannya, kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas peternakan sapi tetapi juga arisan dan simpan pinjam yang dilakukan dalam pertemuan rutin bulanan setiap tanggal 10. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga permasalahan yang dihadapi, baik kelompok maupun individu dan dicarikan cara penyelesaiannya. Dari usaha ternak sapi, anggota Kube mendapatkan hasil anakan sapi dua sampai tiga kali. Kelompok ini telah memiliki kekayaan enam juta rupiah hasil dari simpanan wajib anggota sebesar Rp. 5.000,- yang dikumpulkan pada waktu pertemuan rutin bulanan dan jasa pinjaman uang kas yang dimanfaatkan oleh anggota kelompok.

Bibit Mulyo, didirikan pada tahun 2005 beralamat di Dusun Dengok VI, Desa Dengok. Kube ini bergerak dalam usaha ternak sapi. Kegiatan berkembang dengan simpan pinjam dan arisan yang dilakukan saat pertemuan rutin setiap bulan pada tanggal 5. Sampai saat ini telah terkumpul modal kelompok sekitar lima juta rupiah yang berasal dari iuran wajib dan

jasa hasil dari simpan pinjam anggota kelompok. Kelompok ini juga mengadakan kerja kelompok dalam meringankan anggotanya. Dalam meningkatkan ekonomi keluarga, istri anggota Kube membuat keripik pisang yang dititipkan pada warung-warung terdekat. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosial seperti kerja bakti, menjenguk orang sakit, melayat serta membantu apabila ada anggota warga yang mempunyai hajatan. Dalam rangka membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, di antara anggota Kube sudah terbiasa saling bekerjasama dalam mengolah sawah atau lahan pertanian.

Handayani 102, beralamatkan di Dusun Ngasemrejo, Desa Ngawu, Playen. Kelompok ini berdiri pada tahun 2006, bergerak dalam pengembangan usaha ternak sapi. Kelompok ini berdiri atas dasar keinginan serta kemauan warga dengan tujuan sebagai tempat penyalur aspirasi anggota. Kegiatan lain yang dilakukan adalah simpan pinjam dan arisan yang dilaksanakan pada pertemuan rutin bulanan setiap tanggal 6. Kube ini telah memiliki modal sekitar tujuh juta rupiah yang berasal dari iuran wajib Rp 5.000,- per bulan dan jasa pinjaman anggota. Masing-masing anggota sudah mendapatkan anakan sapi sebanyak dua kali. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosial, seperti kerja bakti di lingkungan sekitar, membantu hajatan dan membangun rumah tetangga. Sifat gotong royong dalam kelompok ini masih dilestarikan, tujuannya untuk meringankan beban anggota.

Handayani 121, beralamatkan di Dusun Ngunut Lor, Desa Ngunut yang didirikan pada tahun 2006. Kelompok ini mengembangkan usaha ternak sapi sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan menopang kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dan semakin mahal. Kegiatan yang dilakukan kelompok ini antara lain mengadakan pertemuan rutin yang dilaksanakan pada tanggal 5 setiap bulannya. Modal usaha yang berasal dari iuran wajib anggota dan jasa simpan pinjam telah mencapai sekitar lima juta rupiah. Kelompok ini juga memiliki usaha pembuatan keripik pisang dan emping melinjo yang melibatkan isteri dalam produksi dan pemasarannya. Kelompok ini juga melakukan kegiatan sosial seperti menjenguk orang

sakit bagi anggota, kerja bakti, gotong royong, dan membantu orang yang sedang mempunyai hajatan, mengadakan simpan pinjam dan arisan serta kerja gotong royong dalam mengerjakan lahan pertanian. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran dan tidak dipungut biaya bagi anggota kelompok yang mendapatkan jatah giliran.

Handayani 122, beralamatkan di Dusun Ngunut Lor, Desa Ngunut berdiri pada tahun 2006 yang bergerak dalam pengembangan usaha ternak sapi. Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok ini antara lain simpan pinjam, arisan dan juga kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan pertemuan dalam kelompok dilaksanakan tanggal 10 setiap bulannya dengan agenda arisan, simpan pinjam, dan memecahkan masalah yang dihadapi anggota. Modal kelompok terkumpul sekitar tujuh juta rupiah yang digunakan untuk pengembangan usaha anggota melalui simpan pinjam dengan batas waktu pengembalian 10 bulan. Kube ini juga mengadakan kerja kelompok dengan tujuan untuk meringankan anggotanya dalam mengerjakan ladang dengan cara bergiliran, tetapi tidak dipungut biaya hanya menyediakan makan untuk anggota kelompok.

Kecukupan, didirikan pada tahun 2008 yang beralamatkan di Dusun Menggoran, Desa Bleberan dengan usaha yang dikembangkan ternak sapi. Kube ini juga melakukan kegiatan pertemuan rutin dilaksanakan tanggal 7 setiap bulannya, diisi dengan simpan pinjam dan arisan. Sampai saat ini telah terkumpul modal usaha sebesar lima juta rupiah. Masing-masing anggota telah memiliki setidaknya dua ekor sapi. Kelompok ini mempunyai kegiatan sosial seperti menjenguk orang sakit, melayat dan membantu warga di lingkungan sekitar yang sedang mempunyai hajatan. Kelompok ini mengambil nama kecukupan dengan maksud agar dalam kehidupan dan usaha yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Kelompok ini juga mengembangkan industri rumah tangga pembuatan kripik yang dilakukan oleh istri anggota Kube, kegiatan tersebut selain untuk mengisi waktu luang juga menambah penghasilan keluarga.

Lestari, di dirikan pada tahun 2004, beralamat di Dusun Toboyo, Desa Plembutan, Kecamatan Playen yang bergerak dalam bidang usaha ternak sapi. Kube ini juga menjalankan berbagai kegiatan seperti Kube lainnya, yakni simpan pinjam, arisan dan kegiatan sosial seperti membesuk orang sakit, kerja bakti dan juga melayat apabila ada warga yang meninggal. Pertemuan rutin Kube Lestari dilakukan setiap tanggal 10 untuk setiap bulannya. Modal usaha yang dikumpulkan dari iuran wajib dan jasa pinjaman anggota telah mencapai sekitar tujuh juta rupiah. Rata-rata anggota telah memiliki dua-tiga ekor sapi hasil pengembangan dari modal awal yang diperoleh dari dinas sosial. Beberapa anggota kelompok ini juga mengembangkan usaha warung, baik di rumah maupun di pasar.

Lumintu, didirikan pada tahun 2004 yang beralamat di Dusun Plembutan Timur, Desa Plembutan, Kecamatan Playen. Usaha yang dikembangkan adalah ternak sapi. Kelompok ini juga mengadakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 8 dengan kegiatan simpan pinjam, arisan, dan memecahkan masalah bila salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini, kelompok telah memiliki modal usaha sekitar sembilan juta rupiah, yang berasal dari iuran wajib anggota yang dikumpulkan sebesar Rp 5.000,- per bulan, jasa pinjaman, dan jasa kerja kelompok. Kerjasama antaranggota kelompok dalam mengerjakan sawah atau lahan pertanian dilakukan dengan pemberian upah di bawah standar upah pada umumnya, yakni Rp 25.000,- per hari. Dari upah tersebut, yang Rp 5.000,- dimasukkan dalam tabungan atas nama yang bersangkutan, dan sisanya Rp 20.000,- dibawa pulang. Sistem ini mengajarkan masyarakat khususnya anggota kelompok untuk menabung, dengan cara menyisihkan sebagian hasil usahanya.

Makmur Lumintu, beralamat di Dusun Nogosari, Bandung, Kecamatan Playen, didirikan pada tahun 2005 dengan jenis usaha mengembangkan ternak sapi yang sesuai dengan kondisi alam sekitar yang mendukung bagi pengembangan usaha ternak. Kelompok ini juga mempunyai kegiatan simpan pinjam, dan arisan yang diselenggarakan pada pertemuan rutin

bulanan setiap tanggal 5. Modal usaha yang berasal dari iuran wajib Rp 5.000,- per bulan dan jasa pinjaman anggota sampai saat ini telah terkumpul sekitar delapan juta rupiah. Rata-rata anggota telah menikmati anakan sapi antara dua-tiga kali. Bagi anggota yang tidak memiliki keperluan mendesak, sapi tersebut dipelihara sampai berkembang biak menjadi tiga-empat ekor. Anggota yang memiliki keperluan, dapat menjual anakan sapinya

Urip Anyar, beralamat di Dusun Tanjung 1, Desa Bleberan, Playen yang didirikan pada tahun 2004. Kegiatan rutin dalam kelompok ini antara lain simpan pinjam, arisan dan kegiatan sosial. Modal usaha sekitar sembilan juta rupiah yang berasal dari iuran wajib, jasa pinjaman, dan denda ketidakhadiran anggota pada pertemuan rutin. Tujuan diadakan pertemuan rutin antara lain untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan di antara anggota kelompok. Kelompok ini juga membuat perjanjian bagi yang tidak hadir tanpa keterangan akan mendapatkan denda sebesar Rp 1.000,- yang nantinya dimasukkan dalam kas. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar semua anggota dapat menghadiri pertemuan yang telah ditetapkan. Kelompok ini juga mengadakan kerja bakti di lingkungan sekitar, sehingga lingkungan sekitar warga kelihatan bersih dan sehat walaupun banyak warga yang memiliki hewan ternak. Kegiatan yang mereka kembangkan berupa penggembukan ternak sapi.

Kesepuluh anggota LKM-Kube Sejahtera 14 semuanya bergerak dalam peternakan sapi, baik penggembukan maupun budidaya pengembangbiakan. LKM Kube Sejahtera 14 selain bertindak sebagai penyimpan tabungan anggota Kube dan masyarakat sekitar, juga memberikan pinjaman bagi anggotanya. Anggota kesepuluh Kube yang secara otomatis juga merupakan anggota LKM-Kube Sejahtera 14 sangat merasakan manfaat keberadaan lembaga ini, khususnya bagi pengembangan usaha dan pembiayaan yang mendesak, seperti membayar rumah sakit, membayar keperluan sekolah anak, dan hajatan. Pinjaman anggota Kube pada LKM-Kube Sejahtera 14 tidak mensyaratkan adanya agunan, karena pada dasarnya modal awal dari lembaga ini berasal dari anggota Kube yang

dananya berasal dari hibah pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Di samping usaha yang sifatnya ekonomis produktif, kesepuluh Kube juga memiliki kegiatan sosial berupa pertemuan rutin yang diisi dengan arisan, simpan pinjam, dan pembahasan permasalahan yang dihadapi anggota. Gotong royong antarwarga sebagai modal sosial kehidupan masyarakat pedesaan masih hidup subur di wilayah Kecamatan Playen. Gotong royong diimplementasikan dalam kegiatan hajatan, pembangunan rumah, penggarapan ladang dan sawah, dan pembuatan kandang sapi antaranggota kelompok Kube.

LKM-Kube Sejahtera 14 berbentuk koperasi dengan anggota awal seluruh anggota dari 10 Kube yang tergabung, meskipun pengelolaan LKM-Kube dilakukan oleh pengurus harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan staf administrasi, tetapi kewenangan tertinggi ada pada anggota yang dimanifestasikan dalam bentuk rapat anggota tahunan. Tujuan pembentukan LKM-Kube Sejahtera 14 untuk meningkatkan perekonomian khususnya bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Visi lembaga berupa memanfaatkan potensi alam serta pengelolaan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat secara optimal. Visi tersebut dijabarkan dalam misi berupa upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, kreatif, serta inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan. Tujuan, visi, dan misi LKM-Kube Sejahtera 14 sejalan dengan tujuan, kemanfaatan, visi, dan misi pembentukan LKM-Kube Sejahtera secara nasional. Tujuan pembentukan LKM-Kube Sejahtera adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Manfaat keberadaan LKM-Kube Sejahtera adalah sebagai berikut. (1) Meningkatkan kemandirian anggota Kube dengan memanfaatkan pembiayaan modal kerja dari LKM-Kube Sejahtera. (2) Membuka peluang tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha bagi anggota Kube maupun masyarakat sekitar dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. (3) Membangun budaya hidup hemat dengan membiasakan diri menabung secara disiplin di LKM-Kube

Sejahtera. (4) Keberadaan LKM-Kube akan lebih mandiri dan berkelanjutan. (5) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setempat. (6) Kehidupan warga masyarakat lebih cerah, terjamin, dan terencana.

Visi yang ditetapkan oleh penggagas model LKM-Kube Sejahtera adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat dengan kualitas anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sementara misi yang diemban berupa: (1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi. (2) Gerakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi nyata. (3) Kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju. (4) Mewujudkan gerakan keadilan dalam membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan sistem ekonomi yang transparan dan adil.

Sebagai lembaga milik dan dibawah kendali masyarakat setempat secara otomatis keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha LKM-Kube menjadi hak milik masyarakat, maju mundurnya LKM-Kube sangat ditentukan oleh kepentingan, kepedulian, dan kemanfaatan lembaga bagi masyarakat. Modal awal LKM-Kube Sejahtera 14 sebesar Rp 147.500.000,-, berupa setoran dari 10 Kube anggota yang dananya berasal dari pemerintah. Sampai dengan 31 September 2013, aset LKM-Kube Sejahtera 14 telah berkembang menjadi Rp 287.789.100,-. Aset LKM-Kube Sejahtera 14 terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Aset LKM Kube Sejahtera 14

No	luran	Jumlah (dalam rupiah)
1	luran wajib 10 Kube @ 14.750.000,-	147.500.000,-
2	Investasi kantor	67.344.300,-
3	luran wajib anggota non kube	8.550.000,-
4	Simpanan pokok anggota	1.200.000,-
5	Tabungan Masyarakat	63.194.800,-
	Jumlah	287.789.100

Melihat komposisi aset LKM-Kube Sejahtera 14 di atas, dapat dimaknai bahwa mayoritas pemilik aset adalah anggota 10 Kube, berupa iuran wajib dan simpanan pokok. Pembentukan LKM-Kube Sejahtera memang ditujukan menjadi lembaga pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat miskin tanpa dibebani dengan berbagai persyaratan yang memberatkan. Semangat kebersamaan dan kesadaran akan potensi yang dapat dikembangkan apabila masyarakat berkelompok merupakan roh dari Kube dan LKM-Kube. Kegiatan LKM-Kube Sejahtera 14 berupa menggalang dana masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan pinjaman pembiayaan kepada masyarakat untuk usaha produktif dan kebutuhan mendesak, dan memfasilitasi pelatihan pengelolaan manajemen bagi Kube anggotanya.

Masyarakat yang tergabung dalam Kube menanamkan saham pada LKM dalam bentuk tabungan kelompok, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anggota Kube yang telah mampu untuk menanamkan saham secara mandiri. Partisipasi masyarakat non-Kube dalam LKM-Kube Sejahtera 14 berupa simpanan, yakni Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA). Pengelolaan tabungan masyarakat dilakukan dengan sistem koperasi, dengan penerbitan buku sebagai bukti simpanan dan mendapatkan sisa hasil usaha (SHU), yang diperhitungkan setahun sekali menjelang rapat anggota tahunan, bukan jasa bunga sebagaimana tabungan dalam bank. LKM-Kube Sejahtera 14 juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelatihan keterampilan usaha, dan pengelolaan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kube anggota LKM pernah mengikuti diklat manajemen koperasi dan usaha kecil menengah yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi, dan diklat pengembangan kapasitas pengurus serta pengelola UKM yang diselenggarakan oleh dinas sosial bekerjasama dengan pusat inkubasi usaha kecil (PINBUK).

Keberadaan LKM-Kube dirasakan manfaatnya tidak saja oleh anggota Kube tetapi juga masyarakat di wilayah Kecamatan Playen, seperti mendorong kegiatan menabung, membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi

dan kebutuhan mendesak, serta menerima dan mendistribusikan zakat, infaq dan sodaqoh. Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman sangat dirasakan oleh masyarakat meskipun jumlah maksimal perorangan hanya dua juta rupiah dengan batas waktu pengembalian 24 bulan. Pinjaman secara berkelompok (Kube) dapat diberikan maksimal 50 juta rupiah dengan waktu pengembalian 36 bulan. Tanggung jawab pengembalian pinjaman sistem kelompok ada pada seluruh anggota, artinya apabila ada anggota yang tidak mampu mengangsur anggota lainnya harus menutup, bisa juga diambilkan dari uang kas kelompok terlebih dahulu. Pemberian pinjaman secara berkelompok ini seperti pada sistem Gramen Bank di Bangladesh yang digagas oleh Muhammad Yunus. Bedanya, kelompok Kube yang menjadi anggota LKM mayoritas anggotanya laki-laki, sementara kelompok Gramen Bank semuanya perempuan. Asumsi penggagas Gramen Bank, perempuan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dibandingkan laki-laki karena pada dasarnya yang paham akan kebutuhan rumah tangga adalah isteri.

Hasil pemberdayaan Kube dan LKM-Kube dilihat dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan adanya perubahan. Semua responden menyatakan bahwa ada peningkatan pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya. Bapak Amat Jamzuri dari Kube Bibit Mulyo menyatakan berikut. "Pada awal berdirinya LKM saya pinjam uang sebesar 500 ribu rupiah untuk modal usaha keripik pisang yang dikerjakan oleh istri saya. Karena permintaan makin banyak dan pinjaman sudah lunas, saya pinjam lagi sebesar dua juta rupiah yang harus dikembalikan selama 24 bulan. Jumlah penghasilan saya per bulan tidak tentu, akan tetapi yang jelas ada peningkatan, buktinya saya mampu memperbaiki rumah dan menyekolahkan anak." (wawancara, 2013).

Pendapat senada dikemukakan oleh bapak Ngatiman dari Kube Handayani 121. "Pekerjaan saya semula hanya tani, setelah tergabung dalam Kube saya mendapat bantuan seekor sapi. Dalam dua tahun telah berkembang menjadi dua ekor. Setelah terbentuk LKM, awalnya kelompok

mengajukan pinjaman sebesar 50 juta rupiah yang kemudian dibelikan anakan sapi sebanyak 10 ekor. Saat ini saya sudah punya lima ekor sapi. Karena ingin menambah penghasilan keluarga, saya secara pribadi mengajukan pinjaman pada LKM sebesar dua juta rupiah untuk modal usaha pembuatan keripik pisang dan emping melinjo. Alhamdulillah, pinjaman tersebut telah lunas, usaha saya masih berjalan sampai saat ini.” (wawancara, 2013). Dampak program Kube dan keberadaan LKM-Kube terhadap peningkatan pendapatan responden terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi Pendapatan Responden

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1	< Rp 1.000.000,-	4	-
2	Antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	11	7
3	Antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	5	8
4	> Rp 2.000.000,-	2	7

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan responden sebelum tergabung dalam Kube mayoritas antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000,-. Responden yang berpendapatan Rp. 1.000.000,- - Rp 1.500.000,- sebanyak 11 orang (50 persen), dan antara Rp 1.500.000,- - Rp 2.000.000,- terdapat lima orang (22,70 persen). Pendapatan tersebut mereka peroleh dari profesi yang dijalani yakni sebagai tukang kayu atau tukang batu dengan upah rata-rata Rp 45.000,- - Rp 65.000,-. Setelah responden menjadi anggota Kube rata-rata pendapatan mereka meningkat, tidak ada lagi yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- per bulannya. Sebanyak tujuh orang memberikan jawaban masih berpenghasilan antara Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,-, dan 15 orang lainnya mempunyai pendapatan > Rp 1.500.000,-. Peningkatan pendapatan responden diperoleh dari penjualan pupuk kandang dan keuntungan penjualan kripik pisang atau emping melinjo, usaha yang mereka jalankan setelah tergabung dalam Kube dan mendapatkan pembinaan serta pinjaman modal dari LKM-Kube Sejahtera 14.

Peningkatan pendapatan di atas tidak lepas dari ketepatan pemilihan usaha yang disesuaikan dengan sumber potensi wilayah. Kecama-

tan Playen merupakan wilayah dengan kondisi relatif subur, dengan lahan luas berupa hutan lindung, tegalan, dan sawah. Usaha ternak sapi dan kambing sangat cocok dikembangkan mengingat ketersediaan bahan pangan (rumput dan tanaman) cukup banyak. Pengembangan UEP emping melinjo dan keripik pisang berasal dari dua bahan baku yang banyak tersedia di lahan-lahan warga masyarakat. LKM-Kube Sejahtera 14 mampu memotivasi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pengembangan usaha dengan memanfaatkan sumber potensi setempat. Peningkatan pendapatan responden ternyata juga berimplikasi pada peningkatan kemampuan mereka dalam menyekolahkan anak. Hal ini terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kemampuan Responden Menyekolahkan Anak

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1	Sekolah Dasar	22	22
2	Sekolah Menengah Pertama	17	22
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	13	20
4	Perguruan	3	10

Keduapuluhdua responden baik sebelum maupun setelah tergabung dalam Kube semuanya mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang sekolah dasar (SD). Hal ini terkait dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun, dimana semua biaya pendidikan anak mendapat bantuan pemerintah kecuali peralatan pribadi. Walaupun wajib belajar sampai jenjang sekolah menengah pertama, kenyataannya terdapat 5 orang responden yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Alasan utama ketidakmampuan mereka dalam hal pembiayaan transportasi harian, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang responden berikut. “Memang semua biaya sekolah gratis, bahkan jika menunjukkan surat keterangan miskin, anak juga mendapatkan bantuan peralatan pribadi. Akan tetapi jarak rumah dengan SMP begitu jauh dan harus naik angkutan umum atau ojek. Untuk membayar biaya transport harian tersebut yang memberatkan karena penghasilan baru

saya terima setiap hari Sabtu.” Setelah mereka tergabung dalam Kube, semua responden mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang SMP bahkan terjadi peningkatan yang cukup tajam dalam hal kemampuan menyekolahkan anak sampai jenjang SLTA dan perguruan tinggi.

Kemampuan keuangan keluarga, tambahan wawasan dalam setiap pertemuan anggota Kube dan pembinaan dari LKM-Kube dan dinas sosial setempat, serta pergaulan yang semakin luas dengan dunia luar terkait dengan usaha yang ditekuni mampu mengubah pola pikir terkait dengan pendidikan anak. Semua responden sepakat bahwa pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan masa depan anak. Di samping karena luas lahan yang dimiliki semakin sempit karena pembagian warisan sehingga berdampak pada keterbatasan lahan garapan yang tentunya juga akan berdampak pada pendapatan, responden menginginkan anak-anaknya memperoleh penghasilan dari profesi selain petani dan peternak. Kegiatan pertanian dan peternakan dilakukan sebagai kegiatan sampingan, agar anak-anak mudah mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal kemudian dibekali dengan pendidikan yang memadai.

Di bidang kesehatan, semua anggota Kube mampu mengakses layanan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit umum daerah, baik kabupaten maupun provinsi dengan adanya Jamkesmas dan Jamkesda. Berdasarkan pengakuan responden jika antrian di puskesmas terlalu banyak atau sakit yang memerlukan rawat inap, mereka memanfaatkan rumah sakit swasta yang ada di Kecamatan Playen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sudah sangat memadai. Menurut responden, memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda sangat membantu dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga tidak merasa resah dan gelisah apabila mengalami sakit karena sudah ada jaminan dari pemerintah walau tidak sepenuhnya semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Salah satu responden mengatakan bahwa layanan kesehatan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap manusia dengan

harapan dipermudah dalam pelayanan. Kondisi rumah seluruh anggota 10 Kube (100 orang) hasil wawancara dengan ke 22 orang responden terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Rumah Anggota antara Sebelum dan Sesudah Program Kube

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1	Dinding bambu, lantai tanah	37	10
2	Dinding papan, lantai tanah	34	4
3	Dinding tembok, lantai plesteran	20	35
4	Dinding tembok, lantai ubin	6	10
5	Dinding tembok, lantai keramik	3	41

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang dan berfungsi sebagai tempat berkumpulnya anggota keluarga. Berdasarkan tabel di atas, kondisi rumah anggota sebelum mengikuti program Kube masih ada yang sangat memprihatinkan, berdinding bambu dan berlantai tanah sebanyak 37 orang, setelah bergabung dalam Kube tinggal 10 orang yang berumah dengan kondisi tersebut. Kesepuluh orang yang masih berumah dengan kondisi dinding bambu dan lantai tanah karena masih tinggal di tanah orangtuanya yang belum dibagi waris, sehingga masih ragu-ragu untuk merenovasi menjadi rumah yang lebih layak. Mayoritas anggota Kube mampu merenovasi rumah tinggalnya, bahkan mayoritas sudah memiliki rumah layak huni dengan dinding tembok dan lantai ubin atau keramik. Kemampuan anggota Kube dalam merenovasi rumah tidak lepas dari peningkatan pendapatan keluarga dan keinginan untuk hidup lebih sehat serta layak. Keberadaan LKM-Kube sebagai lembaga yang menerima tabungan dan pemberi pinjaman bagi anggota, mampu berperan sebagai dinamisator pembangunan di wilayah kerjanya.

E. Penutup

Keberadaan program Kube di Kecamatan Playen yang dimulai sekitar tahun 2004-2005 dan pendirian LKM-Kube pada tahun 2010 terbukti telah mampu memberdayakan masyarakat.

Kesepuluh Kube anggota LKM-Kube Sejahtera 14 yang bergerak dalam usaha ternak sapi baik penggemukan maupun budidaya berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga. Diversifikasi usaha juga dilakukan oleh beberapa anggota Kube disesuaikan dengan sumber potensi setempat, seperti pembuatan keripik pisang dan emping melinjo. LKM-Kube Sejahtera 14 berhasil sebagai lembaga mediasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara masyarakat mampu dengan yang kurang mampu. Lembaga ini mampu menggerakkan peranserta masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menabung di LKM-Kube, bagi anggota Kube timbul kesadaran untuk menabung dan mengembangkan usaha yang modalnya mereka peroleh dari pinjaman di LKM-Kube.

Keberadaan LKM-Kube perlu dipertahankan mengingat, pertama sifatnya komplementer, yakni bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang karena alasan tertentu tidak digarap atau masih belum digarap secara intensif oleh pemerintah. Fungsi komplementer ini menempatkan LKM menjadi institusi alternatif bukan dalam arti cadangan atau pengganti akan tetapi menjadi institusi pilihan tempat masyarakat menaruh dan mempertaruhkan harapan bagi pengembangan usahanya. Kedua, bersifat subsider atau peran tambahan dalam arti sebagai institusi yang memberikan *support*, menunjang atau menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dirancang pemerintah. Kedudukan LKM bukan sekedar kepanjangan tangan pemerintah tetapi menjadi partner yang mampu memberi masukan dan kontrol atas kebijakan pemerintah. LKM-Kube masih memerlukan pembinaan agar lebih tertata dan maju, khususnya dari dinas koperasi terkait dengan manajemen pengelolaan, dari dinas sosial perihal bimbingan motivasi pada anggota, serta dinas perindustrian dan perdagangan dalam hal diversifikasi usaha dan jejaring kerja.

Pustaka Acuan

Agnes Sunartiningih, dkk, (2004), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media

Departemen Sosial, (2004), *Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube)*

dan Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta: Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin.

-----, (2005), *Panduan Program Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin.

Dadang Juliantara, (2002), *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Edi Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama

-----, (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia*, Bandung: STKS Press

Heru Nugroho, (2001), *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Istiana Hermawati, dkk, (2011), *Evaluasi Program Kelompok Uaha Bersama*, Yogyakarta: B2P3KS Press

Kementerian Sosial, (2011), *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Maulana Ibrahim, (2003), *Kerangka Hukum Dalam Memperkuat dan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, dalam *Kemiskinan dan Keuangan Mikro*, Jakarta: Gema PKM Indonesia

Midgley, James, (2005), *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Diperta Depag RI

Mubyarto dan Kartodirdjo, S, (1988), *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Onny S Prijono & A.M.W Pranarka, (1996), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS

Randy R Wrihatnolo, 2007, *Managemen Pemberdayaan*, Jakarta: Elex Competindo

Ritzer, George dan Dougglas J. Goodman, 2003, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media

Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Pengembangan Produk Unggulan melalui Program Inkubasi dalam Pembangunan Perdesaan di Provinsi Riau

The Development of Leading Product through Incubation Program in Rural Development, Riau Province

Kurnia Novianti¹ dan Saiful Hakam²

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI). No HP 085714448343.
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI).² No HP 081578112793.
Gedung Herbarium Lantai 4, Jl Ir Juanda 22. Diterima 17 Maret 2014, direvisi 20 Mei 2014, disetujui 9 Juni 2014.

Abstract

Rural areas, as the areas that have been the most targeted and developed in Indonesia, become the places of interest for social research. A case in Riau revealed that among many natural resources that can be developed, palm oil is still becoming the most attention leading product by local government. This paper is to describe the concept of leading product and its relation with rural development through incubation program that have been activated in that province. This paper also propose a recommendation to the implementors of the program activities with more bottom-up approach, with capacity owned by community so that their commitment in the development process will be optimum. Analysis in this paper will be based on field research conducted in 2013 and literature studies from various resources.

Keywords:

Leading Product-Incubation Program-Rural Development

Abstrak

Perdesaan sebagai sebuah kawasan yang banyak ditargetkan untuk dikembangkan di Indonesia, menjadi lokus yang menarik untuk dikaji. Kasus Riau menunjukkan bahwa diantara banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, kelapa sawit tetap menjadi unggulan yang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Tulisan ini hendak menjelaskan konsep produk unggulan dan keterkaitannya dengan pembangunan pedesaan melalui program inkubasi yang tengah digiatkan di propinsi tersebut. Tulisan ini juga mengusulkan rekomendasi kepada pihak pelaksana kegiatan program pembangunan tersebut dengan pendekatan yang lebih bersifat *bottom-up*; dengan mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi optimal. Analisis dalam tulisan ini mengandalkan data dari penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2013 dan studi literatur dari berbagai sumber.

Kata Kunci:

Produk unggulan-Program Inkubasi-Pembangunan Pedesaan,

A. Pendahuluan

Secara konseptual, produk unggulan merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang dilakukan oleh Hidayat, dkk. tahun 2012 menyebutkan bahwa produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk

dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Logika tentang produk unggulan juga sangat relevan jika diterapkan sebagai pendekatan dalam pemberdayaan kawasan pedesaan. Karakteristik khas kawasan pedesaan, keterbatasan infrastruktur, perilaku ekonomi masyarakat, interaksi sosial, budaya setempat serta masalah keamanan juga akan sangat mempengaruhi pola atau model pemberdayaan kawasan pedesaan.

Produk unggulan menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan desa. Pembangunan ini berorientasi pada kebutuhan lokal, dijalankan secara mandiri oleh desa dengan menggerakkan potensi modal sosial, kearifan dan sumberdaya lokal, misalnya pengaturan tata ruang, pola bercocok tanam, konservasi lingkungan, ataupun distribusi hasil alam kepada masyarakat, yang semakin berkembang dengan orientasi pada perbaikan infrastruktur desa sampai kepada perbaikan dan pemerataan pelayanan publik.

B. Kajian Teori

Sektor Unggulan dalam Pembangunan:

Di Propinsi Riau, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang signifikan, di samping produksi pertambangan minyak dan gas bumi.¹ Delapan dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau masih mengandalkan sektor pertanian sebagai kontributor penting PDRB wilayah, yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Kontribusi sektor pertanian di masing-masing wilayah bervariasi antara 10,2 persen hingga 44,7 persen dari total PDRB wilayah. Dari delapan kabupaten yang unggul di sektor pertanian tersebut, ternyata sebagian besar berasal dari sub-sektor perkebunan. Kontribusi sub-sektor pertanian di keenam kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, dan Rokan Hulu, bervariasi dari 16,9 persen hingga 44,7 persen. Sebenarnya subsektor perkebunan di Kabupaten Siak dan Rokan Hilir juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi, tetapi lebih rendah dari 10 persen total PDRB di masing-masing kabupaten, yakni 6,0 persen dan 9,4 persen (Zainal, 2007).

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan, pemerintah daerah Propinsi Riau telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijakan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR), program kredit koperasi

primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas. Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Riau adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa. Untuk sektor perkebunan Pemerintah Daerah Riau menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah (Syahza, 2005).

Lebih lanjut Syahza (2005) menganalisis bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, yaitu *pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan kelima, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza, 2002).

Oleh karena alasan di atas, maka kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepatnya di daerah Riau.

¹⁾ Secara umum, sektor pertambangan dan penggalan memberikan kontribusi sebesar 41,9 persen terhadap PDRB Provinsi Riau, disusul kemudian oleh sektor pertanian (21,5 persen), dan sektor industri pengolahan (20,1 persen). Kontributor utama di sektor pertambangan dan penggalan adalah Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, dan Rokan Hilir, dengan kontribusi antara 48,0 persen hingga 74,9 persen dari total PDRB di masing-masing wilayah (Zainal, 2007).

Ini disebabkan saat krisis ekonomi dimulai pada pertengahan tahun 1997, sektor perkebunan merupakan penyelamat bagi petani perkebunan khususnya petani kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan sehingga jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi (Saragih, 2001). Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; pertama, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan kedua, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan (Syahza, 2005: 3).

Namun hasil kajian tim melalui penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan September dan Oktober 2012 menunjukkan bahwa penanaman dan industri pengolahan kelapa sawit masih lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, pembangunan kelapa sawit belum memberikan keuntungan secara merata kepada masyarakat pedesaan, terutama petani kecil. Melihat kondisi tersebut, peneliti melihat adanya kesenjangan antara realitas dan harapan; di satu sisi, kelapa sawit menjadi potensi yang sangat menjanjikan karena menyumbang lebih dari 60% kepada PDB Propinsi, sementara di sisi lain kelapa sawit belum mampu memberikan keuntungan secara merata bagi masyarakat. Industri pengolahan kelapa sawit mulai dari hulu hingga ke hilir seharusnya dapat dimanfaatkan oleh desa melalui industri rumah tangga, misalnya pengolahan minyak CPO atau pengelolaan limbah untuk dijadikan energi alternatif.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, tetapi juga menjanjikan keberlanjutan (*sustainability*) bagi desa-desa di Propinsi Riau, dibutuhkan sebuah perencanaan yang komprehensif. Seperti telah disinggung di awal bahwa perencanaan pembangunan kini harus menggunakan paradigma yang tidak hanya mengutamakan kemajuan

secara materil, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Oleh karena itu, produk unggulan yang dimiliki Riau sebagai sebuah wilayah yang memiliki interkoneksi luas dengan wilayah-wilayah di sekitarnya (termasuk kawasan di luar Indonesia) sudah selayaknya dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan karena bagaimanapun, keberhasilan pembangunan nasional tidak akan terwujud apabila pedesaan masih menjadi kawasan yang tertinggal.

Konsep Inkubator Usaha dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Desa: Inkubator usaha secara umum dianggap sebagai suatu bentuk infrastruktur diarahkan untuk mendukung dan memelihara pembentukan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Inkubator usaha merupakan program sangat penting (Allen dan McCluskey, 1990; Barrow, 2001; Sherman dan Chappell, 1998; Smilor dan Gill, 1986). Peran inkubator usaha merupakan suatu organisasi dengan kegiatan khusus serta aspek-aspek rinci tentang sumber-sumber nilai yang menjadi panduan bagi pelaku usaha dan pegiat-pegiat wirausaha, pengaturan organisasi, praktik-praktik kerja, sumber daya, dan jasa dan terutama berfungsi untuk memfasilitasi suatu banda usaha baru untuk melakukan *start-up* dan tumbuh lebih lanjut.

Inkubator usaha merupakan istilah umum untuk setiap organisasi yang menyediakan akses pada ruang kerja/tempat usaha yang terjangkau dan pelayanan administrasi secara terpadu (Allen dan McCluskey, 1990; Fry, 1987). Selama bertahun-tahun program ini dijalankan dengan berbagai label serupa seperti *Business Accelerators* (Barrow, 2001); *Research Parks* (Money, 1970); *Science Parks* (Martin, 1997); *Knowledge Park* (Bugliarello, 1998); *Seedbeds* (Felsenstein, 1994); *Industrial Parks* (Autio and Klofsten, 1998), *Innovation Centers* (Campbell, 1989), *Technopoles* (Castells and Hall, 1994), and *Networked Incubators* (Hansen et al., 2000). Dengan kata lain, inkubator usaha memiliki banyak nama.

Beberapa inkubator dan juga program inkubasi dibentuk secara khusus untuk mempercepat perkembangan ekonomi daerah dan untuk

membantu badan usaha baru meraih modal dan investasi, sementara inkubator lain dibentuk dengan tujuan untuk mengkomersialisasikan riset-riset yang secara khusus membawa badan usaha kecil memiliki kemampuan teknologi menjalin kontak dan relasi dengan sejumlah universitas dan badan usaha besar. Terdapat aspek-aspek berbeda tentang tujuan inkubator dan program inkubasi secara keseluruhan misal memberikan, dalam beberapa tingkatan, dukungan infrastruktur sebagai bagian dari kompensasi guna agar badan usaha baru tersebut dapat menghindari kegagalan bisnis atau ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Asosiasi Inkubasi Nasional Amerika mendefinisikan inkubator usaha sebagai suatu alat pembangunan ekonomi yang didesain untuk mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan perkumpulan-perkumpulan usaha melalui sejumlah dukungan sumber daya dan jasa.

Menurut Sherman dan Chappell (1998), dukungan jasa tersebut terdiri atas bantuan pengembangan sektor usaha dan rencana pemasaran, pembentukan tim manajemen, dan bantuan modal dan jalinan dan relasi ke sejumlah badan usaha jasa profesional tertentu lainnya. Inkubator usaha juga menyediakan pelayanan administrasi dan peralatan terpadu dan ruang kerja yang fleksibel. Bentuk menarik dari inkubator adalah kekuatan mereka dalam menciptakan dan menggali sinergi kerja sama. Gabungan berbeda antara sumber daya, jasa, dan keahlian merupakan suatu pemikiran untuk menciptakan sinergi bagi program inkubasi. Ini berarti bahwa inkubator merupakan suatu bangunan fisik dengan lokasi geografis tertentu di mana satu badan usaha baru dapat meminimalkan biaya-biaya awal atau usaha awal karena mendapatkan ruang kerja yang terjangkau, pelayanan terpadu, dan bantuan-bantuan bisnis (Allen dan Rahman 1985).

Inkubator dan juga program inkubasi secara khusus berusaha menyediakan lingkungan usaha yang terawat secara aktif guna menjamin bahwa usaha-usaha awal mendapatkan sumber daya, jasa, dan bantuan yang diperlukan. Sumber-sumber daya tersebut memiliki harga atau biaya yang sangat mahal sehingga badan usaha baru tersebut tidak dapat mengakses bahkan

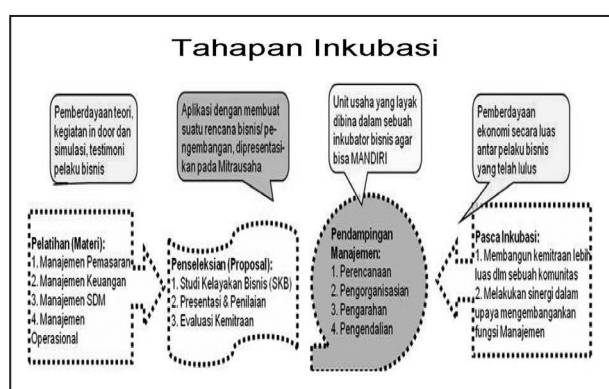
memilikinya. Dalam pemahaman ini, inkubator dan program inkubasi berusaha menjelaskan beragam informasi tentang hambatan-hambatan pasar yakni informasi harga, kekurangan jasa, bantuan usaha, dan modal. Kebanyakan inkubator dan program inkubasi dibuat dengan asumsi sampai berapa lama dan sejauh mana badan usaha dapat bertahan dengan fasilitas-fasilitas.

Tujuan terpenting dari program inkubasi adalah untuk meningkatkan bakat kewirausahaan. Ini berarti bahwa pendorong utama perusahaan bisnis baru bukan ketersediaan dana, ketersediaan fasilitas tingkat dan ketersediaan teknologi melainkan agen wirausaha atau pelaku usaha. Program inkubasi berusaha memaksimalkan kekuatan agen wirausaha/pelaku usaha dengan menyediakan bagi para agen wirausaha tersebut fasilitas, jasa, dan dukungan guna melengkapi bakat dan sumber daya yang telah dimilikinya, yang pada gilirannya berarti membantu mereka memperluas dan meningkatkan potensi dan bakat mereka. Dengan kata lain program inkubasi dapat dilihat sebagai jaringan perencanaan dan rancangan disain di antara agen wirausaha dan proses kegiatan komersialisasi atau perniagaan. Sumber daya dan kesempatan yang disediakan dalam program inkubasi dapat diringkas dan dielaborasi menjadi riil dan non-riil. Sumberdaya riil meliputi lingkungan fisik, ruang kerja, dan peralatan komunikasi, pelayanan usaha, perlengkapan, dan pembiayaan. Kesempatan atau sumber daya nonriil mencakup penempatan suatu kawasan dengan berpotensi, kemungkinan meraih legitimasi, input sosial, dan dukungan psikologis.

Oleh karena itu, inkubator merupakan lembaga yang memberikan program untuk membina keberhasilan pengembangan sektor usaha melalui rangkaian program permodalan dan juga dukungan pembinaan unsur bisnis dengan tujuan menjadikan sektor usaha tersebut menjadi badan usaha kuat, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan baik, serta menjadi badan usaha berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Inkubator bisnis adalah suatu bagian dari program kemitraan untuk mengembangkan sektor usaha bersama-sama, dengan tujuan

menjadikan sektor usaha tersebut menjadi usaha nyata dan berkembang sesuai dengan visi badan usaha. Secara umum bantuan disediakan inkubator bisnis adalah: akses dan bantuan permodalan, membuka jaringan terkait dan membantu perkembangan usaha tersebut, pengembangan strategi pemasaran, membantu dalam manajemen akuntansi, mentoring dan pelatihan usaha, manajemen pengelolaan perusahaan, memberi pengenalan dan pene-kanan atas etika bisnis, memberikan informasi mengenai industri bisnis terkait secara umum, membantu hal-hal terkait dengan regulasi.



Sumber: Hewick, Laurence. 2006. *Canadian Business Incubator*.

Menurut Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): Inkubasi adalah konsep pendewasaan pelaku usaha secara berkualitas melalui ruang-ruang kerja tertata disebut inkubator. Ruang-ruang kerja didesain untuk memberikan dukungan bagi pelaku-pelaku usaha berbakat mencakup: pembinaan, pelatihan, jaringan profesional, bantuan dalam finansial hingga mereka telah lulus dan dapat bertahan dalam lingkungan kompetitif.

Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002: Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan

atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Bentuk inkubator sebagai wadah pembinaan pelaku usaha dibedakan berdasarkan kelompok usaha yang dibina, baik berdasarkan jenis maupun skala usaha. Inkubator usaha mikro: pelaku usaha yang menjalankan sekurang-kurangnya satu bentuk usaha namun tidak memenuhi kriteria UMKM sesuai UU No 20 tahun 2008. Inkubator usaha UMKM: pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM sesuai UU No 20 tahun 2008, dan memiliki badan hukum. Setiap inkubator didampingi oleh sekurang-kurangnya lembaga keuangan yang dibentuk swadaya untuk pengelolaan dana bergulir.

Tahapan Inkubasi: Hewick (2006) menyebutkan bahwa inkubator dalam konteks ini mengandung makna yang analog dengan inkubator di lingkungan kedokteran yang berarti perawatan oleh tim medis kepada bayi yang baru lahir prematur, dengan tujuan agar bayi tersebut meningkat daya tahan dan adaptasinya terhadap lingkungan hidup yang sebenarnya, sehingga menjadi normal kehidupannya. Sementara inkubator usaha merupakan suatu media atau tempat para pengusaha kecil dan menengah maupun calon wirausaha baru berlatih, bertanya dan berdiskusi untuk mengembangkan atau merealisasikan usahanya, maupun untuk memecahkan permasalahan manajemen usahanya, baik secara individu maupun kelompok.

Modul pelatihan diperlukan untuk proses inkubasi meliputi: Cara mengevaluasi kelayakan ide usaha dari calon unit usaha. Cara mengevaluasi kelayakan rencana usaha. Teknik memfasilitasi investasi bagi calon unit bisnis. Pengorganisasian badan atau sektor usaha. Manajemen pemasaran. Manajemen keuangan. Teknik memenangkan persaingan dalam usaha. Rakitan paket teknologi. Teknik pengendalian, pengawasan dan evaluasi. Penciptaan atmosfir kewirausahaan dalam lingkungan masyarakat. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan mandiri.

Sumberdaya keuangan Inkubator usaha dan juga program inkubasi pada tahap awal memerlukan dukungan dana dari pemerintah dan

lembaga bersangkutan. Namun dalam jangka panjang sumber dana dapat diperoleh melalui modal dari pihak luar maupun keuntungan pengelolaan. Pemasaran dilakukan pada stakeholder di Kabupaten dan Kota dengan mengembangkan program kerja kemitraan, *sponsorship*, hibah, untuk mendapat sumberdana. Sementara untuk mendapat pesert dilakukan dengan riset pemasaran sesuai dengan kebutuhan Kabupaten dan Kota. Rancangan Program Kerja dan Pendanaan, Program Mitra Binaan & Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan, Pencitraan Perusahaan, Program Sponsorship Kegiatan, Program Dana Hibah, Program Kerjasama & Kemitraan (Community Development & CSR, Pembiayaan (UU No 20 Tahun 2008).

Berdasarkan UU No 20 tahun 2008 pasal 21, pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah. Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam pasal 22 disebutkan, bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi

jasa keuangan konvensional dan syariah; dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana tercakup dalam pasal 22 adalah sebagai berikut. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Selain pemerintah, dunia usaha dan masyarakat juga dapat berperan serta aktif dalam meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Ada pula program mitra binaan, *corporate social responsibility* (CSR), dan *sponsorship* sebagai pendukung inkubasi. Dana Program Kemitraan berasal dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN diatur dalam Kepmen BUMN No Kep- 236/MBU/2003. Dana ini berupa kredit bagi UMKM serta hibah untuk pembinaan dan pelatihan UMKM. Terdapat inkubator bisnis yang bekerja sama dengan BUMN dalam rangka penyaluran dana PKBL untuk UMKM, dengan suku bunga bersubsidi. Inkubator bisnis memperoleh *fee* sebesar persentase tertentu dari sejumlah dana disalurkan kepada usaha binaan. Selain *fee* dari hasil penyaluran dana kepada UMKM, inkubator bisnis juga melakukan pembinaan dan pelatihan didanai dari dana PKBL BUMN. Dalam proses inkubasi usaha binaan dan inkubator bisnis dapat bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lain dalam rangka pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenant. Beberapa sponsor yang telah bekerjasama dengan Inkubator Bisnis antara lain perusahaan swasta, yang memiliki program CSR, lembaga donor dalam dan luar negeri.

Pola Kemitraan yang termuat dalam UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi. Menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Usaha Besar dilarang memiliki dan menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Usaha Menengah dilarang memiliki dan menguasai usaha mikro dan usaha kecil mitra usahanya.

C. Hasil Penelitian: Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Produk Unggulan

Pembangunan pertanian di Riau terutama yang terfokus pada agribisnis usaha tani diakui memang dapat meningkatkan produksi, tetapi sangat sulit meningkatkan pendapatan petani secara riil dan meningkatkan serta menahan nilai tambah yang lebih besar di wilayah pusat produksi pertanian. Penyebabnya adalah pada agribisnis usaha tani nilai tambah yang tercipta sangat kecil dan jauh lebih kecil daripada nilai tambah yang tercipta agribisnis hulu dan hilir (industri pengolahan dan perdagangan). Pembangunan pertanian di Riau perlu diubah dari konsep pertanian primer ke konsep agribisnis.

Untuk meningkatkan pendapatan petani,

menambah nilai hasilnya, dan memberi orientasi pasar, maka pengertian lama tersebut perlu diubah dengan paradigma baru pembangunan pertanian (*as a new way of seeing agriculture*) yang dikenal sebagai pendekatan agribisnis. Pendekatan agribisnis bukan sekadar bisnis komoditi pertanian yang sudah lama dikenal, akan tetapi lebih dari itu, agribisnis merupakan cara baru melihat dan membangun pertanian. Suatu sistem agribisnis terdiri dari empat subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), subsistem agribisnis usahatani (*on-farm agribusiness*), subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*), dan subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (*supporting institution*). Subsistem agribisnis hulu mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas. Dengan demikian, di dalamnya termasuk kegiatan pabrik pupuk, usaha pengadaan bibit unggul, baik untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, ternak maupun ikan; pabrik pakan untuk ternak dan ikan; pabrik pestisida; serta kegiatan perdagangannya.

Subsistem agribisnis merupakan kegiatan yang selama ini dikenal sebagai kegiatan usaha tani, yaitu kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak dan nelayan, serta dalam arti khusus, termasuk pula kegiatan perhutanan; yang berupaya mengelola input (lahan, tenaga kerja, modal teknologi dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian. Subsistem agribisnis hilir, sering pula disebut sebagai kegiatan agroindustri adalah kegiatan industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku. Kegiatan pabrik minyak kelapa sawit, industri pengalengan ikan, pabrik tepung tapioka termasuk dalam kelompok subsistem ini. Subsistem perdagangan hasil pertanian atau hasil olahannya merupakan kegiatan terakhir untuk menyampaikan *output* sistem agribisnis kepada konsumen, baik konsumen di dalam negeri maupun konsumen di luar negeri (ekspor). Kegiatan pengangkutan dan penyimpanan merupakan bagian dari subsistem ini.

Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*) yaitu kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti kebijakan pemerintah, perbankan, penyuluhan, pembiayaan dan lain-lain. Secara

ringkas dapat dinyatakan, sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertikal antara beberapa subsistem bisnis dalam satu sistem komoditas. Keempat subsistem tersebut saling terkait dan tergantung. Kemandegan dalam satu subsistem akan mengakibatkan kemandegan subsistem lainnya. Misalnya, kegiatan agroindustri tidak mungkin berkembang tanpa dukungan pengadaan bahan baku dari kegiatan produksi pertanian maupun dukungan sarana perdagangan dan pemasaran. Dengan paradigma baru (agribisnis) tersebut, maka cara membangun pertanian adalah membangun keempat subsistem agribisnis tersebut mulai dari hulu hingga ke hilir secara simultan dan konsisten. Membangun dan mengembangkan agroindustri (agribisnis hilir) harus seiring dengan pengembangan agribisnis usaha tani dan agribisnis hulu. Hal ini berbeda dengan paradigma lama dimana pembangunan pertanian yang kita anut di masa lalu, yang membangun pertanian hanya pada usaha tani saja.

Pengembangan agribisnis pada dasarnya bersifat integratif dalam artian pembangunan antarsektor (sektor pertanian dengan sektor lainnya) dan bahkan antarwilayah di Riau (antarkabupaten dan antar pedesaan di setiap kabupaten), sehingga akan terjadi sinergi antar sektor maupun antar wilayah di Riau, yang pada gilirannya bermuara pada pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan agribisnis di Riau, perlu diupayakan agar di wilayah ini dikembangkan usaha pembibitan produk unggul yang dapat memenuhi kebutuhan bibit petani, yang paling penting adalah mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang bahan bakunya ada di Riau. Kita perlu mengembangkan industri yang bahan bakunya dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kopi, kelapa, coklat, kemiri, jambu mete dan hasil-hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dengan pengembangan agribisnis industri, maka nilai tambah agribisnis yang tertahan di wilayah Riau akan lebih besar.

Untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperluas jaringan bisnis petani, perlu didorong berkembangnya organisasi bisnis terutama koperasi agribisnis dikalangan petani

di Riau. Koperasi agribisnis yang dimaksudkan disini bukanlah konsep KUD masa lalu yang menangani segala macam komoditas dan hanya bergerak pada pertanian primer saja. Koperasi agribisnis yang dimaksudkan adalah koperasi yang menangani satu jenis komoditi mulai dari hulu hingga ke hilir. Melalui koperasi agribisnis ini, petani dapat mengembangkan jaringan bisnisnya, baik pada agribisnis hulu maupun pada agribisnis hilir (industri pengolahan, perdagangan). Nilai tambah yang tercipta dalam agribisnis suatu komoditas dapat dinikmati oleh petani sedemikian rupa, sehingga pendapatan mereka dapat meningkat lebih cepat. Hal ini akan meningkatkan gairah dan kebanggaan para petani serta akan merangsang tumbuhnya generasi baru pengusaha agribisnis dari keluarga petani.

Pengembangan agroindustri dan organisasi bisnis petani tersebut perlu disertai dengan subsistem jasa agribisnis terutama pengembangan prasarana jalan. Pengembangan prasarana jalan perlu mendapat prioritas dari Pemda Riau karena masih banyak pedesaan di Riau yang belum terjangkau kendaraan roda empat, padahal potensi pengembangan agribisnis cukup besar. Pengembangan jaringan jalan akan mendorong pengembangan agribisnis baru dan meningkatkan efisiensi pengangkutan komoditas pertanian di Riau.

Apabila pengembangan agribisnis berhasil diwujudkan, maka Riau akan siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang di masa yang akan datang. Berkembangnya agribisnis di Riau akan menarik kegiatan petani lainnya, baik yang menyediakan bahan penolong dan jasa yang dibutuhkan oleh agribisnis, dan sektor informal. Hal ini akan menarik aliran modal dan sumberdaya manusia ke Riau. Pengembangan agribisnis akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan integrasi antarsektor di Riau untuk membiayai sendiri (*self-financing*) pembangunan, sehingga siap melaksanakan otonomi daerah secara penuh.

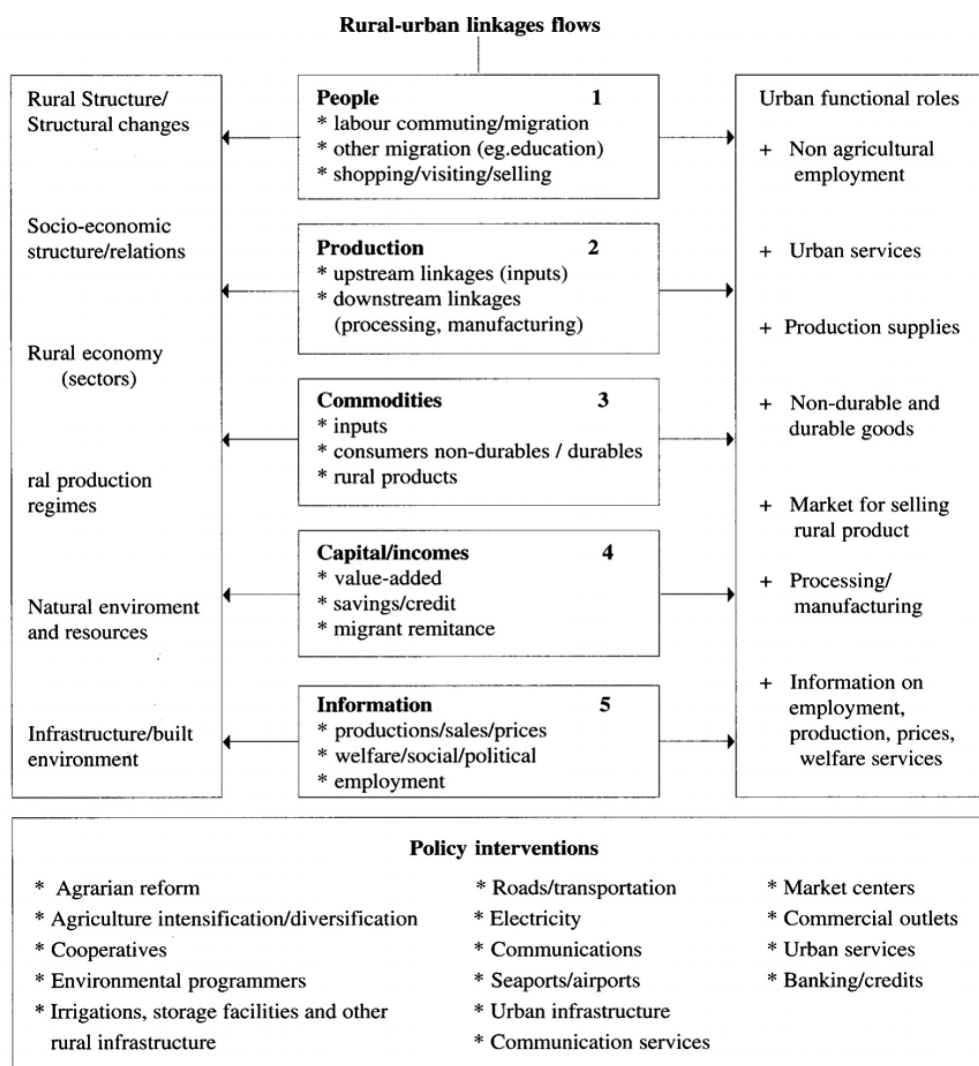
Produk-produk agribisnis yang dihasilkan di Riau adalah produk yang bersifat memiliki elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi, maka meningkatnya pendapatan masyarakat di wilayah perkotaan

akan menarik lebih lanjut berkembangnya agribisnis di Riau. Pengembangan agribisnis dapat mengintegrasikan perekonomian pedesaan dengan perkotaan, perekonomian Riau dengan perekonomian Nasional. Komoditas yang dihasilkan agribisnis Riau juga dibutuhkan di kawasan internasional, maka manfaat ekonomi yang timbul dari liberalisasi ekonomi dunia dan integrasi ekonomi (khususnya AFTA dan APEC) pada abad ke-21, dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Riau.

Pengembangan agribisnis yang bertumpu pada aset-aset di pedesaan-pedesaan akan membuka peluang timbul dan berkembangnya pembangunan pedesaan yang terintegrasi. Berbagai kegiatan usaha mikro kecil menengah dan industri pengelolaan dan industri rumah tangga

akan muncul dan berkembang di pedesaan yang pada gilirannya menggulirkan pembangunan pedesaan terintegrasi berbasis agribisnis di Riau, selanjutnya dengan timbulnya liberalisasi ekonomi dunia dan integrasi ekonomi pada abad 21, perlu dikembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai komunitas internasional, dengan begitu Riau membuka diri bagi kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai komunitas internasional.

Sistem Agribisnis menurut Syahza (2003) adalah semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi subsistem: pengadaan sarana



Sumber: Douglas (1998) dalam Daryanto (2003).

Sebagai bahan acuan yang lain, tulisan ini juga mengutip strategi pendekatan Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (2011), sebagai berikut. M-P3MI merupakan suatu program pengembangan model pembangunan pertanian melalui inovasi

Memperhatikan secara lebih cermat bahwa model pembangunan yang bersifat *top-down* tidak lagi relevan, bahkan dalam tulisannya yang bersifat reflektif terhadap kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan



Gambar 1. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

sebagai subyek pembangunan, Mosse (2005) mencontohkan, bahwa pembangunan pertanian di India pada kenyataannya direncanakan oleh orang-orang Barat (Inggris) dan proses perencanaan *policy* yang akan digunakan dalam pembangunan dilakukan di Inggris dan bukan di negara yang akan dibangun. Namun lebih memprihatinkan lagi adalah dalam merencanakan *policy* tersebut, sama sekali tidak melibatkan warga masyarakat yang akan dibangun. Mereka diposisikan sebagai obyek dari pembangunan, yang dianggap bermasalah dan akan memperoleh penyelesaian masalah dari “dewa” pembangunan, yaitu konsultan asing yang terdiri dari orang-orang terpelajar yang memiliki segudang pengalaman dalam membangun sebuah masyarakat. Dari sini, muncul isu kekuasaan antara pihak perencana pembangunan dan masyarakat yang hanya menjadi obyek (pihak yang hanya pasif menerima).

Upaya untuk memahami hubungan antara *policy discourse* dan praktik di lapangan terhambat oleh dominasi dua paradigma tentang kebijakan pembangunan yang sebenarnya bersifat kontradiktif satu dan lainnya. Pandangan instrumental (*instrumental view*) yang menganggap *policy* sebagai penyelesaian masalah yang bersifat rasional. Pandangan lain yang disebut Mosse (2005) sebagai *critical view* memandang kebijakan sebagai wacana teknis yang dirasionalisasi (yang sebenarnya) menyembunyikan tujuan terselubung dari kekuatan atau dominasi birokrasi, yang merupakan tujuan politik (sebenarnya) dari pembangunan. Wacana tentang pembangunan sebagai sebuah proses perencanaan yang melibatkan agen-agen pembangunan merupakan bagian dari sebuah kekuatan kolektif besar dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengupayakan kemajuan, merupakan *public transcript* yang terus dipropagandakan oleh pemerintah melalui berbagai metode dan media. *Hidden transcript* juga ikut muncul sebagai sebuah konsep yang kerap digunakan untuk memaknai ketidakkonsistenan antara rumusan idealis di lembar kertas dan praktik yang dilakukan.

Kritik Mosse (2005) berlanjut pada perhatiannya terhadap aktor yang begitu kuat memegang peran dalam menginterpretasi hingga

meluaskan ide, kepentingan, dan tujuan dari pembangunan yang dimunculkan dalam *public transcript*. Ia menyebutkan, bahwa “.....*the constant work of translation (of policy goals into practical interests; practical interests back into policy goals)* sebagai tugas dari perantara yang berkeahlian (*skilled broker*) yaitu manajer, konsultan, peneliti, *fieldworkers*, dan pemimpin komunitas, yang membaca makna dari proyek pembangunan dan menerjemahkan ke dalam bahasa institusional yang dimiliki oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendukung, yang secara konstan membentuk kepentingan dan membuatnya nyata.”

Oleh karena itu, model perencanaan pembangunan yang direkomendasikan melalui tulisan ini adalah rumusan yang mengedepankan pendekatan *bottom-up* atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan yang berasal dari pemetaan kebutuhan atau kehendak masyarakat di lokasi pembangunan. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari aspek pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Peneliti merujuk pada konsep *local knowledge* yang ditawarkan Walsh dan Harvey (1997). Dibandingkan dengan *indigenous knowledge*, istilah pengetahuan dalam *local knowledge* selalu bersifat *socially (culturally, politically, economically) grounded*, dan artikulasinya dalam praktik pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan (*power*) dan hubungan antara aktor-aktor yang berbeda dan agen yang terlibat. Hal ini merupakan kritik terhadap konsep *indigenous knowledge* yang begitu meromantismekan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah lokasi yang seolah-olah *steril* dari pengaruh pihak luar. Pengetahuan ini kemudian dianggap hanya dimiliki oleh masyarakat bersangkutan dan tidak berubah sampai kapan pun. Peneliti sependapat dengan kedua penulis, bahwa pandangan seperti itu sangat mengabaikan konteks perubahan (masa) sehingga masyarakat dipandang sebagai sebuah entitas yang statis.

Pendekatan pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang ditawarkan oleh Walsh dan Harvey menjadi satu pendekatan yang berbeda dalam menempatkan masyarakat, pengetahuan

yang dimilikinya, dan praktik dalam konteks pembangunan. Walsh dan Harvey (1997) juga menekankan, bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial dalam arti bahwa pengetahuan memproduksi dan diproduksi dalam konteks sosial tertentu yang membentuknya dalam cara yang berbeda. Dalam konteks pembangunan, pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh *stakeholder* menjadi hal yang relevan, dan tantangannya adalah untuk mencari pemahaman (*shared understanding*) yang tidak dimiliki oleh sebuah kelompok tertentu (*any single party*).

Pengetahuan lokal dan praktik membentuk sekaligus dibentuk oleh pola diferensiasi sosial dan konteks sosial budaya, historis, insitusional, dan politis. Mereka muncul dan berubah dari waktu ke waktu (Walsh dan Harvey, 1997), pengetahuan dan praktik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari konteks tersebut. Untuk memahami pengetahuan lokal dan praktik dalam konteksnya ini dibutuhkan pendekatan yang bersifat historis, menekankan pada pentingnya perubahan dalam proses sosial dan ekologis. Pendekatan berbasis aktor juga digunakan untuk melihat perubahan yang dihasilkan oleh interaksi kompleks antara individu dan kelompok yang diwarnai oleh pengetahuan dan kekuasaan yang berbeda dan berubah.

Pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok lokal (*local group*) bukanlah bentuk statis dari kebijaksanaan (*static body of wisdom*), melainkan berisikan pandangan yang dinamis (*dynamic insights*) dan teknik yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui eksperimen dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial ekonomi (Walsh dan Harvey, 1997). Pengetahuan lokal tentang akses kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam berubah, menyesuaikan dengan perubahan kondisi fisik dan sosial ekonomi yang terjadi. Pengetahuan lokal itu kemudian dimodifikasi dengan pengetahuan yang diterima oleh masyarakat selama berinteraksi dengan aktor-aktor yang lain, baik yang mendukung maupun menentang gerakannya. Pengetahuan yang dimiliki juga tidak disimpan tetapi disebarluaskan kepada anggota lain dalam komunitasnya.

Pustaka Acuan

- Autio, E. and M. A. Klofsten. (1998). "Comparative Study of Two European Business Incubators". *Journal of Small Business Management*, 36(1): 30-43.
- Allen, D. N., and S. Rahman. (1985). 'Small Business Incubators: A Positive Environment for Entrepreneurship'. *Journal of Small Business Management*, 23(July): 12-22.
- Allen, D. N., and R. McCluskey. (1990). "Structure, Policy, Services and Performance in the Business Incubator Industry". *Entrepreneurship, Theory and Practice*, 15 (2): 61-77.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2011). *Panduan Umum Model Pengembangan Pertanian Pedesaan Melalui Inovasi (M-P3MI)*. Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
- Bugliarello, G. (1998). Knowledge Parks and Incubators. In R. C. Dorf (Ed.), *The Handbook of Technology Management*. CRC Press Inc.
- Campbell, C. (1989). "Change Agents in the New Economy: Business Incubators and Economic Development", *Economic Development Review*, 7(2): 56-59.
- Centre for Strategy and Evaluation Services, "Benchmarking of Business Incubators." Brussels: European Commission Enterprise Directorate General, 2002.
- Colin. Barrow. (2001). *Incubators: A Realist's Guide to the World's New Business Accelerators*.
- Daryanto, Arief. (2003). "Disparitas Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia". *Agrimedia*, 8 (2).
- Felsenstein, D. (1994). "University-Related Science Parks - 'Seedbeds' or 'Enclaves' of Innovation?". *Technovation*, 14 (2): 93-110. Reprinted in Westhead P. and Wright M (eds.) UK: Edward Elgar.
- Fetterman, David M. (1989). *Ethnography Step by Step*. Newbury Park: Sage Publications.

- Hansen, M.T., Chesbrough, et al. (2000). "Networked Incubators: Hothouses of the New Economy". *Harvard Business Review*. September-October: 74-83
- Jaccarino, Mike. "City breaks ground on first business incubator in the Bronx's Hunts Point". New York Daily News.
- Linda Knopp, (2006) *State of the Business Incubation Industry*. Athens, Ohio: National Business Incubation Association, 2007.
- Manuel Castells, Peter Hall, and Peter Geoffrey Hall. (1994). *Technopoles of the World: Making of 21st Century Industrial Complexes*. Taylor & Francis Group.
- Martin, F. (1997). "Business Incubators and Enterprise Development: Neither Tried nor Tested?" *Small Business and Enterprise Development*, 4, 1: 3-11.
- Meredith Erlewine, "Comparing Stats on Firm Survival." In *Measuring Your Business Incubator's Economic Impact: A Toolkit*. Athens, Ohio: National Business Incubation Association, 2007.
- Molnar, Lawrence A., Donald R. Grimes, Jack Edelstein, Rocco De Pietro, Hugh Sherman, Dinah Adkins and Lou Tornatzky, *Business Incubation Works*. Athens, Ohio:
- Mosse, David. (2005). *Cultivating Development: an Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- National Business Incubation Association, (1997). [U.S. Small Business Administration], Frequently Asked Questions, referenced on NBIA.org.
- Peacock, James L. (1986). "Method" in *The Anthropological Lens. Harsh Light, Soft Focus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rustiadi, Ernan dan Affendi Anwar. (2000). *Permasalahan Pembangunan Wilayah Riau Menyongsong Otonomi Wilayah*. Makalah disampaikan pada Konsultasi Regional PDRB se-Propinsi Riau, tanggal 21 September 2000, Pekanbaru.
- Saragih, B., (2001). *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE, Bogor.
- Sherman, H. and D.S. Chappell. (1998). "Methodological challenges in evaluating business incubator outcomes". *Economic Development Quarterly*, 12: 313-321.
- Smilor, R. and M. Gill. (1986). *The New Business Incubator: Linking Talent, Technology, Capital, and Know-how*. Heath and Company, Lexington Massachusetts: D.C.
- State of the Business Incubation Industry, 2006
- Stone, Mary. "Mancuso, inventor of business incubator, dies". Rochester Business Journal. Retrieved 2008-04-24.
- Syahza, Almasdi. (2012). *Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau*. Hasil penelitian Hibah Fundamental, DP2M Dikti Tahun 2012.
- Syahza, Almasdi. (2005). "Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau". *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/ November/2005.
- Syahza, Almasdi. (2003). "Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau". *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Volume 3 Nomor 2 November 2003.
- The Business Incubation Industry. Sekora, Michael. *Mastering the Art of Competition*. New York, New York: Jossey Bass. 2010
- Walsh, Martin T. dan Sharon P. Harvey. (1997). *Understanding and Engaging Local Knowledge and Practice: Practical Approaches to Natural Resources Research and Development*. UK: National Resources Institute, University of Greenwich.
- Wanggai, Velix Vernando. (2011). Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Ed.). *Mengelola Sebuah Perubahan: Memahami Arah Kebijakan*

Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014). Jakarta: Sekretariat Negara.

Zainal, M. Rusli. (2007). *Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dalam Pembangunan Propinsi Riau*. Tesis Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang UMKM. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454-A-BC75_9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf. Diakses pada tanggal 3 September 2013.

<http://inkubatorbisnis.wordpress.com/lingkup-kerja-inkubator/>. Diakses pada tanggal 1 September 2013.

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat, Cimahi, Jawa Barat
Social Rehabilitation for Persons with Disabilities
A Case Study on Social Rehabilitation Institution for Persons with Disabilities in Cibabat, Cimahi, West Java.

Habibullah dan Agus Marzuki

Habibullah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
 Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur. Email: habibullah@kemsos.go.id.
 Agus Marzuki, Badan Pusat Statistik, Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Jakarta. Email: marzuki@bps.go.id.
 Diterima 27 Februari 2014, direvisi 20 Maret 2014, disetujui 5 Mei 2014.

Abstract

Social rehabilitation services for persons with disabilities organized by institution has advantages and disadvantages. One of the disadvantages is its limited capacity if compared with disabilities population who need social service. The results of this study reveals that the social rehabilitation services input in the form of clients, human resources, facilities and infrastructure, culture, theory/methods and relative feedback has been relatively fulfilled. Operational conversion, supported by structural component and functional processes has been implemented but not optimal. Social rehabilitation services output have made some clients working independently, either by opening their own business or working in the company.

Keywords:

Social Rehabilitation-Persons with Disabilities-Social Institution

Abstrak

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh panti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan adalah keterbatasan daya tampung panti dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa input pelayanan rehabilitasi sosial berupa klien, sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, teori/metode dan umpan balik relatif sudah terpenuhi. Konversi operasi didukung komponen struktural dan proses fungsional terlaksana namun belum optimal. Output pelayanan rehabilitasi sosial, beberapa klien sudah mandiri, baik bekerja dengan membuka usaha sendiri maupun bekerja di perusahaan.

Kata Kunci:

Rehabilitasi Sosial-Penyandang Disabilitas-Panti Sosial

A. Pendahuluan

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Salah satu lembaga pelayanan bagi PMKS di Provinsi Jawa Barat adalah Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC) Cibabat, Cimahi. BRSPC Cibabat Cimahi merupakan satu-satunya lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi

Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat terdapat Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong, yang juga melayani penyandang disabilitas, tetapi bukan diselenggarakan oleh pemerintah daerah melainkan menjadi tanggung jawab Kemensos. Sebagai satu-satunya lembaga rehabilitasi penyandang disabilitas milik Pemda Jawa Barat, BRSPC Cibabat Cimahi mempunyai beberapa permasalahan:

Daya tampung yang hanya 100 orang per tahun masih sangat terbatas sehingga menyebabkan keterbatasan jangkauan pelayanan BRSPC Cibabat-Cimahi. Dari tahun 2003 sampai dengan 2012 BRSPC Cibabat-Cimahi baru bisa melayani 680 orang penyandang cacat (Sutaat, dkk, 2012). Padahal, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat

terus meningkat secara signifikan. Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat tahun 2008 hanya sekitar 64.953 jiwa, dan meningkat tajam menjadi 132.114 jiwa pada tahun 2011, dalam waktu tiga tahun terjadi peningkatan dua kali lipat (Jawa Barat Dalam Angka 2012: 169).

Di BRSPC Cibabat Cimahi, pelayanan rehabilitasi penyandang cacat tubuh dan tunarungu masih digabung menjadi satu. Penggabungan pelayanan rehabilitasi beberapa jenis disabilitas dalam satu panti menimbulkan masalah. Menurut hasil penelitian (Haryati Roebyantho, 2010, hal. 124-125) di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong, terungkap bahwa penggabungan pelayanan tunadaksa dengan tunarungu wicara menimbulkan beberapa kendala, antara lain sarana dan prasarana khususnya untuk penyandang cacat tunarungu wicara belum dipersiapkan dengan baik. Perbedaan karakteristik menyebabkan sulitnya penyatuan kegiatan yang bersifat umum antara kedua penyandang cacat tersebut, pekerja sosial membutuhkan waktu dan ketrampilan ekstra khususnya dalam kemampuan bahasa isyarat.

Dukungan sarana, prasarana, dan biaya dari pemerintah pusat sudah terputus dengan adanya otonomi daerah. Prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan, sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial hanya sebagai "ikutan" saja. Alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 20 persen sedangkan untuk pembangunan kesejahteraan sosial hanya 1 persen (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2013). Padahal, panti sosial yang diselenggarakan pemerintah daerah tetap dituntut sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional dan merupakan alternatif terakhir ketika keluarga dan masyarakat tidak mampu menyelenggarakan rehabilitasi sosial.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi pelayanan rehabilitasi sosial berdasarkan model pendekatan kebutuhan fungsional pada organisasi pelayanan masyarakat seperti yang diungkapkan Dale (2006). Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat-Cimahi?

B. Kajian Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pasal 1, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk kegiatan secara selayaknya. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatinkesos, 2012) Kementerian Sosial RI, terdapat 2.126.875 penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Masih tingginya jumlah penyandang disabilitas tersebut memerlukan intervensi negara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan menyeluruh kepada penyandang disabilitas adalah dengan meratifikasi konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2006 mengenai hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pada konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas tersebut disebutkan bahwa negara adalah pihak yang harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi (proses penyesuaian kehidupan) dan rehabilitasi (proses penyembuhan), terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial. Salah satu amanah dari Undang-Undang tersebut bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengorganisasi, memperkuat dan memperluas program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi melalui sistem pelayanan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian tanggung jawab pelayanan

kesejahteraan sosial bukan hanya milik pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 memberi pilihan kepada pihak pengelola unit pelaksana teknis (UPT) panti sosial untuk tetap berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, Kementerian Sosial RI pada akhirnya menyerahkan 163 panti sosial dari jumlah keseluruhan 198 panti sosial kepada pemerintah daerah (Kementerian Sosial RI, 2010). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang paling efisien dan cepat dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan semua Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) panti sosial yang dikelolanya karena mereka berada dekat dengan PMKS, seiring dengan semangat otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Situmorang, 2012, hal. 150).

Secara umum otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan demokrasi lokal. Namun pemberian kewenangan tersebut tidak serta merta mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah yang semakin kompleks dan beragam. Menurut Menteri Sosial RI (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, pelaksanaan rehabilitasi sosial (Resos) yang dilakukan bagi PMKS dinilai belum memuaskan dan perlu ditingkatkan. Unit pelaksana teknis (UPT) resos di daerah diminta proaktif dalam menjamin penanganan PMKS tepat program dan sasaran (Berita satu). Belum optimalnya pelaksanaan resos bagi PMKS di daerah diduga disebabkan beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada pelayanan bagi PMKS.

Untuk menjadi lembaga pelayanan masyarakat yang profesional, menurut Yeheskel

Hasenfeld (1983: 4-7) organisasi pelayanan masyarakat harus melihat bahan dasarnya, yaitu manusia dan penggunaan teknologi transformasi yang digunakan. Yeheskel mengemukakan, klasifikasi berdasarkan dimensi teknologi pelayanan yang diberikan oleh organisasi pelayanan, terdapat tiga jenis penggunaan teknologi:

1. Pemrosesan-manusia (*people-processing technologies*). Tujuannya memberi status atau label sosial tertentu terhadap klien sehingga dapat ditentukan jenis pelayanan yang diperlukan selanjutnya.
2. Pemeliharaan-manusia (*people-sustaining technologies*). Berupaya mencegah, memelihara dan mempertahankan kesejahteraan klien, tetapi tidak mengubah secara langsung atribut atau perilaku klien.
3. Perubahan-manusia (*people-changing technologies*). Mengubah atribut atau sikap serta perilaku klien agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dale, dkk (2006: 316) memberikan gambaran tentang model yang ideal pada organisasi pelayanan masyarakat. Menurut Dale, model pendekatan kebutuhan fungsional pada organisasi pelayanan masyarakat terletak pada tiga faktor, yaitu input, konversi operasi dan output. Input, merupakan semua sumber daya organisasi pelayanan masyarakat dapat berupa klien, staf, relawan, dana, fasilitas, budaya, metode dan umpan balik. Konversi operasi, terdiri dari komponen struktural dan proses fungsional. Komponen struktural lebih pada pembagian kerja berdasarkan bagian-bagian untuk melaksanakan organisasi pelayanan masyarakat. Sementara proses fungsional merupakan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh komponen struktural lembaga layanan masyarakat. Output terdiri dari kebutuhan fungsional dan tingkat kondisi mapan. Kebutuhan fungsional mempunyai empat komponen yang membentuk tujuan organisasi dan hubungan internal dan eksternal yaitu: pola yang dipertahankan, dan adaptasi merupakan variabel internal, sedangkan integrasi dan pencapaian tujuan merupakan variabel eksternal.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pokok bahasannya adalah implemen-

tasi pelayanan rehabilitasi sosial pada BRSPC Cibabat, Cimahi, Jawa Barat yang difokuskan kepada tiga faktor, yaitu input, konversi operasi dan output. Pemilihan sampel lokasi ditentukan secara *purposive* berdasarkan jumlah penyandang disabilitas dan keberagaman jenis pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki penyandang disabilitas cukup besar karena tercatat sebagai provinsi keempat yang memiliki jumlah penyandang disabilitas (10,43 persen) setelah Provinsi Jawa Tengah (18,91 persen), Jawa Timur (14,35 persen), dan Nusa Tenggara Barat (12,90 persen). Selain itu Provinsi Jawa Barat cukup memiliki keragaman dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan terdapat dua balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yaitu BRSPC Cibabat Cimahi (milik Pemda) dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong (milik Kemensos).

Pemilihan responden dilakukan secara *snowball* dengan jumlah responden sebanyak 12 orang. Informan dipilih secara *purposive*, terdiri dari Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala BRSPC, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyaluran dan Penerimaan, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial BRSPC Cibabat Cimahi, masing-masing sebanyak satu orang. Informan pekerja sosial sebanyak empat orang dan penerima manfaat BRSPC Cibabat Cimahi sebanyak dua orang. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara mendalam, telaah dokumentasi dan observasi.

C. Hasil Penelitian: Pelayanan Rehabilitasi Sosial BRSPC Cibabat

1. Profil BRSPC Cibabat Cimahi

Pada awal berdirinya, BRSPC Cibabat-Cimahi merupakan panti sosial dibawah naungan Kementerian Sosial RI. Namun seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pembubaran Departemen Sosial pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, maka BRSPC Cibabat-Cimahi menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah di Provinsi Jawa Barat. Sasaran pelayanan BRSPC Cibabat-Cimahi adalah

penyandang disabilitas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dari kalangan tidak mampu berdasarkan daerah pengirim yaitu dari berbagai dinas/instansi kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perorangan meliputi:

1. Penyandang disabilitas (cacat) tubuh dan tuna rungu (wicara) usia 15 s.d. 30 tahun.
2. Keluarga: terutama bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang cacat tubuh dan tuna rungu (wicara).
3. Masyarakat: yang mau dan mampu berpartisipasi.

Kapasitas tampung BRSPC Cibabat-Cimahi sebanyak 100 orang penyandang cacat tubuh dan tuna rungu wicara. Sementara sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

2. Input Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di BRSPC

Input pelayanan rehabilitasi sosial merupakan semua sumber daya organisasi pelayanan masyarakat dapat berupa klien, staf, relawan, dana, fasilitas, budaya, teori dan metode dan umpan balik. Klien, Sebagian besar klien BRSPC Cibabat-Cimahi mempunyai ciri-ciri sangat sensitif, mudah tersinggung, dan cepat marah, namun memiliki solidaritas tinggi sehingga sangat diperlukan peranan pekerja sosial untuk melakukan bimbingan sosial bagi klien. Tidak semua penyandang cacat tubuh dan tuna rungu wicara dapat menjadi klien BRSPC karena ada persyaratan. Persyaratannya adalah bisa baca tulis; mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri (mampu didik dan mampu latih); dan tidak memiliki tanggung jawab keluarga baik istri, suami, anak maupun orang tua.

Untuk persyaratan bisa baca tulis ditegaskan bahwa pihak BRSPC tidak menerima calon klien yang tidak bisa baca tulis meskipun kuota pelayanan belum terpenuhi. ".....kalau tidak bisa baca tulis maka tidak akan kami terima karena di kabupaten/kota punya LBK meskipun kuota kita 100 tapi masih 81 tetap yang tidak bisa baca tulis tidak kita terima, kita masih nunggu dari SLB yang sekarang lagi ujian untuk memenuhi kuota itu...." (AG, Pejabat struktural BRSPC, April 2013). Pemenuhan kuota yang belum terpenuhi

tersebut akan diambil dari SLB. Kelulusan SLB biasanya pada bulan Juni sedangkan kegiatan pelayanan di BRSPC Cibabat-Cimahi di mulai pada bulan April tiap tahunnya.

Penyandang disabilitas tersebut cacatnya tidak terlalu berat sehingga mampu dan mandiri untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas disebabkan karena tidak ada petugas khusus yang mengawasi dan membimbing klien selama 24 jam. Salah satu pejabat struktural BRSPC Cibabat-Cimahi menyatakan, jika tidak sesuai persyaratan maka pelayanan rehabilitasi sosial tersebut tidak tuntas untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas padahal biaya yang dikeluarkan untuk satu klien tersebut relatif besar. Salah satu kekurangannya adalah keterbatasan daya tampung BRSPC Cibabat Cimahi yang hanya mampu melayani 100 klien per tahun. Hal itu berimplikasi kepada masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Namun dalam implementasinya, BRSPC Cibabat Cimahi terkadang mengalami kesulitan mencari klien sehingga persyaratan klien ada yang dilanggar hanya untuk memenuhi kuota.

Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPC Cibabat Cimahi didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honorer dan tenaga bantu. Namun dirasakan SDM tersebut masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut menyebabkan sebagian pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Untuk pekerja sosial (peksos) sebagai ujung tombak pelayanan, relatif sudah sesuai yaitu berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Kondisi jumlah pekerja sosial tahun 2013 tersebut relatif lebih baik dibanding dengan tahun 2011, menurut salah satu pekerja sosial di BRSPC Cibabat-Cimahi pada tahun 2011 hanya terdapat dua pekerja sosial untuk melayani 100 klien. Meskipun BRSPC Cibabat-Cimahi berdiri di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2002 tetapi keberadaan fungsional pekerja sosial baru pada tahun 2006. Menurut pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa

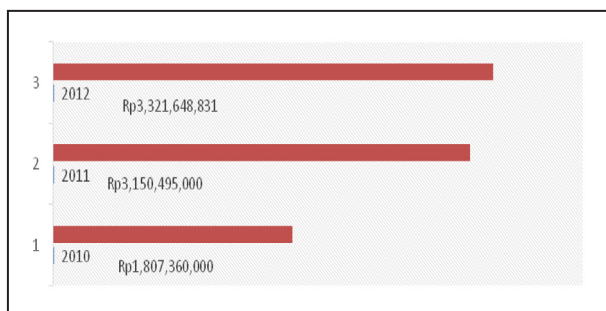
Barat kekurangan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), khususnya pekerja sosial, sudah disampaikan usulannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi pekerja sosial dituntut profesionalisme. Di Provinsi Jawa Barat terdapat 67 pekerja sosial yang tersebar di UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, jumlah tersebut relatif besar tetapi kurang produktif.

“Salah satu kendala memang di balai-balai kekurangan SDM khususnya peksos rasionya masih kurang kami sudah menyampaikan usulan ke BKD namun di satu sisi mereka juga dituntut profesionalisme aparatur yang kuat. Kita sekarang cenderung besar tapi tidak produktif semestinya kecil tapi produktif,” (KN, Pejabat Dinas Sosial Jawa Barat). Produktivitas kinerja pekerja sosial tersebut sebagai konsekuensi dari penerapan renumerasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah diberikan sejak tahun 2010. “Kita pemprov Jabar sejak tahun 2010 telah menerapkan renumerasi dengan dua indikator prestasi kerja dan perilaku kerja, tahun 2013 di ujicobakan dengan mengukur beban kerja.” (KN, Pejabat Dinas Sosial Jawa Barat).

Keinginan untuk mendapat pekerja sosial berkualitas dan berkemampuan disampaikan oleh koordinator pekerja sosial BRSPC Cibabat-Cimahi tetapi sistem rekrutmen pekerja sosial tidak didasarkan uji kompetensi melainkan hanya menerima pekerja sosial dari usulan-usulan tanpa melihat pekerja sosial tersebut mampu atau tidak. Dari sisi kuantitas, rasio antara peksos dan klien belum memadai. Idealnya perbandingan antara peksos dengan klien adalah 1:5, yaitu 1 peksos untuk melayani 5 klien. Namun realitasnya yang terjadi adalah 1 peksos melayani 20 klien. Selain itu tidak adanya uji kompetensi bagi peksos menyebabkan berbagai motivasi untuk menjadi pekerja sosial, antara lain motivasi untuk membantu dan mengurus klien, mendapatkan tunjangan besar, dan bebas dan kerja santai.

Tenaga honorer terdiri dari tenaga kebersihan dan aplikator keuangan. Tidak ada tenaga honorer yang terjun langsung ke pelayanan klien. Kinerja tenaga honorer ini, menurut pejabat struktural di BRSPC Cibabat-Cimahi sudah

cukup baik namun karena luas lingkup kerjanya maka hasilnya belum maksimal. Selain tenaga honorer, ada tenaga bantu yang terdiri dari guru bahasa isyarat, instruktur dan satpam. Jumlah guru bahasa isyarat sangat kurang dan tidak ada yang bertugas selama 24 jam sehingga menyulitkan jika sedang ada masalah dengan klien tuna rungu wicara. Sedangkan tenaga satpam selain kurang jumlahnya, juga usianya rata-rata sudah relatif tua. Pembiayaan, keseluruhan pembiayaan BRSPC Cibabat Cimahi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, dan jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dana tersebut terutama dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana balai dan sub unit yang dilakukan sejak tahun 2011.



Gambar 1. Jumlah Dana BRSPC Cibabat Cimahi tahun 2010-2012

Sumber: BRSPC Cibabat

Selain untuk peningkatan sarana dan prasarana, alokasi dana tersebut digunakan untuk pelayanan rehabilitasi sosial, termasuk untuk SOSH (biaya makan sehari) sebesar Rp 20.000 per klien. Program yang dilaksanakan oleh BRSPC Cibabat-Cimahi terlihat seperti program-program tahun sebelumnya, karena keterbatasan alokasi anggaran. Menurut pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, pelayanan rehabilitasi sosial dengan sistem panti harus dipastikan oleh dinas sosial bahwa biaya tetap (*fixed cost*) yang dianggarkan selama setahun harus selalu ada, sebab jika tidak tersedia akan mengganggu kelancaran pelayanan rehabilitasi sosial. Biaya tetap yang harus dialokasikan tersebut berupa gaji pegawai, biaya listrik, air, telpon dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Kondisi struktur anggaran lebih banyak teralokasikan untuk memenuhi anggaran biaya tetap, sedangkan biaya pelayanan langsung relatif lebih kecil dibanding alokasi biaya tetap. "Kalau pelayanan di balai kita harus menghitung *fixed cost* selama selama setahun jangan sampai tidak terpenuhi kalau di luar balai tergantung program.....masalah lagi biaya tetap seperti gaji jauh lebih besar daripada biaya pelayanan/program yang langsung untuk masyarakat." (KN, Pejabat Dinas Sosial Jawa Barat).

Mengenai kewenangan dalam pendanaan dan anggaran, BRSPC Cibabat-Cimahi tidak mempunyai kewenangan karena yang melakukan sinkronisasi anggaran dan perencanaan keuangan adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. "Mengenai pelayanan rehabilitasi sosial merupakan otonom di balai-balai namun dari segi anggaran dan perencanaan keuangan kita sinkronisasi di sini." (KN, Pejabat Dinas Sosial Jawa Barat). Keterbatasan anggaran untuk pelayanan rehabilitasi sosial tersebut tidak terlepas dari prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Anggaran pendidikan tahun 2013 sebesar 20 persen sedangkan alokasi anggaran pembangunan kesejahteraan sosial hanya 1 persen.

Sarana dan Prasarana: Apabila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, maka hampir semua telah tersedia meski dirasakan kurang memadai. Peningkatan sarana dan prasarana terjadi karena ada program revitalisasi sarana dan prasarana sejak tahun 2011. Namun program revitalisasi baru sebatas sarana gedung saja dan belum kepada alat untuk pelayanan. Penambahan sarana dan prasarana tersebut cenderung lebih berorientasi pada sarana dan prasarana umum, tidak khusus untuk kebutuhan klien. Sarana dan prasarana rehabilitasi sosial khususnya sarana dan peralatan untuk bimbingan keterampilan. Sarana keterampilan yang dimiliki oleh BRSPC Cibabat-Cimahi saat ini kebanyakan merupakan aset lama yang dulunya dimiliki oleh Balai Pemberdayaan Sosial Remaja dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Sosial.

“Untuk sarana prasarana rehabilitasi sosial memang diperlukan sarana dan peralatan untuk bimbingan keterampilan, sarana keterampilan yang kita punya merupakan aset lama milik balai remaja dan balai diklat.” (ES, Pejabat struktural BRSPC).

Salah satu pejabat struktural BRSPC Cibabat-Cimahi membandingkan dengan kondisi balai ketika masih dibawah naungan dengan Kementerian Sosial RI, ketika dibawah naungan Kementerian Sosial RI balai mendapatkan bantuan JICA untuk alat assesmen vokasional. Secara umum menurut pejabat struktural ini, secara program pelayanan lebih bagus ketika di bawah naungan Kementerian Sosial namun dari sisi kesejahteraan pegawai lebih bagus pada saat sekarang yaitu di bawah naungan Pemerintah. Sarana dan prasarana yang dulunya aset Kementerian Sosial RI pada awalnya cukup membebaskan BRSPC Cibabat-Cimahi karena kurangnya biaya pemeliharaan. Namun permasalahan tersebut mulai teratasi sejak 2 tahun terakhir. Dengan demikian terjadi peningkatan sarana dan prasarana gedung terutama akibat dari program revitalisasi sarana dan prasarana. Namun dari segi sarana dan prasarana layanan tidak mengalami perkembangan bahkan lebih baik ketika pada saat bergabung dengan Kementerian Sosial, saat itu balai mempunyai alat assesmen vokasional.

Budaya Kerja: pegawai khususnya yang terkait dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas diharapkan memiliki jiwa penolong dan cinta terhadap klien. BRSPC Cibabat-Cimahi berusaha mengembangkan budaya jiwa menolong dan cinta kasih kepada pegawai dan klien. Meski sudah berjalan, namun seringkali masih terkendala dengan motivasi pegawai dan kondisi klien. Akibatnya, pengembangan budaya masih terbatas orang per orang dan bukan kepada lembaga. Untuk budaya di kelas, klien juga dibiasakan seperti yang dilakukan sekolah-sekolah pada umumnya. Kebiasaan tersebut antara lain dengan membiasakan tiap hari untuk masuk kelas dan diperkenalkan untuk piket kelas. Selain itu juga dilakukan pemilihan pengurus angkatan ketua, sekretaris dan bendahara. Pihak BRSPC Cibabat-Cimahi juga mendukung program-program yang dilakukan

klien yang ditujukan untuk menjalin keakraban dan kekompakan antar klien.

“Di sini mengikuti tata tertib secara umum saja, seperti disini tidak boleh pegang HP, tidak boleh merokok. Mereka boleh pegang HP tapi ada waktunya, pagi HP dititip ke pembimbing dan sore dikembalikan. Untuk satu wisma (20 klien) satu pembimbing.” (PS, Pekerja Sosial BRSPC). Untuk ketertiban pelayanan, juga dibudayakan aturan penggunaan HP pada saat bimbingan. HP dititipkan kepada pembimbing (pagi hari) dan setelah bimbingan (sore) HP dikembalikan kepada klien.

Teori: Pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh peksos, diakui oleh pejabat struktural di BRPSC Cibabat-Cimahi masih menggunakan teknik dan metode yang lama. Teknik dan metode tersebut didapat peksos melalui pendidikan formal di perguruan tinggi maupun melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Kemensos RI maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Metode dan teknik yang digunakan untuk pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas tersebut menurut peksos di BRSPC Cibabat- Cimahi menggunakan *case work* (bimbingan sosial individu), *group work* (bimbingan sosial kelompok), dan *community organization and community development* (bimbingan sosial dengan masyarakat) yang merupakan standar baku pelayanan rehabilitasi sosial.

Umpan Balik: Pada pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas BRSPC Cibabat-Cimahi senantiasa melakukan peningkatan pelayanan, untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelayanan maka dilakukan kajian mengenai penyandang disabilitas yang dilakukan pada tahun 2012 dengan melibatkan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (B2P2KS Lembang) Kementerian Sosial R.I.

“Kita juga tahun 2012 melakukan kajian mengenai pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan perguruan tinggi STKS Bandung dan UPI Bandung serta Balai Diklat Kemensos B2P2KS.” (ES, Pejabat struktural BRSPC).

Sebagai upaya untuk mendapatkan umpan balik, BRSPC Cibabat-Cimahi melaksanakan kajian dengan melibatkan perguruan tinggi.

3. Konversi Operasi

Konversi operasi terdiri dari komponen struktural dan proses fungsional. Komponen struktural BRSPC Cibabat-Cimahi terdiri dari unsur pejabat struktural yang terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penerimaan dan Penyaluran, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, selain pejabat struktural tersebut terdapat juga fungsional umum dan fungsional pekerja sosial. Kepala BRSPC Cibabat-Cimahi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok BRSPC Cibabat-Cimahi. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum. Kepala Seksi Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penyaluran bagi penyandang cacat, khususnya penyandang cacat tubuh dan tuna rungu wicara. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, khususnya penyandang cacat tubuh dan tuna rungu wicara. Pejabat fungsional peksos bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Pengisian formasi untuk pejabat struktural bukan merupakan wewenang dari BRSPC Cibabat-Cimahi, tetapi ditentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Provinsi Jawa Barat. BRSPC Cibabat-Cimahi hanya bisa mengusulkan saja, sedangkan keputusan akhir tetap ada di Baperjakat. Hal tersebut yang menjadi penyebabseringnya pejabat struktural dipegang oleh orang yang tidak mempunyai pengalaman dan tidak memiliki latar belakang ilmu kesejahteraan sosial. Salah satunya tercermin pada pejabat kepala balai saat ini yang sebelumnya menjadi pejabat di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu terkesan ada "gesekan" antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional khususnya peksos.

Salah satunya karena peksos merasa sering diatur oleh pejabat struktural khususnya dalam urusan anggaran.

Proses Fungsional, proses pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendekatan bertahap yaitu sosialisasi, seleksi, assesmen, penerimaan dan orientasi, serta bimbingan keterampilan. Sosialisasi dilakukan oleh petugas dari BRSPC Cibabat-Cimahi ke calon klien dan Dinas Sosial kabupaten/kota. Pelaksanaan seleksi diselenggarakan di kabupaten/kota dan bukan dilakukan oleh petugas dari BRSPC Cibabat-Cimahi tapi dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat. Akibatnya calon klien sering dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan.

Proses assesmen dilakukan dua kali yaitu asesmen yang dilakukan di kabupaten/kota dan assesmen ketika calon klien berada di BRSPC Cibabat-Cimahi. Pada proses assesmen yang dilaksanakan oleh BRSPC Cibabat-Cimahi melibatkan dokter, pekerja sosial dan lain-lain. Hasil dari assesmen vokasional yang dilakukan oleh petugas BRSPC Cibabat-Cimahi seringkali tidak memuaskan klien. Misalnya pada proses assesmen terungkap bahwa minat klien adalah keterampilan salon namun karena keterbatasan kapasitas maka terpaksa peminatan keterampilan tersebut dialihkan kepada kelas keterampilan yang masih kosong misalnya menjahit. Proses assesmen seharusnya tidak hanya sebatas kepada asesmen vokasional, namun juga dilakukan untuk mengungkap latar belakang keluarga, sehingga dapat ditemukan permasalahan klien yang sebenarnya dan dapat diberikan solusi yang tepat.

Proses penerimaan dilakukan melalui seleksi administrasi dan penempatan di asrama. Penyandang disabilitas tubuh dan rungu wicara digabung dalam satu asrama. Upaya tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan jumlah antara klien penyandang disabilitas tubuh dan rungu wicara. Penggabungan ini juga mempunyai tujuan agar klien saling kenal dan beradaptasi dengan orang yang baru dikenal. Sedangkan proses orientasi bertujuan untuk mengenalkan klien kepada program-program di BRSPC Cibabat-Cimahi, tata tertib selama mengikuti

bimbingan, dan memperkenalkan lingkungan di BRSPC Cibabat-Cimahi.

Salah satu pelayanan rehabilitasi sosial yang cukup diminati di BRSPC Cibabat-Cimahi adalah bimbingan keterampilan. Terkesan bimbingan keterampilan menjadi menu utama pelayanan, padahal menurut peksos seharusnya bimbingan sosial lebih diutamakan. Dengan bimbingan sosial, klien menjadi lebih termotivasi serta lebih memahami etika sosial dan dinamika kelompok sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Menurut peksos, bimbingan sosial di BRSPC Cibabat Cimahi belum begitu maksimal dan baru berhasil antara 60-75 persen. Meski demikian, hasilnya sudah cukup terlihat, seperti klien sudah berani bicara di depan umum, lebih percaya diri, tidak minder dan sudah lebih terbuka.

4. Output

Tujuan dari pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPC Cibabat-Cimahi adalah meningkatkan kemandirian agar mereka dapat berfungsi sosial. Keberfungsian sosial tidak hanya mampu berkomunikasi dengan masyarakat saja akan tetapi juga membuat klien benar-benar diterima oleh masyarakat sekitar dan mempunyai keterampilan yang mampu menghidupi mereka. Diharapkan penyandang disabilitas tidak menjadi beban orang tua dan orang lain seperti penyandang disabilitas yang menjadi pengemis di jalanan padahal terlihat fisiknya masih kuat. Setelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPC Cibabat-Cimahi maka klien akan dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Namun untuk memastikan bahwa klien benar-benar mandiri maka dilakukan pembinaan lanjut.

Berdasarkan hasil pembinaan lanjut, klien yang sudah menerima pelayanan dan benar-benar mampu berfungsi secara sosial dan mandiri hanya 60 persen. Pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPC Cibabat-Cimahi memang tidak mengharuskan klien bisa mampu bekerja karena memang tergantung dengan usaha klien sendiri. Namun seringkali bantuan untuk kewirausahaan yang diberikan pada saat selesai menerima pelayanan, disalahgunakan untuk keperluan lain. Bantuan peralatan yang diberikan seringkali dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ketidakberhasilan pelayanan, antara lain senantiasa berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang dulunya tempat magang. Namun permasalahannya adalah letak perusahaan yang relatif jauh dari rumah sehingga gaji yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pelayanan rehabilitasi sosial BRSPC Cibabat-Cimahi tetap mengikuti standar pelayanan dari Kemensos tapi disesuaikan dengan kondisi dan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wajar saja pemerintah pusat bertujuan menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial yang paripurna, namun pemerintah daerah seringkali terkendala dengan anggaran. Hal itulah yang dapat menimbulkan dualisme kebijakan antara Kemensos dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam implementasinya, dualisme kebijakan terkadang dapat menjadi faktor penghambat dalam pelayanan rehabilitasi sosial BRSPC Cibabat Cimahi.

E. Penutup

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan temuan pokok yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu: tidak semua penyandang cacat tubuh dan tuna rungu wicara dapat menjadi klien BRSPC karena ada persyaratan. BRSPC Cibabat Cimahi hanya mampu melayani 100 klien per tahun, namun dalam implementasinya BRSPC Cibabat Cimahi terkadang mengalami kesulitan mencari klien sehingga persyaratan klien ada yang dilanggar hanya untuk memenuhi kuota. SDM BRSPC Cibabat Cimahi masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keseluruhan pembiayaan BRSPC Cibabat Cimahi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Kondisi struktur anggaran pada saat ini lebih banyak teralokasikan untuk memenuhi anggaran biaya tetap, sedangkan biaya untuk pelayanan rehabilitasi sosial relatif lebih kecil dibanding alokasi biaya tetap. Sarana dan prasarana hampir semua telah tersedia namun dirasakan masih kurang memadai. Penambahan sarana dan prasarana lebih berorientasi kepada sarana/prasarana umum dan tidak khusus untuk kebutuhan klien.

Metode dan teknik yang digunakan untuk pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di BRSPC Cibabat-Cimahi masih menggunakan metode lama. Metode tersebut adalah *case work* (bimbingan sosial individu), *group work* (bimbingan sosial kelompok), dan *community organization and community development* (bimbingan sosial dengan masyarakat) yang merupakan standar baku pelayanan rehabilitasi sosial. Komponen struktural pada BRSPC Cibabat-Cimahi terdiri dari unsur pejabat struktural yang terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penerimaan dan Penyaluran, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, selain pejabat struktural tersebut terdapat juga fungsional umum dan fungsional pekerja sosial. Proses fungsional adalah pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui pendekatan bertahap yaitu sosialisasi, seleksi, assesmen, penerimaan dan orientasi, serta bimbingan keterampilan.

Tujuan dari pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPC Cibabat-Cimahi adalah meningkatkan kemandirian agar mereka dapat berfungsi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial BRSPC Cibabat-Cimahi tetap mengikuti standar pelayanan dari Kemensos tapi disesuaikan dengan kondisi dan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini merekomendasikan, bahwa klien BRSPC Cibabat Cimahi adalah penyandang disabilitas cacat tubuh dan rungu wicara yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, seharusnya perbandingan peksos dengan klien adalah 1:5 bukan 1:20 seperti kondisi. Seharusnya peksos selalu menambah pengetahuan tentang teknik dan metode pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan formal di perguruan tinggi maupun melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga peksos lebih profesional dalam melayani klien. Diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap bimbingan baik bimbingan keterampilan maupun bimbingan sosial supaya dapat diukur kuantitas dan kualitasnya. Hal itu untuk menyeimbangkan porsi antara bimbingan keterampilan dengan bimbingan sosial. Diperlukan koordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan LSM dalam

penyaluran klien ke perusahaan yang dulunya sebagai tempat magang.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2012). *Jawa Barat Dalam Angka 2012*.
- Berita satu. (2013, Maret 22). *Program Rehabilitasi Sosial Dinilai Belum Memuaskan*. Dipetik Maret 23, 2013, dari Berita Satu: <http://www.beritasatu.com/nasional/103507-program-rehabilitasi-sosial-dinilai-belum-memuaskan.html>
- Dale, O. d. (2006). *Human Behavior and the Social Enviroment: Social Systems Theory*. Boston: Pearson.
- Haryati Roebyantho, S. S. (2010). *Penelitian Pola Multi Layanan Pada Panti Sosial Penyandang cacat*. Jakarta: P3KS Press.
- Hasenfeld, Y. (1983). *Human Service Organizations*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Kementerian Sosial RI. (2010). *Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial RI*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Pusdatinkesos. (2012). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 2011*. Jakarta: Pusdatinkesos.
- Situmorang, C. H. (2012). Penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang sosial di daerah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 150.
- Sutaat. (2012). *Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi di Tiga Provinsi)*. Jakarta: P3KS Press.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional di Pantai Arungkeke

Life Strategy Continuation of Traditional Fishermen in Arungkeke Coastal Area

Tateki Yoga Tursilarini

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Kantor: Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta. Telpn (0274) 377265.

Faximile (0274) 373530. E-mail tursilarini@gmail.com.

Diterima 2 Januari 2014, direvisi 16 April 2014, disetujui 9 Mei 2014.

Abstract

The problem faced by fishermen community in Arungkeke Village is caused by the difficulty to develop their business, limited resource of capital, fuel increasing that is not in balance with their captive. Their selves adaptation strategy to stanch their lives finally enable them to get out from vulnerable lives. Data resource are family heads and their members. Informants are from related institutionals, village apparatus, local public figures, and social institution committed to fishermen lives. Data are gathered through interview, focused group discussion, and documnetary analysis. Data are analysed through interpretative-descriptive technique. It is found that living strategy to stanc their lives are business diversification, family money management enhancement, and local value application. Those strategies survive their lives. It is recommended that fishermen need to be educated in skill and expertisement on management strategy so that fisheries and rumput laut are marketable as other products. It needs always to be increased their motivation, spirit, and community support so that they always work independently form others. For local goverment, social, fishery and oceanery, non-government organization should have same commitement to help fishermen out form poverty, because support and policy consistency are needed to develop Arungkeke shore area, and will bring a good impact on fishermen welfare enhancement it that area.

Keywords:

Lives Continuation-Traditional Fishermen-Shore Area

Abstrak

Permasalahan yang dialami masyarakat nelayan di Desa Arungkeke antara lain disebabkan kesulitan pemilik usaha mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber modal, kenaikan harga BBM tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan. Strategi adaptasi nelayan dalam bertahan hidup pada akhirnya mampu keluar dari keterpurukan atas upaya masyarakat sendiri, mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Sumber data adalah kepala keluarga dan anggota keluarga nelayan, dan informan dari instansi terkait, aparat desa, tokoh masyarakat, lembaga sosial yang peduli terhadap nelayan. Data digali melalui wawancara, FGD, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif interpretatif. Strategi kelangsungan hidup nelayan, meliputi penganeekaragaman mata pencaharian, pengelolaan keuangan keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal. Sejumlah strategi tersebut mampu menjawab berbagai masalah nelayan sehingga tetap survive dalam hidupnya. Direkomendasikan, nelayan perlu diberi pengembangan keterampilan dan keahlian tentang metode dan strategi manajemen, sehingga produk perikanan dan rumput laut mampu bersaing dengan produk lainnya. Perlu selalu ditumbuhkembangkan motivasi, semangat dan dukungan bagi masyarakat nelayan agar tetap berkarya dan produktif tanpa menggantungkan pada pihak lain. Bagi Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menjalin kerjasama dalam upaya membantu masyarakat nelayan keluar dari belenggu kemiskinan, karena dukungan dan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pantai Arungkeke, akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Kata kunci:

Kelangsungan Hidup-Nelayan Tradisional-Pesisir

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian dunia di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: keberanian dan ketangguhan pelaut-pelaut Indonesia sudah sejak lama dikenal di berbagai belahan dunia, bahkan di beberapa

wilayah tertentu seolah telah menjadi legenda; Indonesia memiliki potensi sumber daya dan produksi ikan yang sangat besar dan merupakan negara penghasil ikan nomor lima terbesar di dunia setelah Cina, Peru, Chili, dan Amerika Serikat. Sumberdaya pesisir kelautan adalah aset yang penting bagi negara Indonesia, ter-

bentang 5,5 juta km² lautan di Indonesia dengan sumberdaya perikanan yang beragam, setiap tahunnya 6,7 juta berbagai jenis ikan, udang, dan cumi dihasilkan dari lautan Indonesia (Abdul Mugni, 2006:1). Ironisnya potensi sumber daya laut yang berlimpah tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Terbukti sebagian besar masyarakat pesisir atau nelayan hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik, akses modal, pendidikan dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada nelayan, menjadikan nelayan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Belajar dari pengalaman masa lalu di era tahun 1970, pada saat dicanangkan kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap yang lebih dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*), tetapi kebijakan tersebut belum dapat menjangkau masyarakat pesisir, sehingga strategi pemberdayaan nelayan miskin perlu ditinjau kembali. Di satu sisi kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap telah menyebabkan meningkatnya produksi perikanan, tetapi di sisi lain kebijakan revolusi biru telah pula memperparah dan meningkatkan jumlah nelayan miskin tradisional karena kalah bersaing dengan nelayan bermodal, bahkan meningkatkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya laut yang tidak beraturan. Pada tahun 1980-1996 kebijakan ini diperbaharui lagi dengan diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan, baik melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas dan pemberian izin kapal asing. Dalam perkembangan revolusi biru, pemerintah tidak hanya mengintervensi nelayan melalui modernisasi perikanan, tetapi juga mengeluarkan berbagai regulasi hukum, misalnya Undang-Undang Perikanan tahun 1995 dan Keputusan Presiden No 39 Tahun 1980 yang melarang pengoperasian jaring *trawl* (pukat harimau). Pada kenyataannya kebijakan revolusi biru serta berbagai regulasi hukum yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya menunjukkan signifikansi yang nyata dalam kehidupan

masyarakat nelayan khususnya nelayan *grass-root* sebagai *common people*. Sebagian besar nelayan tradisional di Indonesia sampai saat ini masih hidup dalam situasi sosial dan ekonomi di bawah standar (taraf hidup yang subsisten dan situasi sosial yang tertinggal) dan cenderung tereksplorasi (Andri Adi Arif, 2010).

Menurut data BPS mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia tahun 2011 mencapai 787 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Sebanyak 7,87 juta nelayan berasal dari sekitar 10.600 desa miskin yang tersebar di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air, termasuk salah satunya di kawasan pesisir Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan data tingkat kemiskinan masyarakat pesisir pantai tahun 2002, apabila indikator kemiskinan adalah penghasilan 1 dolar AS per hari, maka sebanyak 32 persen dari 16 juta KK nelayan atau sekitar 5.120.000 KK termasuk katagori miskin, dan apabila indikator kemiskinan adalah berpenghasilan 2 dolar AS per hari, maka jumlah nelayan miskin sekitar 60 persen dari 16 juta KK atau sekitar 9.600.000 KK.

Kondisi kehidupan masyarakat pesisir di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir atau nelayan di pesisir pulau Jawa. Desa Arungkeke merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya berada di pesisir pantai. Sebagai daerah perairan, Desa Arungkeke yang termasuk perairan laut Flores pada awalnya merupakan pesisir yang dapat dijadikan sumber mata pencaharian nelayan. Perairan Kabupaten Jeneponto merupakan pertemuan massa air dari Selat Makassar dan Laut Flores yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 4 (WPP) Selat Makassar dan Laut Flores, merupakan salah satu WPP yang masih dapat dikembangkan karena tingkat pemanfaatannya baru mencapai 70,50 persen. Akan tetapi sejak tahun 2001-2004 terjadi penurunan kegiatan usaha perikanan *mini purse seine* yang ditandai dengan penurunan jumlah armada penangkapan. *Mini purse seine* (pukat cincin) adalah alat tangkap yang dilingkari cincin atau tali kerut yang berfungsi sebagai kantong untuk mengumpulkan ikan/menjaring ikan. Beberapa

faktor penyebab, diantaranya diduga karena kesulitan beberapa pemilik usaha perikanan *mini purse seine* untuk mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber permodalan, sehingga beberapa kapal *mini purse seine* bertonase kecil dialih fungsikan menjadi kapal pengangkut kayu, dan kenaikan harga BBM pada saat itu tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan sehingga nelayan banyak yang merugi. Karena merugi para pemilik kapal *mini purse seine* menjual kepada pengusaha gill net ke daerah lain, selain itu juga karena kapal gill net membutuhkan BBM lebih sedikit dibanding *purse seine*.

Hasil penelitian Kusnadi (2002:1-24) tentang nelayan di pantai utara Jawa permasalahan di atas juga dialami para nelayan, bahwa pada umumnya masyarakat nelayan di desa-desa Pantai Utara Jawa, nelayan yang bisa bertahan dan meningkat kesejahteraan hidupnya adalah nelayan-nelayan bermodal besar yang kemampuan jelajahnya hingga lepas pantai, akan tetapi jumlah mereka relatif kecil. Sebaliknya untuk nelayan tradisional dengan kepemilikan modal dan kemampuan peralatan tangkap yang sangat terbatas tidak akan mampu bersaing dalam memperoleh hasil tangkapan. Sehingga secara sosial ekonomi tingkat kehidupan nelayan kecil atau tradisional tingkat kesejahteraan hidupnya rendah, dalam struktur masyarakat nelayan, kelompok nelayan tradisional dan nelayan buruh merupakan lapisan sosial yang paling miskin.

Beberapa kendala yang dihadapi nelayan tradisional di Desa Arungkeke, serta berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada nelayan tradisional, berbagai cara ditempuh agar dapat bertahan hidup (survival) dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya kelautan pesisir pantai Arungkeke. Upaya untuk bertahan hidup, sejumlah nelayan yang memiliki sampan mencoba bertahan sebagai nelayan, dengan pekerjaan tambahan bertani rumput laut, sedangkan yang tidak memiliki perahu dan tidak dapat bekerja di kapal-kapal penangkap ikan bekerja serabutan sebagai buruh, penarik becak di Kabupaten Jeneponto atau Kota Makassar. Pada saat itu kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seolah mimpi yang tak mungkin jadi kenyataan.

Terlebih lagi apabila batasan kebutuhan dasar (*basic need*), adalah tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk perlengkapan rumah tangga dalam suatu keluarga, demikian juga tersedianya fasilitas umum, air minum, sanitasi, angkutan, kesehatan dan pendidikan (Mulyanto & Evers, 1985).

Kemampuan nelayan tradisional Desa Arungkeke secara perlahan-lahan keluar dari kemiskinan yang dialami, diakui berkaitan erat dengan jiwa dan semangat sebagai bangsa maritim yang ditandai suatu nilai budaya yang dimiliki dengan keberanian menantang alam, serta kegigihan dan ketangguhan dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut telah diwarisi oleh para nelayan dari orangtua bahkan dari nenek moyangnya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri nelayan tradisional Desa Arungkeke juga terikat oleh kebudayaan Bugis-Makassar yang cenderung ekspresif dan lebih terbuka. Budaya bangsa maritim yang telah melekat erat dalam jiwa nelayan, menumbuhkan semangat pantang menyerah dalam mensikapi berbagai permasalahan yang menderanya, diperlukan berbagai strategi agar tetap eksis dan bertahan ditengah-tengah goncangan yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Deskripsi tentang nelayan tradisional dengan mengambil tindakan demi kelangsungan hidup dengan melakukan beberapa strategi survival dan pada akhirnya mampu keluar dari keterpurukan atas upaya masyarakat sendiri, telah mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Oleh sebab itu tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi ketahanan hidup nelayan tradisional dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, sosial budaya, alam oleh nelayan tradisional.

Kajian Teori

Kemiskinan sering dikaitkan dengan sifat kekurangan dan ketidakberdayaan, kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan struktural. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diper-

lukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Ahmad Avenroza dkk, 2007:6).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau disebabkan karena kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan, banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang kurang beruntung dan terperangkap dalam perlakuan yang tidak adil menjadikan serba berkekurangan dan tidak sesuai dengan tuntutan hidup yang layak (Suyanto, 1995:59).

Beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Aulia (2009), terkait dengan tiga dimensi, yaitu: Dimensi ekonomi, kurangnya sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial orang, baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Dimensi sosial budaya, kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat; Dimensi sosial dan politik, rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Arif Satria (2009: 25-26), kemiskinan masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi tiga macam: kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan, karena struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur politik yang tidak kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemiskinan kul-

tural merupakan kemiskinan yang disebabkan faktor budaya, seperti kemalasan, cara berfikir fatalistik, dan rendahnya etos kewirausahaan. Sementara itu kemiskinan alamiah terjadi karena kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan produksi. Ketiga tipe kemiskinan tersebut terkait satu sama lain. Misalnya, kemiskinan kultural dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, padahal mereka pun sebenarnya juga memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan. Keterbatasan memperoleh akses pendidikan terjadi karena ketidakmerataan pembangunan. Begitu juga mereka miskin karena tidak punya modal. Hal ini disebabkan juga karena keterbatasan mereka untuk mengakses di lembaga permodalan, baik bank maupun lembaga non bank. Keterbatasan akses tidak semata karena faktor geografis mengingat wilayah pesisir relative jauh dari perkotaan, tetapi juga karena kebijakan perbankan yang melihat kegiatan perikanan sebagai kegiatan yang penuh ketidakpastian dan resiko. Selain pertimbangan resiko dan sifat usaha yang musiman, sebagian besar pelaku ekonomi pada sektor ini juga tergolong dalam pengusaha dengan skala usaha ekonomi rendah dan tidak memiliki asset dalam jumlah berarti. Kondisi ini menyebabkan mereka tersisih dari jangkauan lembaga perbankan yang masih mendasarkan pada ketersediaan jaminan dan bukan kelayakan usaha dalam penyaluran dananya. Artinya, ketidakberdayaan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh situasi yang tidak mereka kendalikan.

Secara umum nelayan tradisional diartikan sebagai nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana, dan orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kusnadi, 2008:85-86). Lebih jauh tentang nelayan tradisional, Bagong Suyanto, (1996:7-15) menggambarkan, bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, karena sedikit goncangan atau kebutuhan mendadak, mereka akan *collapse*. Faktor penyebabnya adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai

dari kungkungan alam dan irama musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi penangkapan ikan, kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, dan posisi tawar-menawar yang lemah. Terkait dengan kondisi kemiskinan nelayan, Arif Satria (2008) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan di Indonesia yang sebagian besar merupakan nelayan miskin, hampir dapat dijumpai di setiap daerah pesisir pantai di Pantai Utara Jawa kondisi tingkat kesejahteraan hidupnya rendah. Kemiskinan di kampung-kampung nelayan khususnya nelayan tradisional dan buruh nelayan menjadi fenomena umum yang banyak terjadi.

Keseluruhan ciri yang melekat pada diri nelayan tradisional tersebut merupakan faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional yang bersifat internal. Selain itu, terdapat faktor-faktor penyebab eksternal kemiskinan nelayan tradisional, antara lain: Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat; Praktik penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; Penegakan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen; Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia, Kusnadi (2008:19).

Menurut Boedisantoso (1999), pada umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Keterbatasan ekonomi nampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah, sedangkan keterbatasan sosial yang dialami oleh nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara fisik masyarakat

tidak lagi dapat dikatakan terisolasi atau terasing. Keterbatasan sosial lebih terwujud dalam ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi ke luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Kenyataan inilah mengakibatkan masyarakat nelayan mengalami nasib terpinggirkan (marginal) dari proses kemajuan. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Dikaitkan dengan kondisi kehidupan nelayan tradisional, maka dapat dipastikan bahwa nelayan tradisional berada jauh dari kondisi sejahtera.

Kajian mengenai nelayan tradisional mengungkapkan bahwa ketidakmampuan nelayan miskin melepaskan diri dari kemiskinannya disebabkan tidak adanya modal dan tidak adanya akses ke lembaga-lembaga keuangan. Sebagian besar masyarakat nelayan tradisional tersebut berada dan hidup di desa-desa pesisir pantai yang kondisi perairannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk memanfaatkan sumber daya perikanan karena daerah perairannya sudah dalam kondisi tangkap lebih. Masyarakat nelayan tradisional juga menghadapi berbagai tekanan sosial ekonomi yang sangat berat, kondisi ini apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat nelayan yang kondisi sumber daya perairannya masih potensial. Oleh karena itu agar masyarakat nelayan tradisional tetap dapat memiliki kelangsungan dalam hidupnya diperlukan berbagai strategi untuk mengatasinya. Berbagai strategi kelangsungan hidup nelayan tidak hanya bertumpu pada satu mata pencaharian saja sebagai penangkap ikan, yang mana sumber mata pencaharian tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan penyediaan mata pencaharian lain sebagai alternatif yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan sosialnya. Selain itu, masyarakat nelayan melakukan penghematan serta penye-

suaian dengan penghasilan yang diperoleh atau mengelola pendapatan keluarga. Strategi lainnya dengan menerapkan nilai-nilai budaya lokal berupa gotong royong antara nelayan dengan pemilik perahu.

Strategi kelangsungan hidup tersebut, secara harfiah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai cara, metode dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk digunakan sebaik mungkin agar tetap bertahan hidup. Memang mengharapkan nelayan untuk bekerja di luar bidang perikanan yang mungkin telah digeluti selama hidupnya tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah mengubah persepsi dan sikap seseorang terhadap suatu bidang pekerjaan. Akan tetapi dalam bidang apapun seseorang bekerja, dapat dipastikan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat hidup sejahtera atau mencapai suatu tingkat kesejahteraan sosial tertentu. Pilihan bidang pekerjaan akan didasarkan pada keyakinan bahwa pekerjaan tersebut akan memberi penghasilan sesuai dengan yang diharapkan.

Berbagai strategi diversifikasi dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional pada dasarnya merupakan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian. Strategi diversifikasi ini berkaitan erat dengan perubahan sikap dan proses persuasi. Sehubungan dengan sikap dan persuasi sejumlah teori telah dikemukakan oleh para ahli psikologi. Pada awal tahun 1970-an Dr. Martin Fishbein mengemukakan teori nilai harapan (*value-expectancy theory*). Sejak pertama kali dikemukakan pada awal tahun 1970-an, *value-expectancy theory* telah mengalami perkembangan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji keabsahan teori ini. Tidak mengherankan jika latar belakang teori ini adalah psikologi, karena teori ini dikemukakan oleh beberapa psikolog terkemuka, seperti Martin Fishbein, Icek Ajzen dan Philip Palmgreen. Teori ini memprediksi sikap manusia terhadap objek dan tindakan. Teori ini sangat penting untuk mengetahui *expectancy* (harapan), *values* (nilai), *beliefs* (keyakinan), *attitude* (sikap), dan *gratification sought* (pencarian kepuasan).

Berbagai strategi untuk kelangsungan hidup nelayan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan nelayan tradisional agar tetap survive. Menurut Pretty (1995), tingkat partisipasi dapat dibagi dalam tujuh tipe, yaitu: *manipulative participation*, *passive participation*, *participation by consultation*, *participation for material incentives*, *functional participation*, *interactive participation*, dan *self-mobilization*. Dalam konteks penelitian ini, strategi kelangsungan hidup nelayan merupakan upaya diri untuk mengatasi masalah diri sendiri. Upaya pengentasan kemiskinan harus diarahkan yang bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan kemiskinan yang dialami. Beberapa strategi yang dilakukan masyarakat nelayan miskin merupakan partisipasi *self-mobilization* (partisipasi mandiri), masyarakat nelayan berpartisipasi dengan jalan mengambil inisiatif secara independen untuk merubah sistem, yaitu strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai budaya lokal masyarakat.

Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan utama menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut (Travers, 1978 dan Gay, dalam Consuelo G Savila, 1993: 70). Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif* yaitu wilayah pesisir pantai yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Dasar penentuan lokasi merupakan salah satu kabupaten dari 50 kabupaten tertinggal di Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut ditentukan kabupaten sebagai lokasi penelitian, di Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Sulawesi.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Informan, dengan kriteria orang yang mengetahui seluk beluk permasalahan kehidupan nelayan, 10 orang; Keluarga nelayan tradisional, terdiri dari kepala keluarga/suami dan anggota

(isteri, anggota keluarga lain/anak yang berusia 17 tahun ke atas dan belum berumah tangga), 6 keluarga/18 orang (terdiri dari suami 6 orang, isteri 6 orang dan anak 6 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan panduan wawancara, untuk data primer. *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan dalam rangka pengayakan data primer, dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan dunia nelayan. Dalam FGD dilibatkan tokoh masyarakat nelayan; wakil keluarga nelayan tradisional; pejabat setempat terkait (dari dinas sosial; kelautan dan perikanan; camat; aparat desa).

Teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi populasi nelayan tradisional, profil lokasi penelitian, potensi sumber daya yang tersedia di wilayah penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik observasi, digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas keseharian masyarakat nelayan dengan segala keunikan dan karakteristik masing-masing. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, untuk menganalisis tentang beberapa strategi nelayan tradisional dalam upaya mempertahankan kehidupan.

Hasil Penelitian: Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional Arungkeke

1. Potensi Sumber Daya Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Arungkeke

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Wilayah Kabupaten Jeneponto memanjang dari Timur ke Barat dengan panjang garis pantai $\pm$ 95 km. Perairan Kabupaten Jeneponto merupakan pertemuan massa air yang berasal dari Selat Makassar dan Laut Flores yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 4 (WPP 4). Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, produksi ikan yang didaratkan setiap tahunnya rata-rata 13.116,2 ton berupa ikan pelagis kecil. Kabupaten Jeneponto memiliki 35 Desa/Kelurahan yang terletak di pesisir pantai, salah satu di antaranya adalah Desa Arungkeke yang dipilih sebagai lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Desa Arungkeke merupakan salah satu desa dari tujuh desa di Kecamatan Arungkeke, sebagai desa pantai, Desa Arungkeke mempunyai garis pantai sepanjang $\pm$ 2 Km. Terdapat dua dusun dari enam dusun di Desa Arungkeke yang terletak di tepi pantai, yaitu Dusun Lassang-lassang dan Dusun Sicini. Tidak diperoleh data tentang potensi lestari perikanan di perairan Desa Arungkeke, sehingga tidak diketahui berapa besar potensi lestari perikanan Desa Arungkeke yang telah dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan. Jenis mata pencaharian penduduk dari 300 orang penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan 121 orang sebagai petani tambak. Petani tambak tersebut sebagian besar budidaya ikan bandeng dan udang windu dengan mengelola tambak seluas 129 ha. Pada tahun 2009, produksi perikanan Desa Arungkeke meliputi, produksi ikan laut 1.016,7 ton, rumput laut 277,7 ton, bandeng 98,84 ton, udang windu 23,42 ton.

Sumber daya pertanian, dilihat dari luas wilayah Desa Arungkeke adalah 3,09 km², 166 ha (53,72 persen) merupakan areal pertanian berupa sawah 136 ha; tegalan 23,25 ha; dan pekarangan seluas 6,75 ha. Penduduk Desa Arungkeke yang bermata pencaharian pokok sebagai petani adalah sebanyak 731 orang. Tidak ada komoditi pertanian yang menjadi andalan, karena kontribusi Desa Arungkeke dalam produksi pertanian dan perkebunan Kecamatan Arungkeke hanya berkisar antara 2-3persen dari seluruh produksi pertanian dan perkebunan Kecamatan Arungkeke. Produksi pertanian dan perkebunan pada tahun 2009, meliputi: padi 627,5 ton, jagung 162 ton, ubi kayu 4,5 ton, bawang merah 1,85 ton, lombok 3 ton, kelapa 40 ton, kapas 61 ton.

Sumber daya alam berupa pariwisata pantai sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena dari tujuh desa di Kecamatan Arungkeke enam desa merupakan desa pantai. Meskipun demikian, potensi wisata pantai belum dimanfaatkan secara memadai karena terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Salah satunya desa yang saat ini memiliki potensi wisata pantai yang cukup besar adalah Desa Arungkeke, seiring dengan dibangunnya 144 unit rumah nelayan yang tertata rapih. Sarana

dan prasarana wisata pantai yang dimiliki Desa Arungkeke saat ini adalah dermaga kayu sepanjang 70 m yang dapat dijadikan tempat berteduh dari hujan dan sengatan matahari. Saat ini sedang dibangun jalan beton sepanjang 500 m menyusuri tepi pantai Dusun Sicini dengan lebar 3 m, selain itu sarana prasarana dengan telah dibangun sejumlah fasilitas MCK. Semua sarana dan prasarana yang tersedia tersebut, dan dukungan keadaan pantai yang indah dan bersih, sebenarnya memungkinkan dikembangkan Desa Arungkeke menjadi obyek wisata pantai, terlebih lagi apabila warga masyarakat dibimbing dan dibina agar memiliki kemampuan mengelola potensi wisata tersebut.

Sumber daya sosial yang dimiliki masyarakat sehubungan dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan potensi kebudayaan, pada dasarnya merupakan sumber daya sosial. Untuk mendeteksi potensi (SDM), cara yang paling mudah adalah menelaah tingkat pendidikan masyarakat, fasilitas kesehatan yang dimiliki, mobilitas sosial dan kondisi keberfungsian pranata sosial, etos kerja, gender, serta tradisi budaya. Penduduk Desa Arungkeke pada umumnya hanya berpendidikan SD. Sebagian kecil saja penduduk yang lulus SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, bahkan masih banyak penduduk yang buta aksara. Fasilitas pendidikan di desa ini terdapat sejumlah lembaga pendidikan, yaitu: fasilitas untuk sekolah anak-anak ada dua Taman Kanak-Kanak, tiga SD, satu MTs setingkat dan satu MAN setingkat SLTA.

Ketersediaan sarana dan petugas kesehatan di Desa Arungkeke juga masih tergolong kurang. Tetapi untuk ukuran sebuah desa nelayan dapat dikatakan cukup memadai. Sarana dan petugas kesehatan yang tersedia meliputi sebuah puskesmas, enam posyandu, satu klinik KB, enam pos KB, seorang dokter umum, delapan orang perawat, dua orang bidan dan tiga orang dukun bayi. Mencermati pemilikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, dapat dikatakan bahwa potensi sumber daya sosial di Desa Arungkeke belum memadai untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya fisik merupakan salah satu penunjang yang pokok untuk melaksanakan

pengembangan wilayah. Salah satu sumber daya fisik yang merupakan faktor penting yang dapat berfungsi untuk menunjang pengembangan wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi (jalan raya) jaringan transportasi jalan raya mulai dari ibu kota Kabupaten Jeneponto (Bontosunggu) sampai ke Desa Arungkeke, seluruhnya merupakan jalan aspal. Hal ini memberi harapan bagi pengembangan wilayah Desa Arungkeke, karena dengan tersedianya jaringan transportasi jalan raya yang representatif memudahkan mobilitas manusia, barang, jasa, dan kapital.

Di samping memiliki jaringan transportasi jalan raya yang cukup memadai, terdapat sebuah pasar yang dapat menunjang kegiatan ekonomi perdagangan serta menampung aktivitas jual-beli masyarakat. Keberadaan pasar sangat penting sebagai penggerak dinamika perekonomian lokal. Pemasaran hasil-hasil produksi dari Desa Arungkeke berupa ikan, hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan menjadi lebih mudah karena keberadaan pasar. Akan tetapi Desa Arungkeke yang merupakan desa nelayan belum memiliki Pasar Ikan, sehingga produksi perikanan dari Desa Arungkeke dijual di daerah lain di luar wilayah Kecamatan Arungkeke. Dan tentunya kondisi tersebut menyebabkan nelayan mengalami kendala untuk segera memasarkan hasil tangkapan yang diperoleh.

Sarana dan prasarana di bidang telekomunikasi yang terdapat di Desa Arungkeke dapat dikatakan cukup memadai. Di desa ini terdapat 120 sambungan telepon, 247 pesawat televisi, 226 radio, dan 673 pelan pelanggan PLN. Meskipun sarana telekomunikasi publik berupa wartel dan kantor pos belum tersedia, akan tetapi cukup banyak penduduk yang memiliki HP. Bahkan banyak nelayan yang pergi melaut berbekal Hand Phone untuk mempermudah komunikasi dengan kerabatnya di darat.

2. Aktivitas Kenelayan Daerah Pesisir Pantai Arungkeke

Aktivitas sehari-hari nelayan di Desa Arungkeke tidak berbeda dengan kampung-kampung nelayan lainnya, di daerah tersebut sebutan nelayan dibedakan nelayan *parawé* dan *papé kang*. Nelayan *papé kang* yaitu nelayan yang dalam

mencari ikan menggunakan pancing sebagai alat tangkap utama, sedangkan nelayan *parawé* yaitu nelayan yang dalam mencari ikan menggunakan peralatan tangkap ikan seperti, jaring bentang, *bubu* dan sejenisnya.

Pada pagi hari sudah mulai terlihat para nelayan *parawé* istilah lokal, baru pulang dari melaut dengan membawa hasil tangkapan dengan dibantu para istri ataupun anggota keluarga yang lainnya, untuk dibawa dan dijual di pasar ikan. Setelah itu mereka pulang dan beristirahat, menjelang adzan Dhuhur para nelayan mulai melakukan aktivitas mengurus tanaman rumput laut sampai sore hari.

Kepala keluarga nelayan yang masih aktif mencari ikan, mereka pergi melaut pada pagi hari (*papé kang*) istilah lokal sebagai pemancing dan sebagai nelayan *parawé*. Nelayan *papé kang* yaitu nelayan dalam mencari ikan menggunakan pancing sebagai alat tangkap utama. Nelayan *papé kang* menggunakan waktu untuk bekerja selama 3–5 jam sehari, aktivitas mencari ikan hanya dilakukan sekitar dua jam, antara jam 06.00–08.00 pagi. Selanjutnya waktu digunakan untuk mengurus tanaman rumput laut. Nelayan *parawé* melaut pada malam hari dan menghabiskan waktu untuk bekerja rata-rata 14 jam sehari-semalam.

Menjelang azan Dzuhur tampak puluhan pria dewasa berkumpul di sekitar rumah panggung di pinggir pantai. Nelayan *parawé* tersebut merupakan nelayan yang melaut pada malam hari dan baru pulang pagi hari. Nelayan *parawé* dengan membawa peralatan tangkap ikan seperti, jaring bentang, *bubu* dan sejenisnya. Kelompok nelayan ini sepulang melaut langsung tidur, dan menjelang Dzuhur melakukan kegiatan mengurus rumput laut.

Kelompok nelayan *papé kang* pada umumnya berusia antara 35–50 tahun. Mereka merupakan korban tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari para pemilik kapal penangkap ikan. Menurunnya produksi perikanan Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004, menyebabkan banyak pemilik kapal penangkap ikan yang mengalihfungsikan kapalnya sebagai kapal pengangkut kayu, dan sebagian lagi dijual kepada pengusaha perikanan dari daerah lain. Akibatnya banyak nelayan tradisional

atau nelayan buruh Desa Arungkeke kehilangan mata pencaharian. Sejak saat itu banyak nelayan Desa Arungkeke berkecimpung di bidang pertanian rumput laut sebagai pekerjaan sampingan.

Ketidakberdayaan nelayan tradisional atau nelayan buruh, ketika pemilik kapal menganggap usaha perikanan tidak dapat lagi memberi keuntungan yang besar, mereka mengalihfungsikan kapalnya untuk usaha lain atau menjualnya tanpa harus mempertimbangkan nasib nelayan tradisional atau nelayan buruh kehilangan mata pencaharian.

Kondisi sumber daya alam yang sangat potensial karena perairan Arungkeke merupakan wilayah yang cocok untuk dijadikan areal pertanian rumput laut, sehingga tersedia mata pencaharian baru bagi nelayan tradisional Desa Arungkeke. Selain itu, didukung dengan kesediaan beberapa pemilik perahu bermesin tempel ber PK kecil (*katinting*) yang mau membantu dan bekerjasama dalam usaha budi daya rumput laut, menjadikan nelayan tradisional tidak sendirian dalam menghadapinya.

Kerjasama antara kelompok nelayan *papé kang* dengan pemilik perahu, sistem organisasi penangkapan ikan yang lama tidak dipakai lagi, tidak ada lagi pola *punggawa-sawi* (istilah lokal: *punggawa* pemilik perahu, *sawi* = awak perahu). Ikan hasil tangkapan dibagi rata antara pemilik perahu dengan nelayan setelah dipotong biaya-biaya operasional. Kemudian dalam kerjasama usaha budi daya rumput laut, pemilik perahu meminjamkan perahunya tanpa menyewa, sebagai imbalannya nelayan berkewajiban mengurus lahan rumput laut kepunyaan pemilik perahu, dari mulai memasang bibit, merawat, sampai memanen.

Kelompok nelayan *papé kang* rata-rata memperoleh penghasilan dari mencari ikan berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per hari. Oleh sebab itu beberapa nelayan mengistilahkan mencari ikan sebagai mencari makan, bukan mencari penghasilan, karena pendapatan dari mencari ikan benar-benar dihabiskan untuk makan setiap hari. Uang hasil penjualan ikan sekurang-kurangnya cukup untuk membeli dua liter beras, kopi, dan gula untuk konsumsi satu hari. Untuk lauk disisihkan dari ikan hasil tang-

kapen sebelum dijual. Jadi, kalau nelayan tidak memiliki sumber pendapatan lain, maka ungkapan “bekerja hari ini untuk makan hari ini”.

Nelayan *papé kang* Desa Arungkeke dapat melakukan kegiatan mencari ikan sepanjang tahun, mereka tidak terpengaruh oleh pederan bulan, karena hanya melaut di siang hari. Peralatan tangkap yang digunakan juga sangat sederhana, seperti perahu motor tempel ber PK kecil, pancing, jaring lempar (*jala*) dan jaring bentang (*panambé*) ukuran kecil. Lokasi penangkapan juga tidak jauh dari pantai, hanya sekitar tiga mil. Setiap perahu digunakan oleh 2–3 orang (pada umumnya dua orang). Target yang hendak dicapai pun sangat sederhana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan hari ini. Hasil tangkapan berupa ikan pelagis kecil, seperti banyar, dan kembung, serta ikan-ikan pesisir lainnya.

Penghasilan nelayan dari usaha budi daya rumput laut sangat bervariasi, tergantung luas areal yang dikuasai. Penguasaan areal pembudidayaan rumput laut ditentukan oleh besarnya modal yang ditanamkan untuk membeli tali plastik tempat mengikatkan bibit rumput laut, serta untuk membeli bambu atau kayu untuk tiang pengikat tali tempat menggantungkan bibit-bibit rumput laut. Bagi nelayan yang areal penanaman rumput lautnya sempit dan hanya bisa menghasilkan 100 kg rumput laut setiap panen, berarti hanya akan menerima Rp 400.000,- setiap 45 hari. Jumlah tersebut lebih kecil dari penghasilan mencari ikan selama 45 hari. Akan tetapi jumlah tersebut sangat berarti bagi nelayan, karena uang sejumlah itu dapat diterima sekaligus setiap panen 45 hari sekali dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di luar kebutuhan makan sehari-hari, seperti: pendidikan anak, kesehatan, kegiatan sosial, ritual keagamaan. Penghasilan nelayan *parawé* dari usaha budi daya rumput laut berkisar antara Rp 300.000,- – Rp 600.000,-.

Berbeda dengan nelayan *papé kang*, pada kelompok nelayan *Parawé*, organisasi penangkapan dan pola hubungan kerja *punggawa-sawi* masih tetap berlaku, dengan sistem bagi hasil 1-2, yaitu satu bagian untuk *punggawa* dan dua bagian untuk *sawi*. *Punggawa* merupakan pemilik modal, *sawi* atau peminjam, pekerja,

buruh disebut juga nelayan kecil. Pemilik modal berhak membeli hasil tangkapan *sawi* yang diberi modal. Dan *sawi* berkewajiban menjual hasil tangkapan kepada *punggawa* yang memodalinya. Kewajiban ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan. Modal yang diberikan oleh *punggawa* tidak terbatas pada modal materi berupa uang, tetapi juga kepada peralatan seperti kapal, mesin kapal, jaring, pancing, pukot dan sebagainya (Idham, 2010).

Peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan *parawé* sedikit lebih maju dibanding peralatan *papé kang*, mereka pada umumnya menggunakan perahu ukuran besar (*jolloro*) bermesin 12 PK, organisasi penangkapan beranggota antara 5–6 orang. Hasil tangkapan lebih bervariasi, seperti: *selar*, *lemuru*, *katamba*, dan *udang*. Nelayan *parawé* memperoleh penghasilan lebih besar dibanding nelayan *papé kang*, baik penghasilan dari menangkap ikan maupun penghasilan dari usaha budi daya rumput laut. Nelayan *parawé* rata-rata memperoleh penghasilan dari menangkap ikan berkisar antara Rp 30.000 sampai Rp 40.000,- per hari dengan hari kerja 20 hari dalam sebulan dan 14 jam dalam sehari-semalam. Kemudian penghasilan dari usaha budi daya rumput laut, nelayan *parawé*, menerima antara Rp 600.000,- sampai Rp 1.000.000,- untuk setiap panen, karena rata-rata penguasaan areal usaha rumput laut oleh nelayan *parawé*, lebih luas daripada nelayan *papé kang*.

Dengan penghasilan sejumlah itu, pada umumnya nelayan *parawé*, tidak berharap diberi ketrampilan kerja/usaha di luar bidang perikanan. Yang diharapkan adalah adanya teknologi baru dalam penangkapan ikan yang memungkinkan hasil tangkapan meningkat. Pemikiran tersebut timbul dari kesadaran bahwa kenyataannya nelayan *parawé* telah menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja sehingga kecil kemungkinan untuk bekerja di bidang lain. Sebaliknya, nelayan *papé kang*, yang penghasilannya lebih kecil dan masih mempunyai banyak waktu luang, sangat mengharapkan terbukanya lapangan kerja baru di daerahnya, baik bidang perikanan maupun non perikanan, agar mereka memperoleh kesempatan kerja untuk menambah penghasilan. Sebagian besar

nelayan Arungkeke, baik nelayan *papé kang* maupun nelayan *parawé* menyambut positif apabila diberi bimbingan ketrampilan kerja/usaha, baik bidang perikanan maupun non perikanan. Mereka sangat menyetujui pernyataan bahwa semakin banyak seseorang menguasai jenis ketrampilan kerja, semakin luas pula kesempatan untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.

3. Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional

Strategi kelangsungan hidup adalah segala upaya dengan menggunakan cara, metode dan pengalaman manusia untuk tetap bertahan hidup dan *survive* agar tetap eksis di dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya manusia memiliki daya tahan untuk tetap bertahan hidup akan tetapi semua kembali kepada manusia itu sendiri untuk bisa mengatasi segala hambatan yang dialaminya. Demikian juga yang dialami nelayan di sekitar pantai Arungkeke, bangkit untuk keluar dari keterpurukan hidup sebagai nelayan. Strategi nelayan untuk bertahan hidup merupakan wujud keberfungsian sosial pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Baker, Dubois dan Miley (1992) dalam (Suharto, 2005:146) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Pertahanan hidup bagi nelayan miskin menurut Scott (1990) dilakukan dengan berbagai upaya meliputi: Keluarga miskin mengurangi frekuensi makan dan beralih ke makan yang mutunya lebih rendah; Menggunakan alternatif sub sistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas; Menggunakan jaringan sosial yang berfungsi sebagai pereda kejut selama masa krisis ekonomi.

Strategi untuk bertahan hidup masyarakat nelayan di Desa Arungkeke setelah mengalami keterpurukan sejak tahun 2004, tidak menyurutkan semangat hidup masyarakat nelayan atas usaha sendiri bisa keluar dan mengatasi masalah tersebut. Beberapa strategi kelangsungan hidup yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Arungkeke diantaranya strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Pertama, diversifikasi mata pencaharian. Salah satu strategi bertahan hidup di tengah-tengah berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan, karena faktor di luar kemampuan nelayan, tidak mematahkan semangat nelayan untuk bangkit menghadapinya. Penganekaragaman mata pencaharian merupakan salah satu pilihan yang dilakukan nelayan, setelah pekerjaan sebagai nelayan tidak selamanya dapat menjamin kelangsungan hidup rumah tangganya. Dengan berbagai pilihan mata pencaharian, nelayan dapat kembali memenuhi pendapatan ekonomi keluarga.

Nelayan tradisional Desa Arungkeke, yaitu sebagai nelayan *parawé* dan nelayan *papé kang*. Para nelayan tersebut pada umumnya adalah pekerja yang gigih, meskipun kegigihannya dalam bekerja belum mampu membawa nelayan ke tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kegigihan nelayan Desa Arungkeke dalam bekerja dapat dilihat dari penggunaan waktu untuk bekerja. Nelayan *parawé* melaut sekitar 16 jam dalam sehari semalam untuk mencari ikan dan merawat tanaman rumput laut. Sedangkan nelayan *papé kang* walaupun hanya melaut selama lebih kurang lima jam dalam sehari, akan tetapi pada umumnya masih melibatkan diri dalam pekerjaan di darat. Data tentang pekerjaan pokok dan sampingan nelayan tradisional Desa Arungkeke menggambarkan kegigihan nelayan dalam bekerja. Kepala keluarga nelayan tradisional memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan sebagai nelayan atau pencari ikan. Mata pencaharian sampingan nelayan, ada yang menekuni sebagai petani rumput laut, petani di sawah/ladang, tukang becak, tukang kayu, buruh, dagang, dan sopir. Seperti yang diceritakan salah satu nelayan *papé kang*,

“...Sekarang kita bisa mi kerja yang lain, tidak cuma cari ikan, sekarang ada mi rumput laut jadi kalau pulang dari cari ikan kita priksa rumput laut. Kalau dapat ikan dan bisa dijual yang pergi jual orang perempuan, anak laki-laki yang sudah besar bantu urus rumput laut. Selama ada usaha rumput laut isteri dan anak-anakku sudah bisa bantu cari uang, jadi ekonomi rumah tangga juga tambah bagus. Dulu kalau ada undangan orang kawin, mamaknya anak-anak selalu pusing cari pinjaman uang, sekarang tidak mi lagi...karena kadang-kadang bisa mi menabung..”(Daeng H, hasil wawancara).

Nelayan *parawé* memang kecil kemungkinan untuk menambah pekerjaan sampingan selain budi daya rumput laut, karena pekerjaan mencari ikan dan budi daya rumput laut telah menyita sekitar 16 jam dalam sehari-semalam. Usaha yang dilakukan nelayan *parawé* untuk menambah penghasilan keluarga membuka warung di rumah menyediakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti yang diceritakan isteri S:

“Bapa’ kerja selaing mencari ikan, tanam rumput laut, dan buka usaha kecil-kecilan jualan kebutuhan sehari-hari ada beras, minyak, sabun, mie, garam dan lain-lain... Saya bantu bapa’.. pas panen rumput laut.. ibu-ibu kumpul tunggu bapa’-bapa’ ambil rumput laut dari laut..kita pisahkan yang masak, bagus, tidak ada penyakitnya setelah itu bantu kita jemur di pinggir pantai... Ya semua berkat izin Allah dibantu sama anak-anak, ya untuk putar ini usaha.” (Isteri S, hasil wawancara).

Berbeda dengan nelayan *papé kang* yang menghabiskan waktu di laut untuk menangkap ikan dan merawat rumput sekitar lima jam dalam sehari. Nelayan *papé kang* pada umumnya masih memiliki waktu luang yang dapat digunakan untuk bekerja di bidang lain. Hal ini menggambarkan bahwa nelayan tradisional di Desa Arungkeke tidak hanya sekedar bersikap positif terhadap mata pencaharian alternatif melainkan telah berpartisipasi dan berperan di dalam mengembangkan jenis mata pencaharian di luar sektor perikanan.

Salah satu strategi agar tetap bertahan hidup para nelayan melibatkan anggota kelu-

arga dalam diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian. Salah satu ciri keluarga nelayan miskin yaitu, tingginya frekuensi keterlibatan anak pra usia kerja dan istri nelayan dalam usaha ekonomi rumah tangga Mukhlis, (ed), 1988:165). Ciri keluarga nelayan miskin sesuai dengan konsep mekanisme survival yang secara tegas menjelaskan bahwa, konsep mekanisme survival menurut Moser mekanisme survival dengan melibatkan segenap anggota keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsep tersebut, Moser membuat kerangka analisis yang disebut dengan *The Asset Vulnerability Framework*. Dalam kerangka tersebut terdapat beberapa cara dalam mengelola aset, meliputi: Tenaga kerja misalnya, meningkatkan keterlibatan perempuan dan anak-anak untuk membantu perekonomian keluarga; Modal manusia, misalnya memanfaatkan status kesehatan, ketrampilan dan pendidikan untuk menentukan kapasitas orang untuk bekerja dan menentukan hasilnya; Produktivitas, misalnya menggunakan rumah, tanah dan sawah untuk keperluan hidupnya; Relasi rumah tangga atau keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme uang kiriman; Modal sosial, misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal dan memberikan kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.

Anggota keluarga nelayan tradisional yang berhasil di wawancara, berstatus sebagai istri, dan anak nelayan, semua anak laki-laki anggota keluarga nelayan tradisional bekerja melanjutkan pekerjaan orang tua sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut. Pada keluarga nelayan ada pembagian yang tegas antar anggota keluarga, pekerjaan di darat lebih banyak dilakukan oleh istri nelayan dan anak nelayan perempuan, sedangkan di laut lebih banyak dilakukan oleh nelayan (suami) dengan anak laki-laki yang telah cukup dewasa. Istri nelayan bekerja membantu suami dalam pengolahan ikan dan rumput laut. Hasil tangkapan sebagian dijual berupa ikan segar, dan ada yang diolah menjadi ikan kering, pekerjaan tersebut lebih sering dilakukan pada saat suami pulang melaut dengan membawa hasil tangkapan pada saat-saat musim panen. Sedangkan pada musim

paceklik yaitu mulai bulan November, Desember merupakan masa-masa sulit nelayan karena pada musim penghujan otomatis nelayan tidak bisa dengan leluasa melaut.

Isteri nelayan juga mau bekerja apa saja demi membantu suami dalam mengupayakan kelangsungan hidup keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga agar tidak menjadi semakin menurun. Para isteri nelayan tradisional juga mengharap diberi tambahan ketrampilan kerja agar dapat terserap di lapangan kerja lain untuk menambah penghasilan. Tidak jauh berbeda dengan kepala keluarga nelayan tradisional, anggota keluarga nelayan tradisional juga telah menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam mata pencaharian alternatif di luar bidang perikanan. Hal ini dilakukan karena keluarga nelayan tradisional tidak bisa menggantungkan perekonomian keluarga pada salah satu anggota keluarga (ayah/suami) saja. Pada keluarga nelayan tradisional di Desa Arungkeke, pola nafkah ganda terjadi ketika anak dan isteri/anggota keluarga lain ikut bekerja menambah penghasilan keluarga dan tidak hanya menggantungkan kepada kepala keluarga. Anggota keluarga nelayan yang berstatus isteri dan anak, pada umumnya memiliki pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Mereka bekerja di luar bidang perikanan yaitu bertani rumput laut, berdagang, buruh bantu bikin perahu dan transportasi.

Anak Daeng H, AWL menyampaikan pengalaman hidupnya, hingga sukses menekuni usaha rumput laut menceritakan:

"Tahun 2003 saya kelas 4 SD tapi disuruh berhenti sekolah sama orang tuaku karena ndak ada biaya. Saya jadi tukang pelihara sapinya orang tapi ndak kuat..saya lari ke Makassar jadi anak jalanan. Setelah 1 tahun ndak sekolah datang bapakku ke Makassar suruh saya pulang dan sekolah lagi, katanya usaha rumput lautnya berhasil. Alhamdulillah saya bisa sekolah sampai lulus SMK. Saya sadar kalau biaya sekolahku hasil dari usaha rumput laut, mulai dari mencari bibit, menanam, merawat, dan memanen sampai mengolah supaya rumput laut punya nilai tambah, saya lakukan bersama-sama orangtua dan adik-adik tapi saya ndak larang ji bapa' mencari ikan." (Alw, hasil wawancara).

Anak S, nelayan *papekang'* menceritakan sebagai anak tertua tidak bisa tinggal diam melihat kondisi kehidupan ekonomi keluarganya yang tidak menentu, bapaknya nelayan miskin dan untuk menghidupi keluarga orang tuanya mencari tambahan pekerjaan lain dengan usaha buka warung kecil-kecilan untuk menambah income keluarga.

"Saya bantu bapa' sama ibu' setelah pulang sekolah buka warung. Itu ji saya ikhlas bantu orangtua, kasihan mereka kerja keras untuk keluarga." (AB, hasil wawancara)

Baik anggota keluarga nelayan yang berstatus isteri maupun yang berstatus anak, pada umumnya memiliki pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Bekerja sampingan di luar bidang perikanan yaitu pertanian, berdagang, buruh bantu bikin perahu dan transportasi. Isteri nelayan (N) ada yang bekerja jualan makanan khas Makassar, untuk menambah income keluarga, dan (Z) membantu suami merawat rumput laut,

"...Siang masak dulu bikin mi baru' sore-sore begini mi pa' saya jual-jualang kue-kue kaya' jalangkote begitu, saya bawa mi ke tempat jualannya tetangga di sekitar sini. Kalo hasilnya itu biasa Rp. 30.000,- paling tinggi biasa Rp. 60.000,- biasa lalo Rp. 20.000,- ji. tidak ada untungnya pa' ..tapi saya kasi jalan saja yang penting ada di kerja to." (N, hasil wawancara).

"...lama sekali keluarga menderita waktu bapak ndak bekerja karena kapal ikan dijual sama yang punya. Untungnya ada orang disini yang mau kasih pinjam lepa-lepa (sampan), jadi bisa cari ikan di sekitar pantai hasilnya bagi dua, kalau dapat banyak bisa dijual untuk beli beras dan untuk lauk, kalau hasilnya sedikit makannya ubi pakai lauk ikan. Untuk tambahan usaha lain bapak pinjam uang sama *punggawa* ikan untuk modal usaha rumput laut tapi tetap ji pinjam *lepa-lepa* untuk cari ikan dan usaha rumput laut. 2 tahun cari ikan dipinggir pantai sambil usaha rumput laut baru mulai hidup lebih tenang. Sudah bisa bayar utang dan beli peralatan sederhana untuk bikin dodol rumput laut. Anak-anak semua bantu, saya berani mi kumpul-kumpul sama ibu-ibu disini karena

sudah bisa mi beli pakaian yang pantas.”(Z, hasil wawancara)

Salah satu anak nelayan *parawe*, menceritakan kegiatan yang dilakukan selama ini setelah pulang sekolah atau pada hari libur, kerja bantu-bantu buat kapal:

“...Saya masih sekolah SLTA, pas libur saya kerja atas keinginan sendiri, jadi kalo misalkan tida’ iku’ ka lagi di kapalnya bapa’ karena tida’ turung laut, yaa cari-cari ka lagi pekerjaang laing. Biasa kalo ada panggilan-nya temang kerja bangunang iku’ ka saja, baru bapak itu biasa juga bantu-bantu orang biking kapal. Istilahnya pa’ kalo’ tinggal ki di darat lagi yaahh kita sendiri mi berusaha cari pekerjaan supaya ada penghasilang biarpung itu sediki’ ji kasiang.” (AM, hasil wawancara).

Strategi yang dilakukan masyarakat nelayan merupakan strategi alokasi sumberdaya manusia, yaitu melibatkan anggota keluarga nelayan pada diversifikasi atau penganekaragaman pekerjaan dalam rumah tangga nelayan. Strategi alokasi sumberdaya manusia tersebut merupakan bentuk dari strategi pola nafkah ganda, keterlibatan seluruh anggota keluarga di dunia kerja atau bentuk kontribusi di bidang ekonomi keluarga. Apa yang dilakukan keluarga nelayan merupakan strategi penyesuaiaan masyarakat pesisir atau keluarga nelayan tradisional, yaitu dengan mengerahkan isteri dan anggota keluarga untuk ikut mencari nafkah. Keterlibatan kaum perempuan/isteri dalam mencari nafkah tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual yang banyak dijumpai pada masyarakat pesisir. Suami atau kaum laki-laki bekerja di lautan sedangkan anggota keluarga/isteri atau kaum perempuan melanjutkan pekerjaan suami di darat, misal: mengolah menjadi ikan kering, menjual ikan segar ke pasar ikan, menjemur rumput laut dan mengolah menjadi makanan atau dodol meskipun masih sangat sederhana.

Selain itu, pada umumnya kaum perempuan/isteri nelayan juga terlibat dalam kegiatan prana sosial yang ada di masyarakatnya, seperti kelompok arisan, kegiatan pengajian, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang ada di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

ekonomi. Keterlibatan perempuan/isteri nelayan dalam kegiatan tersebut, untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga nelayan tradisional dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Kedua, pengelolaan ekonomi keluarga. Keluarga nelayan tradisional juga mengatur sedemikian rupa pengelolaan rumah tangganya untuk bertahan hidup, diantaranya dengan menghemat pengeluaran untuk konsumsi. Pada umumnya pengelolaan keuangan yang dilakukan keluarga nelayan diserahkan sepenuhnya pada isteri, penghasilan suami maupun isteri dijadikan satu yang terpenting adalah kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga. Oleh karena itu pengelolaan keuangan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting, dan menurut mereka perempuan/isteri lebih mampu untuk mengatur keuangan keluarga. Suami sebagai kepala keluarga tinggal menerima laporan dari isteri tentang penggunaan uang, seperti yang diceritakan bapak IZL:

“...Semua penghasilang dari hasil laut atau hasil usaha lain kita satukan semua supaya bisa saling menutup kekurangannya. Untuk kebutuhan sehari-hari ibu yang atur semuanya, biaya anak-anak sekolah sampe urusan makan ta’ di ruma.” (IZL, hasil wawancara).

Pemenuhan kebutuhan dasar nelayan tradisional di Desa Arungkeke, meliputi pemenuhan kebutuhan makan. Seluruh nelayan tradisional mengaku kebutuhan makan sehari-hari dapat terpenuhi, meskipun secara kualitas makanan yang disantap bersama keluarga menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Bahkan tidak jarang, hasil tangkapan ikan sebagian untuk dikonsumsi bersama-sama sebagai menu sehari-hari.

Kebutuhan sandang, nelayan cenderung kurang memperhatikan pakaian sehari-hari. Bahkan terkesan tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembeli pakaian. Meskipun demikian, nelayan tradisional menyatakan membeli pakaian sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Kebutuhan papan, seperti halnya perkampungan nelayan pada umumnya, letak rumah-rumah panggung berjajar sepanjang jalan tidak

jauh dari bibir pantai, kondisi lingkungan tempat tinggal nelayan belum dapat dikatakan baik atau layak, bahkan ada beberapa rumah yang kurang terawat dan terkesan kumuh. Sarana jalan di sekitar pemukiman nelayan sudah cukup tertata, dengan adanya jalan pengerasan sirtu selebar ± 2 m dibatasi dengan tembok penahan ombak setinggi 75 cm dan lebar 75 cm merupakan jalan utama di Dusun Lassang-Lassang.

Pada umumnya nelayan tradisional Desa Arungkeke kebutuhan minimal akan tempat tinggal sudah terpenuhi. Terlebih lagi sejak tahun 2007 Desa Arungkeke menjadi lokasi program perbaikan kampung dengan dana APBD Kabupaten Jeneponto. Proyek tersebut berlokasi di Dusun Sicini berupa pembangunan 40 unit rumah, kemudian pada Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 dilanjutkan dengan pembangunan 104 unit rumah nelayan. Bersamaan dengan pembangunan rumah nelayan dengan dana APBD tersebut, dibangun pula dermaga kayu sepanjang 70 m, jalan aspal sepanjang 1 km, sambungan listrik PLN sebanyak 144 sambungan, dan sarana MCK dengan anggaran dari Bank Dunia.

Pemenuhan kebutuhan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial nelayan Desa Arungkeke, diukur dengan menggunakan indikator kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan hubungan sosial. Kebutuhan pendidikan, nelayan Desa Arungkeke sebagian besar berpendidikan SD, sebagian lainnya lulus SLTP dan sebagian terkecil lulus SLTA, hal itu menunjukkan bahwa taraf pendidikan nelayan Desa Arungkeke relatif rendah. Dalam penelitian ini, kemampuan nelayan Desa Arungkeke memenuhi kebutuhan keluarga akan pendidikan, diukur dengan menelaah pendidikan anak-anak. Tidak ada nelayan Desa Arungkeke yang tidak mampu menyekolahkan anak. Hal ini ditandai dengan tidak adanya anak-anak usia sekolah dari keluarga nelayan Desa Arungkeke yang tidak bersekolah, meskipun hanya sampai jenjang pendidikan setingkat SLTP.

Kebutuhan pemeliharaan kesehatan, banyak nelayan tradisional bila sakit atau merasa tidak enak badan, biasanya membeli obat di warung-warung. Keluarga nelayan pada umumnya tidak menyediakan anggaran khusus untuk

pemeliharaan kesehatan. Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Arungkeke, berupa Puskesmas, sembilan Posyandu dengan seorang dokter umum dan delapan orang paramedis, serta dua orang bidan. Kebutuhan pelayanan kesehatan nelayan dan keluarganya secara minimal sesungguhnya sudah terpenuhi, karena pada umumnya nelayan tradisional Desa Arungkeke merupakan pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat.

Ketiga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Krisis yang melanda nelayan tradisional Arungkeke akibat fluktuasi produksi ikan tangkap telah menyebabkan mudarnya fungsi gotong royong dalam masyarakat Arungkeke. Setiap orang secara sendiri-sendiri berusaha untuk bertahan hidup. Pemilik kapal penangkap ikan menjual kapalnya untuk mencegah kerugian yang lebih besar, tanpa memperhitungkan para buruh nelayan yang akan kehilangan pekerjaannya. Nelayan tradisional menggunakan alat tangkapnya secara optimal untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.

Situasi masyarakat nelayan di pesisir pantai di Desa Arungkeke, khususnya di lingkungan nelayan tradisional saat itu sesuai dengan pendapat Mattulada (1988) yang mengemukakan, bahwa kebudayaan tradisional memiliki ciri umum, yaitu keterpaduan segenap komponen yang membangunnya. Apabila suatu komponen kehilangan fungsinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam totalitas kebudayaan. Perlu beberapa saat lamanya kegoncangan-kegoncangan untuk menemukan keseimbangan baru Mattulada (1988). Nelayan tradisional tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menemukan keseimbangan baru. Selang beberapa waktu di dalam masyarakat nelayan, muncul bentuk gotong royong yang berbeda dengan pola hubungan gotong royong yang telah lama dikenal. Pranata sosial bentuk baru ini bahkan belum memiliki sebutan yang baku, sebagian orang menyebut "*situlung-tulung*". Pranata sosial ini merupakan sebuah corak hubungan yang terjadi antara para pemilik perahu dengan para buruh nelayan di sekitarnya yang secara sosial ekonomi biasanya berstatus lebih rendah. Hubungan yang terjadi antara pemilik perahu dengan buruh nelayan ini berlangsung secara

sukarela dan saling menguntungkan, artinya merupakan sebuah relasi simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling membutuhkan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pranata *situlung-tulung* dalam masyarakat Desa Arungkeke ini tergolong baru yang muncul dan mulai diterapkan pada tahun 2007 setelah terjadinya krisis di kalangan nelayan tradisional. Pranata *situlung-tulung* ini telah memudahkan nilai ekonomi peralatan tangkap, seperti perahu dan alat tangkap ikan lainnya. Peralatan yang pada awalnya dapat dijadikan sumber penghasilan pemilik peralatan, telah bergeser fungsinya menjadi peralatan yang lebih berfungsi sosial. Misalnya perahu milik Pak Ali boleh digunakan oleh nelayan Budi untuk mencari ikan tanpa dibebani kewajiban apapun. Namun biasanya nelayan yang meminjam perahu akan membagi sama rata hasil tangkapannya dengan pemilik perahu setelah terlebih dahulu menyisihkan ikan hasil tangkapan senilai biaya yang telah dikeluarkan. Dalam hal perahu digunakan untuk menanam, merawat dan memanen rumput laut, maka peminjam merasa berkewajiban untuk membantu pemilik perahu untuk menanam, merawat dan memanen rumput laut milik pemilik perahu. Pola hubungan kerja sama tersebut dalam bahasa Makassar disebut *situlung-tulung* yang berarti saling tolong-menolong. Itulah bentuk pranata sosial yang tumbuh di kalangan nelayan tradisional setelah terjadinya krisis produksi ikan tangkapan di Desa Arungkeke pada tahun 2000.

Didasari nilai *situlung-tulung* penggunaan peralatan tangkap pinjaman (tidak menyewa) mengarahkan nelayan untuk tidak mencari hasil tangkapan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, melainkan hanya mencari ikan semampunya dan sedapatnya saja. Dengan demikian secara langsung nelayan telah menjaga kelestarian ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik. Selain itu, penggunaan peralatan tangkap pinjaman yang didasari nilai *situlung-tulung* dapat menjaga hubungan antara nelayan, pemilik peralatan dan lingkungan sosial/budaya. Pranata *situlung-tulung* mendorong nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara terencana dan menyesuaikan dengan

berbagai kebijakan pengelolaan perikanan, karena nelayan tidak perlu khawatir menderita kerugian atau tidak mampu membayar sewa peralatan.

Kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan yang didasari pranata dan nilai *situlung-tulung* telah mencerminkan pelaksanaan tiga komponen kunci dalam pembangunan perikanan berkelanjutan yang dikemukakan Charles (2001), yaitu: sistem alam (meliputi: ikan, ekosistem dan lingkungan biofisik), sistem manusia (meliputi: nelayan, komunitas perikanan, lingkungan ekonomi, sosial/budaya), dan sistem pengelolaan perikanan (mencakup: perencanaan dan kebijakan perikanan serta pembangunan perikanan).

Analisis Teoritis atas Temuan Penelitian

Serangkaian kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau nelayan masih menimbulkan berbagai persoalan di dalam penerapannya. Salah satu kebijakan pemerintah dengan istilah revolusi biru tentang motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap, diharapkan akan meningkatkan hasil tangkapan nelayan sehingga pendapatan nelayan meningkat. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut hanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh sebagian kecil nelayan yaitu kelompok nelayan yang memiliki modal besar, alat-alat tangkap modern, dan kemampuan kapal jelajah yang dimiliki dapat mencapai hingga ke lepas pantai (*off shore*).

Selain kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya, masyarakat pesisir pantai Arungkeke mengalami berbagai kendala, diantaranya diduga karena kesulitan beberapa pemilik usaha perikanan *mini purse seine* untuk mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber permodalan, sehingga beberapa kapal *mini purse seine* bertonase kecil dialih fungsikan menjadi kapal pengangkut kayu, dan kenaikan harga BBM pada saat itu tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan sehingga nelayan banyak yang merugi. Karena merugi para pemilik kapal *mini purse seine* menjual kepada pengusaha gill net ke daerah lain, selain itu juga karena kapal gill net membutuhkan BBM lebih sedikit dibanding *purse seine*. Beberapa

faktor penyebab lainnya, kondisi alam dan irama musim yang sulit ditebak, tingkat pendidikan yang rendah sehingga nelayan tetap hidup dalam ketidakberdayaan dan keterbatasan baik ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan.

Beberapa keterbatasan dan ketidakberdayaan, tidak serta merta menjadikan nelayan tidak memiliki kemauan untuk mengubah nasib agar lebih baik. Strategi adaptasi nelayan dalam mensikapi berbagai kendala tersebut dengan melakukan berbagai strategi untuk kelangsung hidup untuk keluarganya. Strategi kelangsungan hidup adalah segala upaya dengan menggunakan cara, metode dan pengalaman manusia untuk tetap bertahan hidup dan *survive* agar tetap eksis menjalani kehidupannya. Pada dasarnya manusia memiliki daya tahan untuk tetap bertahan hidup akan tetapi semua kembali kepada manusia itu sendiri untuk bisa mengatasi segala hambatan yang dialaminya. Demikian juga yang dialami nelayan di sekitar pantai Arungkeke, bangkit untuk keluar dari keterpurukan hidup sebagai nelayan. Strategi kelangsungan hidup yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Arungkeke diantaranya strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Pemberdayaan nelayan miskin memberikan penekanan pada partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya partisipasi dari masyarakat miskin itu sendiri mengacu pada teori nilai harapan (*value-expectacy theory*), Martin Fishbein (1970), bahwa partisipasi muncul apabila ada harapan yang lebih baik dari apa yang dilaksanakan. Strategi survival yang dilakukan masyarakat nelayan di pesisir pantai Arungkeke berupa penganekaragaman mata pencaharian merupakan wujud tingginya partisipasi nelayan tradisional dalam pengembangan mata pencaharian alternatif atau pekerjaan sampingan bidang perikanan maupun di luar perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Pretty (1995), partisipasi dapat dibagi dalam tujuh tipe, yaitu: *manipulative participation*, *passive participation*, *participation by consultation*, *participation for material incentives*, *functional*

participation, *interactive participation*, dan *self-mobilization*. Pengentasan kemiskinan harus bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan kemiskinan yang dialami. Beberapa strategi yang dilakukan masyarakat nelayan miskin merupakan partisipasi *self-mobilization* (partisipasi mandiri), masyarakat nelayan berpartisipasi dengan jalan mengambil inisiatif secara independen untuk merubah sistem, yaitu strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Upaya pengembangan mata pencaharian alternatif baik di bidang perikanan maupun luar perikanan yang dilakukan secara intensif berupa budi daya rumput laut dalam kenyataannya menunjukkan bahwa usaha budi daya rumput laut cukup menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan, dan mendorong sebagian nelayan untuk ikut melakukan usaha budi daya rumput laut. Nelayan *parawe'* dan nelayan *pape'kang* telah menjadikan usaha budi daya rumput laut sebagai pekerjaan sampingan, dan terbukti mereka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar yaitu tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk perlengkapan rumah tangga dalam suatu keluarga, demikian juga tersedianya fasilitas umum, air minum, sanitasi, angkutan, kesehatan dan pendidikan.

Penutup

Berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan tidak menyurutkan semangat nelayan untuk bangkit mengubah nasib agar lebih baik. Masyarakat nelayan di Desa Arungkeke yang terikat oleh kebudayaan Bugis-Makassar yang cenderung ekspresif dan lebih terbuka serta memiliki keberanian menantang alam, kegigihan, dan ketangguhan dalam bekerja merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari orangtua bahkan dari nenek moyangnya. Terbukti ketika pada tahun 2004 para nelayan mengalami penurunan produksi sumber daya ikan, para nelayan bangkit untuk memilih alternatif pekerjaan lain di luar bidang perikanan yaitu mulai dikembangkan budi daya rumput laut. Pengembangan mata

pencaharian alternatif merupakan salah satu strategi nelayan tradisional dalam mempertahankan kehidupannya. Yaitu dilakukan dengan berinisiatif atas upaya diri sendiri dengan menciptakan alternatif penganekaragaman mata pencaharian di luar perikanan, dengan mengembangkan dan melakukan pekerjaan mengelola budi daya rumput laut, membuka usaha kecil-kecilan, buruh membuat kapal, dan pekerjaan sampingan lainnya yang dapat dilakukan pada saat tidak melaut.

Beberapa strategi yang lain yaitu, secara bersama-sama atau bergotong royong melakukan upaya menciptakan alternatif pekerjaan sampingan, bekerja sama dengan para pemilik perahu untuk melakukan budi daya rumput laut yang masih sangat potensial untuk dikembangkan di Desa Arungkeke. Penerapan nilai-nilai gotong royong berupa pranata *situlung-tulung* di kalangan nelayan tradisional telah mendorong tumbuhnya kembali semangat nelayan tradisional untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan Desa Arungkeke secara optimal. Meningkatnya kemauan dan kemampuan nelayan tradisional dalam memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan Desa Arungkeke, mendorong meningkatnya kesejahteraan nelayan tradisional Desa Arungkeke. Strategi adaptasi nelayan dalam mensikapi berbagai permasalahan yang dihadapi, keluarga nelayan melakukan pengelolaan keuangan dalam rumah tangganya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi keuangan yang diperoleh.

Dari kesimpulan di atas diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut, diperlukan pengembangan ketrampilan dan keahlian di bidang budidaya perikanan dan budidaya rumput laut yang meliputi metode dan strategi manajemen budidaya tersebut sehingga produk perikanan dan rumput laut mampu bersaing dengan produk lainnya di daerah tersebut. Perlu selalu ditumbuhkembangkan motivasi, semangat dan dukungan bagi masyarakat nelayan agar mereka tetap berkarya dan produktif baik di bidang perikanan maupun di luar perikanan tanpa menggantungkan pada pihak lain, dan dapat mencari alternatif pemecahan sendiri. Bagi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jeneponto,

dukungan dan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pesisir pantai yaitu Desa Sicini dan Desa Lassang-Lassang agar potensi sumber daya baik perikanan, rumput laut dan sumber daya lainnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan pesisir pantai di wilayah tersebut, yaitu dengan telah tersedianya sarana jalan, perumahan nelayan, fasilitas dermaga kayu, fasilitas umum untuk pengembangan usaha kecil dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan menarik minat investor untuk mendorong pembangunan di kawasan pesisir pantai menjadi kawasan yang bernilai ekonomis. Dan tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Bagi instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga sosial yang menaruh perhatian pada masyarakat nelayan hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menjalin kerjasama antar instansi, lembaga sosial dalam upaya membantu masyarakat nelayan keluar belenggu kemiskinan. Diharapkan instansi dan lembaga sosial di dalam membuat kebijakan harus memperhatikan karakteristik masyarakat nelayan yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya. Program pemberdayaan bagi masyarakat nelayan seharusnya bisa menjadi suatu kegiatan pengembangan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh nelayan. Peran pemerintah atau instansi terkait dan pihak lain, adalah melakukan pendampingan agar alternatif pemecahan tersebut bisa dilaksanakan disamping memberikan alternatif pilihan lainnya yang selama ini belum dilakukan oleh masyarakat nelayan.

Pustaka Acuan

- Abdul Mugni, (2006). *Strategi Rumah Tangga Nelayan dalam Mengatasi Kemiskinan*, (Studi Kasus Desa Linting, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Bogor: Fakultas Pertanian IPB.
- Andi Adri Arief, *Modernisasi Perikanan: Apa Yang Terjadi?* (<http://www.scribd.com/>)

- doc/14684717/Modernisasi-Perikanan, di akses tanggal 16/10/2010).
- Arif Satria, (2008). *Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan*, Senin 9 Juni 2008, PRI/ Kompas Images.
- Aulia, Tessa. F. (2009). *Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya*. Jakarta: Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin UI.
- Arif Satria, (2009), *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Ahmad Avenroza, dkk, (2007). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Boedisantosa, S, (1999). Komuniti Lokal di Kawasan Pesisir dan Pemberdayaannya, *Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas Pesisir*, Depok, 30 Mei-1 Juni 1999.
- Baker, Dubois dan Miley. 1992 dalam Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refina Aditama.
- Charles, A.T. (2001), *Sustainable Fishery System*, Blackwell Science, Ltd.
- Consuelo G. Sevilla, dkk, (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Fishbein, M & Azjen, I, (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Massachusetts: Addison-Wiley Publising Company.
- Idham, (2010). Struktur Ekonomi Masyarakat Nelayan. <http://sistem-pembagian-hasil.punggawa-sawi.html>.
- Kecamatan Arungkeke Dalam Angka Tahun (2010)*. Koordinator Statistik Kecamatan Arungkeke dan BPS Kabupaten Jeneponto.
- Kusnadi, (2008), *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi, (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LKiS.
- Mattulada, (1988), *Kebudayaan Tradisional, Sekelumit Tentang Sulawesi Selatan*, dalam Harsya.W.Bachtar dkk *Masyarakat Dan Kebudayaan*, Kumpulan Karangan Untuk Selo Soemardjan, Jakarta: Djambatan.
- Mulyanto, dan Hans Dietr Evers. (1985). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali.
- Mukhlis, (ed), 1988:165-228), dalam Daulay Perdamean, Mamik Sumarmi. Tanpa tahun terbit. *Survival Mechanism Victim Household of Lumpur Lapindo in Sidoarjo-Jatim*, Surabaya:UPBJJ UT. PDF.
- Moser, dalam Daulay Perdamean, Mamik Sumarmi. Tanpa tahun terbit. *Survival Mechanism Victim Household of Lumpur Lapindo in Sidoarjo-Jatim*, Surabaya:UPBJJ UT. PDF
- Pretty, Jule, N. (1995). *Participatory Learning for Sustainable Agriculture*. London: Sustainable Agriculture Programme, International Institute for Environment and Development, 3 Endsleigh Street.
- Radi R dan Riant Nugroho, (2007). *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Medio Komputindo.
- Suyanto, Bagong, (1995), *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refina Aditama.
- Scott, James.C. (1990). *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. Undang Undang No 11 Tahun 2009 *Kesejahteraan Sosial*.

**Pendamping Program Aslut
sebagai Strategi Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
*Elderly Program Guidance
as a Strategy to Empower Neglected Elderly***

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Badiklit Kesos,
Kementerian Sosial RI. Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta (0274) 377265, Fax (0274) 373530.
E-mail <ellykuncorowati@yahoo.co.id> HP +6287838724537.
Diterima 21- 1-2014, direvisi 23-4-2014, disetujui 20 Mei 2014.

Abstract

In order to cope a lot of numbers of neglected elderly, the Ministry of Social Affairs has been launching a program (policy) called Neglected Elderly Social Assistance (ASLUT). The main object of ASLUT Program is to ease living burden of neglected elderly in order to meet the basic needs and living maintenance, the second is to maintain the welfare of the elderly so they can enjoy a reasonable standard of living. To realize the goal of ASLUT program, the program then requires a guidance as a strategy. The research question is how the strategy has to be performed to mentor ASLUT program to empower neglected elderly? The purpose of the research is to know the local empirical strategy of ASLUT program guidance conducted in the empowerment of neglected elderly. The research takes place in Banjarbaru City, West Kalimantan Province. The research method used is descriptive. The result showed that the guidance is used as strategy to direct cash assistance will get assuredly to the concerned (Elderly). Guidance also serves as commitment with the post office to liquify and disburse the aid in cash, and nominating other names for replacement if the existing die and to be resumed by other elderly that is waiting in list.

Keywords:

Guidance–Program Strategy –Neglected Elderly Empowerment

Abstrak

Dalam rangka untuk mengatasi jumlah lansia terlantar yang cukup banyak, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, meluncurkan program dan kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Tujuan utama Program ASLUT adalah untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Untuk mewujudkan tujuan program ASLUT, program tersebut membutuhkan pendampingan sebagai suatu strategi. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pendampingan yang dilakukan program ASLUT dalam memberdayakan lanjut usia terlantar? Tujuan penelitian adalah diketahuinya strategi pendampingan yang dilakukan program ASLUT dalam memberdayakan lanjut usia terlantar. Lokasi penelitian di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan digunakan agar bantuan langsung tunai sampai kepada yang bersangkutan. Pendampingan berfungsi mendampingi lembaga pembayar, yakni kantor pos, untuk mencairkan bantuan langsung tunai. Pendamping berfungsi membuat komitmen dengan pihak pos untuk pencairan dan mengajukan nama pengganti penerima manfaat yang sudah ada dalam daftar tunggu, apabila ada lansia penerima manfaat terdahulu meninggal dunia.

Kata Kunci:

Pendampingan–Strategi–Pemberdayaan Lanjut Usia

A. Pendahuluan

Sepanjang tahun 2013, jumlah warga lanjut usia di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut catatan Kementerian Sosial, setidaknya ada 2,8 juta warga lanjut usia (lansia) yang terlantar. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-

faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tetapi tidak mau mengurus. UU No 13 tahun 1998 menyatakan, bahwa lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya

mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Undang-undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.

Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia, ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologi, ekonomi dan sosial. Secara biologis penduduk lanjut usia adalah yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, dan sistem organ.

Lanjut Usia terlantar secara ekonomi lebih dipandang sebagai beban, banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberi banyak manfaat, bahkan dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. Lanjut usia terlantar dapat dikategorikan sebagai *transient neglected elderly*, yakni lansia terlantar sementara. *Transient neglected elderly* adalah suatu keadaan ketika lansia menjadi terlantar sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, atau karena kejadian bencana alam. Fenomena 'lansia terlantar sementara' di Indonesia cenderung terus bertambah setelah krisis tahun 1997, kenaikan harga BBM, dan bencana alam seperti banjir, longsor, gempa dan tsunami. Terdapat kategori lansia terlantar kronis (*chronic neglected elderly*) yakni lansia yang muncul akibat di luar faktor-faktor tersebut di atas. Faktor lain yang ikut mewarnai kehidupan lansia terletak pada upaya penanganan lansia terlantar sementara lebih layak dibanding lansia terlantar kronis. Prediksi ini diperkuat adanya upaya yang mengisyaratkan penanganan lansia terlantar sementara, di masa datang akan relatif lebih kompleks sehingga cenderung mengerucut pada lansia terlantar kronis.

Beberapa faktor penyebab lanjut usia menjadi terlantar antara lain adalah ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang tidak dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan, kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga tempat mere-

ka tinggal, ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak, serta kebutuhan penghidupan tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada.

Menurut data dari Kemensos RI, ciri-ciri lanjut usia terlantar antara lain adalah batas usia 60 tahun ke atas (laki-laki atau perempuan). Tidak sekolah, tidak tamat/tamat SD, makan kurang dua kali per hari. Makan makanan berprotein tinggi (4 sehat 5 sempurna) kurang dari empat kali per minggu, pakaian yang dimiliki tidak layak karena kurang dari empat stel, tempat tidur tidak tetap, jika sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan, ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya.

Dalam rangka mengatasi jumlah lansia terlantar yang cukup banyak jumlahnya, 2,8 juta, diluncurkan strategi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berupa Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Tujuan utama Program ASLUT, pertama untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Program ASLUT dinilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya lanjut usia terlantar. Program ASLUT dimulai sejak tahun 2006 sampai saat ini belum bisa melayani seluruh lansia terlantar yang ada di Indonesia. Tahun 2006 baru bisa melayani 2500 orang lansia terlantar, dan hingga pada tahun 2011 baru bisa melayani 13.250 orang lansia terlantar (Kemensos, 2010).

Untuk mewujudkan tujuan program ASLUT, dibutuhkan pendampingan sebagai suatu strategi, karena keberhasilan program ASLUT sangat tergantung pada peran para pendamping sosial, dan merekalah yang mengetahui kondisi lansia di lapangan. Tugas pendamping ASLUT sangat tidak mudah, mereka harus di lapangan mendampingi para lansia terlantar yang kondisinya sudah renta dan rentan kurang berdaya. Melihat kondisi lansia yang demikian diperlukan adanya pemberdayaan, sehingga peran pendamping sangat penting. Mereka harus memantau kesehatan para lansia, memperhatikan kebutuhan

yang dibutuhkan lansia, pendamping juga harus melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) para lansia yang didampingi. Memperhatikan hal tersebut, maka penelitian Pendamping Program Sebagai Suatu Strategi Pemberdayaan Bagi lanjut Usia Terlantar dilakukan.

Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah strategi di alam empirik pemberdayaan bagi lanjut usia terlantar? Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya strategi pendampingan pada program ASLUT dalam memberdayakan lansia terlantar. Lokasi penelitian di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Kementerian Sosial dalam hal pembuatan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial bagi lansia, dan juga sebagai bahan acuan bagi pihak pendamping terkait bidang pendampingan sosial.

B. Kajian Teori

1. Pendamping Sosial

Sebutan pendamping sosial dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Istilah pendamping dapat ditemukan juga dalam pasal 17 UU PKDRT, disebutkan bahwa "Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan". Kenyataan di lapangan banyak ditemukan pendamping sosial yang tidak berlatar belakang pekerjaan sosial, melainkan warga masyarakat yang mengabdikan diri dan atau bekerja di bidang kesejahteraan sosial, baik yang berlatar belakang maupun yang bukan berlatar belakang pekerjaan sosial. Pada dasarnya pendamping sosial tumbuh atas kemauan dan inisiatif sendiri serta kesukarelaan untuk mengabdikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Instansi sosial pemerintah di semua tingkatan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial serta forum yang dibentuk oleh dan untuk pendamping sosial pada setiap tingkatan, dapat melakukan penumbuhan ter-

hadap minat dan kemauan seseorang warga masyarakat untuk menjadi pendamping sosial.

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks Suharto (2006) menyebut, peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping bukan sebagai pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung. (Suharto, 2006). Peranan pendamping dalam mengembangkan program ASLUT sangat menentukan. Kunci untuk mencapai efektivitas terletak pada kemampuan pendamping sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara simultan. Fungsi utama yang mencerminkan kegiatan pokok dalam rangka mencapai tujuan pendampingan masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan fakta: mengupayakan diperolehnya landasan kenyataan (fakta) yang memadai untuk perencanaan dan kegiatan yang baik.
- b. Pengembangan program: yaitu merintis, mengembangkan, menyempurnakan dan mengakhiri program-program dan pelayanan-pelayanan.
- c. Standar (pembakuan): yaitu menentukan, memelihara dan meningkatkan standar serta meningkatkan keefektifan, efisiensi dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi masyarakat, bagian-bagian dari masyarakat dan satuan-satuan penduduk lainnya.
- d. Kooperasi dan koordinasi: yaitu meningkatkan dan memperlancar saling hubungan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi upaya-upaya antar perseorangan-perseorangan, kelompok dan organisasi.
- e. Pendidikan: yaitu melaksanakan pendidikan (pendidikan orang dewasa, pendidikan tentang kesejahteraan keluarga, pelatihan ketrampilan, pelatihan administrasi praktis dan sebagainya) untuk kepentingan pencapaian tujuan bimbingan sosial, dan untuk tujuan meningkatkan serta mengembangkan

potensi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal kualitas (mutu) kesadaran pada diri sendiri, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengatur dan mengendalikan diri sendiri, kemampuan bekerjasama dan kepemimpinan.

- f. Hubungan masyarakat: yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari anak yang berkonflik dengan hukum secara keseluruhan tentang kebutuhan-kebutuhan, sumber-sumber, tujuan-tujuan yang akan dicapai, pelayanan-pelayanan, metode-metode yang digunakan dan standar (ukuran-ukuran) yang seharusnya.
- g. Peningkatan: yaitu meningkatkan dan mengupayakan agar tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai atau usulan-usulan program pemecahan masalah disepakati secara resmi atau diinginkan/disenangi oleh anak yang berkonflik dengan hukum.
- h. Partisipasi: mengerahkan dan memelihara keikutsertaan secara aktif dari perseorangan-perseorangan atau kelompok-kelompok dalam berbagai kegiatan dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak.
- i. Pemberian dukungan: yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan dukungan keuangan secara memasahi dari organisasi-organisasi dan orang-orang yang terlibat terkait dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial.
- j. Organisasi massa : yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan kerja organisasi massa agar bertindak secara efektif dalam kaitannya dengan usaha-usaha menumbuhkan kemandirian, usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan atau menyempurnakan saling hubungan antar organisasi atau kelompok.

Suharto (2006) merumuskan kegiatan dan proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian moti-

vasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsinya antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif yakni memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri.

Perlindungan, fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

Pendukung, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Program pemberdayaan lanjut usia yang berkelanjutan seperti ASLUT memerlukan tenaga pendamping yang berkualitas dan mampu memadukan konsep pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan modal sosial secara partisipatif. Pendamping adalah seorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap bi-naan yang telah menjadi sasaran program.

Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan

secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator

Pendamping sosial sebagai pendamping suatu program hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat tak berdaya dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial:

- a. Motivasi. Dalam melakukan motivasi lanjut usia terlantar perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Pada tahap ini membantu lanjut usia terlantar untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar.

- c. Manajemen diri. Pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk mengembangkan sebuah sistem. Memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut, dimana setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan.
- d. Mobilisasi sumber. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. Ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial.
- e. Pembangunan dan pengembangan jaringan pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dari ke lima kegiatan yang harus dilakukan oleh pendamping sosial memperlihatkan bahwa pendamping program ASLUT mempunyai tugas yang cukup berat karena dia harus bisa memberdayakan lansia terlantar secara optimal, mulai dari memotivasi, meningkatkan kesadaran, manajemen diri, mobilisasi sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan, agar lansia agar berpartisipasi aktif pada pemberdayaan program ASLUT sehingga kesejahteraan sosialnya dapat ditingkatkan.

2. Pemberdayaan

Menurut kamus bahasa Indonesia (Depdikbud, 2003), strategi berarti 1 ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-

bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 2 ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yg menguntungkan: *sebagai komandan ia memang menguasai betul seorang perwira di medan perang*; 3 rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; 4 tempat yang baik menurut siasat perang.

Dalam arti umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena *power* bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata daya tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa". Pemberdayaan mempunyai tiga sisi yaitu pertama penyadaran akan hak-haknya, ke dua peningkatan kapasitas (*capacity building*) diberikan daya, baik perorangan maupun kelompok, dan pemberdayaan pemberian peluang, kebebasan (Randy R Wrihatnolo, 2007:1).

Menurut Maria Fraskho, (2000), konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; a. Proses pemusatan kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam penguatan kapasitas ini adalah melalui pendampingan. Strategi pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat yang dalam sudut pandang yang lain dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pro pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta menyelesaikan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat (Zubaedi, 2007).

Program pemberdayaan untuk lanjut usia terlantar dimaksudkan untuk mengeliminir ketergantungan dan hilangnya *self help* dari kelompok sasaran. Pemberdayaan maknanya lebih luas dari hanya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi para

lanjut usia yang mengalami hambatan medis, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kondisi pelayanan sosial tersebut harus terus diperluas jangkauannya dan ditingkatkan cara pemberian pelayanannya. Upaya untuk memperluas jangkauan pemberdayaan dan peningkatan mutu pelayanan, dilaksanakan melalui berbagai program antara lain dalam pelaksanaan pelayanan dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Untuk meningkatkan dan mengembangkan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) perlu dilakukan Pengembangan Teknik Pendamping dan Penanggung Jawab Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar.

3. Tugas Pendamping program

- a. Menyusun rencana, mengorganisir dan mengajak lanjut usia potensial memberdayakan dirinya.
- b. Penyuluhan sosial; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyampaian informasi sebagai upaya bimbingan dan motivasi.
- c. Peningkatan sosial; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian kemampuan berusaha.
- d. Fasilitas; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan peningkatan akses pemanfaatan fasilitas umum dan pelayanan sosial dasar yang sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.
- e. Advokasi; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan untuk memperjuangkan kepentingan lanjut usia.

Metode pendampingan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Bimbingan sosial / terapi individu;
- b. Bimbingan sosial kelompok/ terapi kelompok;
- c. Bimbingan Sosial Komunitas;
- d. Bimbingan sosial masyarakat;
- e. Penelitian Sosial; dan/atau;
- f. Admintrasi Sosial;

Bimbingan sosial/terapi individu sebagaimana dimaksud ditujukan kepada sasaran pelayanan yang bersifat individual dan dilakukan secara tatap muka. Bimbingan sosial kelompok/ terapi kelompok sebagaimana dimaksud dilaku-

kan dengan menggunakan kelompok sebagai media terapi bagi sasaran pelayanan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat mengganggu terhambatnya proses pelayanan.

Bimbingan Sosial Komunitas sebagaimana dimaksud dengan menggunakan kehidupan dan interaksi komunitas yang menjadi lingkungan sosial mengungkapkan masalah-masalahnya baik yang bersifat individu, keluarga, lingkungan dan/atau masyarakat serta dapat memfasilitasi berbagai alternatif dan solusi pemecahannya. Penelitian sosial dilakukan sebagai upaya untuk menemukan, menggali, mengkaji berbagai eksistensi permasalahan sosial.

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (lansia terlantar) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004), Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- a. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian

keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
- d. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- e. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- f. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- g. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

4. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar bertujuan untuk menjamin pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai tujuan,

program dilakukan dengan cara pemberian uang tunai kepada lanjut usia yang memenuhi kriteria per orang per bulan selama satu tahun melalui lembaga penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah.

Strategi program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dalam memberdayakan lanjut usia terlantar dengan menggunakan pendampingan. Pendamping program ini terutama berfungsi untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan, proses, dan ketepatan pemanfaatan dana oleh lanjut usia. Dana yang diperuntukkan bagi lanjut usia terlantar harus diterima dan digunakan oleh lansia yang bersangkutan, dan penggunaan dananya pun diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para lanjut usia terlantar, sehingga kebutuhan dasarnya seperti sandang dan pangan, perawatan kesehatannya seperti bisa berobat ke Puskesmas dapat terpenuhi. Kriteria Penerima:

- a. Diutamakan bagi lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun, dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (*bedridden*) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan telantar.
- b. Lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas yang tidak potensial, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan telantar.

Persyaratan Penerima

- a. Terdata dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.
- b. Memiliki KTP/surat keterangan domisili/Kartu Keluarga dan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- c. Melampirkan foto diri terakhir ukuran post-card.

Persyaratan pendamping

Beberapa persyaratan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) antara lain:

- a. Penduduk desa/kelurahan setempat, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Desa, dan diharapkan ber-

pengalaman sebagai: Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pengurus Karang Taruna/Karang Lansia. Pengurus Organisasi Sosial/Keagamaan. Kader Posyandu. Pengurus PKK. Anggota/warga masyarakat setempat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

- b. Diutamakan berpendidikan SLTA/ sederajat.
- c. Diutamakan mampu mengoperasikan komputer atau mampu menggunakan mesin tik manual.

Pendamping program bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan kepada penerima manfaat ASLUT dengan tugas sebagai berikut. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat. Melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam satu bulan dan membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima ASLUT. Melaksanakan bimbingan apabila terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan para lanjut usia yang didampinginya. Memantau dan membimbing pemanfaatan dana JSLU untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan program. Memberikan kemudahan bagi lanjut usia penerima JSLU menerima pelayanan lain yang dibutuhkan. Memberikan kemudahan bagi lanjut usia penerima JSLU untuk mendapatkan pembayaran di tempat tinggal penerima manfaat JSLU dari Lembaga Penyalur. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar-menukar informasi dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan pendampingan. Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program JSLU secara periodik ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota. Membuat laporan dan berita acara penggantian penerima JSLU sesuai dengan daftar tunggu apabila terdapat penerima JSLU yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai dengan kriteria ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

Bantuan dana langsung tunai dari program ASLUT yang diberikan kepada para lansia terlantar penerima manfaat tersebut besarnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan. Besarnya dana ini masih mengacu

pada satuan biaya makan Satu Orang Satu Hari (SOSH) tahun 2005 yang besarnya Rp 10,000,- (sepuluh ribu) per orang per hari. SOSH inilah yang digunakan oleh panti dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar (Kemensos RI, 2011). Penggunaan dana bantuan ASLUT ini harus tepat yakni untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi, oleh karenanya strategi penyaluran dana ini harus didampingi oleh pendamping program agar bisa tepat sasaran sesuai nama dan alamat (*by name by address*).

Kriteria sasaran penerima manfaat uang langsung tunai adalah sebagai berikut. Diutamakan bagi lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas, dan bagi lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas dalam keadaan sakit menahun sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Hidupnya sangat tergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa terbaring di tempat tidur (*bedridden*). Tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Indera pendengaran dan penglihatan sudah tidak berfungsi normal. Dalam satu hari makan kurang dari dua kali. Makan daging/ ika/telur dalam satu minggu kurang dari dua kali. Mempunyai tempat untuk tidur tetapi tidak layak. Bukan penyandang cacat berat atau seseorang yang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial secara permanen. Memiliki KTP/Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah. Apabila berstatus suami istri dan satu rumah dihuni oleh dua orang atau lebih, maka yang memperoleh jaminan sosial adalah salah seorang dari mereka. Memiliki kartu JSLU yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, digunakan metode penelitian deskriptif. penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu de-

ngan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Fenomena disajikan secara apa adanya, hasil penelitian diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi, penelitian ini tidak ada suatu hipotesis tetapi berupa pertanyaan penelitian. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu masalah, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Fenomena disajikan dan diuraikan secara jelas tanpa manipulasi dan tidak ada suatu hipotesis, tetapi berupa suatu pertanyaan penelitian. Analisis deskriptif menggunakan analisis distribusi frekuensi yaitu menyimpulkan berdasarkan hasil rata-rata. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur, yakni menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Di samping itu juga digunakan panduan wawancara terbuka untuk melengkapi data yang belum terjaring melalui instrument tertutup.

D. Hasil Hasil Penelitian: Identifikasi, Pendidikan dan Ketrampilan Pendamping Program.

Responden penelitian ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang keseluruhannya berprofesi sebagai pendamping program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini akan disajikan mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan pendamping program ASLUT, honor yang diterima, pengetahuannya terhadap tugas yang dihadapi para pendamping, binaan yang diberikan kepada lansia terlantar penerima manfaat, pengetahuannya terhadap tugas yang dijalankannya.

a. Jenis Kelamin Pendamping: Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis kelamin para pendamping program ASLUT di Kota Banjarbaru sejumlah 56 persen berjenis kelamin perempuan. Sebagian lagi sejumlah 44persen berjenis kelamin laki-laki. Profesi

sebagai pendamping sosial tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang terpenting adalah mereka harus mempunyai jiwa sosial, karena pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya dan bagi lansia terlantar pada khususnya sangat membutuhkan pendamping program yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan program, membantu mencairkan dana bantuan langsung tunai, mengunjunginya sebagai *home visit* satu minggu sekali, serta memantau penggunaan dana tersebut. Realita tersebut memperlihatkan bahwa ternyata perempuan lebih banyak berprofesi sebagai pendamping program ASLUT.

b. Tingkat Pendidikan Pendamping: Tingkat pendidikan menjadi salah satu kriteria untuk menjadi pendamping program ASLUT. Program ini mensyaratkan minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) untuk bisa menjadi pendamping program. Berikut ini akan dapat diketahui mengenai tingkat pendidikan pendamping program ASLUT di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan pendamping program ASLUT sejumlah 70 persen adalah berpendidikan SLTA, memang yang merupakan persyaratan pendamping program ASLUT minimal berpendidikan SLTA. Pendamping program yang berpendidikan SMP ada sejumlah 14 persen. Berpendidikan D3 berjumlah 14 persen, bahkan yang berpendidikan lebih rendah pun seperti SD juga ada sejumlah 1 persen, dan yang berpendidikan S1 sejumlah 1persen. Dari hasil wawancara yang dikembangkan diketahui bahwa menurut mereka yang sangat menentukan bukanlah tingkat pendidikan, namun kepedulian sosial serta jiwa pengabdian untuk mau membantu para lansia terlantar. Di samping itu mereka yang berpendidikan SD dan SMP merupakan pendamping program ASLUT yang dananya dari APBD. Mereka ditunjuk langsung oleh kelurahan karena keaktifan dan kepeduliannya di masyarakat dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

c. Pengetahuan Pendamping terhadap Tugas:

Sebagai seorang pendamping program ASLUT haruslah mengetahui secara tepat mengenai tugas yang harus dijalankannya agar program pemberdayaan bagi lanjut usia terlantar tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara terhadap para pendamping program ASLUT dapat diketahui sebagai berikut: Tugas yang harus dijalankan para pendamping program ASLUT adalah melaksanakan pendampingan pada saat pencairan bantuan langsung tunai bagi lansia terlantar. Tanpa adanya pendamping program yang mendampingi, petugas pos sebagai lembaga penyalur dana tidak akan berani mencairkannya, hal tersebut dikarenakan yang mengetahui secara persis nama-nama serta alamat para penerima manfaat atau para lansia terlantar tersebut adalah para pendamping program tersebut. Petugas pos sebetulnya juga telah menerima daftar nama dan alamat para calon penerima manfaat atau para lansia terlantar ini, tetapi pada saat pencairan haruslah didampingi oleh pendamping program, maka petugas pos tidak berani melanggarnya. Inilah strategi yang dilakukan program ASLUT harus adanya pendamping program, dimaksudkan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran sesuai nama dan alamat.

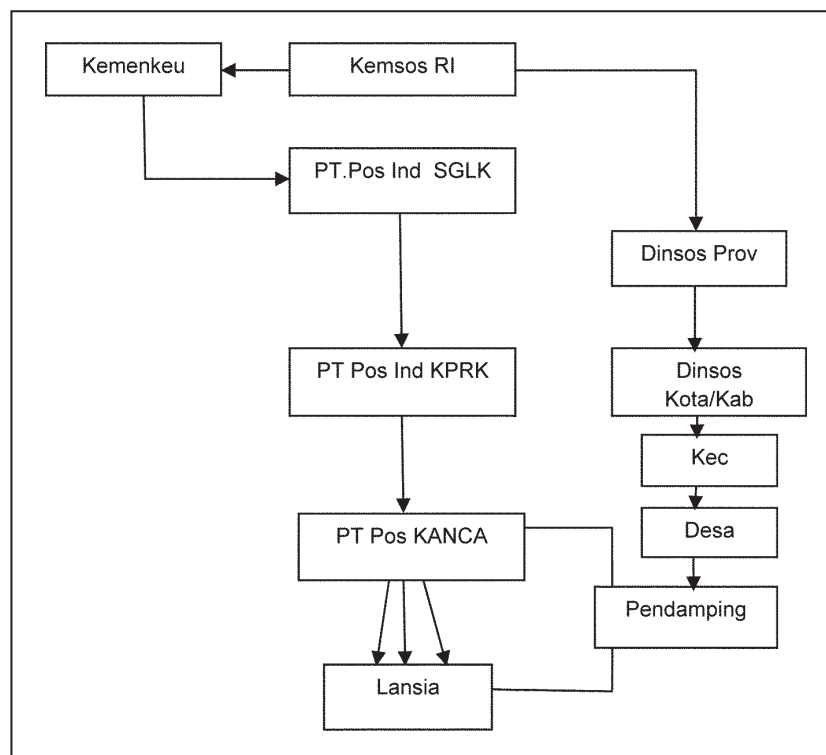
Dari hasil wawancara diketahui bahwa tugas lain yang harus dilakukan pendamping program ASLUT adalah mengunjungi para lansia terlantar penerima manfaat program ASLUT ini satu minggu sekali, mengantarkannya berobat ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit apabila sakit, memperhatikan makanannya, artinya para lansia penerima manfaat tersebut harus makan. Apabila ada lansia penerima manfaat yang meninggal dunia, mereka harus segera melaporkannya kepada Dinas Sosial Provinsi agar nanti bisa segera dilaporkan ke Kementerian Sosial Pusat di Jakarta untuk segera digantikan kepada para lansia yang termasuk daftar tunggu.

Setelah monitoring tentu saja sebagai seorang pendamping program ASLUT, mereka haruslah melaporkan hasil binaannya

kepada dinas sosial provinsi secara triwulan sekaligus untuk mengambil honorariumnya sebagai pendamping program ASLUT. Dari hasil wawancara diketahui pula bahwa tugas pendamping program ASLUT mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap program. Dengan honor tidak seimbang dengan beban tugas sebagai seorang pendamping program ASLUT sebesar (Rp 250.000,- per bulan) pendamping harus mendampingi sejumlah lansia yang ada di satu kecamatan. Hal ini memperlihatkan betapa beratnya tugas seorang pendamping program ASLUT. Tanpa memiliki jiwa sosial yang tinggi mustahil pekerjaan ini dapat dijalankannya, karena mereka harus mengunjungi rumah para lansia terlantar yang cukup sulit untuk dijangkau, di samping itu mereka menggunakan uang transpornya sendiri untuk *home visit*, karena tidak adanya bantuan transportasi dari pemerintah untuk kegiatan yang harus dijalankannya.

d. Ketrampilan Yang Harus Dimilikinya: Sebagai seorang pendamping program ASLUT, ada beberapa ketrampilan yang harus dimilikinya. Menurut mereka ketrampilan yang harus dimiliki dalam mendampingi lansia terlantar para penerima manfaat antara lain adalah harus memiliki ketrampilan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi lansia serta mengetahui penyebab permasalahan tersebut, merawat lansia secara ramah, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Di samping itu juga harus trampil dalam menyusun rencana kerja, rencana apa yang akan dikerjakannya, oleh siapa dan bagaimana. Membuat perjanjian untuk pencairan dana bantuan langsung tunai bagi lansia terlantar dengan pihak lembaga pembayar dalam hal ini yakni kantor pos, juga harus trampil bersosialisasi, dan yang paling penting harus mampu membuat laporan pekerjaan atas binaannya, dan harus disampaikan kepada dinas sosial provinsi setempat.

e. Nilai-nilai yang Harus Dimilikinya: Sebagai seorang pendamping program ASLUT, maka ada beberapa nilai-nilai pekerjaan sosial atau dalam pekerjaan sosial sering disebut sebagai *body of value* yang harus dimi-



Gambar 1. Mekanisme Kerja Pendamping Program ASLUT

likinya. Nilai-nilai tersebut antara lain berupa asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa atau masyarakat dimana pekerjaan sosial dilaksanakan. Artinya pendamping program harus bisa memahami dan mentaati norma-norma sosial yang ada di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kerangka nilai-nilai ini berfungsi memedomani, mengarahkan serta membimbing sikap serta perilaku seorang pendamping program sebagai pekerja sosial dan dalam hubungannya dengan klien, dengan lembaga tempat bekerjanya, dengan sejawat profesional serta dengan masyarakat luas. Kerangka nilai diperoleh dan dihayati oleh seorang pendamping melalui upaya penanaman nilai-nilai tersebut dalam proses pendidikannya. Pemahaman terhadap kerangka nilai membantu pendamping didalam merumuskan “apa yang seharusnya” sebagai suatu dasar untuk merumuskan

tujuan dan mengembangkan program-program kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kerangka nilai pekerjaan sosial juga berfungsi sebagai filter didalam upaya pengadopsian maupun pengembangan aspek-aspek ilmu pengetahuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat dimana praktek pekerjaan sosial dilakukan.

Dalam merawat lansia, maka seorang pendamping program hendaknya memiliki nilai konsep diri artinya bahwa setiap orang mempunyai motivasi dan kemampuan untuk berubah, sehingga kesejahteraan sosialnya dapat dirubah dan ditingkatkan. Di samping itu juga mengetahui akan nilai kebutuhan yang berarti bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan sesuai dengan kemampuan dirinya, sehingga beberapa kebutuhan lansia terlantar yang tidak terpenuhi, melalui program ASLUT ini beberapa kebutuhan lansia terlantar dapat terpenuhi dan kebutuhan kesejahteraan sosialnya pun terpenuhi.

- f. **Aktifitas Asistensi:** Sebagai seorang pendamping program, maka ada beberapa tugas asistensi yang harus dilaksanakannya

agar program dapat berjalan dengan lancar, dan lanjut usia terlantar terlayani. Beberapa tugas tersebut antara lain adalah : memberikan kemudahan penyaluran dana bantuan JSLU yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Penyalur, dan memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada penerima program dan dipergunakan untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Penyaluran dilakukan secara berkala. Dana diberikan kepada penerima JSLU per orang per bulan dan diberikan secara berkelanjutan dalam satu tahun anggaran. Di samping itu maka pendamping program ASLUT juga harus memberikan bimbingan sosial kepada lanjut usia agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Pelayanan memberikan kemudahan bagi lanjut usia untuk menerima dana bantuan. Pendampingan terhadap pemanfaatan dana, memantau dan membimbing pemakaian dana bantuan.

g. Mekanisme Kerja Pendamping Program ASLUT, dapat dilihat pada Gambar 1.

E. Penutup

1. Refleksi

Program Asistensi Sosial Lajut Usia Terlantar (ASLUT) yang telah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk memberdayakan lansia terlantar yang tidak mempunyai penghasilan, dan diutamakan bagi mereka yang telah berusia di atas lima puluh tahun. Program tersebut berwujud bantuan langsung tunai berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- setiap bulannya ditujukan kepada nama-nama sesuai alamat yang sudah ditentukan (*By name By address*) sehingga bantuan tersebut dapat sampai dengan mudah dan tepat kepada yang bersangkutan. Dalam tugasnya, Pendamping program ASLUT ternyata harus mengetahui prinsip-prinsip pekerjaan sosial seperti pengetahuan tentang ASLUT, ketrampilan dalam mendampingi program, serta memiliki nilai-nilai ataupun norma-norma sosial yang ada di masyarakat serta mampu membimbingnya.

Program ASLUT menggunakan strategi pendampingan, karena dana tersebut harus langsung

diterima oleh para lansia terlantar yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat program. Tanpa adanya pendamping program pada saat pencairan dana, maka petugas penyalur yakni kantor pos tidak akan berani mencairkannya. Strategi ini dilaksanakan karena pendamping program pula yang mengetahui nama-nama serta alamat calon penerima dana. Strategi pendampingan juga dimaksudkan agar para lansia terlantar penerima manfaat tersebut tidak hanya diberdayakan melalui bantuan langsung tunai saja, namun para penerima manfaat tersebut juga diperhatikan kondisi fisik, psikis dan sosialnya, dengan melakukan kunjungan *home visit* ke rumah-rumah para lansia tersebut satu minggu sekali di samping untuk memperhatikan kondisinya, juga untuk memantau penggunaan dana bantuan langsung tunai tersebut, karena dana tersebut memang harus digunakan untuk kesejahteraan lansia, dan tidak boleh digunakan untuk lainnya. Program ASLUT ternyata hingga saat ini cukup efektif dalam memberikan bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar, karena bantuan tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para lanjut usia terlantar, sehingga para lanjut usia dapat lebih berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan di samping itu mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

2. Rekomendasi

Kecilnya honorarium pendamping program yang diterimanya setiap bulan yakni sebesar Rp 250.000,-, serta tidak sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya yang meliputi satu kecamatan, dan tidak adanya transportasi untuk mengunjungi ke rumah-rumah para lansia terlantar penerima manfaat setiap seminggu sekali, maka diperlukan adanya uang transport, karena honor yang diterimanya sangat kecil. Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan para pendamping program dalam bekerja, sehingga diperlukan peningkatan honorarium para pendamping program tersebut sesuai dengan Upah Minimum Regional, agar lebih layak dan lebih memudahkan pendamping program untuk melaksanakan tugasnya. Untuk itu dipandang perlu pemberian uang transport bagi para pendamping program ASLUT, karena mereka bekerja dengan sukarela tanpa pamrih dan secara ikhlas mengurus para

lansia yang mereka anggap sebagai orangtua sendiri. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pendamping program, agar para pendamping program mengetahui betul akan tugas-tugasnya sebagai pendamping program ASLUT. Ada undang-undang ataupun regulasi yang mengatur tentang profesi pendamping program, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan akan menghasilkan pendamping program yang lebih profesional, niatnya ikhlas, kerjanya tuntas. Perlunya dipertahankan keberadaan program ASLUT karena melalui program tersebut tidak hanya lanjut usia yang ditingkatkan kesejahteraan sosialnya, namun juga para pendamping program yang bekerja tanpa pamrih.

Daftar Pustaka

- BKKBN, *Online*, 2013, Mei 23, *Tahun 2010 Sebanyak 2,7 Juta Lansia Terlantar Memperoleh JSLU*.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fraskho, Maria. 2000, *Praktek dan Teori Pembangunan*, Riau: Universitas Riau.
- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Girvan, Norman, 1997, *Poverty, Empowerment and Social Development in the Caribbean*, Canoe Press University of the West Indies.
- Kementerian Sosial RI, 2011, *Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta: Direktorat Pelayanan Lanjut Usia.
- Media Indonesia *Online*, 2013 diunduh September, *Perlindungan Lansia*.
- Randy R. Wrihantolo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Sembiring, Iskandar, 2013, *Perubahan Sosial Tidak Akan Terjadi Tanpa pendampingan*, diunduh 20 Januari 2014.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: C.V. Alfabeta.
- Suharto, Eddy, 2002, *Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Makalah disajikan pada Pelatihan Pengembangan Masyarakat Bagi Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tingkat Propinsi se Indonesia, Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Depsos RI,
- Suharto, Eddy, 2004, "Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues" (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Sukmadinata. 2006. *Pengendalian Mutu pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*, Bandung: Refika Aditama.
- Zubaedi, 2007, *Konsep pembangunan Alternatif*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza melalui Lembaga Rehabilitasi Kunci

Drug Abuse Victim Service through Kunci Rehabilitittion Institution

Siti Aminatun

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1, Yogyakarta. E-mail <aminatunsiti57@yahoo.com> HP +6281915535660.
Diterima 14 Nopember 2013, direvisi 12 Februari, disetujui 25 Februari 2014.

Abstract

This research is to describe the effort of Kunci Institution in giving social service for drug abuse victims. Data are gathered through in-depth interview, observation, and documentary analysis. Informants are clients and Kunci institution care takers. Data are analysed through qualitative technique. The result shows that the institution gives social service through rehabilitation to drug abuse victims according to victims condition. In the proses of rehabilitation, the victims are oriented to live in community healthy, phisically, mentally, emotionally, socially, spiritually, and they ought to help themselves. Kunci Institution is one of government partner, non-profit, the clients participating in the rehabilitation have to pay fee as a compensation of daily service, facilities, and clients daily needs. It is recommended that the Ministry of Social Affairs and Narcotic National Board should support in training and education for institution care takers to enhance social service capability.

Keywords:

Drug Abuse Victims-Social Service-Kunci Institution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam memberi pelayanan korban penyalahgunaan Napza. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan telaah dokumen. Informan terdiri dari pengurus dan klien Lembaga Rehabilitasi Kunci. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Rehabilitasi Kunci memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan Napza dengan tahapan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi korban penyalahgunaan Napza. Dalam proses rehabilitasi, klien diarahkan untuk hidup berkomunitas dengan cara hidup sehat baik secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan harus bisa menolong dirinya sendiri. Lembaga Rehabilitasi Kunci merupakan salah satu mitra pemerintah, merupakan lembaga non profit, klien yang mengikuti proses rehabilitasi dipungut biaya, tetapi biaya tersebut dikembalikan kepada klien dalam bentuk pelayanan fisik dan fasilitas kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan pelayanan rehabilitasi bagi klien. Direkomendasikan, Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional perlu memberi dukungan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.

Kata Kunci:

Korban Napza-Pelayanan Sosial-Lembaga Rehabilitasi Kunci

A. Pendahuluan

Berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar baik lokal maupun taraf nasional hampir setiap hari memberitakan tentang penyalahgunaan Napza, psikotropika, ganja, sabu-sabu yang kesemuanya merupakan barang haram yang dilarang untuk digunakan secara ilegal yang bermakna negatif. Barang haram yang digunakan secara ilegal tersebut sebenarnya dapat bermakna positif dan dibutuhkan untuk kebaikan manusia untuk pengobatan yang penggunaannya dilakukan secara legal dengan rekomendasi tenaga kesehatan (medis), ataupun untuk tujuan penelitian yang penggu-

naannya dilakukan dengan pengawasan dan bertanggung jawab. Maraknya penyalahgunaan Napza merupakan fenomena gunung es, artinya kasus-kasus penyalahgunaan Napza yang tidak terungkap lebih banyak dari pada yang terungkap di permukaan. Hal ini menjadi tanda bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai. Dampak negatif penyalahgunaan Napza tidak hanya berimbas pada si korban tetapi bisa berimbas pada kasus kriminal seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga.

Penyalahgunaan Napza tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah menyebar ke berbagai kota kecil seperti yang terjadi di kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Polres Kulonprogo berhasil mengamankan 14 paket kecil ganja dalam sebuah mobil saat digelar razia di jalan Yogyakarta-Wates wilayah Sentolo pada Selasa dinihari 1 Oktober 2013. Razia yang dilakukan petugas gabungan dari Polsek Sentolo, Girimulyo dan Pengasih, mencurigai mobil Avanza AB-1427-DB yang berisi 7 penumpang yang kemudian dua orang mengendap kabur melalui toilet SPBU Sentolo saat mobil diperiksa. Polisi curiga sehingga menggeledah isi mobil dan ditemukan beberapa paket ganja yang masih terbungkus dan menemukan satu puntung lintingan ganja bekas pakai. Rombongan yang hendak menuju Yogyakarta tersebut dari 5 orang yang tersisa di tes urine dan hasil tes menunjukkan 4 orang dinyatakan positif menggunakan zat-zat psikotropika. Tersangka mengaku bahwa paket ganja tersebut akan dipakai sendiri, mereka mendapatkan barang haram dari seorang teman di Semarang dengan harga Rp 60 ribu per paket. Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar kasus narkoba tanggal 18 September 2013 dengan menghadirkan tersangka. Polda DIY yang menggelar operasi tumpas narkoba Progo 2013 mengklaim berhasil mengungkap 62 kasus narkoba dengan 73 tersangka. Kasus penyalahgunaan narkoba juga terjadi di kota kecil Pekalongan, pihak Polres Pekalongan bulan September memaparkan telah menangani 9 kasus melibatkan anak-anak. Pada saat yang sama Polres Brebes menggelar kasus narkoba dengan mengamankan satu tersangka pengedar sabu-sabu antarpinsi, berinisial RD (25 tahun), beserta sabu-sabu seberat 885 gram senilai Rp 1,6 miliar, yang dibawa dari Bandung tujuan Denpasar, Provinsi Bali dengan menggunakan bus.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008 prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Angka korban penyalahgunaan narkoba semakin hari menunjukkan peningkatan, berdasarkan data dari BNN tersebut jumlah pecandu narkoba pada tahun

2010 mencapai 3,6 juta orang. Hasil survey BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011 diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2 persen atau sekitar 3,8 juta orang. Korban penyalahgunaan narkoba berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari dan akan merugikan Negara di kemudian hari.

Menurut kepala BNN Komisaris Jendral Polisi Anang Iskandar (Tribunnews.com, Jakarta, 16 Agustus 2013) para korban penyalahgunaan Napza harus ditolong dan direhabilitasi sehingga mereka bisa reintegrasi di tengah masyarakat dan kembali bisa meraih masa depannya. Korban penyalahgunaan Napza sudah kehilangan masa lalunya dan masa kininya, karenanya jangan sampai kehilangan masa depannya. Masih menjadi kendala sampai saat ini adalah kadang para korban penyalahgunaan Napza baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, padahal seharusnya setiap korban penyalahgunaan Napza harus mendapatkan pertolongan melalui suatu program rehabilitasi. Perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN menilai rehabilitasi para pengguna Napza tergolong lambat dibanding pertumbuhan para pengguna, oleh karena itu perlu percepatan dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Data jumlah korban penyalahgunaan Napza yang besar tersebut tiap tahunnya baru 18 ribu orang yang mengikuti rehabilitasi (Republika, 17 September 2013:7). Data tersebut menunjukkan bahwa Lembaga rehabilitasi social korban penyalahgunaan Napza merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. untuk menolong korban agar dapat terbebas dari Napza. Salah satu Lembaga Rehabilitasi korban penyalahgunaan

Napza adalah Lembaga Rehabilitasi Kunci yang berada di wilayah Yogyakarta dan telah terdaftar di instansi Dinas Sosial Tingkat I dan juga telah memiliki akte notaris. Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social yang mengemuka tersebut menjadi suatu hal yang ironis karena yang terungkap hanya sedikit bila dikaitkan dengan prevalensi 3,8 juta orang korban, permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu menolong korban penyalahgunaan Napza yang sangat membutuhkan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian tentang Pelayanan Korban Penyalahgunaan Napza melalui Lembaga Rehabilitasi Kunci perlu dilaksanakan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana upaya Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam memberikan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan Napza? Adapun tujuan pengkajian adalah diketahui upaya yang dilakukan Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam memberikan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan Napza. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pengambil kebijakan tentang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Napza. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif, menurut Suharsimi Arikunto (2001: 309) dalam penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu, tetapi mengumpulkan informasi untuk menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variable, suatu gejala atau keadaan pada saat penelitian dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan telaah dokumen, Informan penelitian terdiri dari pengurus dan klien Lembaga Rehabilitasi Kunci. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif dalam bentuk deskriptif tentang upaya Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam memberikan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan Napza.

B. Kajian Teori

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sering disebut Napza, sebetulnya Napza ini

berguna dalam bidang pengobatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Apabila Napza ini disalahgunakan maka pemakainya akan menjadi adiksi (ketagihan) yang dapat menyebabkan pemakai Napza tidak dapat lepas dari cengkeraman Napza. Menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan, seseorang tentu berbeda menyikapinya ada yang bisa beradaptasi dengan baik atau tidak mampu beradaptasi dan mencari pelarian (kompensasi) kepada hal-hal yang bersifat negative dan bisa menjadi penyalahgunaan Napza (Zaenal, 2010:74). Dalam menangani berbagai kasus tentang Napza ini Kepolisian melalui Polres memiliki Satuan Narkoba yang menangani kasus narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah akronim dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Istilah Napza dan Narkoba sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko yaitu berbahaya kecanduan (adiksi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa jenis Napza dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu: Napza golongan I adalah Napza yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, sehingga tidak boleh digunakan kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan, contohnya: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Napza golongan II, adalah Napza yang memiliki daya adiktif kuat, golongan ini bermanfaat untuk pengobatan. Napza golongan III daya adiktifnya ringan juga digunakan untuk pengobatan dan penelitian, bentuk Napza ini antara lain ganja, kokain, heroin, morfin, methadone, dan petidin. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun yang dimaksud psikotropika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Pemakai Napza secara ilegal dapat menyebabkan ketergantungan dan akan menjadi korban penyalahgunaan Napza, pemakai yang sudah kecanduan akan selalu memakai secara terus menerus karena akan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dan cenderung untuk selalu menambah dosis dan berakibat fatal bagi kesehatan apabila tidak direhabilitasi akan berakhir dengan kematian.

Pengedar Napza akan berusaha mencari korban dengan cara mendekati secara sembunyi dan rahasia, ancaman hukuman bagi siapa saja yang menyalahgunakan Napza tidak membuat pengedar takut dan berhenti. Pengedar mengetahui bahwa siapapun yang telah terjerat Napza akan menjadi ketergantungan dan selalu membutuhkan, dari sinilah pengedar akan mendapat keuntungan dan selalu berusaha untuk terus mencari mangsa. Pengedar dalam bergerak mencari mangsa tidak segan untuk memberikan Napza secara gratis akan tetapi apabila sudah menjadi ketergantungan maka tidak ada gratis lagi dan harus membayar dan hal inilah yang menjadi target pengedar agar tetap mempunyai penghasilan dari peredaran gelap Napza tersebut. Korban penyalahgunaan Napza sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan baik melalui perantara maupun langsung kepada pengedar dan hal ini dilakukan dengan cara tertentu yang tidak diketahui oleh selain penyalahguna sehingga sulit untuk menangkap karena terselubung dan mereka mengetahui bahwa kegiatannya merupakan suatu pelanggaran hukum. Pemberantasan terhadap penyalahgunaan Napza tentu sudah dilakukan oleh para penegak hukum, namun ibarat pencuri pengedar maupun penyalahguna Napza selalu berusaha mencari kesempatan mendapatkan Napza apalagi yang sudah menjadi korban penyalahgunaan Napza mereka akan berusaha mendapatkan meskipun dengan cara mencuri ataupun meminta uang secara paksa dan pengedarpun selalu berusaha untuk mengambil keuntungannya.

Penyalahgunaan Napza bisa terjadi karena adanya interaksi antara individu pemakai

dengan pihak penyedia Napza dan faktor lingkungan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba bukan masalah yang berdiri sendiri namun merupakan faktor yang multi dimensi dan sangat kompleks. Sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan Napza (Zaenal: 2010: 87) adalah penyalahgunaan Napza terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan factor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya dan zat itu sendiri). Penyalahgunaan Napza adalah suatu proses gangguan mental adiktif, yang pada dasarnya ia adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa (yaitu gangguan kepribadian, kecemasan, dan atau depresi). Senada dengan Zaenal, menurut M. Isyam (2007: 53) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Napza adalah: 1. Karena ketidaktahuan, tertipu atau dipaksa. Kondisi seperti ini tidak diketahui oleh korban tentang jenis-jenis narkoba serta pengaruh yang ditimbulkannya. 2. Pengaruh teman yang mendorong untuk coba-coba memakai. Pengaruh teman dekat dapat mengakibatkan seseorang akan menjadi pengguna dan menyalahgunakan karena ajakan atau rayuan teman. 3. Faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial dimana korban tinggal dan bergaul dapat menjadi factor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. 4. Situasional, suasana pesta atau berkumpul dengan teman-teman sebaya dan kelompok bermain dapat memicu kelompok untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba.

Napza mempunyai efek dalam fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku orang yang memakainya. Zat tersebut seringkali disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang pada gilirannya sampai pada ketergantungan (*dependence*) Zaenal (2010:88). Disebutkan bahwa zat atau obat yang dapat menimbulkan adiksi dan dependensi adalah zat atau obat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap zat/ obat tersebut, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya. 2. Kecenderungan untuk menambah dosis (takaran) sesuai toleransi tubuh. 3. Ketergantungan fisik (*physical dependence*),

apabila zat (obat) dihentikan akan timbul gejala fisik yang dinamakan gejala putus Napza atau sakau. 4. Ketergantungan psikis jika zat (obat) dihentikan dalam bentuk kecemasan, kegelisahan, dan manifestasi psikis lainnya. Adapun ciri-ciri orang telah terkena Napza yang menimbulkan sifat adiksi dan dependensi antara lain: senantiasa menginginkan pemuasan segera, terbelenggu oleh masa lalu, emosional, berharap besar, berjiwa kecil, hidup dalam impian, terlalu bergantung pada sesuatu yang semu dan sesaat, tidak mempunyai kepercayaan diri, manipulative, dan tidak taat kepada peraturan dan cenderung terlibat kriminal. Penyalahgunaan Napza adalah perbuatan illegal menurut A. Kadarmanta (2010: 54) menyebutkan bahwa penyalahgunaan Napza secara tidak legal dan melawan hukum selain merusak kesehatan, dampak lain akan kecanduan. Kecanduan akan menyebabkan perilaku obsesif kompulsif, artinya pemakai harus terus menerus menggunakan untuk menghindari sakit.

BNN menekankan bahwa, berbagai jenis Napza merupakan obat terlarang dan dilarang peredarannya karena berbahaya dan dapat merusak kesehatan untuk pemeriksaan bagi pemakai obat terlarang tersebut ataupun bagi siapa saja yang dicurigai sebagai pemakai dapat dengan menggunakan tes urine. Pemeriksaan dengan menggunakan urine membutuhkan waktu sekitar 14 jam untuk mengetahui hasilnya dan hanya mampu mendeteksi jejak pengguna obat terlarang yang dikonsumsi kurang dari tiga hari karena kalau lebih dari tiga hari sudah sulit terdeteksi. Disamping pemeriksaan menggunakan urine dapat juga menggunakan uji rambut dengan metode kromatografi yang mampu mendeteksi penggunaan penyalahgunaan Napza selama 90 hari sebelum tes dilakukan dan hasil uji rambut dinilai lebih akurat. Metamphetamine (sabu) dalam bentuk pil dapat meningkatkan daya tahan atau stamina tubuh. Obat ini biasa digunakan agar seseorang tidak mudah lelah, zat ini bekerja dengan memberi rangsangan terhadap otak dan syaraf. Zat ini dapat memberikan efek negative berupa gangguan syaraf, memberi efek menenangkan, dan membuat pemakainya mengalami halusinasi, gangguan persepsi, dan menjadikan ketergantungan bagi pemakainya.

Fidiansyah dalam Zaenal (2010) mengelompokkan korban penyalahgunaan Napza secara umum dapat dibagi kepada tiga golongan besar. 1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. 2. Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan Napza sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian yang psikopatik (antisosial), kriminal, dan pemakai Napza untuk kesenangan semata. 3. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Penyalahgunaan Napza menimbulkan komplikasi di bidang psikiatrik, yaitu: gangguan mental organik atau gangguan perilaku. Di bidang medic, komplikasi yang ditimbulkannya terdapat pada organ otak, lever, pencernaan, pankreas, otot, seks, janin, endokrin, gangguan nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker. Dari sudut medic (*organo biologic*) pada penyalahgunaan Napza, terjadi interaksi zat dengan reseptor di susunan syaraf atau otak, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan neurofisiologik, perasaan dan perilaku. Gangguan pada alam pikir, perasaan, dan perilaku ini merupakan gejala dari adanya gangguan neurotransmitter pada susunan syaraf pusat (otak) tadi.

Korban penyalahgunaan Napza mempunyai kecenderungan untuk selalu menambah dosis yang digunakan yang dapat berakibat over dosis dan bisa meninggal dunia. Penyalahgunaan Napza, pengedar, maupun bandar termasuk dalam perbuatan illegal dan melanggar hukum, pelakunya dapat ditindak secara hukum dan ditangkap guna mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Narkotika pasal 24 mewajibkan pecandu narkotika/ Napza untuk melapor kepada institusi wajib lapor, peraturan ini ditujukan untuk membantu para pecandu mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyiratkan bahwa pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya akan kesejahteraan bagi

semua warga Negara namun pemerintah juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat hal ini dimungkinkan karena keterbatasan pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi. Upaya penyembuhan bagi korban penyalahgunaan Napza terus diupayakan salah satunya melalui lembaga rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan secara terpadu meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan vokasional yang dilaksanakan dalam suatu lembaga rehabilitasi sosial yang ditujukan agar korban penyalahgunaan Napza dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Rehabilitasi memiliki tujuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang dilaksanakan secara persuasive, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Menurut LE Hinsie dan Canbell (dalam Nurdin, 2012) disebutkan bahwa "rehabilitasi merupakan segala tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental sosial dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan. Dimana pada prosesnya diarahkan untuk mencapai perbaikan penyesuaian klien sebesar-besarnya, kesempatan vokasional sehingga dapat bekerja dengan kapasitas maksimal, dan penyesuaian diri dalam lingkungan perorangan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat". Program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza menitikberatkan pada kegiatan yang menekankan pada penguatan moral agar setelah selesai mengikuti rehabilitasi mempunyai mental yang kuat guna melindungi diri dari berbagai godaan yang bisa menjerumuskannya kembali kepada perbuatan penyalahgunaan Napza.

C. Hasil Penelitian: Penanganan Korban Napza di Lembaga Rehabilitasi Kunci

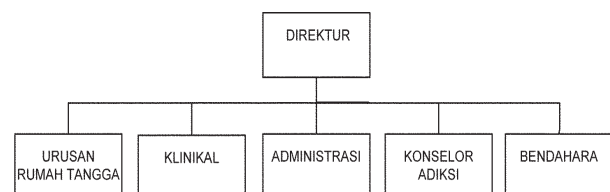
Lembaga Rehabilitasi Kunci merupakan sebuah institusi yang memberikan pelayanan

bagi para korban penyalahgunaan narkoba yang beralamat di RT 01/RW 38 Nandan, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55581 telp/fax: (0274)624747. Lembaga Rehabilitasi Kunci diresmikan tanggal 1 November 2005 oleh BR. DR. Rene Stockman, FC Superior Jendral Bruder Karitas, beliau sangat peduli terhadap korban penyalahgunaan Napza. Didirikannya Lembaga Rehabilitasi Kunci atas dasar keprihatinan terhadap korban penyalahgunaan Napza dari pimpinan Kongregasi Bruder Karitas di Roma, yang kemudian menindaklanjuti dengan mendirikan Lembaga Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Napza di asrama bruderan karitas Nandan. Nama "Kunci" diambil dari nama "De Sleutel" Lembaga Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza di Belgia yang berarti kunci. Pada awal berdirinya tiga orang pengelola Lembaga Rehabilitasi Kunci menimba ilmu di Belgia tentang seluk beluk rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza. Lembaga Rehabilitasi Kunci berdiri dan mulai memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan Napza sejak diresmikan tanggal 1 November 2005. Akta pendirian Lembaga Rehabilitasi Kunci oleh notaris Dwi Hartiningsih, SH. dengan Akta Pendirian nomor 10 tanggal 25 September 2006, dan terdaftar pada instansi Dinas Sosial Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor 188/579/V.3 tertanggal 27 Februari 2008. Korban penyalahgunaan Napza membutuhkan penanganan rehabilitasi sosial dan hanya pihak-pihak yang mempunyai keahlian pada bidang ini yang bisa melakukan berbagai tahapan rehabilitasi sebagaimana pepatah yang mengatakan serahkan persoalan kepada ahlinya maka akan teratasi dengan baik. Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus memperkuat, dan menentukan keberlangsungan dan eksistensi Lembaga Rehabilitasi Kunci ini. Secara filosofis penanganan penyalahgunaan Napza dapat dilakukan dengan memahami seluk beluk penyalahgunaan Napza itu sendiri baik latar belakang penggunaan, faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Napza dan bagaimana cara-cara penanggulangan dan menangani korban penyalahgunaan Napza agar dapat terbebas dari jeratan Napza mela-

lui pelayanan rehabilitasi sosial sehingga bisa menjalankan peran dan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dari hasil wawancara dengan para klien diketahui bahwa mereka menjadi korban penyalahgunaan Napza hingga kecanduan karena berawal dari kelompok pergaulan, berawal dari kebiasaan merokok dilanjutkan dengan mencoba Napza hingga akhirnya ketagihan dan mengalami ketergantungan. Keputusan untuk mengikuti rehabilitasi sosial merupakan suatu kesadaran untuk membebaskan diri dari ketergantungan Napza yang jelas akan merusak kehidupannya, dengan mengikuti program rehabilitasi merupakan jalan menuju kehidupan yang berkesejahteraan sosial dan bisa melaksanakan peran dan fungsi sosialnya sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi warga yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Lembaga Rehabilitasi Kunci berkapasitas menangani 20 orang klien dengan fasilitas sebagai berikut satu ruang tamu untuk menerima tamu siapa saja yang datang dan berhubungan dengan lembaga yang melayani korban penyalahgunaan Napza tersebut. Dua ruang kantor yang berfungsi sebagai tempat kegiatan administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan lembaga. Satu ruang konseling yang digunakan untuk memberikan pembinaan secara khusus kepada klien yang membutuhkan. Satu ruang makan dan dapur yang digunakan untuk memasak keperluan makan dan minum seluruh penghuni lembaga rehabilitasi kunci ini, baik untuk sarapan, coffee break, makan siang dan makan malam semuanya dimasak sendiri oleh penghuni dengan cara dijadwal mingguan setiap orang mendapat giliran satu hari. Untuk keperluan kebersihan badan dan pakaian tersedia 15 kamar mandi dan semua penghuni berkewajiban menjaga kebersihan kamar mandi. Ruang asrama terdiri dari 20 kamar tidur yang diperuntukkan bagi klien dan satu ruang tidur untuk staff Lembaga Rehabilitasi Kunci dan semua kamar mempunyai teras, di depan teras ada taman sebagai penyejuk. Satu ruang yang digunakan untuk laboratorium komputer yang digunakan untuk memberikan pelatihan komputer bagi klien yang berminat. Tempat vocational digunakan un-

tuk memberikan latihan keterampilan bagi klien sebagai bekal bila sudah selesai rehabilitasi dan harus kembali ke masyarakat. Satu ruang rekreasi dan kegiatan untuk memberikan penanganan terhadap klien dengan cara bebas dari rasa tegang baik secara perseorangan maupun kelompok. Lembaga Rehabilitasi Kunci berdiri di lahan seluas dua hektar dan merupakan salah satu bagian dari kompleks sekolah dan gereja. Lembaga Rehabilitasi yang didirikan atas prakarsa dari pihak swasta ini merupakan wujud dari kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggung jawab sosial dari elemen masyarakat terhadap korban penyalahgunaan Napza. Melalui bagan berikut dapat diketahui struktur organisasi kepengurusan Lembaga Rehabilitasi Kunci yaitu:



Direktur Lembaga Rehabilitasi Kunci bertanggung jawab terhadap keberadaan lembaga dan mengkoordinir seluruh kegiatan lembaga ini. Urusan rumah tangga dengan komitmen kerja untuk terwujudnya Lembaga Rehabilitasi Kunci yang asri, indah, bersih, dan damai serta nyaman sebagai tempat tinggal. Klinikal (Medical Proses) bertanggung jawab untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pendampingan klien dengan latar belakang pendidikan perawat. Administrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan ketertiban administrasi, sedangkan bendahara mengelola segala urusan yang berhubungan dengan keuangan. Konselor adiksi melakukan pendampingan klien dengan cara bimbingan dan konseling selama klien mengikuti pemulihan dalam proses rehabilitasi, dan juga prevention untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan Napza kepada pihak-pihak yang membutuhkan berbagai informasi tentang penyalahgunaan Napza. Sebagai lembaga rehabilitasi yang memberikan pelayanan kepada korban penyalahgunaan Napza, lembaga ini

mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional dengan cara memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kepada pengelola apabila ada pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan korban penyalahgunaan Napza. Kepengurusan dalam Lembaga Rehabilitasi Kunci ini bekerja bersama-sama dan selalu berkoordinasi satu dengan lainnya guna berjalannya proses rehabilitasi sesuai dengan yang telah digariskan agar klien bisa terbebas dari Napza dengan dilandasi kasih serta kepedulian sosial.

Persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi penyalahgunaan Napza di Lembaga Rehabilitasi Kunci adalah korban yang bermasalah dengan Napza dan memiliki kesadaran ingin bebas dari kecanduan tanpa paksaan dari pihak manapun, peserta pria dan wanita dari semua keyakinan agama. Tahap selanjutnya konsultasi atau wawancara dengan staff Rehabilitasi Kunci untuk menentukan bisa diterima atau tidak, apabila lolos dilanjutkan dengan mengisi formulir pendaftaran, surat pernyataan untuk mengikuti dan patuh dengan aturan yang ditetapkan, dan pernyataan dari orang tua/ wali untuk memenuhi kewajibannya dalam mendukung proses rehabilitasi baik dukungan moril maupun materiil. Biaya yang ditetapkan untuk mengikuti rehabilitasi sebesar Rp 1.500.000,-, dan biaya ini akan kembali ke klien untuk pembiayaan makan, dan biaya fasilitas lembaga seperti listrik dan air. Bagi yang sudah pernah Periksa kesehatan, menunjukkan kepemilikan surat keterangan dokter dengan informasi kesehatan yang akurat. Apabila persyaratan terpenuhi maka bisa langsung masuk untuk mengikuti rehabilitasi.

Setelah klien memenuhi persyaratan dan mulai masuk untuk mengikuti proses rehabilitasi sosial maka dimulai dengan tahapan menggunakan metode *therapeutic community* detoksifikasi dan entry stage. Sebelum mengikuti rehabilitasi sosial setiap klien melaksanakan screening mulai dari assessment awal melalui *Voluntary Conseling Test* (VCT) dengan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Gedong Tengen untuk mengetahui kondisi kesehatan apalagi kalau memiliki riwayat kese-

hatan khusus agar pihak lembaga mengantisipasi keadaan bila memerlukan pertolongan. Setiap ada klien baru yang masuk lembaga rehabilitasi ini, maka pihak lembaga rehabilitasi akan menghubungi puskesmas Gedong Tengen yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan dari puskesmas ke lembaga rehabilitasi kunci dengan menggunakan mobil kesehatan lengkap dengan peralatannya. Hasil pemeriksaan terhadap klien yang baru masuk tersebut diberikan kepada pihak lembaga rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan dalam memberikan pentahapan pelayanan rehabilitasi. Bawaan pribadi juga diperiksa sesuai dengan kebutuhan selama mengikuti rehabilitasi dan apabila ada kekurangan maka keluarganya dimohon untuk melengkapi. Tahap *screening* selesai kemudian dilanjutkan pada tahap detoksifikasi (pemusnahan racun) selama 1-2 minggu atau bisa membutuhkan waktu lebih tergantung kepada kondisi klien pada saat mulai masuk lembaga rehabilitasi. Pada tahap ini apabila terpaksa klien mengalami sakit akan diberi obat penawar tetapi bila klien kuat maka dipaksa pasang badan artinya menahan rasa sakit dan kondisi ini akan lebih baik bagi klien. Sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, kemudian dilanjutkan tahap induksi yaitu klien harus mulai mengenal komunitas tempat lingkungan yang baru agar klien mengetahui berbagai ruangan yang ada dan fungsi dari berbagai ruangan tersebut. Klien juga harus mengenalkan diri kepada teman yang sudah lebih dulu mengikuti rehabilitasi dan mengenalkan diri kepada staff lembaga rehabilitasi yang akan selalu mendampingi selama proses rehabilitasi.

Klien harus mengetahui tentang berbagai peraturan tentang hal-hal yang harus dipatuhi yaitu aturan/*rules* yang berlaku dan hal-hal yang merupakan larangan yang harus dipatuhi/ *cardinal rules* yang tertuang dalam jadwal kegiatan harian. Penjelasan tentang peraturan yang ada akan membuat klien mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga diharapkan klien mudah menyesuaikan diri dalam mengikuti tahapan rehabilitasi selanjutnya. Aturan umum yang harus dipatuhi oleh klien yaitu: 1. Dilarang membawa, memiliki, dan memakai obat-obatan dan atau alcohol

di lingkungan Pusat Pemulihan Rehabilitasi Kunci. 2. Dilarang melakukan tindak kekerasan (memukul, berkelahi, menendang, mendorong, menggigit, bergulat, dan atau semua tindakan yang menunjukkan sifat kasar dan melukai) pada klien lain di lingkungan Pusat Pemulihan Rehabilitasi Kunci. 3. Tanpa pengecualian dilarang melakukan hubungan seksual dengan siapapun. 4. Dilarang mencuri apapun (uang, pakaian, sepatu, perhiasan, rokok, pasta gigi, dan semua benda-benda pribadi), dilarang saling meminjam bagi yang meminjam sama dengan mencuri. 5. Tidak dibenarkan melarikan diri atau meninggalkan pusat rehabilitasi kunci tanpa ijin tertulis dari staff dengan alasan apapun selama masih tinggal enam bulan penuh. 6. Semua penghuni rumah Lembaga Rehabilitasi Kunci dilarang membawa teman, laki-laki atau perempuan tanpa ijin langsung dari staff untuk alasan apapun. 7. Merokok diijinkan dalam waktu-waktu tertentu. Peraturan ini akan membantu setiap residen (klien) untuk hidup di Lembaga Rehabilitasi Kunci Yogyakarta demi tujuan akhir yang ingin dicapai setiap klien selama mereka tinggal di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta. Tujuh aturan pokok ini harus dipatuhi dan menjadi sendi untuk menjaga tetap tegaknya motivasi setiap klien agar sembuh. Peraturan ini diterjemahkan dalam acara kegiatan harian yang disusun setiap harinya (dengan jadwal harian). Pada akhir tahap induksi ini, dengan bimbingan staff dan dukungan keluarga, klien harus mengambil keputusan akan melanjutkan program rehabilitasi atau mau keluar dari program karena untuk mengikuti dan melanjutkan program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza (klien) harus bersedia mengikuti dengan baik dan mematuhi peraturan dan menjauhi larangan yang secara rinci tertuang dalam jadwal kegiatan harian klien.

Apabila klien memutuskan untuk mengikuti program rehabilitasi maka klien akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu *primary stage*, pada tahap ini klien belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas, semua klien diberi tugas harian dan harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Tugas-tugas yang harus dilakukan setiap hari

yaitu kegiatan komunitas baik individu maupun kelompok, bekerja sama dengan komunitas, memasak, mencuci, dan rekreasi dalam bentuk olah raga bersama berupa bulutangkis, tenis meja, bola basket, bola voli, dan sepak bola yang kesemuanya itu merupakan kegiatan kelompok yang berguna memperkuat motivasi untuk sembuh. Setiap tiga bulan sekali diadakan *outing-outbound* dan rekreasi ke tempat-tempat rekreasi dan menginap biasanya hari Sabtu siang hingga Minggu sore dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan alam. Pengelolaan emosi adalah salah satu tujuan terpenting pada fase *primary stage* ini, nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab diuji dalam kehidupan berkomunitas. Tahapan selanjutnya adalah *re-entry stage*, ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat dengan baik. Tahap *re-entry stage* yang merupakan tahap intensif ini meliputi dua tahapan yaitu tahap rawat intensif selama 4 bulan dan tahap regular selama 2 bulan.

Pertemuan komunitas dilakukan pada pagi, siang dan sore dengan jadwal yang sudah disusun dengan berbagai kegiatan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi, pertemuan komunitas ini dilaksanakan dalam berbagai kesempatan baik kegiatan yang bersifat klasikal maupun acara istirahat. Lembaga juga memfasilitasi dan memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan ekspresi individu yang juga merupakan kegiatan untuk mengembalikan kepercayaan dan stabilitas diri. Tugas yang diberikan kepada klien diarahkan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggungjawab. Masing-masing klien harus mengevaluasi perkembangan diri mereka sendiri terus menerus untuk menemukan jati diri dengan formula terbaik dengan berpedoman pada peraturan dalam proses rehabilitasi. Di Lembaga Rehabilitasi Kunci program rehabilitasi menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC) yaitu metode terapi dengan hidup bersama dalam sebuah komunitas. Dalam komunitas mereka harus saling membantu dan menguatkan demi perubahan perilaku yang lebih baik. Tiga hal utama yang dipelajari dalam komunitas adalah kejujuran,

tanggung jawab, dan rasa hormat. *Therapeutic Community* menerapkan konsep untuk, dari dan oleh klien itu sendiri, klien memulihkan dirinya sendiri dengan membantu dan dibantu oleh teman yang lain juga dari pihak eksternal seperti keluarga, pendamping harian, konselor, dan dokter. Pengakuan klien bahwa mereka berusaha berubah melalui bimbingan yang diberikan pengasuh yang selalu dekat, klienpun harus disiplin bangun pagi pukul 04.30, lalu berdoa mereka dibekali ilmu, disiplin, dan religius dan merupakan implementasi dari iman mengingat agama merupakan sumber norma dan nilai kehidupan, baik bagi individu maupun komunitas guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tahap intensif rawat inap selama 4 bulan dimulai setelah klien selesai tahap pra-rehabilitasi dengan orientasi pengenalan program dan screening, detoksifikasi dan pemulihan fisik. Fase awal pada minggu pertama sampai minggu keempat berupa asesmen awal, menejemen kasus- rencana rawatan, pemahaman adiksi, pendidikan kesehatan diri dan pengenalan diri. Setelah minggu pertama sampai minggu keempat selesai dilanjutkan fase madya (minggu ke 5- minggu ke 10) dengan materi pengembangan rencana rawatan, pemahaman pemulihan, pendidikan kesehatan diri keterampilan hidup dan pencegahan kekambuhan. Kemudian dilanjutkan fase akhir pada minggu ke 11-minggu ke 16 dengan materi pemantapan rencana rawatan, pencegahan kekambuhan, keterampilan hidup, kelompok bantu diri, asesmen akhir dengan mengevaluasi pemulihan klien dan dialog dengan keluarga untuk menjaga klien tetap dalam kondisi baik membantu klien dapat menjalankan peran dan fungsi sosial dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat serta persiapan pelepasan klien untuk kembali pada keluarganya. Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam memberikan pelayanan rehabilitasi dengan cara menekankan perawatan psikologis. Dalam perawatan ini korban penyalahgunaan Napza dijauhkan dari Napza dan secara psikologis diminta untuk menjaga diri mereka sendiri untuk terlibat dalam kegiatan menarik dan menjaga mereka bebas dari rasa tegang, dengan melakukan kegiatan yang menarik secara bertahap klien mulai kehilangan kebutuhan

akan obat-obatan. Secara rinci kegiatan harian dalam pelayanan rehabilitasi diatur dengan jadwal yang disesuaikan dengan materi dari program rehabilitasi sosial. Jadwal rutin setiap pagi hari semua penghuni lembaga rehabilitasi harus sudah bangun pada pukul 04.30 pagi dan dilanjutkan dengan kegiatan kebersihan badan seperti mandi yang kemudian dilanjutkan beribadah bagi yang beragama Kristen dan Katolik di Kapel, yang beragama Islam sholat Subuh, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu pelaksanaan ibadah di kamar masing-masing. Setelah kegiatan ibadah selesai masing-masing klien membersihkan kamar dan mencuci pakaiannya sendiri. Sejak bangun pagi sampai mengerjakan kewajiban individu seperti mandi, mencuci, dan membersihkan kamar merupakan tugas individu untuk membangun tanggung jawab tentang kewajiban yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan ini dilakukan sampai pukul tujuh.

Setiap klien mendapatkan tugas sekali dalam setiap minggunya untuk memasak makanan berupa nasi, sayur, dan lauk pauk yang akan disantap bersama seluruh klien dan pengasuh. Tugas memasak yang diberikan kepada klien bertujuan untuk memampukan diri melayani kebutuhan diri secara fisik juga memperhatikan kebutuhan kelompoknya, hal ini akan sangat berguna dalam kehidupan setelah klien pulang ke keluarganya dan keterampilan memasak dapat dikembangkan dalam usaha yang berhubungan dengan makanan. Acara sarapan pagi selesai dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan pagi dari jam delapan yang diisi oleh pengasuh dengan tujuan untuk penguatan mental klien kemudian dilanjutkan coffee break sampai dengan jam 10.30. Setelah acara coffee break pada hari Senin dilanjutkan seminar dengan materi adiksi sampai dengan pukul 12.20 dalam pemberian materi ditekankan dengan pendekatan psikologis untuk menyadarkan klien tentang bahayanya Napza dan penguatan mental agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Materi tentang adiksi selesai dilanjutkan makan siang dan istirahat siang sampai pukul 14.30, jadwal selanjutnya coffee break dan olahraga yaitu bulu tangkis, tenis meja, bola basket, dan sepak bola sampai pukul 17.30. Selesai

olah raga klien mandi dan bagi yang beragama Islam sholat Maghrib, memasak untuk makan malam bagi yang mendapat giliran tugas dan menghidangkan untuk bersama-sama makan malam bagi seluruh klien dan pengasuh dari pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.30 selesai makan malam, kemudian dilanjutkan *wrap up* dijadwalkan sampai pukul 22.00 *wrap up* merupakan suatu kegiatan untuk menyatukan semua klien dalam menyelesaikan dan merangkum program rehabilitasi dipimpin oleh chief/ kepala lembaga dilanjutkan istirahat tidur dari pukul 22.00 sampai pukul 04.30 pagi.

Jadwal yang disusun sedemikian rinci dengan tujuan agar klien dengan senang hati mengikuti seluruh kegiatan dan membiasakan diri mengikuti proses rehabilitasi yang sedang dijalannya. Jadwal kegiatan hari Selasa sama dengan hari Senin hanya setelah coffee break dilanjutkan dengan kerja bakti di halaman belakang, dilanjutkan makan siang dan istirahat siang. Pukul 15.00-17.30 diisi materi *support group* untuk saling membangun dan mendukung diantara klien. Setelah makan malam dilanjutkan *wrap up* sampai dengan pukul 22.00. Pada hari Rabu setelah coffee break pagi diisi materi terapi kelompok, yaitu penguatan keakraban dan saling mendukung diantara klien untuk sembuh dengan kelompok yang tetap/ *static group* setelah istirahat siang sampai dengan pukul 17.30. setelah makan malam kegiatan *wrap up* dipimpin oleh Chief sampai dengan pukul 22.00. Jadwal hari Kamis setelah makan pagi pukul 08.00-09.00 koordinasi dan pertemuan pagi dilanjutkan membersihkan seluruh fasilitas lembaga, selesai coffee break pagi diisi materi konseling individual semua klien dengan pengasuh, klien mengemukakan kemajuan yang dirasakan dalam mengikuti proses rehabilitasi dan pengasuh memberikan arahan dan dukungannya sampai pukul 12.20 dilanjutkan makan siang dan istirahat siang. Pukul 15.00-17.30 semua klien berolahraga sesuai dengan keinginannya, setelah makan malam kegiatan *wrap up* sampai pukul 22.00. Kegiatan hari Jumat setelah makan pagi dilanjutkan koordinasi dan pertemuan pagi, selesai coffee break pagi diisi materi seminar kelompok psiko edukasi sampai jam 11.30 dan bagi yang beragama Islam sholat

Jumat, setelah makan malam dilanjutkan *wrap up*. Jadwal kegiatan pada hari Sabtu setelah makan pagi kegiatan bersih-bersih fasilitas lembaga, coffee break diisi dengan kegiatan santai dan dilanjutkan sampai kegiatan makan siang klien dapat melakukan kegiatan yang disenangi seperti membaca buku di ruang perpustakaan, belajar computer di ruang computer, atau melihat televisi di ruang rekreasi, pada malam hari setelah makan malam seluruh klien yang tidak pulang mengadakan rekreasi dengan acara menonton film bersama di ruang rekreasi. Kegiatan pada hari Minggu klien diberi waktu untuk melakukan kegiatan rekreasi yang disenangi, bagi yang beragama Katolik dan Kristen pergi ke gereja untuk mengikuti kebaktian, setelah makan malam dilakukan evaluasi oleh pengasuh kepada semua klien untuk merencanakan kegiatan pada seminggu ke depan hal ini dilakukan sampai tahap intensif selesai (4 bulan) yang kemudian dilanjutkan tahap regular (2 bulan).

Pada tahap regular metode intervensi utama tetap sama yaitu konseling individu dan terapi kelompok, namun menekankan vokasional (latihan kerja) yaitu pada keterampilan hidup dan yang diberikan oleh lembaga berupa peternakan ayam petelur dan perikanan ikan nila. Klien pada tahap regular diberi tanggung jawab memelihara hewan piaraan dan menjual hasilnya keluar lembaga dengan cara mendekati konsumen dengan cara mencari pembeli ke warung-warung makan ataupun dijual ke pasar. Hasil penjualan telur dan ikan nila diperuntukkan untuk membeli pakan hewan piaraan tersebut, aktifitas klien menjual hasil peliharaan dan membeli pakan merupakan praktek kerja yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat guna membiayai kehidupannya dan menanamkan budaya kerja, kedisiplinan, keteraturan, dan penghargaan atas hasil kerja. Pelajaran ini sangat berharga bagi klien untuk menumbuhkan kepercayaan diri bahwa mereka bisa berbuat dan menolong diri sendiri dengan bekerja keras juga diberi keterampilan computer, desain grafis dan photo shop. Usaha yang sungguh-sungguh juga ditekankan oleh pengasuh untuk diiringi dengan doa, klien didorong untuk tetap semangat bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan. Klien juga diberi bekal kepercayaan bahwa manusia harus

berusaha untuk meraih yang dicitakan, namun harus diingat bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penentu segalanya dan manusia harus ikhlas menerima semua kehendakNya.

Penyelenggaraan pelayanan dengan pendekatan multi disipliner bersifat rehabilitative, promotif, dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi klien agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan membawa kepada fungsi sosialnya agar dapat melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal. Lembaga Rehabilitasi ini pada tahap regular menerapkan program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) yaitu program rawatan pemulihan adiksi dengan model bio-psiko-sosial, dimana peran dan fungsi masyarakat menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi masyarakat yang dimaksud meliputi pelaksana program, keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses rawatan dan turut menjaga lingkungan masyarakat itu sendiri agar terhindar dari penyalahgunaan Napza. Tujuan dari PABM adalah pencapaian dan pemeliharaan kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial, melalui pengurangan perilaku risiko terkait penggunaan Napza, dengan mengurangi dan mewaspadai tingkat penggunaan ataupun sepenuhnya abstinan.

Pada tahap regular klien sudah diijinkan pulang pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu tiap minggunya untuk bergabung kembali bersama keluarganya. Lembaga Rehabilitasi Kunci juga bekerja sama dengan *stakeholder* setempat (RT, RW, Polsek, dan Kelurahan) juga keluarga klien yang akan membimbing klien selama di rumah serta meminta laporan kegiatan karena klien yang sudah selesai menjalani rehabilitasi dan siap pulang ke lingkungan keluarganya dipersiapkan menjadi duta bagi lembaga ini untuk turut serta membantu sesama agar terhindar dari penyalahgunaan Napza. Konseling individu dan kelompok mengenai persiapan terminasi (selesaiannya pelayanan rehabilitasi) bagi klien tetap menjadi metode intervensi utama dengan topik persiapan bagi klien untuk menghadapi kehidupan dalam bermasyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Klien yang sudah

dinyatakan bebas dari ketergantungan Napza akan dilepas artinya proses rehabilitasi dianggap selesai dan klien akan diserahkan kembali kepada keluarganya. Klien beserta keluarganya dipersiapkan untuk tetap menjadi duta bagi penanggulangan penyalahgunaan Napza hal inilah yang menjadi inti dari PABM dimaksud dengan pendekatan *Harm Reduction* (HR) yaitu mengurangi kesalahan, kerugian, kerusakan, dan kejahatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Napza.

Pendekatan HR dalam PABM dengan cara menjangkau klien ke hidden population, klien yang sudah menjadi duta bertindak sebagai agent of change/ agen perubahan. Akhir dari terapi komunitas adalah hidup sehat tanpa narkoba dan alkohol, hidup jujur, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab, siap kembali hidup dalam keluarga dan masyarakat, menjadi duta Lembaga Rehabilitasi Kunci untuk turut menyadarkan masyarakat disekitarnya tentang bahaya penyalahgunaan Napza, serta memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan Napza untuk berani mengambil keputusan mengakhiri dunia kelamnya seperti dirinya yang berani mengambil keputusan dengan mengikuti rehabilitasi yang merupakan keputusan penting dalam hidupnya guna menyongsong kehidupan dengan cara yang sehat bebas dari Napza. Klien yang sudah pulang ke rumah dan menjadi duta rehabilitasi tetap ada ikatan dan tetap menjalin hubungan baik dengan lembaga dan bila menemui berbagai kendala tetap dapat berkonsultasi. Hal ini sejalan dengan program yang diterapkan yaitu Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) dan memang Lembaga Rehabilitasi Kunci terbuka bagi siapa saja baik bagi korban penyalahgunaan Napza maupun prevensinya.

Sebagai tempat pemulihan yang berlandaskan hidup berkomunitas, fokus pada pelayanan rehabilitasi dengan membantu klien untuk kembali hidup sehat, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Adapun program prevensi dari Lembaga Rehabilitasi Kunci ini mempunyai program *Kunci Prevention Services* (KPS) yaitu program pencegahan penyalahgunaan Napza melalui kegiatan seminar, ceramah, atau pelatihan dengan

cara menerima kunjungan atau bisa diundang pihak sekolah, organisasi pemuda, kelompok orangtua, pengelola sekolah dan asrama, dan kelompok kategorial lainnya baik instansi pemerintah maupun swasta, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi dari Lembaga Rehabilitasi Kunci yaitu Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh klien sehingga mampu memenuhi target profesionalitas yang tinggi melalui metode *Therapeutic Community*. Adapun misi lembaga ini yaitu: Komunitas Lembaga Rehabilitasi Kunci adalah komunitas berdasar pada rasa cinta dan kasih tanpa batas bagi semua orang yang didirikan untuk membantu semua orang yang ingin bebas dari masalah penyalahgunaan dan ketergantungan pada Napza dan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas kepribadian dengan menciptakan kesempatan dan harapan baru demi mengembangkan hidup. Motto lembaga yaitu "Ukuran dalam mengasahi adalah mengasahi tanpa ukuran" hal ini berarti dalam mengasahi tidak ada batasnya selalu dan selalu mengasahi. Adapun tujuan yang ingin dicapai lembaga yaitu membantu pecandu kembali waras, pulih dari kecanduan, serta membantu memperoleh kembali harapan dan keyakinan lewat hidup teratur dan terarah. Mengembalikan keseimbangan dan fungsi seseorang yang telah mengalami disfungsi atau kerusakan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Lembaga Rehabilitasi Kunci dari awal berdirinya selalu berusaha memberikan pelayanan rehabilitasi sosial secara maksimal dan selalu berpijak pada kasih dan kepedulian sosial terhadap sesama untuk membantu korban penyalahgunaan Napza bebas dari ketergantungan dan hidup sehat guna meraih masa depan yang lebih baik.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban penyalahgunaan Napza membutuhkan lembaga rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisinya agar tidak ketergantungan dengan Napza. Lembaga Rehabilitasi Kunci berupaya menumbuhkan kepercayaan diri, kecakapan diri, dan keterampilan sebagai bekal mencari peluang kerja untuk kemandirian secara ekonomi

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga Rehabilitasi Kunci merupakan salah satu mitra pemerintah yang peduli dan memberikan perhatian kepada para korban penyalahgunaan Napza agar bisa reintegrasi di tengah masyarakat dan bisa kembali meraih masa depan. Lembaga Rehabilitasi Kunci memang memungut biaya tetapi lembaga ini non profit karena biaya tersebut akan kembali lagi kepada klien dalam bentuk pelayanan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan fasilitas kamar, serta biaya air dan listrik yang merupakan kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan pelayanan rehabilitasi bagi klien. Disamping memberikan pelayanan pemulihan, secara terbuka Lembaga Rehabilitasi Kunci ini juga berusaha melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Napza melalui kegiatan seminar, ceramah, ataupun pelatihan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti menerima kunjungan dari sekolah maupun elemen masyarakat luas. Apabila ada pihak yang mengundang untuk memberikan ceramah maupun acara lain yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza maka lembaga akan memenuhi permintaan tersebut karena merupakan salah satu upaya pencegahan agar korban tidak bertambah dan merupakan upaya sosialisasi tentang keberadaan lembaga yang dibutuhkan bagi korban penyalahgunaan Napza.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi yang didirikan atas prakarsa masyarakat merupakan mitra dari pemerintah dan merupakan wujud nyata dari kepedulian, kesetiakawanan sosial, dan tanggung jawab sosial dengan sukarela turut memikirkan korban penyalahgunaan Napza. Lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza didalamnya berkiprah secara sukarela tenaga pengelola yang mengabdikan dirinya untuk membantu korban penyalahgunaan Napza. Oleh karena itu direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional untuk memberikan perhatian dan dukungan berupa pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan.

Pustaka Acuan

- A.Kadarmanta, (2010). *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: Forum Media Utama.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2009). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.
- Darwin Butar-Butar, (2012). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN.
- Moch Isyam, (2007). *Pesantren Narkoba*, Yogyakarta: Safiria Insania.
- Nurdin Widodo, (2012). *Pembinaan Lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial*, Jakarta: P3KS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*, Jakarta: Kemensesneg RI.
- Pusat Data dan Informasi, (2009), tentang *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos RI
- Suharsimi Arikunto, (2001). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Bima Aksara.
- Sunit Agus Tri Cahyono, (2009). *When Napza Lure Human Being*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Sutomo, (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos RI.
- _____. 2011. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Dilengkapi Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Peraturan Pemerintah No 44 2010 tentang Prekursor, Prpress No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Permenkes No 10101/MENKES/XI?2008 tentang Registrasi Obat (beserta penjelasannya), Bandung:Citra Umbara.
- Zaenal Abidin Anwar, (2010). *PP Suryalaya dan Penanggulangan Napza*, Bandung: Wahana Karya Grafika.

